



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025;
- c. bahwa Perubahan RKPD sesuai huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk diatur dengan Peraturan Bupati Kaimana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2014 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut P-KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
9. Bupati adalah Bupati Kaimana.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar:
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun P-KUA Tahun 2025;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun P-PPAS Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. Rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah tahun 2025.
- (2) P-KUA dan P-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai dasar menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Penyusunan Rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pembangunan Tahun 2025;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025;
 - e. BAB V : Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2025; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Rincian sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
HASAN ACHMAD

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025 NOMOR 505

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



IMANUEL TUMANAT, SH.
PENATA TK.I
NIP. 19811225 201104 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
TAHUN 2025**

**B A B I
P E N D A H U L U A N**

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja merupakan merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Renja OPD mengacu kepada Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan Penyusunan RKPD antara lain mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antardaerah; menjaga konsistensi penjabaran program RPJMD tahun 2025; keselarasan penyusunan (Rencana Kerja) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode 2025 dan RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Periode 2025; pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; meningkatkan pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; serta tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan

daerah kabupaten/kota dan provinsi yang mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan berdasarkan kepada Rencana Strategis dengan memperhatikan program prioritas, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta memperhatikan amanat sebagai berikut:

- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut provinsi/Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
- d. Evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2025.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c. penetapan. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, kabupaten/kota dan memberi ruang bagi pokok-pokok pikiran DPRD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rencana Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5999 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2025

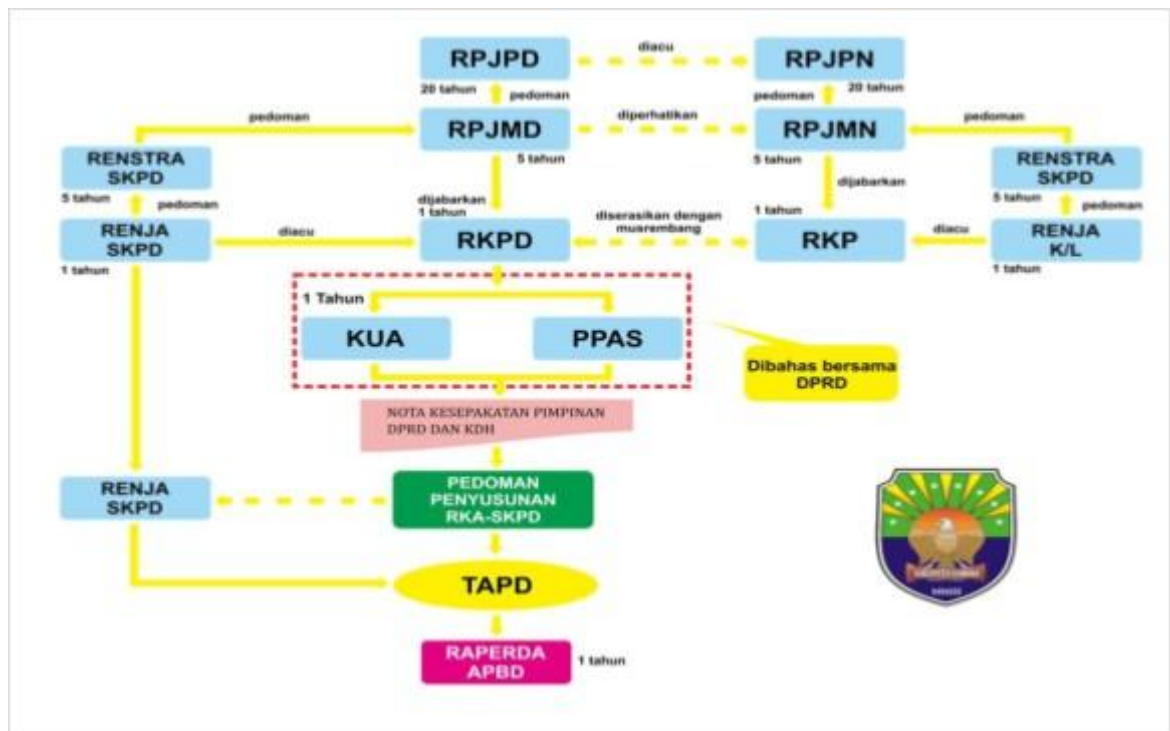
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2025-2045;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaimana 2016-2021;
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*E-Planning*) Kabupaten Kaimana;
28. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
29. Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/12/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2025;
30. Surat Edaran Nomor 800/279/Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Perencanaan pembangunan harus terpadu dan terintegrasi, dimulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Keterpaduan itu dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Sedangkan tujuan Perubahan RKPD adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai acuan utama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025;
- 2) Menjadi landasan penyusunan R-KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025;
- 3) Sebagai bentuk sinergitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

Pemerintah;

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penyajian dokumen RKPD sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Hasil Semester I Tahun Anggaran 2025
- 2.2. Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah 2025
- 2.3. Permasalahan Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kaimana
- 3.2. Kebijakan Pendapatan Daerah
- 3.3. Kebijakan Belanja Daerah
- 3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional
- 4.4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- 4.5. Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, dilakukan untuk mengukur capaian tiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan melihat tingkat kemajuan (progres) pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai dengan bulan juni 2025, dengan waktu evaluasi kurang dari satu tahun, maka progress pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada tingkat keluaran sub kegiatan.

2.1 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 tersaji sebagaimana tabel berikut :

Berikut ini kami tampilkan data realisasi keuangan (pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025) Triwulan II (per 30 Juni 2025).

Tabel 2.1 Data Realisasi Anggaran Tahun 2025, per 30 Juni 2025

		ANGGARAN	REALISASI Rp	REALISASI %
1	PENDAPATAN	1.179.884.653.295,00	427.325.140.357,00	36,21
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.771.559.300,00	23.947.551.872,00	65,12
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.844.825.000,00	4.178.955.447,00	38,53
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.425.000.000,00	8.319.511.644,00	50,65
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.750.734.300,00	3.171.072.805,00	115,28
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.751.000.000,00	8.278.011.976,00	122,61
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.138.844.943.331,00	403.377.588.485,00	35,41
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.128.997.201.242,00	401.875.390.755,00	35,59
	Pendapatan Transfer antar Daerah	9.847.742.089,00	1.502.197.730,00	15,25
1.2.1.1	Dana OTSUS dan DTI	142.736.358.242,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Dana Perimbangan	0,00	1.475.429.700,00	40,17
1.2.1.3	Dana bagi Hasil (DBH)	200.505.696.000,00	80.543.215.400,00	40,17
1.2.1.4	Dana Alokasi Umum (DAU)	608.937.994.000,00	275.913.051.000,00	45,31
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK)	93.407.362.000,00	2.953.914.605,00	3,16

1.2.1.6		Dana Desa	83.409.792.000,00	40.989.780.050,00	49,14
1.2.2		Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.053.033.276.000,00	360.885.610.705,00	34,27
1.2.2.1		Dana Otonomi Khusus	142.736.358.242,00	0,00	0,00%
1.2.2.2		Dana Perimbangan	0,00	1.475.429.700,00	0
1.2.3		Transfer Pemerintah Provinsi	9.054.425.599,00	1.502.197.730,00	16,59
1.2.3.1		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.054.425.599,00	1.502.197.730,00	16,59
1.3		LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.268.150.664,00	0	0
1.3.1		Pendapatan Hibah			
2		BELANJA	1.267.025.300.390,27	303.615.032.258,00	23,96
2.1		BELANJA OPERASI & MODAL	1.044.369.565.737,28	265.010.070.438	25,38
2.1.1.02.01		Dinas Kesehatan	164.414.739.258,78	40.296.448.749,00	24,50
2.1.1.03.01		RSUD kaimana	59.270.094.059,24	10.040.490.778,00	16,94
2.1.1.04.01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.756.427.519,21	16.471.760.333,00	14,47
2.1.1.05.01		Satuan Polisi Pamong Praja	9.698.295.372,00	2.114.500.938,00	21,80
2.1.1.06.01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.282.434.026,00	641.367.139,00	12,14
2.1.1.07.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.385.498.906,00	2.859.113.584,00	25,11
2.1.1.08.01		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.798.719.374,00	1.141.262.100,00	30,04
2.1.1.09.01		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.318.422.756,00	2.534.591.339,00	20,57
2.1.1.10.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.279.959.468,00	2.092.428.030,00	28,74
2.1.1.11.01		Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.288.938.569,00	2.478.694.951,00	17,34
2.1.1.12.01		Dinas Lingkungan Hidup	9.978.147.386,00	2.746.763.573,00	27,52
2.1.1.13.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.139.534.438,00	1.671.682.052,00	32,52
2.1.1.14.01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.412.709.384,00	1.945.628.473,00	13,49
2.1.1.15.01		Dinas Perhubungan	34.924.348.973,00	2.851.248.731,00	8,16
2.1.1.16.01		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8.280.175.024,00	1.962.478.034,00	23,7
2.1.1.17.01		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.537.075.794,50	2.003.295.886,00	17,36
2.1.1.18.01		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11.921.919.509,00	2.241.778.363,00	18,8
2.1.1.19.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.658.418.877,00	1.484.479.401,00	10,86
2.1.1.20.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.560.842.542,58	2.042.786.050,00	36,73

2.1.3.21.01		Dinas Perikanan	16.033.700.926,02	2.770.409.448,00	17,27
2.1.1.01.01		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	302.535.266.059,76	74.978.429.985,00	24,78
2.1.3.22.01		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.097.153.447,54	4.018.741.381,00	22,2
2.1.4.23.01		Sekretariat Daerah	85.936.010.325,00	25.230.903.353,00	29,36
2.1.4.24.01		Sekretariat DPRD	48.926.052.109,00	13.389.784.232,00	27,36
2.1.4.25.01		Distrik Kaimana	15.044.961.362,00	4.295.238.028,00	28,54
2.1.4.26.01		Kelurahan Kaimana Kota	1.327.789.550,00	112.500.000,00	8,47
2.1.4.27.01		Kelurahan Krooy	1.465.246.480,00	98.480.000,00	6,72
2.1.4.28.01		Distrik Teluk Arguni	5.634.799.383,00	2.271.881.740,00	40,31
2.1.4.29.01		Distrik Teluk Etna	3.397.190.119,00	944.857.117,00	27,81
2.1.4.30.01		Distrik Buruway	4.248.703.458,00	1.732.469.951,00	40,77
2.1.4.31.01		Distrik Kambrau	4.028.442.179,00	1.380.011.532,00	34,25
2.1.4.32.01		Distrik Yamor	3.494.901.676,00	830.031.923,00	23,74
2.1.4.33.01		Distrik Arguni Bawah	4.420.130.442,00	1.406.708.777,00	31,82
2.1.4.34.01		Inspektorat	14.476.515.151,64	2.321.951.119,00	16,03
2.1.4.35.01		BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan	18.054.194.977,00	3.538.956.427,00	19,6
2.1.4.36.01		Badan Pendapatan Daerah	8.831.403.976,00	2.374.479.558,00	26,88
2.1.4.37.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	201.507.876.950,00	44.133.817.751,00	21,9
2.1.4.38.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	11.306.049.277,00	2.101.419.496,00	18,58
2.3		BELANJA TAK TERDUGA	52.099.613.552,00	955.800.000,00	1,83
2.3.1		Belanja Tak Terduga	52.099.613.552,00	955.800.000,00	1,83
		SURPLUS / (DEFISIT)	(87.140.647.095,27)	123.710.108.099,00	141,96
3		PEMBIAYAAN	87.140.647.095,27	(685.000.000,00)	(0,78)
3.1		PENERIMAAN DAERAH	87.140.647.095,27	0,00	0,00
3.1.1		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	87.140.647.095,27	0,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTO	87.140.647.095,27	(685.000.000,00)	(0,78)
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	123.025.108.099,00	0,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana, 2025

Berdasarkan Data Realisasi Anggaran di atas bahwa realisasi pendapatan pada Triwulan II sebesar 35,51 % (Rp.380.482.808.159,00) dari total pendapatan Rp.1.071.454.435.899,00 Sedangkan untuk belanja (Belanja operasional dan Modal, belanja tak terduga dan belanja transfer), realisasi belanja pada Triwulan II sebesar 23,59% (Rp.303.615.032.258,00 dari total belanja Rp.1.267.025.300.390,00). Untuk realisasi belanja berdasarkan OPD pelaksana, rata-rata realisasi belanja OPD (belanja operasi dan modal) adalah sebesar 23,96 %, persentase realisasi tertinggi adalah Distrik Buruway sebesar 40,77% (Rp. 1.732.469.951,00 dari total pagu anggaran Rp. 3.735.070.988,00) dan persentase realisasi ter-rendah adalah Kelurahan Kaimana Krooy dengan realisasi keuangan 6,72% (Rp.98.480.000,00 dari total pagu anggaran (Rp. 1.465.246.480,00).

2.2 Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah

Realisasi kinerja program perangkat daerah adalah tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan oleh instansi Pemerintah Daerah dalam satu periode (satu tahun). Ini mencerminkan seberapa efektif dan efisien program tersebut dijalankan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, Renstra, dan Renja. Realisasi kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
			JUMLAH PAGU PROGRAM																	
									46.708.740.508						1.457.963.285					
1		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 89% 100% 100% 100%	41.947.829.510	97%	12.735.921.025	100% 100% 100% 100% 82%	7.067.934.797	0%	761.010.675	0%	0	0%	761.010.675	0%	13.496.931.700	32%	DPPKP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dok	182.471.800	1 Dok	25.950.000	1 Dok	33.080.000	0 Dok	18.720.550	0 Dok	0	0%	18.720.550	0%	44.670.550	24%	DPPKP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra dan Renja OPD	7 Dok	99.472.000				21.980.000	0 Dok	-	0 Dok	-	0%	-	0%	-		DPPKP	
		Koodinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja OPD	6 Dok	82.999.800	1 Dok	25.950.000	1 Dok	11.100.000	0 Dok	5.545.000	0 Dok	0	0%	6	0%	37.040.000	45%	DPPKP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.665.974.926		8.358.827.702		4.251.829.497		0		0	0%		0%	8.358.827.702	39%	DPPKP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran gaji ASN	72 Bln	16.953.922.126	12 bulan	6.334.043.202	12 bulan	3.565.678.497	3 Bln	925.169.444	3 Bln	1.098.647.280	0%	4	0%	8.540.389.691	50%	DPPKP	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga Kontrak/Penerima honor	152 org	4.655.676.000	33 orang	2.005.174.500	30 orang	677.271.000	30 org	89.247.000	0	0	0%	89.247.000	0%	2.094.421.500	45%	DPPKP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Lap	56.376.800	1 laporan	18.810.000	1 laporan	8.880.000	0 Dok	0	0 Laporan	4.440.000	0%	4.440.000	0%	23.250.000	41%	DPPKP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.506.414.000		3.299.745.858		565.148.000		0		0			3.299.745.858	73%	DPPKP		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	1 tahun	30.230.000	1 tahun	14.920.000	0	0		-		-	30.230.000		DPPKP		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	96.203 hr	883.950.000	14.560 liter	381.921.325	4405 hr	268.320.000	0 hr		2.656	60.568.500		60.568.500	452.009.825	51%	DPPKP		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72 bulan	150.992.000	12 bulan	104.145.000	55.000 lembar	69.800.000		8.900	4.450.000		4.450.000		113.095.000	75%	DPPKP		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269 orang	3.471.472.000	42 orang	2.783.449.533	42 orang	1.211.334.800		42 orang	169.291.900		92.580.000		3.045.321.433	88%	DPPKP		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			988.961.800		821.366.840		332.107.400							821.366.840	83%	DPPKP		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 bulan	71.850.000	500 lembar	16.470.000	500 lembar	6.000.000	83	1.000.000	125	1.500.000		2.500.000	18.970.000	26%	DPPKP		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	392.784.000	12 bulan	120.054.490	12 bulan	70.200.000	3 bln	4.347.150	3 bln	5.350.650		9.697.800	132.762.790	34%	DPPKP		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	44.000.000	12 bulan	123.213.800	12 bulan	56.248.000		0%					123.213.800	280%	DPPKP		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bulan	480.327.800	12 bulan	561.628.550	12 bulan	199.659.400	3 bln	11.115.940	3 bln	35.138.820		46.254.760	620.514.550	129%	DPPKP		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.970.000.000												0%	DPPKP		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	51 Org	100.000.000												0%	DPPKP		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65 orang	1.870.000.000												0%	DPPKP		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			165.104.000												0%	DPPKP		
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	112 unit	165.104.000												0%	DPPKP		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			733.818.000		230.030.625		122.090.000		0%				230.030.625	31%	DPPKP			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72 bulan	414.380.000	12 bulan	115.804.477	12 bulan	56.880.000	3 bln	2.240.000	3 bln	1.605.000		3.845.000	119.649.477	29%	DPPKP		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Tahun	239.698.000	77.811.148	4 gedung	46.900.000		1 gedung	955.000		955.000		78.766.148	33%	DPPKP			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104 unit	79.740.000	4 gedung	36.415.000	100 unit	18.310.000		43 Unit	7.910.000		7.910.000		46.325.000	58%	DPPKP		
		Program Kawasan Permukiman							300.000.000								0%	DPPKP		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota							300.000.000								0%	DPPKP		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	81.209.000	9 Dok	81.209.000	6	65.934.800	24%	16.034.00	33%	21.676.0	41%	37.710	0%	118.919.000
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota						300.000.000								0%	DPPKP		
		Program Kawasan Permukiman			1.000.000.000		246.422.301.087		36.328.729.599							246.422.301.087	24442%	DPPKP		
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.000.000.000		1.000.000.000		40.300.000							1.000.000.000	100%	DPPKP		
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen RP3KP dan RP2KPKP	1 Dok	1.000.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	1 kegiatan	30.000.000							1.000.000.000	100%	DPPKP		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			13.944.462.421		245.422.301.087		36.328.729.599							245.422.301.087	1760%	DPPKP		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tersedianya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	773 unit	13.444.462.421	27 Kampung/637 unit	245.422.301.087	27 Kampung/715 unit	36.265.243.599							245.422.301.087	1825%	DPPKP		

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Kegiatan	500.000.000	50 unit	-	20 unit	16650.000										0%	DPPKP
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Tersedianya Database Perumahan					100%	46836.000										0%	DPPKP
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			4.873.350.743							0							0%	DPPKP
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	77 Unit	4.873.350.743							0							0%	DPPKP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			9.000.000.000							0							0%	DPPKP
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	10%	9.000.000.000							0							0%	DPPKP
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			5.153.066.253		5.101.125.112		3.012.076.112			0					5.101.125.112		99%	DPPKP
		Penyelesaian masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5.153.066.253	61 658 m2	5.101.125.112		3.012.076.112			0					5.101.125.112		99%	DPPKP
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	100000 m2	4.153.066.253	61,658m2	5.068.375.112	100.000 m2	2.991.576.112	6154 m2	184.092.000	5739 m2	171.692.000		355.784.000		5.424.159.112		131%	DPPKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah GantiKerugiandanSantunanTanah untukPembangunanolehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 sertifikat	1.000.000.000	100 sertifikat	32.750.000	100 sertifikat	20.500.000			0					42.750.000		4%	DPPKP
									Rata - rata capaian kinerja (5)											
									Predikat kinerja											
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
								</												

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bangunan yang rahabilitasi lainnya	1 paket	967.500.000								47.834.900,00						0%	BAPENDA	
2.	Persentase PAD terhadap pendapatan																			BAPENDA	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah																		BAPENDA	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Produk Hukum		366.150.000				75.230.000										0%	BAPENDA	
		Perencanaan pengelolaan Retribusi daerah	Jumlah Produk Hukum		636.500.000				327.400.000										0%	BAPENDA	
		Pendataan dan pendaftaran objek pajak Daerah	Jumlah identifikasi objek pajak		636.250.000				127.250.000				17.100.000,00						0%	BAPENDA	
		Pelayanan Penyuluhan dan penyebarluasankebijakan pajak daerah	Jumlah idlan dan sosialisasi		567.160.000				93.268.000				25.151.000,00						0%	BAPENDA	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPPD penagihan pajak		963.620.000				196.910.000				41.990.000,00						0%	BAPENDA	
		Pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah		439.600.000				76.000.000				44.840.000,00						0%	BAPENDA	
		Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah rekonsiliasi		335.860.000				52.500.000				32.833.000,00						0%	BAPENDA	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah hadiah dan panutan PBB-P2		893.950.000				178.790.000										0%	BAPENDA	
		Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/ kota	Jumlah koordinasi dan konsultasi		152.500.000				30.500.000										0%	BAPENDA	
		Penilaian PBB-P2 serta BPHTB	Jumlah objek pajak baru		464.900.000				92.980.000				22.800.000,00						0%	BAPENDA	
		Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Jumlah konsultasi pendaftaran WP/WR		270.000.000				54.000.000										0%	BAPENDA	
		Penetapan wajib Retribusi	Jumlah penetapan Retribusi Daerah		270.000.000				54.000.000										0%	BAPENDA	
		Penetapan Wajib Pajak	Jumlah penetapan pajak daerah		1.201.700.000				240.340.000				8.928.000,00						0%	BAPENDA	
		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data		251.100.000				50.220.000										0%	BAPENDA	
		Penyelesaian Keberatan Pajak	Jumlah Keberatan yang diselesaikan		225.000.000				45.000.000				4.750.000,00						0%	BAPENDA	
		Penyediaan Sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah garis parkir retribusi tempat khusus parkir		172.740.000				57.580.000					0%	0	0%			0%	BAPENDA	
Rata - rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																				
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
JUMLAH AGU PROGRAM 2025										238.626.025.058											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		0	836.408.124.839	0	178.731.434.319	3	235.845.033.455	0	28.022.697.995	0	45.109.268.801	0	73.931.966.796	0	260.823.080.449	0		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan n Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	510.647.679.472	0	114.976.695.913	34,59%	147.415.553.108	0	27.965.008.392	0	38.309.355.268	0	66.275.163.660	0	180.939.254.573	0	35%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
3		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	578.596.000	6 dok	910.111.840	2 dok	78.832.000	0	0	1 dok	79.900.000	0	79.900.000	0	990.011.840	0	171%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
4		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2Dok	455.055.920			3 dok	0	1 dok	41.450.000		41.450.000		496.505.920			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	35.350.000	3 dok	78832.000	0	0	1 dok	38.450.000		38.450.000		73.800.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Dok	419.705.920			0	0	0	0		0		419.705.920			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
7		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Persentasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	0	486.431.814.623	0	108.577.566.973	100%	140.894.890.242		27.092.733.851		38.229.455.268		65.322.189.119		173.899.756.092		36%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
8		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1 Tln	100.312.897.473			1 tln	26.929.622.851	1 tln	38.103.755.268		65.033.378.119		165.346.275.592			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
9		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Tln	8.264.669.500			1 tln	163.111.000	1tln	125.700.000		288.811.000		8.553.480.500			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
10		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		83,77%	140.894.890.242	0	0	0	0		0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
11		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			0				0	0	0	0		0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	
12		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 laporan				0	0	0	0		0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15	
13		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan manajemen	0	1.703.069.600	0		0	69.658.420		0		0		0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
14		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			0		2 dok	69.658.420	0	0	0	0		0		0			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
15		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0				0	0	0	0	0		0		0			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
16		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	0	14.879.313.893	0	3.643.858.100			0	3.308.521.579	252.583.744			0	241.843.744		3.839.986.844			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
17		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			69 Unit	348.898.200			0	0	0	0		0		348.898.200			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
18		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Thn	45.715.000			10tn	10.740.000	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
19		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 palet	1.079.014.900		3.308.521.579	1 palet	60.400.000	0	0	0	60.400.000		1.139.414.900			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
20		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			26 dok	59.760.000			0	20.000.000	0	0	0	20.000.000		79.760.000			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
21		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			312 Lap	2.110.470.000			0	161.443.744	0	0	0	161.443.744		2.271.913.744			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
22		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang	0	4.841.035.356	0	813.994.000	0	1.507.573.877	278.353.997	0	0	0	0	278.353.997		1.092.347.997			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
23		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 dok	521.259.000	1 dok		1 dok	18.500.000	0	0	0	18.500.000		539.759.000			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
24		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1dok	206.160.000	1 dok	1.507.573.877	1 dok	152.693.997	0	0	0	152.693.997		358.853.997			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
25		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1dok	86.575.000	1 dok		1 dok	107.160.000	0	0	0	107.160.000		193.735.000			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
26		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang penunjang	0	2.213.850.000	0	1.031.165.000	89,19%	1.556.076.990	342.136.800	0	0	0	342.136.800		1.117.151.800			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1 dok	35.380.000	1 dok		1 dok	14.100.000	0	0	0	14.100.000		49.480.000			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
28		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 dok	579.145.000	1 dok		1 dok	308.536.800	0	0	0	308.536.800		887.681.800			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
29		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 unit	80.950.000		1.556.076.990				0	0	80.950.000				DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		
30		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
31		Pemeliharaan Aset tetap lainnya	jumlah aset tetap lainnya			1 Lap	256.150.000	1 lap		1 lap	0	0	0	0	0					DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
32		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 dok	79.540.000	1 dok		1 dok	19.500.000	0	0	0	19.500.000		99.040.000			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
33		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMP Angka Putus Sekolah SD % Satuan Pendidikan dalam Rapor Mutu SMP APK SD % Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK APM SMP % Guru Bersertifikat SMP % Guru Bersertifikat SD % Guru Bersertifikat TK APK SMP APM SD	0	325.660.445.367	0	63.454.738.406	0	88.429.480.347	0	856.889.603	0	6.799.913.533	0	7.656.803.136	0	79.883.825.876			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
34		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	% Biaya personil siswa SD % Guru/Tutor sesuai kualifikasi SD % Kepala satuan pendidikan sesuai standar SD % Pemenuhan Guru SD % Perlengkapan siswa SD Rasio Keterediaan SD terhadap PUS % Ruang kelas SD dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi SD	0	159.240.055.131	0	29.830.742.140	0	28.752.171.605		823.109.603		478.113.866		1.301.223.469		25.906.533.841			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
35		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			1 Ruang	1.227.611.324			0	0	0	0	0	0		1.227.611.324			DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
36		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			3 Ruang	2.100.557.442			0	0	0	0	0	0						

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
37		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dihangun			1 Ruang	406.161.253			0	0	0	0	0	0	406.161.253			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
38		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dihangun			4117 M2	3.559.198.921			0	0	0	0	0	0	3.559.198.921			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
39		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Dihangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dihangun			10 Unit/Kopel	5.657.285.775			0	0	0	0	0	0	5.657.285.775			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
40		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			199 Paket	262.307.860			0	0	0	0	0	0	262.307.860			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
41		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			3077 unit	923.936.000			0	0	0	0	0	0	923.936.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
42		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
43		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			15 orang	547.090.000			0	0	0	0	0	0	547.090.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
44		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			75 guru	2.815.512.500			0	0	0	0	0	0	2.815.512.500			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
45		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Colongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			91 orang	636.660.000			0	0	0	0	0	0	636.660.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
46		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			13 Pkt/skdh	380.000.000			0	0	93.760.000	93.760.000	473.760.000	473.760.000				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
47		Rehabilitasi sedang/berat Ruang kelas	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat			4 Ruang	119.343.350			0	0	0	0	0	0	0				
48		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS							0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
49		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
50		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dihangun			1 ruang	1.549.131.739			0	0	0	0	0	0	1.549.131.739			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
51		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah pembangunan kesehatan sekolah			1 Ruang	414.289.326			0	0	0	0	0	0	0				
52		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
53		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
54		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0	0			0	138.214.049	0	129.600.000	267.814.049	267.814.049				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
55		Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
56		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
57		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
58		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
59		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0	0			1 dik	393.290.554	1 dik	254.753.866	648.044.420	648.044.420				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
60		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar			94 sekolah	423.015.000				291.605.000	0	291.605.000	714.620.000	714.620.000				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
61		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
62		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			72 m2	1.351.241.650			0	0	0	0	0	0	0				
63		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			90 sekolah	6.217.400.000			0	0	0	0	0	0	6.217.400.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
64		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	
65		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan perlengkapan siswa			2300 siswa	1.240.000.000			0	0	0	0	0	0	1.240.000.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA	

28752.171.605

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
66		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	% Biaya personil siswa SMP % Guru/Tutor sesuai kualifikasi SMP % Kepala satuan pendidikan SMP sesuai standar % Pemenuhan Guru / Tutor SMP % Pemenuhan T.Kependidikan SMP % Perlengkapan siswa SMP Rasio Ketersediaan SMP terhadap PUS % Ruang kelas SMP dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi	0	92.600.002.774	0	18.642.446.455	0	20.497.938.603	0	29.280.000	0	1.969.387.000	0	1.998.667.000	20.641.113.455				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
67		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			1 unit	1.223.811.251			0	0	0	0	0	0	1.223.811.251				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
68		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
69		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
70		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			1 Ruang	808.988.985			0	0	0	0	0	0	808.988.985				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
71		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			1 Unit	1.878.582.343			0	0	0	0	0	0	1.878.582.343				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
72		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			1 Palet	937.997.074			0	0	0	0	0	0	937.997.074				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
73		Pembangunan Asrama Sekolah	jumlah Pembangunan asrama sekolah yang tersedia			1 Ruang	924.320.430			0	0	0	0	0	0					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
74		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
75		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
76		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
77		Perlengkapan Dasar buku teks Peserta didik	Jumlah Buku teks peserta didik			1309 Buku	15.426.400			0	0	0	0	0	0					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
78		Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa	jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa			3 palet	91.100.000			0	0	0	0	0	0					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
79		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			100 set	466.200.000			0	0	0	0	0	0	466.200.000				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
80		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			15 unit	560.836.738			0	0	0	0	0	0	560.836.738				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
81		Pengadaan Perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan siswa yang tersedia			1550 siswa	1.240.000.000			0	0	0	0	0	0					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
82		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			9 asrama	8.058.150.000			0	0	0	1.842.720.000	1.842.720.000	9.900.870.000					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
83		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			100 peserta didik	388.250.860			0	0	0	0	0	0	388.250.860				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
84		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			13 org	473.336.500	20.497.938.603		0	0	0	0	0	0	473.336.500				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
85		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalanan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			60 org	961.229.351			0	0	0	0	0	0	961.229.351				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
86		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan ruangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan yg tersedia			644 M2	299.508.000			0	0	0	0	0	0					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
87		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagian peserta didik	Jumlah proses Belajar dan Ujian bagian peserta didik			19 sekolah	223.608.523			0	0	0	0	0	0					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
88		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
89		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							0	0	0	111.067.000	111.067.000	111.067.000					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
90		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
91		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPd

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
92		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0	0			1 Lap	29.280.000	1 lap	15.600.000		44.880.000		44.880.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
93		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
94		Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidik yang terfasilitasi			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
95		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
96		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
97		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
98		Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
99		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
100		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga yang Tersedia			3 palet	91.100.000													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
101		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
102		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	% Biaya personil siswa TK % Guru/Tutor sesuai kualifikasi TK % Kepala satuan pendidikan sesuai standar TK % Penumbuhan Guru / Tutor TK % Perlengkapan siswa TK Rasio Ketersediaan PAUD terhadap PUS % Ruang kelas PAUD Non Formal dalam kondisi baik % Ruang Kelas TK dalam Kondisi Baik % Satuan pendidikan PAUD non Formal terakreditasi % Satuan Pendidikan Terakreditasi TK	0	26.442.846.582	0	2.290.302.200	0	10.225.839.388	0	0	0	178.312.200	0	178.312.200	0	2.468.614.400			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
103		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			3 item	268.900.000			0	0	0	0	0	0	268.900.000				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
104		Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
105		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
106		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
107		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			28 org	991.647.000			0	0	0	0	0	0	991.647.000				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
108		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						10.225.839.388	0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
109		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			38 org	530.307.200			0	0	0	178.312.200	178.312.200	708.619.400					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
110		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP							0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
111		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0	0			0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
112		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			0	0			0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
113		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			1000 org	499.448.000			0	0	0	0	0	0	499.448.000				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
114		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia			0	0			0	0	0	0	0	0	0				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
115		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				1 unit	2.003.811.831			0	0	0	0	0	0	2.003.811.831				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
116		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				368 m2	314.461.110			0	0	0	0	0	0	314.461.110				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	
117		Rehabilitasi Sedang/Berat/ Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				448 m2	385.680.000			0	0	0	0	0	0	385.680.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
118		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				1000 org	360.000.000			0	0	0	0	0	0	360.000.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
119		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD				16 lembaga	289.500.000			0	0	0	0	0	0	289.500.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
120		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	% Biaya personil siswa Kesetaraan % Guru/Tutor sesuai kualifikasi Kesetaraan % Kepala satuan pendidikan sesuai standar Kesetaraan % Pemenuhan Guru / Tutor Kesetaraan % Pemenuhan T.Kependidikan Kesetaraan % Perolehan Peserta Kesetaraan % Ruang kelas Kesetaraan dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi Non Formal	0	3.739.178.500	0	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000		24%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
121		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			1 thn	900.000.000			0	0	0	0	0	0	900.000.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
122		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			1 thn				0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
123		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
124		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	% Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan PPDB % Perolehan Siswa SMA Rasio Ketersediaan SMA terhadap PUS % Ruang kelas SMA dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Pelaksanaan Asesmen Nasional % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMA	0	23.807.544.900	0	4.553.926.090	0	16.862.668.349	4.500.000	0	1.256.810.000	1.261.310.000	0	5.815.236.090				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
125		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
126		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
127		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun			1 ruang	683.663.800			0	0	0	0	0	0	683.663.800			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
128		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
129		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
130		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
131		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			0	0			0	0	0	129.560.000	129.560.000	129.560.000				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
132		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			4 sdtah	976.297.290			0	0	0	887.250.000	887.250.000	1.863.547.290				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
133		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
134		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
135		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik						16062.668.349	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
136		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			66 guru	2.393.965.000			0	0	0	0	0	0	2.393.965.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
137		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
138		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			1 Lap	500.000.000			0	0	0	0	0	0	500.000.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
139		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
140		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
141		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			0	0			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
142		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0		0		0	4.500.000	0	0		4.500.000		4.500.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
143		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0		0		0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
144		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan			0		0		0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
145		Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas			0		0		0	0	0	240.000.000		240.000.000		240.000.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
146		Pembangunan Asrama Sekolah	jumlah asrama			1 unit	358.950.000				0		0				358.950.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
147		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	% Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) % Perengkapan Siswa SMK Rasio Ketersediaan SMK terhadap PUS % Ruang kelas SMK dalam kondisi Baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMK	0	11.884.376.980	0	773.990.080		6.425.199.902		0	0	441.290.467	0	441.290.467	0	1.215.280.547		10%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
148		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			0		0		0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
149		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			0		0		0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
150		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			0		0		0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
151		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			0		0		0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
152		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			0		0		0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
153		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			0		0		0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
154		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			0		0		0	0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
155		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			3 sblah	773.990.080				0	0	150.000.000		150.000.000		923.990.080			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
156		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			0		0			0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
157		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			0		0			0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
158		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			0		0			0	0	168.600.000		168.600.000		168.600.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
159		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			0		0			0	0	122.690.467		122.690.467		122.690.467			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
160		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS			0		0			0	0	0	0	0		0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
161		Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota				43 org	228.594.500				0	0	0	0			228.594.500			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
162		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				68 guru	2.522.334.000				0	0	0	0	0					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
163		Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	% Tersedianya bantuan Fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan	0	7.946.440.500	0	1 Tahun	0	6.465.662.500	0	0	0	2.476.000.000	0	2.476.000.000	0			0%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
164		Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 tahun		6.465.662.500	0	0		2.476.000.000		2.476.000.000					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
165		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-		100.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
166		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-		100000000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
167		Penyusunan Buku teks pelajaran muatan lokal sekolah dasar	jumlah peyusunan buku teks sekolah dasar			1000 buku	100.000.000				0	0	0	0	0				#DIV/0!	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
168		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun				100.000.000				0	0	0	0	0					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
169		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun				100.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
170		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru Proporsi PTK Penggerak Proporsi PTK Bersertifikat % Kekucupan ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
171		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	% Jumlah Ketersediaan guru sesuai dengan angka kebutuhan pada satuan pendidikan yang dikelola pemda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
172		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
173		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
174		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	% Jumlah Ketersediaan guru sesuai dengan angka kebutuhan pada satuan pendidikan yang dikelola pemda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
175		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
176		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
177		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		0	22.699.679.098	0	12.874.859.046	0	6.275.063.902	0	962.051.000	0	4.072.750.000	0	5.034.801.000	0	4.495.521.000		20%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
178		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Organisasi Pemuda	0	1.680.678.000	0	1.784.943.846	0	467.984.402	0	0	0	539.280.000	0	539.280.000	0	0		0%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
179		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan bantuan kewirausahaan Cakupan pelatihan kewirausahaan % Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan % Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi pemuda	0	1285524000		1.784.943.846	0	467.984.402	0	0	0	539.280.000	0	539.280.000	0	0		0%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
180		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		318.045.000	87 org	769.703.846		391.675.402	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
181		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		76.309.000	1 Dok	500.000.000		76.309.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
182		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya saing pemuda pelopor	Jumlah kab/kota penyelenggraan dan kapasitas daya saing pemuda pelopor			532 org	266.620.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
183		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan	Jumlah perlindungan pemuda, advokasi, akses, pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan			150 org	63.550.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
184		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota			110 unit	71.470.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
185		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda			81 org	113.600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
186		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
187		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
188		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
189		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
190		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			0	0		0	0	0	539.280.000	539.280.000							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
191		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	0	21.019.001.098	0	11.089.915.200	0	5.807.079.500	0	962.051.000	0	3.533.470.000	0	4.495.521.000	0	4.495.521.000		21%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
192		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kejuruan olahraga tingkat kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	962.051.000	0	0	0	962.051.000	0	962.051.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
193		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0	0	0	0	0	0	0	962.051.000	0	0	0	962.051.000	962.051.000			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
194		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	2.821.916.000	0	1.532.264.500	0	876.532.000	0	0	0	183.470.000	0	183.470.000	0	183.470.000	7%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
195		Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			270 org	755.254.500			0	0	0	0						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
196		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	jumlah Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			2 unit	698.924.100			0		0	0						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
197		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	jumlah Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			1 dok	298.993.000					0	0						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
198		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota						876.532.000	0	0	0	183.470.000		183.470.000		183.470.000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
199		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0	1.867.349.500	0		0	1.046.155.500	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
200		pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota						1.046.155.500	0	0	0	0		0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	0	12.900.000.000	0	3.300.000.000	0	3.350.000.000	1 dok	0	1 dok	3.350.000.000	0	3.350.000.000	0	3.350.000.000	26%	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
202		Pengembangan Organisasi Keolahragaan					3.300.000.000			0	0		0						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
203		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota			0	0		3.350.000.000	1 dok	0	1 dok	3.350.000.000		3.350.000.000		3.350.000.000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
204		pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		0	0	0	0	0	34.392.000	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan		2.054.949.798	1 Dok	1.101.198.100			0	0	0	0						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
206		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			1 Dok	103.281.000			0	0	0	0						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
207		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi						34.392.000	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
208		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	0	1.374.785.800	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
209		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Pramuka Aktif	0	1.374.785.800	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
210		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			0	0		500.000.000	0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
211		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1 organisasi	150.000.000			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
212		Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan				1 organisasi	150.000.000			0	0	0	0	0	0	0			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
Rata - rata capaian kinerja (5)																				
Predikat kinerja																				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
JUMLAH PAGU PROGRAM 2025											12.749.969.384									
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.936.224.729		8.731.315.384		745.203.293		1.605.289.135		2.350.492.428		14.286.717.157	256%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			746.010.000		43.600.000		45.475.000				13.525.000		13.525.000	0%	57.125.000	8%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	746.010.000		43.600.000	3 Dokumen	30.975.000				900.000		900.000		44.500.000	6%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan/ 100 %	14500.000				12.625.000		12.625.000		12.625.000	0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.717.120.000		10.227.852.800		6.889.185.284		745.203.293		1.200.425.180		1.945.628.473		12.173.481.273		181%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		6.717.120.000		6.218.937.200	35 org/bln	5.276.757.284		707.943.293		1.126.187.180		1.834.130.473		8.053.067.673		120%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-		4.008.915.600	1 Dokumen	1.612.428.000		37.260.000		74.238.000		111.498.000		4.120.413.600		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			16.011.236.000		-		182.482.600		-		-		-		-		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pengadaan Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		223.214.000		-	40 Set	32.000.000		-		-		-		-		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15.788.022.000		-	99 Orang/ 100%	150.482.600		-		-		-		-		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.182.500.000		746.399.753		756.523.000		-		323.457.420		323.457.420		1.069.857.173		21%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		590.400.000		253.951.908	1 Paket/ 100%	145.000.000		-		47.686.600		47.686.600		301.638.508		51%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		258.000.000		83.458.600	1 Paket/ 100%	35.500.000		-		14.292.700		14.292.700		97.751.300		38%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4.334.100.000		408.989.245	4 Laporan/ 100 %	576.023.000		-		261.478.120		261.478.120		670.467.365		15%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.338.830.000		-		-		-		-		-		-		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Eselon III		900.750.000		-	-	-		-		-		-		-		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1.438.080.000		-	1 Unit / 100%	870.000.000		-		-		-		-		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.446.330.800		617.572.576		566.369.500		-		42.031.535		42.031.535		659.604.111		27%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		135.468.000		19.940.000	1 Laporan / 100%	10.250.000		-		2.100.000		2.100.000		22.040.000		16%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1.044.000.000		264.435.956	1 Laporan / 100%	148.400.000		-		24.206.535		24.206.535		288.642.491		28%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.266.862.800		333.196.620	1 Laporan / 100%	407.719.500		-		15.725.000		15.725.000		348.921.620		28%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.667.172.000		300.799.600		291.280.000		-		25.850.000		25.850.000		326.649.600		20%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya		914.880.000		195.486.600	6 Unit / 100%	152.170.000		-		16.350.000		16.350.000		211.836.600		23%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		752.292.000		105.313.000	6 Unit / 100%	139.110.000		-		9.500.000		9.500.000		114.813.000		15%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			29.889.789.000		1.617.799.200		710.664.000		-		7.000.000		7.000.000		1.624.799.200		5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			29.889.789.000		1.617.799.200		710.664.000		-		7.000.000		7.000.000		1.624.799.200		5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa	Terciptanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung		5.113.248.000		-		-		-		-		-		-		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa		1.897.029.000		146.840.000	6 Dokumen/ 84 Kampung	109.020.000		-		7.000.000		7.000.000		153.840.000		8%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Kampung yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparat desa		-		365.879.200		-		-		-		-		365.879.200		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya dokumen perencanaan jangka RPJM Kampung		3.833.597.500		-		-		-		-		-		-		0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		5.749.848.000		35.750.000	3 Dokumen/ 84 Kampung	70.370.000		-		-		-		35.750.000		1%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		2.000.000.000		478.130.000	1 Laporan/ 84 Kampung	386.484.000		-		-		-		478.130.000		24%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4																	-15	
		Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kampung Yang Melakukan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung		1.500.000.000															Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terbentuknya BUMDES Sesuai Potensi dan Sumber Daya Lokal		220.348.500															Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Pembinaan Pemberdayaan dan Pembangunan Kampung	Terciptanya Peningkatan Pemberdayaan dan Kualitas Pembangunan Kampung		5.108.748.000															Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		4.466.970.000		591.200.000	7 Dokumen/ 84 Kampung	144.790.000							591.200.000		13%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					937.619.280		2.946.000.000							937.619.280		0%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					937.619.280		2.946.000.000							937.619.280		0%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					5 UNIT / 100%	2.946.000.000									0%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					1 Dokumen / 100%	762.532.250									0%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		Facilitasi Penyelenggaraan Ketermaman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Perangkat desa untuk BPJS				937.619.280									937.619.280		0%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN			5.312.931.000		805.489.000		361.990.000				354.350.000		354.350.000		1.159.839.000		22%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan			5.312.931.000		805.489.000		361.990.000				354.350.000		354.350.000		1.159.839.000		22%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		5.312.931.000		805.489.000	84 lembaga kemasyarakatan /100 %	361.990.000				354.350.000		354.350.000		1.159.839.000		22%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Rata - rata capaian kinerja (5)																					
Prediktor kinerja																					
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																				
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
		JUMLAH PAGU PROGRAM 2025							9.460.244.581												
1		Program Pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Persentase kebutuhan operasional kantor/jumlah pegawai kantor	99%	68.218.917.580	CC B 94% 98%	28.554.605.748	100%	8.715.958.351	12%	1.021.150.287	30%	2.613.408.241	42%	3.634.558.528	47%	32.189.164.276	47%		DLH	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	140.000.000	76%	19.950.000	100%	21.190.700	21%	4.549.000	0%		21%	4.549.000	17%	24.499.000	17%		DLH	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENJA	5	50.000.000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%		DLH	
		Koordinas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKP	5	50.000.000	76%	19.950.000	1 lap	4.781.700	95%	4.549.000	0%	0%	95%	4.549.000	49%	24.499.000	49%		DLH	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENSTRA	1	10.000.000	0	0	2 dok	16.409.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		DLH	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	30.000.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		DLH	
62		Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Persentase capaian keuangan perangkat daerah	100%	52.537.746.980	94% 98%	13.442.733.302	100%	6.275.196.861	13%	799.433.019	32%	2.023.977.938	45%	2.823.410.957	31%	16.266.144.259	31%		DLH	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS	100%	18.099.796.980	88% 99%	5.954.258.802	32 orang	3.524.148.361	23%	799.433.019	43%	1.525.540.938	66%	2.324.973.957	46%	8.279.232.759	46%		DLH	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS	100%	34.402.950.000	98% 98%	7.488.474.500	2 dok	2.746.944.000	0%		18%	498.437.000	18%	498.437.000	23%	7.986.911.500	23%		DLH	
		Koordinas dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	5 Lap	17.500.000	0	0	1 lap	4.104.500	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		DLH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semester	10 Lap	17.500.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		DLH	
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.035.250.000	99%	483.805.447	100%	513.153.000	4%	21.350.288	38%	196.322.313	42%	217.672.601	68%	701.478.048	68%		DLH	
		Persediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya baju dinas, baju batik, dan pakaian olah raga	3 jenis	50.600.000	99%	136.000.000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	269%	136.000.000	269%		DLH	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	Terlaksananya bintek teknis pengelolaan limbah dan bintek perencanaan IPAL	3 keg	704.250.000	98%	347.805.447	13 orang	513.153.000	4%	21.350.288	38%	196.322.313	42%	217.672.601	80%	565.478.048	80%		DLH	
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan limbah b3 dan proses persetujuan teknis	2 keg	280.400.000	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		DLH	
		Administrasi umum perangkat daerah	persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	100%	7.498.434.000	69% 97%	485.191.965	100%	910.685.790	19%	170.011.221	17%	158.185.000	36%	328.196.221	11%	813.388.186	11%		DLH	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik kantor/penerangan	100%	35.000.000	1 paket	8.723.617	1 paket	13.629.990	0%		0%		0%	-	25%	8.723.617		25%	DLH
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			2 paket	63.786.843			0%		0%		0%	-	0%	63.786.843		0%	DLH
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	824.734.000	99,7% 2 paket	135.058.908	30 paket	67.813.800	0%		0%		0%	-	16%	135.058.908		16%	DLH
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan			0		2 paket	746.100.000	23%	168.784.721	21%	156.463.000	44%	325.247.721	0%	325.247.721		0%	DLH
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak, penggandaan dan publikasi	100%	149.000.000	99% 2 paket	29.758.975	3 paket	16.600.000	7%	1.226.500	10%	1.722.000	18%	2.948.500	22%	32.707.475		22%	DLH
		Pengelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SOPD	Jumlah ketersediaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35 distrik	4.077.500.000	44,7% 5 lap	246.863.623	15 lap	66.542.000	0%		0%		0%	-	6%	246.863.623		6%	DLH
			Jumlah ketersediaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	2.412.200.000					0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	7 jenis	1.802.326.600				151.064.000	0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional atau lapangan bagi aparat	7 jenis	1.802.326.600			60 unit	151.064.000	0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	966.450.000	76% 95%	360.272.154	100%	291.698.000	6%	16.249.642	16%	48.004.170	22%	64.253.812	44%	424.525.966		44%	DLH
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	100%	29.250.000	100% 100%	12.450.000	1 lap	5.004.000	23%	1.150.000	20%	1.000.000	43%	2.150.000	50%	14.600.000		50%	DLH
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan internet, air dan listrik	100%	337.200.000	81% 94%	194.766.020	3 lap	164.400.000	9%	14.019.642	5%	9.027.350	14%	23.046.992	65%	217.813.012		65%	DLH
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan makan dan minum dan bahan kebersihan kantor	100%	600.000.000	65% 96%	153.056.134	3 lap	122.294.000	1%	1.080.000	31%	37.976.820	32%	39.056.820	32%	192.112.954		32%	DLH
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase realisasi pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	4.238.710.000	98% 97%	3.633.348.453	100%	552.970.000	2%	9.557.117	34%	186.918.820	36%	196.475.937	90%	3.829.824.390		90%	DLH
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan rutin/berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan rutin/berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	4.004.450.000	98% 98%	3.598.271.065	13 unit	485.480.000	1%	7.132.117	38%	186.568.820	40%	193.700.937	95%	3.791.972.002		95%	DLH
		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	10 unit	150.000.000	99%	29.500.000	4 unit	56.280.000	0%		0%		0%	-	20%	29.500.000		20%	DLH
		Pemeliharaan/rehabilita sarana-prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	15 jenis	84.260.000	58%	5.577.388	7 unit	11.210.000	22%	2.425.000	3%	350.000	25%	2.775.000	10%	8.352.388		10%	DLH
		Program pengelolaan persampahan	Jumlah persentase timbulan yang tertangani	64%	9.774.908.000	35% 100% 95% 99%	4.020.892.990	59%	669.286.230	0%		0%		0%	-	41%	4.020.892.990		41%	DLH
		Pengelolaan sampah	Persentase cakupan pengelolaan sampah	64%	9.774.908.000	35% 100% 95% 99%	4.020.892.990	59%	669.286.230	0%		0%		0%	-	41%	4.020.892.990		41%	DLH
		Penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah daerah	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup (dokumen sampah)	2 dok	1.345.118.000			0		0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	Tersedianya mesin daur ulang sampah	7 unit	350.000.000			0		0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Penanganan sampah melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Tersedianya TPS permanen	6 unit	1.500.000.000			0		0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	16 kelompok	70.140.000	100%	70.140.000	5 kelompok	500.000.000	0%		0%		0%	-	100%	70.140.000		100%	DLH
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana-prasarana pengelolaan sampah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi	100%	2.245.390.000			0		0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana-prasarana pengelolaan sampah	94%	3.790.000.000	95%	587.097.390	7 unit	144.286.230	0%		0%		0%	-	15%	587.097.390		15%	DLH
		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik					2 unit	25.000.000	0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PL Ts, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	sarana-prasarana pengelolaan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PL Ts, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1500 ton	182.870.000	99%	182.129.500			0%		0%		0%	-	100%	182.129.500		100%	DLH
		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diseleenggarakan oleh pihak swasta	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah kabupaten/kota	30%	19.800.000	100%	19.800.000			0%		0%		0%	-	100%	19.800.000		100%	DLH
		Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah kabupaten/kota	2 lap	19.800.000	2 lap	19.800.000			0%		0%		0%	-	100%	19.800.000		100%	DLH
		Program pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase ketepatan kegiatan usaha yang memiliki izin PPLH	42%	897.000.000			0		0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase tingkat pengelolaan limbah b3 oleh pelaku usaha/kegiatan	42%	897.000.000			0		0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
			Persentase pelaku usaha yang menghasilkan limbah b3	42%	897.000.000			0		0%		0%		0%	-	0%			0%	DLH
		Program pengendalian pencemaran da kerusakan lingkungan hidup	Persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah	64%	3.915.050.000	93% 99%	1.091.856.311	0	75.000.000	0%		0%		0%	-	28%	1.091.856.311		28%	DLH
		Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kualitas lingkungan hidup	64%	3.515.050.000	93% 99%	1.091.856.311	0		0%		0%		0%	-	31%	1.091.856.311		31%	DLH
		Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Tersedianya data kualitas udara, air, tanah dan pesisir pantai	2 dok	985.800.000	93% 99%	1.091.856.311	0		0%		0%		0%	-	111%	1.091.856.311		111%	DLH

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8				-9		-12		13 + 6 + 12		14 + 13/5 x 100%		-15
		Pengelolaan laboratoru lingkungan hidup daerah	Tersedianya gedung laboratorium lingkungan	1 set	1.500.000.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
			Tersedia sarana-prasarana gedung laboratorium lingkungan		761.250.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
			Tersedianya alat ukur lingkunga portabel	10 unit	268.000.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase tutupan lahan dengan fungsi ruang	64%	400.000.000				75.000.000	0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Rehabilitasi hutan lahan	Jumlah bibit bambu atau bibit lainnya untuk perlindungan lahan kritis atau sempadan sungai	2000 bibit	260.000.000			0,01 Ha	75.900.000	0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Peningkatan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan	Jumlah sumur resapan yang terbangun/tersedianya	20 buah	20.000.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Pengujian kualitas udara Ambien	Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara	24 titik	120.000.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Program perencanaan lingkungan hidup	Tersedianya dokumen perenanaan lingkungan hidup	100%	1.825.100.000	100%	94% 98%	6.778.855.772	0		0%		0%		0%		371%	6.778.855.772		371%	DLH	
		Penyelenggaraan RPPLH	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	80%	927.900.000	94%	98%	2.899.001.068	0		0%		0%		0%		312%	2.899.001.068		312%	DLH	
		Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten kaimana	Tersedianya dokumes RPPLH kabupaten kaimana	1 dok	415.900.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Pengendalian pelaksanaan RPPLH	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan RPPLH	4 kali	512.000.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Penyelegaraan KLHS	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	40%	897.200.000	100%	94% 98%	3.879.854.704	0		0%		0%		0%		432%	3.879.854.704		432%	DLH	
		Pembuatan dan pelaksanaan KLHS tata ruang	Tersedianya dokumes KLHS ruang	1 dok	417.200.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPMD	Jumlah dokumen KLHS RPMD/RPMD kabupaten/ kota yang disusun	1 dok	480.000.000	100%	94% 98%	3.879.854.704	0	808%		0%		0%		808%	3.879.854.704		808%	DLH		
		Program keanekaragaman hayati	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	64%	925.000.000	100%		79.995.000	0		0%		0%		0%		9%	79.995.000		9%	DLH	
		Pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati	8 RTH	925.000.000	100%		79.995.000	0		0%		0%		0%		9%	79.995.000		9%	DLH	
		Pengelolaan ruang terbuka hijau	Penyediaan sarana-prasarana pengelolaan ruang terbuka hijau	8 RTH	925.000.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati				100%		79.995.000			0%		0%		0%		0%	79.995.000		0%	DLH	
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin PPLH	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkunga hidup	46%	234.300.000	97%	99% 99%	4.475.708.679	0		0%		0%		0%		1910%	4.475.708.679		1910%	DLH	
		Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin PPLH	Pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiata	46%	234.300.000	99%	99%	308.600.000	0		0%		0%		0%		132%	308.600.000		132%	DLH	
		Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas pejabat pengawaslingkungan hidup	100%	234.300.000					0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota				99%		294.700.000			0%		0%		0%		0%	294.700.000			DLH	
		Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 badan usaha	14.000.000	99%		13.900.000			0%		0%		0%		99%	13.900.000		99%	DLH	
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk masyarakat	Persentase kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan	73%	830.000.000	100%		29.549.313	0		0%		0%		0%		4%	29.549.313		4%	DLH	
		Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan	96%	830.000.000	100%		29.549.313	0		0%		0%		0%		4%	29.549.313		4%	DLH	
		Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Tersedianya informasi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup	6 lokasi	320.000.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Penyelenggaraan penyuluhan dn kampanye lingkungan hidup	Terlaksananya gerakan peduli lingkungan hidup da penyuluhan lingkungan	3 lag	510.000.000	100%		29.549.313	0		0%		0%		0%		6%	29.549.313		6%	DLH	
		Program penghargaan lingkungan hidup	Terwujudnya pelasanan hari lingkungan hidup	60%	356.250.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Persentase lembaga dan/atau masyarakat peduli lingkungan	73%	356.250.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
		Penilaian kinerja masyarakat/lembaga/dunia usaha/pendidikan dalam perlindungan lingkungan	Penilaian penghargaan dalam perlindungan lingkungan hidup	3 kategori	356.250.000			0		0%		0%		0%		0%		0%		0%	DLH	
	Rata - rata capaian kinerja (5)																					
	Predikat kinerja																					
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																					
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	37.527.000	2	44.875.000	7	36.334.000	5 Dok	37.527.000	0%	0%	0%	37527000	0%	0%	0%	0%	Damkar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	13.626.000	2		7	36.334.000	1 Dok	0	0%	0%	0%	0	0%	0%	0%	0%	Damkar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	23.901.000	0	44.875.000	0		1 Dok	0	0%	0%	0%	0	0%	0%	0%	0%	Damkar
		Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah		2.763.436.976		2.618.483.746		2.532.779.663											Damkar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Org	1.569.076.976	13 Org	1.578.743.746	13 Org	1.499.759.663											Damkar
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Lap	1.183.476.000	2 Lap	1.039.740.000	2 Lap	1.033.020.000											Damkar
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	4.954.500	0	-	0	-											Damkar
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Lap	5.929.500		0	0	-											Damkar
		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah			28.350.000		905.985.000													Damkar
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	28.350.000	30	203.615.000	NA	NA											Damkar
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	30	702.370.000	NA	NA											Damkar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			694.619.350		499.152.000		733.849.440											Damkar
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	110.685.500	NA	NA	5 Paket	110.777.440											Damkar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	NA	NA	NA	NA											Damkar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	421.584.600	2 Paket	499.152.000	2 Paket	302.400.000											Damkar
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.611.250	NA	NA	1 Paket	31.675.000											Damkar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Lap	135.738.000	29 Lap	160.680.000	8 Lap	288.997.000											Damkar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					344.144.400		147.855.330											Damkar
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	1 Unit	344.144.400	3 Unit	147.855.330											Damkar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			573.360.000		690.824.300		649.093.500											Damkar
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	Rp30.996.000	2 lap	39.456.000	2 lap	31.005.000											Damkar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet yang Disediakan	3 Lap	Rp150.000.000	3 Lap	Rp105.600.000	3 Lap	Rp130.800.000											Damkar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	Rp392.364.000	2 lap	Rp545.768.300	2 Lap	Rp487.288.500											Damkar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp430.760.000		Rp315.640.000		Rp725.098.850											Damkar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajahnya	12 Unit	Rp396.140.000	7 Unit	Rp315.640.000	9	Rp725.098.850											Damkar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Rp34.620.000,00	NA	NA	NA	NA											Damkar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA											Damkar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA											Damkar
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Rp413.445.700		Rp353.271.600		1.437.620.202											Damkar
		Pencegahan dan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah			Rp56.935.700		Rp353.271.600		Rp850.457.202											Damkar
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Lap	Rp56.935.700	0	Rp0	23 Kejadian	Rp252.530.000											Damkar
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0		77 Unit	Rp353.271.600	32 Unit	Rp597.927.202											Damkar
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL)		Rp356.510.000		Rp0		587.163.000											Damkar
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa,2 Kel	110.900.000	NA	NA	100 Org	Rp587.163.000											Damkar

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

[illegible]

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 lap	Rp14.565.337.870	3 lap	Rp11.647.119.243	2 Lap	Rp2.504.302.000			1 Lap	Rp563.698.350	Rp563.698.350		Rp12.210.817.593		84%	Bagian Umum	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp27.739.458.474	100%	Rp17.579.613.444	100%	Rp1.995.791.000	Rp-		Rp497.603.409	Rp497.603.409		Rp18.077.216.853		65%	Bagian Umum		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp18.910.701.824	200 unit	Rp14.393.027.587	59 Unit	Rp866.260.000			25 unit	Rp408.234.859	Rp408.234.859		Rp14.801.262.446		78%	Bagian Umum	
		Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	Rp2.922.052.000	3 unit	Rp967.505.920	34 Unit	Rp351.720.000			8 Unit	Rp65.373.750	Rp65.373.750		Rp1.032.879.670		39%	Bagian Umum	
		Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 item	Rp4.593.110.650	4 unit	Rp2.219.079.937	4 unit	Rp7.275.11.000			1 Unit	Rp21.744.800	Rp21.744.800		Rp2.240.824.737		49%	Bagian Umum	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	-	Rp -	-	Rp -	50 unit	Rp50.300.000			1 Unit	Rp2.250.000	Rp2.250.000		Rp2.250.000		#DIV/0!	Bagian Umum	
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100%	Rp -	100%	Rp119.250.000	-	Rp -					Rp -	Rp119.250.000		#DIV/0!	Bagian Perekonomian dan SDA		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Rp1.313.594.000	4 unit	Rp119.250.000	-	Rp -					Rp -	Rp119.250.000		9%	Bagian Perekonomian dan SDA		
		Kegiatan Administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	Rp3.670.650.440	100%	Rp1.857.713.394	100%	Rp627.766.255	Rp -		Rp246.190.844	Rp246.190.844		Rp2.103.904.238		57%	Bagian Umum		
		Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 bulan	Rp1.040.181.940	2 org/14 bln	Rp577.963.394	6/14 bln	Rp203.916.255			2 orang	Rp96.190.844	Rp96.190.844		Rp674.154.238		65%	Bagian Umum	
		Penyediaan pakatan Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakatan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 org	Rp315.468.500	7 Paket	Rp109.990.000	2 Pkt	Rp23.850.000					Rp -		Rp109.990.000		35%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Pelaksanaan medical Checkup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org/4 kali cekup	Rp500.000.000	2 Org	Rp299.760.000	2 Org	Rp100.000.000					Rp -		Rp299.760.000		60%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org/12 bulan	Rp1.815.000.000	2 org/12 bulan	Rp870.000.000	2/12 bln	Rp300.000.000			2 Org	Rp150.000.000	Rp150.000.000		Rp1.020.000.000		56%	Bagian Umum	
		Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	Rp2.406.588.000	100%	Rp11.661.060.117	100%	Rp2.751.064.000	Rp -		Rp808.813.775	Rp808.813.775		Rp12.469.873.892		518%	Sekretariat Daerah		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	4.910.140.560	7 Paket	Rp4.352.645.860	6 paket	Rp980.133.000			3 paket	Rp325.512.000	Rp325.512.000		Rp4.678.157.860		95%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	Rp4.910.140.560	7 Paket	Rp4.472.087.160	6 Paket	Rp980.133.000			3 paket	Rp355.742.400	Rp355.742.400		Rp4.827.829.560		98%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	48 item	Rp2.925.819.400	2 pkt	Rp2.836.327.097	1 Paket	Rp790.798.000			-	Rp127.559.375	Rp127.559.375		Rp2.963.886.472		101%	Bagian Umum	
		Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penataan organisasi	100%	Rp1.610.000.000	100%	Rp2.774.777.113	100%	Rp796.683.900		Rp232.744.000	-	Rp97.300.000	Rp330.044.000		Rp3.104.821.113		193%	Bagian Organisasi	
		Pengelolaan kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	3 dok	Rp2.031.084.200	1 Dok	Rp554.831.490	3 Dok	Rp189.284.900					Rp -		Rp554.831.490		27%	Bagian Organisasi	
		Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana	1 Lap	Rp2.367.613.900	1 Dok	Rp661.243.023	1 Lap	Rp249.995.000			-	Rp97.300.000	Rp97.300.000		Rp1.058.543.023		45%	Bagian Organisasi	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	Rp1.688.093.000	1 Dok	Rp686.294.200	1 Dok	Rp28.810.000					Rp -		Rp686.294.200		41%	Bagian Organisasi	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	Rp2.072.818.000	1 Dok	Rp572.408.400	1 Dok	Rp330.594.000		Rp232.744.000				Rp232.744.000	Rp805.152.400		39%	Bagian Organisasi	
		Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi Pimpinan	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	Rp23.977.413.000	100%	Rp16.331.376.909	100%	Rp5.341.325.100		Rp1.098.848.100	Rp1.303.238.915		Rp2.402.087.015	Rp18.733.463.924		Rp83.927.313.885		78%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan	12 Lap	Rp10.384.312.000	35 lap	Rp6.849.612.763	12 Lap	Rp2.524.929.100	3 lap	Rp1.085.659.100	3 Lap	Rp168.100.000	Rp1.253.759.100		Rp8.103.371.863		78%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	12 lap	Rp11.255.420.000	21 lap	Rp7.953.979.146	12 lap	Rp2.354.396.000	3 Lap	Rp13.189.000	3 Lap	Rp1.114.279.915	Rp1.127.468.915		Rp9.081.448.061		81%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Lap	Rp2.337.681.000	1 lap	Rp1.527.785.000	12 lap	Rp462.000.000			4 Lap	Rp20.859.000	Rp20.859.000		Rp1.548.444.000		66%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
2	Meningkatnya mutu kinerja tata kelola pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase tercapainya Persentase tercapainya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Rp17.825.305.309	100%	Rp73.170.212.162	100%	Rp24.081.437.480		Rp423.643.362		Rp10.333.458.361	Rp10.757.101.723		Rp83.927.313.885		471%	Sekretariat Daerah	
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan	100%	Rp19.799.770.500	100%	Rp3.751.369.206	100%	Rp1.734.482.000		Rp91.861.362		Rp282.658.361	Rp374.519.723		Rp4.125.888.929		21%	Bagian Pemerintahan	
		Penataan Administrasi Pemerintahan		-	Rp20.581.140.500	-		Rp -	-	Rp -				Rp -		Rp -		0%	Bagian Pemerintahan	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dok	Rp14.295.278.700	4 dok	Rp1.359.769.620	4 Dok	Rp976.119.000		Rp -		Rp -		Rp -	Rp1.359.769.620		10%	Bagian Pemerintahan	
		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dok	Rp5.504.491.800	4 dok	Rp2.391.599.586	3 Dok	Rp758.363.000	1 Dok	Rp91.861.362	1 Dok	Rp282.658.361	Rp374.519.723		Rp2.766.119.309		50%	Bagian Pemerintahan	
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	Rp58.999.918.993	100%	Rp63.403.779.792	100%	Rp20.448.992.000		Rp -		Rp10.050.800.000	Rp10.050.800.000		Rp73.454.579.792		124%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental	23 paket	Rp5.623.000.000	48 dok	Rp1.244.623.416	1 Dok	Rp19.140.000.000				Rp9.900.000.000	Rp9.900.000.000		Rp11.144.623.416		100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dok	Rp51.137.788.993	86 dok	Rp45.304.674.176	1 Dok	Rp803.000.000			-	Rp150.800.000	Rp150.800.000		Rp45.455.474.176		89%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I	II										
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 125		14 = 13/5 x 100%		-15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perputakaan, Kearsipan, Trantibum Linnas	1 Dok	Rp2.239.130.000	7 Dok	Rp16.854.482.200	1 Dok	Rp505.992.000					Rp -		Rp16.854.482.200		753%		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas dan koordinasi hukum	100%	Rp10.764.962.903	100%	Rp6.015.063.164	100%	Rp1.493.449.480		Rp331.782.000				Rp331.782.000		Rp346.845.164	59%		Bagian Hukum	
		Fasilitas penyusunan produk hukum daerah	jumlah produk hukum daerah yang disusun	180 Dok	Rp4.728.340.775	180 Dok	Rp2.991.769.196	180 Dok	985.792.480	95 dok	Rp93.550.000				Rp93.550.000		Rp3.085.319.196	69%		Bagian Hukum	
		Fasilitas bantuan hukum	jumlah kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	5 Kasus	3.262.283.000	5 Kasus	1.949.477.840	5 Kasus	580.345.000	1 kasus	139.260.000				139.260.000		2.088.737.840	64,00%		Bagian Hukum	
		Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	150 Dok	2.774.340.128	180 Dok	1.073.816.128	180 Dok	207.512.000	20 buku	98.972.000				98.972.000		1.172.788.128	42,00%		Bagian Hukum	
		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase jumlah kerjasama dalam negeri yang didokumentasi	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	204.314.000		Rp -				Rp -		Rp -	#DIV/0!		Bagian Pemerintahan	
		Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama dalam negeri yang didokumentasi	-	Rp -	-	Rp -	1 dok	Rp204.314.000					Rp11.253.000		Rp11.253.000		#DIV/0!		Bagian Pemerintahan	
3	Meningkatnya mutu kinerja tata kelola pemerintahan di bidang Ekonomi dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tercapainya Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	2.149.096.237	100%	7.409.705.394	100%	3.262.525.600		Rp			Rp514.222.000		514.222.000		7.923.927.394	369,00%		Sekretariat Daerah
		Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	2.105.495.000	100%	1.077.284.890	100%	763.450.000		Rp			126.562.000		126.562.000		1.203.846.890	57,00%		Bagian Perekonomian dan SDA
		Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Lap	839.295.000	1 lap	633.870.000	1 Lap	348.944.000		-			64.400.000		64.400.000		698.270.000	83,00%		Bagian Perekonomian dan SDA
		Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 distrik	719.250.000	1 lap	185.750.000	1 Dok	119.250.000					Rp -		185.750.000			26,00%		Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4 Dok	546.950.000	2 dok	257.664.890	4 Dok	295.256.000				2 Dok	Rp62.162.000		Rp62.162.000		Rp319.826.890	58,00%		Bagian Perekonomian dan SDA
		Kegiatan pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	100%	516.570.000	100%	1.277.125.300	100%	Rp382.623.600		Rp -				Rp -		Rp1.277.125.300		247,00%		Bagian Administrasi Pembangunan
		Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Renja SETDA	1 dok	496.744.700	1 dok	247.048.800	-	Rp						Rp -		Rp247.048.800		50,00%		Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Lap	859.710.000	1 lap	338.484.000	1 Lap	132.626.800		Rp				Rp338.484.000				39,00%		Bagian Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 lap	1.573.940.000	1 lap	691.592.500	7 Lap	249.996.800						Rp -		Rp691.592.500		44,00%		Bagian Administrasi Pembangunan
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100%	1.063.253.014	100%	4.480.460.094	100%	1.890.318.000		Rp -			Rp387.660.000		Rp387.660.000		Rp4.868.120.094	458%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dok	1.012.921.000	9 dok	970.217.058	4 Dok	400.269.000						Rp -		Rp970.217.058		96,00%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dok	2.643.424.400	5 Dok	Rp1.443.542.966	1 Dok	Rp2.404.890.000						Rp -		Rp1.443.542.966		55%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Pembiinan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiinaan dan Advokasi Pengadaian Barang dan Jasa	32 Org	5.143.290.579	30 org	Rp2.066.700.070	25 Org	Rp1.249.159.000				15 Org	Rp387.660.000		Rp387.660.000		Rp2.454.360.070	48%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Kegiatan Pemantauan kebijakan SDA	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	100%	2.121.010.000	100%	Rp832.500.000	100%	Rp226.134.000		Rp				Rp -		Rp832.500.000		39%		Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dok	1.689.160.000	2 dok	634.000.000	1 Dok	163.500.000						Rp -		Rp634.000.000		38,00%		Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dok	431.850.000	3 dok	198.500.000	1 dok	62.634.000						Rp -		Rp198.500.000		46,00%		Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah pegawai yang mengikuti koordinasi dan konsultasi bidang pertambangan & energi	2 Org	80.010.000	-	Rp -	-	Rp -						Rp -		Rp -		0,00%		Bagian Perekonomian dan SDA
Rata - rata capaian kinerja (5)																					
Predikc kinerja																					
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																				
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
			JUMLAH PAGU PROGRAM 2025						72.590.820.131												
1		Program Peningkatn Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Program Peningkatn urusan Pemerintah Daerah		31.741.612.046		17.383.869.400		10.793.096.416		3.034.073.646		982.812.040		4.016.985.086		13.004.809.163		40,97%		DINAS PUPR
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelaksaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Tersusunnya Dokumen Renstra 1 Dokumen, Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2 Dok, Tersusunnya Dokumen LKIP 1 Laporan	4 Dok	292.966.300	4 Dok	70.000.000	4 Dok	47.966.300	4 Dok	1.517.036.823	4 Dok	0	4 Dok	1.517.036.823	4 Dok	117.966.300	4 Dok	40,27%		DINAS PUPR
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	3 Dok	12.817.900	3 Dok		3 Dok	12.817.900	3 Dok	0	3 Dok	0	3 Dok	12.817.900	3 Dok	12.817.900	3 Dok	100,00%		
		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja OPD	tersusunnya LKIP	1	140.000.000	1		1		1		1		1		1		1			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	140.148.400	1 Dok	70.000.000	1 Dok	35.148.400	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	35.148.400	1 Dok	105.148.400	1 Dok	75,03%		

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Org/Bln 1Dok	23.187.581.046	55 Org/Bln 1Dok	10.142.392.000	55 Org/Bln 1Dok	8.092.923.616	55 Org/Bln 1Dok	1.517.036.823	55 Org/Bln 1Dok	982.812.040	55 Org/Bln 1Dok	2.499.848.863	55 Org/Bln 1Dok	12.886.842.863	55 Org/Bln 1Dok	55,58%	DINAS PUPR
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Org/Bln	13.704.539.046	55 Org/Bln	5.962.000.000	55 Org/Bln	4.880.469.616	55 Org/Bln	1.517.036.823	55 Org/Bln	982.812.040	55 Org/Bln	2.499.848.863	55 Org/Bln	8.461.848.863	55 Org/Bln	61,74%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	9.483.042.000	1 Dok	4.180.392.000	1 Dok	3.212.454.000	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	4.424.994.000	1 Dok	46,66%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas	1 Paket	50.000.000	1 Paket	955.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0,00%	DINAS PUPR
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Tehnis ke-Plan	O/K	1.400.000.000	O/K	700.000.000	O/K	0	O/K	0	O/K	0	O/K	0	O/K	0	O/K	0,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	370.000.000	1 Paket	255.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 5 Laporan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7 Laporan Sewa Longboat 7 Laporan) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket 55 Lap	2.776.751.500	3 Paket 55 Lap	4.555.429.000	3 Paket 55 Lap	713.351.500	3 Paket 55 Lap	0	3 Paket 55 Lap	0	3 Paket 55 Lap	0	3 Paket 55 Lap	3 Paket 55 Lap	3 Paket 55 Lap	0,00%	DINAS PUPR
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.287.500	1 Paket	23.705.000	1 Paket	12.287.500	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00%	DINAS PUPR
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.360.000	1 Paket	239.379.000	1 Paket	14.360.000	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00%	DINAS PUPR
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	120.990.000	1 Paket	375.620.000	1 Paket	120.990.000	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00%	DINAS PUPR
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah SPDP	20 Orang	773.200.000	20 Orang		20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang		
		Musreimbang	Jumlah SPDP	15 Orang	666.200.000	15 Orang		15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang		
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah SPDP	10 Orang	624.000.000	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang		
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Lap	565.714.000	55 Lap	3.916.725.000	55 Lap	565.714.000	55 Lap	0	55 Lap	0	55 Lap	0	55 Lap	55 Lap	55 Lap	0,00%	DINAS PUPR
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (ATK, Makan Minum dan Kebersuhan) Jumlah laporan Jasa Penyediaan Surat Menyurat	12 Lap 12 Lap 12 Lap	1.885.665.000	12 Lap 12 Lap 12 Lap	905.193.400	12 Lap 12 Lap 12 Lap	1.339.105.000	12 Lap 12 Lap 12 Lap	0	12 Lap 12 Lap 12 Lap	0	12 Lap 12 Lap 12 Lap	0	12 Lap 12 Lap 12 Lap	12 Lap 12 Lap 12 Lap	12 Lap 12 Lap 12 Lap	0,00%	DINAS PUPR
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12.000.000	12 Lap	12.750.000	12 Lap	12.000.000	12 Lap	0	12 Lap	0	12 Lap	0	12 Lap	12 Lap	12 Lap	0,00%	DINAS PUPR
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	768.800.000	12 Lap	308.660.000	12 Lap	768.800.000	12 Lap	0	12 Lap	0	12 Lap	0	12 Lap	12 Lap	12 Lap	0,00%	DINAS PUPR
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	558.305.000	12 Lap	583.783.400	12 Lap	558.305.000	12 Lap	0	12 Lap	0	12 Lap	0	12 Lap	12 Lap	12 Lap	0,00%	DINAS PUPR
		Langganan listrik		12	208.000.000	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		DINAS PUPR
		Langganan koran/majalah		60	34.560.000	60		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		DINAS PUPR
		Langganan iklan		15	210.000.000	15		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		DINAS PUPR
		Langganan Internet		12	14.000.000	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		DINAS PUPR
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya, terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Unit	3.548.650.000	10 Unit	955.855.000	10 Unit	496.550.000	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0,00%	DINAS PUPR
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	496.550.000	10 Unit	955.855.000	10 Unit	496.550.000	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	0	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0,00%	DINAS PUPR
		Belanja Perpanjangan Pajak STNK		19 Unit	69.600.000	19 Unit		19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit		DINAS PUPR
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		60000	232.000.000	60000		60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000		DINAS PUPR
		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		9	685.500.000	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		DINAS PUPR
		penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat bermotor																		DINAS PUPR
		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Alat Berat)			420.000.000															DINAS PUPR
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Bahan dan Material dan jasa service peralatan kantor terpenuhi (Jasa)	2	745.000.000	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		DINAS PUPR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	terpeliharannya gedung kantor	1	300.000.000	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS PUPR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharannya sarana dan prasarana Gedung Kantor	1	300.000.000	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS PUPR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharannya sarana dan prasarana Gedung Kantor	1	300.000.000	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		DINAS PUPR
2		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Presentase Terpenuhinya Pengelolaan Sumber Daya Air	80%	306.000.000	80%	729.734.465	80%	306.000.000	80%	0	80%	0	80%	0	80%	80%	80%	0,00%	DINAS PUPR
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	1 Km	306.000.000	1 Km	729.734.465	1 Km	306.000.000	1 Km	0	1 Km	0	1 Km	0	1 Km	1 Km	1 Km	0,00%	DINAS PUPR

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Teling	Panjang Bangunan Perkuatan telbing yang Dibangun	1 Km	306.000.000	1 Km	729.734.465	1 Km	306.000.000	1 Km		0	1 Km	0	1 Km		1 Km	0,00%	DINAS PUPR	
3		Program Pengolahan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase SPAM Yang Sesuai Dengan Standar Kebutuhan Air Bersih	80%	16.573.304.000	80%	7.134.500.000	80%	2.434.968.000	80%		0	80%	0	80%		80%	0,00%	DINAS PUPR	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase SPAM Yang Sesuai Dengan Standar Kebutuhan Air Bersih		16.573.304.000		6.534.500.000		2.204.794.000			0		0				0,00%	DINAS PUPR	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	170.184.000	1 Lembaga		1 Lembaga	170.184.000	1 Lembaga		0	1 Lembaga	0	1 Lembaga		1 Lembaga	0,00%	DINAS PUPR	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	40 Liter/Det &c	14.368.520.000	40 Liter/Detik		40 Liter/Detik	14.368.520.000	40 Liter/Detik		0	40 Liter/Detik	0	40 Liter/Detik		40 Liter/Det &c	0,00%	DINAS PUPR	
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	10 Unit	60.000.000	10 Unit	600.000.000	10 Unit	60.000.000	10 Unit		0	10 Unit	0	10 Unit		10 Unit	0%	DINAS PUPR	
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300 SR	1.974.600.000	300 SR	5.934.500.000	300 SR	1.974.600.000	300 SR		0	300 SR	0	300 SR		300 SR	0,00%	DINAS PUPR	
4		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase Terbangunnya Sistem Drainase	50%	579.034.000	50%		50%	0	50%	0	0	50%	0	50%		50%	0%	DINAS PUPR	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terbangunnya Sistem Drainase	2500 M	579.034.000	2500 M		2500 M	0	2500 M	0	0	2500 M	0	2500 M		2500 M	0%	DINAS PUPR	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	2500 M	579.034.000	2500 M		2500 M	0	2500 M	0	0	2500 M	0	2500 M		2500 M	0,00%	DINAS PUPR	
5		Program Pengolahan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase Meningkatnya Sistem Pengolahan Air Limbah yang Memadai	80%	2.398.762.000	80%		80%	2.398.762.000	80%		0	80%	0	80%		80%	0%	DINAS PUPR	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Meningkatnya Sistem Pengolahan Air Limbah yang Memadai	10 RT	2.398.762.000	10 RT		10 RT	2.398.762.000	10 RT		0	10 RT	0	10 RT		10 RT	0%	DINAS PUPR	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai Standar	10 RT	2.398.762.000	10 RT		10 RT	2.398.762.000	10 RT		0	10 RT	0	10 RT		10 RT	0,00%	DINAS PUPR	
6		Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentasi Meningkatnya Bangunan Gedung		8.717.522.090		22.881.300.454		8.717.522.090			0		0				0%	DINAS PUPR	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentasi Meningkatnya Bangunan Gedung		4.397.761.045		11.591.707.727		4.397.761.045			0		0				0,00%	DINAS PUPR	
		Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dok	231.620.000	2 Dok	158.000.000	2 Dok	231.620.000	2 Dok		0	2 Dok	0	2 Dok		2 Dok	0,00%	DINAS PUPR	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dok	4.088.141.045	10 Dok	11.131.592.727	10 Dok	4.088.141.045	10 Dok		0	10 Dok	0	10 Dok		10 Dok	0%	DINAS PUPR	
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pemeliharaan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendaftar Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pemeliharaan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendaftar Bangunan Gedung melalui SIMBG	5 Dok	78.000.000	5 Dok	302.115.000	5 Dok	78.000.000	5 Dok		0	5 Dok	0	5 Dok		5 Dok	0%	DINAS PUPR	
7		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Prosentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya		2.794.680.329				2.794.680.329			0		0				0,00%	DINAS PUPR	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	5 Dok	2.794.680.329	5 Dok		5 Dok	2.794.680.329	5 Dok		0	5 Dok	0	5 Dok		5 Dok	0%	DINAS PUPR	
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dok	2.794.680.329	5 Dok		5 Dok	2.794.680.329	5 Dok		0	5 Dok	0	5 Dok		5 Dok	0%	DINAS PUPR	
8		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase Penataan Ruang		111.281.000				111.281.000			0		0				0%	DINAS PUPR	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Prosentase Perencanaan dan Tata Ruang dalam satu Tahun		111.281.000				111.281.000			0		0				0%	DINAS PUPR	
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0	111.281.000	0		0	111.281.000	0		0	0	0	0		0	0%	DINAS PUPR	
9		Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Peningkatan Jalan Kota Dalam Kondisi baik		44.093.017.412		340.713.265.564		45.087.710.296			0		0				0%	DINAS PUPR	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan		23.302.054.381		177.390.289.782		23.799.400.823			0		0				0%	DINAS PUPR	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	9 Dok	394.327.500	9 Dok	6.090.343.178	9 Dok	891.673.943	9 Dok		0	9 Dok	0	9 Dok		9 Dok	0%	DINAS PUPR	
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	16 KM	509.126.204	16 KM	508.23.175	16 KM	509.126.204	16 KM		0	16 KM	0	16 KM		16 KM	0%	DINAS PUPR	
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	7.028.260.005	10 KM	113.481.779.747	10 KM	7.028.260.004	10 KM		0	10 KM	0	10 KM		10 KM	0%	DINAS PUPR	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	3.473.907.330	1 KM	757.322.221	1 KM	3.473.907.330	1 KM		0	1 KM	0	1 KM		1 KM	0%	DINAS PUPR	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10.979 KM	6.659.544.092	10.979 KM	42.126.421.035	10.979 KM	6.659.544.092	10.979 KM		0	10.979 KM	0	10.979 KM		10.979 KM	0%	DINAS PUPR	
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Km	2.511.757.900	1 Km	8.282.540.426	1 Km	2.511.757.900	1 Km		0	1 Km	0	1 Km		1 Km	0,00%	DINAS PUPR	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	253,178 KM	214.040.000	253,178 KM	533.746.000	253,178 KM	214.040.000	253,178 KM		0	253,178 KM	0	253,178 KM		253,178 KM	0%	DINAS PUPR	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin	87,345 KM	2.511.091.350	87,345 KM	6.067.314.000	87,345 KM	2.511.091.350	87,345 KM		0	87,345 KM	0	87,345 KM		87,345 KM	0%	DINAS PUPR	
																		0%	DINAS PUPR	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
								Rata- Rata Capaian Kinerja (5)												DINAS PUPR
								Predikt Kinerja												DINAS PUPR
		FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																		DINAS PUPR
		FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																		DINAS PUPR
			JUMLAH PAGU PROGRAM 2025						4.860.654.231											
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah, Nilai SAKIP, Presentase terhadap laporan keuangan OPD, Profesionalisme aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP), Kualitas Renja, RKA dan DPA Dinas DUKCAPIL	21.248.027.303		6.934.299.066		4.304.514.681						2.132.553.864	0%	9.066.852.930		43%	Dinas DUKCAPIL	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	75.000.000	3	5.550.000	3 dok 1 lap	29.920.000	-	1 dok	11.752.000	1 dok	11.752.000	0%	17.302.000		29%	Dinas DUKCAPIL	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 paket	50.000.000			3 dok	14.970.000	0%	0	0%	0	0%	0%	-		0%	Dinas DUKCAPIL	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 paket	25.000.000	2 Lap	5.550.000	2 lap	14.950.000	0%	0	1 dok	11.752.000	1 dok	11.752.000	0%	17.302.000		69%	Dinas DUKCAPIL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran serta Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		17.834.575.944		5.843.518.794	3.582.195.481				1.930.273.731		1.930.273.731		7.773.792.525		44%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	16.064.575.944	14 bulan	5.428.295.794	14 bulan	3.242.911.481			7 bln	1.835.555.731	7 bln	1.835.555.731	0%	7.263.851.525		45%	Dinas DUKCAPIL
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 bln	331.614.000			6 bln	94.718.000	6 bln	94.718.000	0%	94.718.000		#DIV/0!	Dinas DUKCAPIL
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bln	1.770.000.000		415.223.000								0%	415.223.000		23%	Dinas DUKCAPIL	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2 Dok	7.670.000						0%			#DIV/0!	Dinas DUKCAPIL	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		102.369.000				106.400.000						0%			0%		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	102.369.000			2 paket	106.400.000			0			0%			0%	Dinas DUKCAPIL	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase jumlah administrasi umum kantor yang terlayani		2.065.018.359		430.140.300	341.253.800							0%	430.140.300		21%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	45.623.819	0%		1 paket	25.000.000			100%	24.710.500		24.710.500	0%	24.710.500		54%	Dinas DUKCAPIL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	374.200.000	3 paket	49.376.500	3 paket	92.492.800			34%	31.824.000	34%	31.824.000	0%	81.200.500		22%	Dinas DUKCAPIL
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 unit	152.222.540	3 unit	54.821.200	6 paket	31.675.000						0%	54.821.200		36%	Dinas DUKCAPIL	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	77471	137.452.000		123.695.400	66001	92.400.000			22001	30.800.000	22001	30.800.000	0%	154.495.400		112%	Dinas DUKCAPIL
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 dok	9.300.000	5 paket	6.550.000	7 paket	9.900.000						0%	6.550.000		70%	Dinas DUKCAPIL	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 kali	1.346.220.000	12 kali	195.697.200	10 kali	89.786.000			2 kali	38.495.600	2 kali	38.495.600	0%	234.192.800		17%	Dinas DUKCAPIL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan program penunjang urusan pemerintah daerah		368.700.000		172.651.325	191.765.400				9.344.850		9.344.850	0%	181.996.175		49%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97 ltr	8.700.000			47 ltr	4.935.000						0%			0%	Dinas DUKCAPIL	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bln	360.000.000	12 bln	69.136.000	12 bln	80.400.000			9.344.850		9.344.850	12 bln	78.480.850		22%	Dinas DUKCAPIL	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kepuasan Terhadap Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan			50%	103.515.325	100%	106.430.400						0%	103.515.325		#DIV/0!	Dinas DUKCAPIL	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan		802.364.000		482.438.647	52.980.000							0%	482.438.647		60%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	64.800.000	5 unit	4.441.800	2 unit	52.980.000			2 unit	46.008.333		46.008.333	0%	50.450.133		78%	Dinas DUKCAPIL
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 paket	23.000.000	5 unit	41.496.847								0%	41.496.847		180%	Dinas DUKCAPIL	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II					13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%			
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	714.564.000	12 unit	436.500.000									0%	436.500.000		61%	Dinas DUKCAPIL
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan		3.997.786.000		917.682.360		241.372.950							0%	917.682.360		23%	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		3.997.786.000		590.682.360		241.372.950							0%	590.682.360		19%	
		Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					248.640.000									0%	248.640.000	#DIV/0!		Dinas DUKCAPIL
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen KIA dan dokumen kependudukan	7 distrik	2.747.786.000	7 distrik	82.805.000	7 distrik	77.850.000					0%		0%	82.805.000		3%	Dinas DUKCAPIL
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	7 distrik	1.250.000.000	7 distrik	259.237.360	7 distrik	163.522.950							0%	259.237.360		21%	Dinas DUKCAPIL
		Pemetaan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Dokumen Kependudukan yang optimal bagi masyarakat di 7 Distrik				327.000.000										327.000.000	#DIV/0!		
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia				327.000.000									0%	327.000.000	#DIV/0!		Dinas DUKCAPIL
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil		2.247.786.000		416.988.560		176.441.600							0%	416.988.560		19%	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melayarkan	7 distrik	2.247.786.000	7 Distrik 5 Dak	416.988.560	7 Distrik 5 Dak	176.441.600							0%	416.988.560		19%	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	7 distrik	1.000.000.000	7 distrik	106.878.760	7 distrik	62.640.000							0%	106.878.760		11%	Dinas DUKCAPIL
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen dan Pelayanan Peristiwa Penting	Persentase Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	7 distrik	1.247.786.000	7 distrik		7 distrik								0%			0%	Dinas DUKCAPIL
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia			5 Dak	310.109.800	5 Dak	113.801.600							0%	310.109.800	#DIV/0!		Dinas DUKCAPIL
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			3.251.271.000		401.513.022									0%	401.513.022		12%	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan				401.513.022									0%	401.513.022	#DIV/0!		
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			1 dak	401.513.022									0%	401.513.022	#DIV/0!		Dinas DUKCAPIL
		Pemetaan Administrasi Kependudukan	Persentase Pemetaan Administrasi Kependudukan		1.633.793.000											0%			0%	
		Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan/ Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP - EI, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah ribbon cetak KIA dan KTP-EI Sampul Dokumen Kependudukan, Dompot KIA dan KTP-EI	1 paket	1.633.793.000	1 paket										0%			0%	Dinas DUKCAPIL
		Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		7 Distrik	1.617.478.000											0%			0%	
		Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	7 Distrik	258.739.000	7 Distrik										0%			0%	Dinas DUKCAPIL
		Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	7 Distrik	1.358.739.000	7 Distrik										0%			0%	Dinas DUKCAPIL
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Cakupan Data Kependudukan yang Akurat		1.440.000.000		78.000.000		138.325.000								78.000.000		5%	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	2 dak	1.440.000.000	1 dak	78.000.000	4 dak	138.325.000							1 dak	78.000.000		5%	
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 dak	630.300.000											0%			0%	Dinas DUKCAPIL
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 dak	619.700.000	1 dak	78.000.000	4 dak	138.325.000							1 dak	78.000.000		13%	Dinas DUKCAPIL

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan program penunjang urusan pemerintah daerah		30.000.000	B	2.932.174.645	0%	3.193.786.198					1.487.662.149		4.419.836.794	147.327.893			BPBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyelesaian laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah			70,76	13.685.000	100%	86.011.790					2.080.000		15.765.000	#DIV/0!			BPBD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun		112.582.800	0	-	3 Lap	69.656.790					1	1.240.000	1.240.000	0,01101416			BPBD
		Koord. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Koord. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		84.279.785	2	3.245.000	0	-				0	-	3.245.000	0,03850270			BPBD	
		Koord. dan penyusunan lap capaian kinerja dan Itisair realisasi kinerja SKPD	Jumlah lap. Capaian kinerja yang disusun (LKIP)		150.000.000	1	4.695.000	1	2.940.000				1	840.000	5.535.000	0,0369			BPBD	
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		904.550.000	3	6.680.000	3 Lap	15.067.000					-	6.680.000	0,00738488			BPBD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase jumlah gaji, tunjangan ASN dan honorarium pejabat pengelola keuangan yang dibayarkan			88,35	2.094.163.957	100%	2.675.846.908					1.313.615.073	3.407.779.030	#DIV/0!			BPBD	
		Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		11.848.157.132	17	1.693.533.957	17	2.157.818.980					1.223.115.073	2.916.649.030	0,24616900			BPBD	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan/dok penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		7.057.308.000	7	400.630.000	2	518.028.000					90.500.000	491.130.000	0,06959169			BPBD	
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah				0	-	0	-						-	#DIV/0!			BPBD	
		Penyediaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan			0	-	0	-					0	-	#DIV/0!			BPBD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase jumlah kebutuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun			98,6	524.230.684	100%	210.610.000					80.874.000	605.104.684	#DIV/0!			BPBD	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan		42.653.000	1	-	1	1.637.500					800.000	800.000	0,01875600			BPBD	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		758.700.000	3	142.593.500	3	109.610.000					43.800.000	186.393.500	0,24567483			BPBD	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang yang dicetak dan pengadaan yang disediakan		28.188.000	1	5.000.000	1	3.750.000					-	5.000.000	0,17780444			BPBD	
		Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		1.870.370.000	20	376.637.184	10	95.665.000					36.274.000	412.911.184	0,22076443			BPBD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah				100	14.194.000							0	-	14.194.000	#DIV/0!			BPBD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan mesin yang diadakan			4	14.184.000	0	-					0	-	14.184.000	#DIV/0!			BPBD
		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			95,96	197.943.373	100%	141.330.000					63.528.950	261.472.323	#DIV/0!			BPBD	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		268.699.500	1	1.118.000	1	576.000					286.000	1.404.000	0,08522516			BPBD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet		548.000.000	12	106.725.750	12	80.500.000					32.758.950	139.484.700	0,25453412			BPBD	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		57.290.000	4	13.432.350	5	13.680.000					2.800.000	16.232.350	0,28333653			BPBD	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor		635.133.100	3	73.409.149	3	55.135.000					27.684.000	101.093.149	0,15916844			BPBD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dalam 1 tahun			100	87.957.631	100%	79.987.500					27.564.126	115.521.757	#DIV/0!			BPBD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya			11	82.203.631	11	73.190.000					27.564.126	109.767.757	#DIV/0!			BPBD	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihar/direhabilitasi			4	5.754.000	4	6.797.500					-	5.754.000	#DIV/0!			BPBD	
	Terwujudnya Sistem Penanganan Redaruratan bencana secara efektif dan efisien serta optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi resptime 24 jam			100	427.959.529	100%	311.789.676					138.244.680	566.204.209	#DIV/0!			BPBD	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Prosentase jumlah penduduk/warga negara yang memperoleh layanan informasi bencana			100	144.290.000	10,90%	57.595.000					0	-	144.290.000	#DIV/0!			BPBD
		Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana	Prosentase Penyelesaian dokumen KRB hingga diakhiri			0	-	-	-					0	-	-	#DIV/0!			BPBD
		Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kab/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun			400	144.290.000	100	57.595.000					0	-	144.290.000	#DIV/0!			BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			76	271.717.529	39,88%	91.463.676					58.523.680	330.241.209	#DIV/0!			BPBD	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah Personile TRC yang dikembangkan Kapasitas dan Tehnis dan Menejerialnya			50	81.728.580	0	-					0	-	81.728.580	#DIV/0!			BPBD

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I		II				13 = 6 + 12							
							-8	-9	-12	14 = 13/5 x 100%										
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		0		-	4	32.939.996									#DIV/0!		BPBD
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (perjenis ancaman bencana) Kab/kota		357	76.700.000		400	58.523.680				58.523.680			135.223.680		#DIV/0!		BPBD
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen RPB hingga disahkan		0	113.288.949		0	-				0		-	113.288.949		#DIV/0!		BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase jumlah penduduk dan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		25,85	11.952.000		100%	18.150.000				0	5.940.000		17.892.000		#DIV/0!		BPBD
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana		0			25	18.150.000				5.940.000			5.940.000		#DIV/0!		BPBD
		Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah logistik yang tersalurkan kepada korban bencana		9	11.952.000		0	-				0		-	11.952.000		#DIV/0!		BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulanga Bencana	Prosentase jumlah penduduk/warga negara di daerah rawan bencana yang teridentifikasi dan jumlah aparatur yang ikut dilkat peningkatan SDM Kebencanaan		0	-		36,36 %	144.581.000				73.781.000			73.781.000		#DIV/0!		BPBD
		Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kopetensi manajerial kebencanaan		0			30	82.308.000				30	73.781.000		73.781.000		#DIV/0!		BPBD
		Facilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana		0			1976	62.275.000				0		-	-		#DIV/0!		BPBD
Rata - rata capaian kinerja (%)																				
Predikat: kinerja																				
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
	Meningkatnya Konsistensi dokumen Perencanaan		Persentase konsistensi Capaian Target Program dalam dokumen perencanaan terdiri dari: Persentase Program RPJMD kedalam RKPD Persentase Program RKPD kedalam APBD	100%				98%	18.508.741.162					5.165.201.721						BAPPEDA LITBANG
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase konsistensi program perangkat daerah mitra perencanaan pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia; Perekonomian dan SDA; Infrastruktur dan Kewilayahan)	100%	29.590.540.000		13.915.930.575	98%	4.042.450.600	0%	0	0%	593.696.700	0%	593.696.700	14.509.627.275		49,03%		BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah rumusan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	39 Dokumen	9.222.215.000	12 Dokumen	4.052.124.666	4 Dokumen	2.064.581.600	0	0	0	92.640.700	0	92.640.700	4.144.765.366		44,94%		BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	2.645.810.000	4 Dokumen	944.424.066							4 Dokumen	944.424.066	33,33%	35,70%			BAPPEDA LITBANG
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	330.630.000	2 Laporan	888.717.600							2 Laporan	888.717.600	100,00%	268,80%			BAPPEDA LITBANG
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			2 Laporan	353.668.000							2 Laporan	353.668.000			#DIV/0!		BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			0	0	1 Laporan	87.393.000	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	500.000.000	0	0		0					0 Dokumen	0	0,00%	0,00%			BAPPEDA LITBANG
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	350.000.000	0	0	1 Laporan	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20 Laporan	5.395.775.000	4 Laporan	1.865.315.000	2 Laporan	1.077.188.600	0	0	0	92.640.700	0	92.640.700	1.957.955.700	20,00%	36,29%		BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rumusan dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	32 Dokumen/Kegiatan	11.142.550.000	11 Dokumen	2.961.349.974	1 Dokumen/Kegiatan	23.560.000	0%	0	0%	0	0	0	11 Dokumen	2.961.349.974		26,58%	BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	3.100.000.000	2 Dokumen	475.434.700							2 Dokumen	475.434.700	16,67%	15,34%			BAPPEDA LITBANG
	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	873.775.000	2 Laporan	699.082.000							2 Laporan	699.082.000	100,00%	80,01%			BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	19 Laporan	7.168.775.000	6 Laporan	1.478.176.100	1 Laporan	23.560.000	0	0	0	0	0	0	6 Laporan	1.478.176.100	31,58%	20,62%	BAPPEDA LITBANG
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Laporan	308.657.174							1 Laporan	308.657.174			#DIV/0!		BAPPEDA LITBANG

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									I		II											
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Jumlah pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	9.225.775.000	#ERROR!	6.902.455.935	100%	1.954.309.000	0%	0	0%	501.056.000	0%	501.056.000		7.403.511.935	0,00%	80,25%	BAPPEDA LITBANG		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	600.000.000	0%	0							0	0	0,00%	0,00%			BAPPEDA LITBANG		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	800.000.000	6 Laporan	1.098.474.277	2 Laporan	369.754.000	0	0	0	0	2 Laporan	1.098.474.277	28,57%	137,31%			BAPPEDA LITBANG		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	3.525.775.000	8 Laporan	2.891.944.809	2 Dokumen	1.200.000.000	0%	0	0%	480.000.000	0	480.000.000	1 Laporan	3.371.944.809	16,67%	95,64%	BAPPEDA LITBANG		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			3 Laporan	944.479.900								944.479.900		#DIV/0			BAPPEDA LITBANG		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 Laporan	3.750.000.000	8 Laporan	1.318.306.949	2 Laporan	283.018.000	0	0	0	21.056.000	0	21.056.000	3 Laporan	1.339.362.949	30,00%	35,72%	BAPPEDA LITBANG		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	550.000.000	2 Laporan	649.250.000	1 Laporan	100.737.000	0	0	0	0	0	1 Laporan	649.250.000	25,00%	110,05%			BAPPEDA LITBANG	
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	100%	25.020.491.500		17.186.319.410	90%	4.516.431.800	0%	0	0%	1.013.317.400	0%	1.013.317.400		18.199.636.810		72,74%		BAPPEDA LITBANG	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	29 Dokumen	13.457.746.500	17 Dokumen	9.454.399.109	11 Dokumen	3.153.608.100	0	0	87	813.862.400	87	813.862.400		10.268.261.509		76,30%		BAPPEDA LITBANG	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kelembutan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			0	0	1 Dokumen	70.000.000	0	0	0	0	0	0		#DIV/0			BAPPEDA LITBANG		
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dokumen	1.229.250.000	0	0								0	0	0,00%	0,00%			BAPPEDA LITBANG	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			0	0	1 Laporan	121.686.000	0	0	1	117.736.000	1	117.736.000		117.736.000		#DIV/0		BAPPEDA LITBANG	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	15 Berita Acara	525.000.000	1 Berita Acara	127.762.000	1 Berita Acara	324.53.200	0%	0	0%	0	0	1 Berita Acara	127.762.000	6,67%	24,34%			BAPPEDA LITBANG	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 Berita Acara	6.429.545.500	4 Berita Acara	3.438.918.804	1 Berita Acara	355.003.000	0	0	1	181.279.000	1	181.279.000	5 Berita Acara	3.620.197.804	83,33%	56,31%			BAPPEDA LITBANG
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan			0	0	86 Usulan	207.950.000	0	0	86	155.790.000	86	155.790.000		155.790.000		#DIV/0		BAPPEDA LITBANG	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	8 Dokumen	5.273.951.000	12 Dokumen	5.887.718.305	6 Dokumen	2.366.515.900	0	0	0	359.057.400	0	359.057.400	12 Dokumen	6.246.775.705	150,00%	118,45%			BAPPEDA LITBANG
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	1.467.100.000	100%	1.849.118.211	100%	33.039.500	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1.849.118.211		126,04%		BAPPEDA LITBANG	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	1.467.100.000	4 Dokumen	1.849.118.211	1 Dokumen	330.39.500	0	0	0	0	0	4 Dokumen	1.849.118.211	66,67%	126,04%			BAPPEDA LITBANG	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah pelaksanaan Kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	10.095.645.000	95%	5.882.802.090	100%	1.208.291.400	0%	0	0%	199.455.000	0%	199.455.000		6.082.257.090		60,25%		BAPPEDA LITBANG	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	31 Dokumen/ Laporan	10.095.645.000	13 Laporan	5.006.834.590	1 Laporan	575.388.800	0	0	0	0	0	3 Laporan	5.006.834.590	9,68%	49,59%			BAPPEDA LITBANG	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			2 Laporan	875.967.500	4 Laporan	632.902.600	0	0	0	199.455.000	0		875.967.500		#DIV/0			BAPPEDA LITBANG	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan daerah	100%		100%		100%								0		#DIV/0			BAPPEDA LITBANG	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100%	10.470.000.000	86,67%	4.469.689.035	100%	1.604.681.600	0%	32.000.000	40,0%	653.563.260	40,0%	685.563.260		5.155.252.295		49,24%		BAPPEDA LITBANG	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rumusan Dokumen Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	22 Dokumen	3.050.000.000	7 Dokumen	1.454.362.735								7 Dokumen	1.454.362.735	31,82%	47,68%			BAPPEDA LITBANG	
		Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan	850.000.000	2 Laporan	342.434.335								2 Laporan	342.434.335	66,67%	40,29%			BAPPEDA LITBANG	
		Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	12 Laporan	2.000.000.000	4 Laporan	1.001.178.400								4 Laporan	1.001.178.400	33,33%	50,06%			BAPPEDA LITBANG	
		Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	79.850.000								1 Laporan	79.850.000	100,00%	39,93%			BAPPEDA LITBANG	
		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	6 Rekomendasi	450.000.000	0 Rekomendasi	30.900.000								0 Rekomendasi	30.900.000	0,00%	6,87%			BAPPEDA LITBANG	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPd

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Penelitian dan Pengembangan Bidang sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen Kajian Pengembangan dan Analisis Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	800.000.000	0	0									0	0	0,00%	0,00%	BAPPEDA LITBANG
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	800.000.000	0	0									0	0	0,00%	0,00%	BAPPEDA LITBANG
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Dokumen	3.400.000.000	2 Dokumen	399.655.000									2 Dokumen	399.655.000	50,00%	11,75%	BAPPEDA LITBANG
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	350.000.000	0	0									0	0	0,00%	0,00%	BAPPEDA LITBANG
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	350.000.000	0	0									0	0	0,00%	0,00%	BAPPEDA LITBANG
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	6 Dokumen	1.950.000.000	2 Dokumen	399.655.000									2 Dokumen	399.655.000	33,33%	20,50%	BAPPEDA LITBANG
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	750.000.000	0	0									0	0	0,00%	0,00%	BAPPEDA LITBANG
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen/laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	12 Dokumen/laporan	3.220.000.000	6 Dokumen/ Laporan	2.615.671.300	5 Dokumen/Laporan	1.604.681.600	0%	32.000.000	200%	653.563.260	2	685.563.260		3.301.234.560		102,52%	BAPPEDA LITBANG
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	940.000.000	2 Dokumen	432.120.000	2 Dokumen	500.000.000	0	0	2	500.000.000	2	500.000.000		932.120.000		99,16%	BAPPEDA LITBANG
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1.380.000.000	0	0									0	0	0,00%	0,00%	BAPPEDA LITBANG
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	200.000.000	0	0									0	0	0,00%	0,00%	BAPPEDA LITBANG
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 Laporan	500.000.000	4 Laporan	2.183.551.300	3 Laporan	1.104.681.600	0	32.000.000	0	153.563.260	0	185.563.260	4 Laporan	2.369.114.560	80,00%	473,82%	BAPPEDA LITBANG
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	200.000.000	0	0									0	0	0,00%	0,00%	BAPPEDA LITBANG
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Bappeda Litbang	A		B		A												BAPPEDA LITBANG
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	41.947.829.510	100%	26.693.161.602	100%	8.345.177.962	761.010.675	2.111.613.686	2.872.624.361	6.080.164.758	14,49%	BAPPEDA LITBANG					
			Nilai Sakip OPD	85%		68,85%		82%												
			Persentase terhadap Laporan Keuangan OPD	100%		100%		100%												
			Profesionalisme Aparatur (presensi & pelaksanaan SKP)	100%				100%												
			Kualitas Renja, RKA dan DPA Bappeda Litbang	100%				100%												
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen	796.027.700	12 Dokumen	236.895.100	4 Dokumen	140.000.000	0	0	1	44.386.400	1	44.386.400	13 Dokumen w/ Laporan	281.281.500	34,21%	35,34%	BAPPEDA LITBANG
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	96.027.700	0	0	1 Dokumen	740.491.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	BAPPEDA LITBANG
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	175.000.000	3 Dokumen	47.645.300	1 Dokumen	286.790.000	0	0	0	0	0	0	3 Dokumen	47.645.300	30,00%	27,23%	BAPPEDA LITBANG
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	175.000.000	3 Dokumen	48.501.300	1 Dokumen	26.769.500	0	0	0	0	0	0	3 Dokumen	48.501.300	30,00%	27,72%	BAPPEDA LITBANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	175.000.000	4 Laporan	126.263.000	1 Laporan	295.390.000	0	0	1	29.433.000	1	29.433.000	5 Laporan	155.696.000	40,00%	88,97%	BAPPEDA LITBANG
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	175.000.000	2 Laporan	14.485.500	1 Laporan	28.169.000	0	0	0	14.953.400	0	14.953.400	2 Laporan	29.438.900	33,33%	16,82%	BAPPEDA LITBANG
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	24.582.484.935	100%	15.615.597.924	100%	5.292.896.653	6,25%	761.010.675	6,25%	1.272.839.360	#REF!	2.033.850.035		17.649.447.959		71,80%	BAPPEDA LITBANG
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	19.525.574.935	41	12.729.574.662	41 Orang/bulan	4.404.296.653	41	761.010.675	41	1.266.770.360	41	2.027.781.035	41 Orang	14.757.355.697	66,67%	75,58%	BAPPEDA LITBANG
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4.906.910.000	4 Dokumen	2.875.758.262	2 Dokumen	858.600.000	0	0	0	6.069.000	0	6.069.000	4 Dokumen	2.881.827.262	400,00%	58,73%	BAPPEDA LITBANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	75.000.000	3 Laporan	4.470.000	1 Laporan	15.000.000	0	0	0	0	0	0	3 Laporan	4.470.000	300,00%	5,96%	BAPPEDA LITBANG
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	75.000.000	3 Laporan	5.795.000	1 Dokumen	15.000.000	0	0	0	0	0	0	3 Laporan	5.795.000	300,00%	7,73%	BAPPEDA LITBANG

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah perlengkapan kepegawain perangkat daerah	100%	1.020.000.000	72,72%	125.651.892	100%	57.800.000	0%	0	0	0	0	0	0	125.651.892	123,2%	BAPPEDA LITBANG	
		Pengadaan Pakain dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakain Dinas beserta atribut kelengkapan	50 Stel	80.000.000	2 Paket	81.676.892	2 Paket	57.000.000	0	0	0	0	0	0	2 Paket	81.676.892	102,10%	BAPPEDA LITBANG	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	940.000.000	5 Orang	43.975.000									5 Orang	43.975.000	4,68%	BAPPEDA LITBANG	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100%	7.593.348.875	89,93%	6.025.598.387	100%	1.308.039.424	0%	0	0%	366.368.941	0%	366.368.941	6.391.967.328		84,18%	BAPPEDA LITBANG	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.125.000	4 Paket	11.185.324	1 Paket	2.801.324	0%	0	0	0	0	0	4 Paket	11.185.324	200,00%	79,19%	BAPPEDA LITBANG
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	1.698.414.500	10 Paket	1.986.767.027	2 Paket	100.975.000	0	0	0	0	0	0	10 Paket	1.986.767.027	23,26%	116,98%	BAPPEDA LITBANG
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6.675.000	4 Paket	8.211.000	1 Paket	1.334.000	0	0	0	0	0	0	4 Paket	8.211.000	66,67%	123,01%	BAPPEDA LITBANG
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	266.545.600	0	0	128.540.000	0	128.540.000	0 Paket	128.540.000	0,00%	#DIV/0!	BAPPEDA LITBANG	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	2.381.134.375	8 Paket	761.440.931	3 Paket	138.411.500	0	0	62.400.000	0	62.400.000	8 Paket	823.840.931	266,67%	346,00%	BAPPEDA LITBANG	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3.493.000.000	2 Laporan	3.257.994.105	2 Laporan	797.972.000	0	0	175.428.941	0	175.428.941	2 Laporan	3.433.423.046	66,67%	98,29%	BAPPEDA LITBANG	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	3.378.260.000	100%	1.237.157.767	100%	473.605.000	0%	0	0%	173.557.800	0%	173.557.800	1.410.175.567		41,76%	BAPPEDA LITBANG	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Paket	125.000.000	6 Laporan	69.654.500	1 Laporan	15.012.000	0	0	7.500.000	0%	7.500.000	6 Laporan	77.154.500	300,00%	61,72%	BAPPEDA LITBANG	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Paket	2.633.360.000	7 Laporan	640.138.467	2 Laporan	206.380.000	0	0	54.590.800	0%	54.590.800	7 Laporan	694.729.267	175,00%	26,38%	BAPPEDA LITBANG	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Paket	619.900.000	9 Laporan	527.364.800	3 Laporan	252.213.000	0	0	111.467.000	0%	111.467.000	9 Laporan	638.831.800	450,00%	103,05%	BAPPEDA LITBANG	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.577.708.000	#ERROR!	3.452.260.532	100%	571.885.200	0%	0	0%	254.461.185	0%	254.461.185	3.706.721.717		80,97%	BAPPEDA LITBANG	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	2.977.950.000	37 Unit	2.708.040.070	19 Unit	367.380.000	0	0	137.574.065	0%	137.574.065		2.845.614.135		95,56%	BAPPEDA LITBANG	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	999.908.000	1 Unit	542.896.600	1 Unit	150.045.200	0	0	90.027.120	0%	90.027.120	1 Unit	632.923.720	66,67%	63,30%	BAPPEDA LITBANG	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	599.850.000	59 Unit	201.323.962	62 Unit	54.460.000	0	0	26.860.000	0%	26.860.000		228.183.862		380,4%	BAPPEDA LITBANG	
		Penataan Organisasi		0	0	2 Dokumen	803.671.000	0	0	0	0	0	0	0	0	803.671.000		#DIV/0!	BAPPEDA LITBANG	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0	0	2 Dokumen	803.671.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	803.671.000		#DIV/0!	BAPPEDA LITBANG

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Listrik/ Penerangan	147	59.373.600		243.672.000		243.832.400		13.500.000			0%	13.500.000		257.172.000		433%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	6.848.434.153		1.640.160.000		190.094.000		-			0%	-		1.640.160.000		24%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang Tersedia	49325 Liter	430.048.000		534.225.000		886.018.082		-			0%	-		534.225.000		124%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	216	121.550.000		206.000.000		243.900.000		-			0%	-		206.000.000		169%	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	14 Kali	3.231.360.000		3.939.250.000		6.773.184.000		614.650.275			0%	614.650.275		4.553.900.275		141%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.823.397.300		5.547.549.400		5.930.987.000		637.160.393				637.160.393		6.184.709.793		162%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda yang di pakai dan surat yang di kirim	683 Lembar	7.991.100		19.500.000		19.500.000		3.250.000			0%	3.250.000		22.750.000		285%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	20 Rekening	619.054.000		1.446.150.000		1.021.000.000		115.206.393			0%	115.206.393		1.561.356.393		252%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembelian ATK, Penyediaan Makan Minum serta Peralatan Umum Kantor yang Tersedia	43 jenis	3.196.352.200		4.081.899.400		4.890.487.000		518.704.000			0%	518.704.000		4.600.603.400		144%	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			823.041.000		1.774.872.000		1.780.925.000		172.050.000						1.774.872.000		216%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan serta Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	16	458.410.000		557.875.000		606.975.000		-			0%	-		557.875.000		122%	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8 Unit	135.100.000		626.220.000		625.220.000		172.050.000			0%			626.220.000		464%	Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Memeliharaa n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	2 Unit	229.531.000		590.777.000		548.730.000		-			0%	-		590.777.000		257%	Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			2.394.668.800		3.120.180.156		1.324.551.256		119.083.000		105.000.000		224.083.000		3.120.180.156		130%	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat penatausahaan Keuangan, Tenaga Kontrak dan Staf Ahli DPRD	64 Orang	2.022.626.000		2.862.580.000		482.000.000		70.000.000		105.000.000	0%	175000000		2.862.580.000		142%	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang Didapat Pimpinan dan Anggota DPRD	84	114.442.800		-		585.000.000		-			0%	-		-		0%	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Check Up	20 Orang	257.600.000		257.600.156		257.551.256		49.083.000			0%	49.083.000		257.600.156		100%	Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD			1.319.054.200		1.317.254.200		2.591.653.000		-		-		-		1.317.254.200		100%	Sekretariat DPRD
		Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Safari Ramadan dan Safari Natal	4 Lap	722.310.000		722.310.000		1.570.360.000		-			0%	-		722.310.000		100%	Sekretariat DPRD
		Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Konsultasi dan Koordinasi DPRD	2 Lap	596.744.200		594.944.200		1.021.293.000		-			0%	-		594.944.200		100%	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			967.226.215.481		10.615.893.600		13.929.484.000		2.141.616.673		100.000.000				10.615.893.600		1%	Sekretariat DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1.176.858.000		1.826.384.600		1.651.290.000		123.426.673		100.000.000				1.826.384.600		155%	Sekretariat DPRD
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda dan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibahas dan ditetapkan	12	1.176.858.000		1.712.746.000		1.651.290.000		123.426.673		100.000.000	0%			1.712.746.000		146%	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan/ Uji Publik yang dilaksanakan		-		113.638.600		-					0%			113.638.600		0%	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			448.277.000		451.062.000		465.212.000								451.062.000		101%	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap Hasil Pengawasan	1 Lap	448.277.000		451.062.000		465.212.000					0%			451.062.000		101%	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD			958.689.362.481		3.454.161.000		5.039.928.000		-		-		-		3.454.161.000		0%	Sekretariat DPRD
		Orientasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Orientasi DPRD	3 Lap	681.457.000		873.087.000	3	1.030.717.000					0%			873.087.000		128%	Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Lap	1.334.648.000		2.367.244.000	3	3.681.489.000		-			0%			2.367.244.000		177%	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Program Kerja Tahunan DPRD	1 Lap	22.830.000		21.830.000	1	21.821.000					0%			21.830.000		96%	Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Pembayaran Honorarium Publikasi dan Dokumentasi	8	86.600.000		192.000.000		305.901.000					0%			192.000.000		222%	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			6.911.718.000		4.563.346.000		6.773.054.000		2.018.190.000						4.563.346.000		66%	Sekretariat DPRD
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Lap	3.124.504.000		2.585.336.000		5.291.548.000		1.335.210.000			0%			2.585.336.000		83%	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	20 Orang	22.830.000		21.830.000		-					0%			21.830.000		96%	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Lap	3.124.504.000		1.956.180.000		1.481.506.000		682.980.000			0%			1.956.180.000		63%	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kerjasama Daerah			319.940.000		320.940.000		-		-		-		-		320.940.000		100%	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Kegiatan Pendampingan Musrembang Distrik	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan Musrembang Distrik	1 Lap	319.940.000		320.940.000		-		-		-	0%	-		320.940.000		100%	Sekretariat DPRD
Rata - rata capaian kinerja (5)																				
Predikat kinerja																				
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	JUMLAH PAGU PROGRAM 2025																-15
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN							5.380.257.826						2.184.104.810					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	20.820.116.000	100%	8.493.775.851	100%	5.110.158.797					1.250.000		8.495.025.851		1.699.005.170		
		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah		119.602.500	0%		0%	24.945.100	0%		5,01%	1.250.000	5,01%	1.250.000		1.250.000		250.000	Sekretariat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	0%	0	0%	0	0%	16.770.600	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dak	119.602.500	0%	0	0%	8.174.500	0%	0	3 Dak	1.250.000	3 Dak	1.250.000		1.250.000		250.000	Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya laporan pencapaian kinerja dan keuangan				7.110.493.523	100%	4.165.414.872											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Org	12.500.000.000		6.098.859.523	44 Org	3.853.246.872	44 Org	964.130.719	44 Org	1.021.336.331	0%	1.985.467.050		8.084.326.573		1.616.865.315	Sekretariat
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	2.371.108.000	3 Dak	1.011.634.000	3 Dak	312.168.000	0%	0	3 Dak	50.319.000	0%	50.319.000		1.061.953.000		212.390.600	Sekretariat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah																	
		Pengadaan pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atributnya	100 Pasang	784.875.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				457.978.625	100%	228.988.200											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan kantor yang di sediakan	0%	0	0%	0	0%	152.104.500	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	0%	0	0%	24.005.200	1 Paket	24.005.200	0%	0	0%	0	0%	0	0%	24.005.200	0%	0	Sekretariat
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan pengadaan yang di sediakan	5 Paket	120.480.000	1 Paket	93.900.000	1 Paket	13.640.000	1 Paket	1.440.000	0%	0	0%	1.440.000		95.340.000		19.068.000	Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di Sediakan	40 lap	1.295.250.000	8 lap	340.073.425	8 lap	191.343.000	2 lap	10.260.000	1 lap	3.420.000	0%	13.680.000		353.753.425		70.750.685	Sekretariat
		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				72.245.000													
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	5 Paket	754.250.000	1 Paket	72.245.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		72.245.000		14.449.000	Sekretariat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	1 Unit	3.000.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				412.129.403	100%	236.610.625											
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat yang tersedia	5 Paket	71.855.000	1 Paket	28.049.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		28.049.000		5.769.800	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Lap	202.000.000	3 Lap	174.466.713	1 Lap	161.400.000	1 Lap	1.025.000	4 Lap	29.486.760	0%	30.511.760		204.978.473		40.995.695	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Lap	120.480.000	3 Lap	101.416.690	3 Lap	0	0%	0	0%	0	0%	0		101.416.690		20.283.338	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 Paket	172.550.000	1 Paket	107.397.000	0%	75.210.625	1 Paket	2.445.000	1 Paket	20.118.000	0%	22.563.000		129.960.000		25.992.000	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik				440.929.300	100%	227.100.000											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	0%	0	0%	50.400.000	2 unit	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	50.400.000	0%	0	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya dan Perizinannya	13 unit	1.560.000.000	4 unit	390.529.300	4 unit	227.100.000	0%	0	4 unit	72.200.000	0%	72.200.000		462.729.300		92.545.860	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	4.248.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Sekretariat
	Meningkatnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Menggerakkan Masyarakat gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan		20.954.309.568		62.825.180		188.763.829								62.825.180		12.565.036	Bidang Perpustakaan
		Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)				62.825.180	100%	175.156.829								62.825.180		12.565.036	Bidang Perpustakaan
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10.000 Eksemplar	471.966.688	0%	197.914.800	7.130 Eksemplar		0	0%	0	0%	0	0%	0	197.914.800	0%	0	Bidang Perpustakaan
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Bidang Perpustakaan
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0%	0		62.825.180	0%	175.156.829	0%	0	0%	0	0%	0	0%	62.825.180		12.565.036	Bidang Perpustakaan

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	94.393.338	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Bidang Perpustakaan
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	20.000 Eksiemplar	1.550.747.688	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Bidang Perpustakaan
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (TSM : Information Technology Service-Management)	0%	0	0	190.370.004	95%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	190.370004	0%	0	Bidang Perpustakaan
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100%	13.606.200											
		Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Bidang Perpustakaan
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	35 Orang	809.085.750	0%	73.136.800	30 Orang	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	73136800	0%	0	Bidang Perpustakaan
		Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	30 Orang	1.415.900.063	0%	0	0%	13.606.200	3 Lokus	2.200.000	3 Lokus	640.000	0%	2.920.000	2.920.000		584.000		Bidang Perpustakaan
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN																		
	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kearsipan Daerah (sudah termasuk pengaman arsip dan penyusunan katalog)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			14.479.890.641	100%	303.062.995	100%	81.336.000							303.082.995		60.616.599		Bidang Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsiparis yang bersertifikat Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip "baik" Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip dinamis secara baku																	Bidang Kearsipan
		Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan	90%	1.946.655.628	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Bidang Kearsipan
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	90%	191.074.398	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	0%	0	0%	0	Bidang Kearsipan
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	90%	347.564.132	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%	0	0%	0	0%	0	Bidang Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						-	48.936.000											
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Dokumen Yang di Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	90%	1.261.877.505	0%	0	0%	48.936.000	1.610.000		744.000	0%	2.354.000	2.354.000		478.800			Bidang Kearsipan
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan nasional Tingkat Kabupaten/Kota					303.062.995	100%	32.400.000											
		Penyediaan Informasi, Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	90%	1.216.522.700	0%	166.651.164	500	32.400.000	0%	0	1 Layanan	1.400.000	0,00%	1.400.000	168.051.164				Bidang Kearsipan
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Yang di Berdayakan	0%	0	0	136.431.831	0%	0	0%	0	0	0,00%	0	0,00%	136.431.831		27.286.366		Bidang Kearsipan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																		
		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun																		
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	90%	1.219.808.824	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Bidang Kearsipan

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
-1	-2	-3	-4																	-15	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	599.577.000	3	149.452.000	1	-	1	0	0%	0	0%	-	0%	149.452.000		149.452.000	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
12		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	155 70	15.210.875.758	155 70	6.263.861.584	31	3.289.371.033		628.505.532		971.466.990		1.599.972.522		9.553.232.617		11.153.205.139	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155	13.032.958.558	93	5.206.629.284	31	2.868.227.033		587.665.532		959.726.990		1.547.392.522		8.074.856.317		9.622.248.839	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	2.097.376.000	36	1.010.651.500	12	407.686.000		40.840.000		11.740.000		52.580.000		1.418.337.500		1.470.917.500	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	40.179.600	3	23.290.000	1	6.388.000		0		0		-		29.678.000		29.678.000	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	5	40.361.600	3	23.290.800	1	7.070.000		0		0		-		30.360.800		30.360.800	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
13		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum dinas kominfo	31	29.840.000	31	29.840.000	-	-		-		-		-		29.840.000		29.840.000	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah orang menerima pakaian dinas	31	29.840.000	31	29.840.000	0	-	0	0	0%	0	0%	-		29.840.000		29.840.000	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
14		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dinas kominfo		3.218.320.365		2.045.876.203		756.193.289		-		59.256.080		59.256.080		2.802.069.492		2.861.325.572	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket/bulan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	911.050.565	36	569.591.000	12	223.769.000	0	0	6	38.370.000		38.370.000		793.360.000		821.730.000	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket/bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	178.850.000	36	344.887.800	12	55.149.964	3	0	3	0		-		400.037.764		400.037.764	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	2.128.419.800	36	1.131.397.403	12	477.274.325	3	0	3	20.886.080		20.886.080		1.608.671.728		1.629.557.808	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan layanan barang penunjang urusan dinas kominfo	-	988.570.750	-	558.706.154	-	380.856.000	0	0	0	0		-		939.562.154		939.562.154	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		988.570.750		558.706.154		380.856.000	0	0	0	0		-		939.562.154		939.562.154	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.716.424.484	100	892.917.885	36	361.235.199	0	0	4.350.000	4.350.000				1.254.153.084		1.258.503.084	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	26.415.000	36	16.364.000	12	5.250.000	0	0	0	0		-		21.614.000		21.614.000	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	730.413.784	36	284.470.955	12	152.346.955	0	0	0	0		-		436.817.910		436.817.910	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	959.595.700	36	592.082.930	12	203.638.244	0	0	0	4.350.000		4.350.000		795.721.174		800.071.174	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65	1.310.205.300	39	575.431.443	13	245.503.838	0	0	0	0		-		820.935.281		820.935.281	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	776.040.000	33	295.663.199	11	134.375.882	0	0	0	0		-		430.039.081		430.039.081	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		306.231.300		127.812.244		35.149.956	0	0	0	0		-		162.962.200		162.962.200	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Parasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	10	227.934.000	6	151.956.000	2	75.978.000	0	0	0	0		-		227.934.000		227.934.000		
2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Lembaga Publik yang aktif dalam Pengelolaan Komunikasi Publik		1.967.329.965		1.282.585.500		67.060.965		-		42.862.000		42.862.000		1.349.646.465		1.392.508.465	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
21		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat dan Asn yang mengikuti diklat penyebaran informasi		1.967.329.965		1.282.585.500		67.060.965		-		42.862.000		42.862.000		1.349.646.465		1.392.508.465	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	100	1.414.754.365		1.104.837.500		67.060.965		0	0	0	0		-		1.171.898.465		1.171.898.465	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Pengutan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimbingan/pelatihan		552.575.600		177.748.000		-		0	0	42.862.000		42.862.000		177.748.000		220.610.000		
3		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang sudah memiliki Website, Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah, Persentase jumlah kampung yang terlayani akses internet		12.889.611.256		5.228.886.472		3.064.837.461		17.010.000		241.007.832		258.017.832		8.293.723.933		8.551.741.765	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
31		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun, Jumlah artikel yang termaut dalam website pmda selama 1 tahun, jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun		12.889.611.256		5.228.886.472		3.064.837.461		17.010.000		241.007.832		258.017.832		8.293.723.933		8.551.741.765	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		2.007.760.442		500.515.778		590.572.717,00		0		2.700.000		2.700.000		1.091.088.495		1.093.788.495	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		10.881.850.814		4.728.370.694		2.474.264.744,00		17.010.000		238.307.832		255.317.832		7.202.635.438		7.457.953.270	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			241.968.000				56.040.000,00		0		6.949.600		6.949.600		56.040.000		62.989.600	
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan dokumen data sektoral daerah, persentase jumlah pengembangan SDM penyusun data sektoral	100	241.968.000				56.040.000				6.949.600		6.949.600,00		56.040.000		62.989.600	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
4.1.2		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan sosialisasi penyusunan data statistik sektoral	100	241.968.000	100		100	56.040.000,00				6.949.600		6.949.600,00		56.040.000		62.989.600	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100	241.968.000	0		100	56.040.000		0		6.949.600		6.949.600		56.040.000		62.989.600	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			190.255.000						0		0							
5		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bintek TOT tata kelola informasi dan jaringan komunikasi sandi dan dokumen penetapan peraturan bupati tentang penerapan TTE		190.255.000						0		0		0		0		0	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
5.1.2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya bintek TOT tatakelola informasi dan jaringan komunikasi sandi dan tersedianya dokumen perbup tentang TTE		190.255.000	-		-			-		-		-		-		-	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		190.255.000	000		0			0		0		0		-		-	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Rata - rata capaian kinerja (5)																				
Predikat kinerja																				
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
JUMLAH PAGU PROGRAM 2025																				
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah, Nilai Sakip, Presentase terhadap laporan keuangan OPD, Profesionalisme aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP), Kualitas Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan		17.422.916.464		15.033.659.383		0%		0%		0	32%	1.808.846.705	0%	16.842.506.088		97%	Dinas Perhubungan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		216.086.400						0%		50%	28.030.000	0%	28.030.000		0		Dinas Perhubungan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								0	0%	0	0%		0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								0	0%	0	100%	141.30000	0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13.505.400						0	0%	0	100%	13900000	0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.225.047.880							0%		43%	1.625.910.505	0%	1.625.910.505		0	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14.062.563.920						0	0%	0	56%	157.4190505	0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4.156.350.000						0	0%	0	6%	51720000	0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		67.527.000						0	0%	0	0%		0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		67.527.000						0	0%	0	0%		0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			91.000.000							0%		0%		0%				Dinas Perhubungan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		91.000.000						0	0%	0	0%		0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							0,00	0%		0	0%		0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.179.000.000							0%		6%	44.750.000	0%	44.750.000		0	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		414.724.000						0	0%	0	0%		0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		325.000.000						0	0%	0	0%		0%	0		0	Dinas Perhubungan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.179.000.000						0	0%	0	10,25%	44750000	0%	0		0	Dinas Perhubungan

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.256.198.000							0%		16,25%	68.522.900	0%	68.522.900	0		Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								0	0%	0	0%		0		0		Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		982.270.000						0	0%	0	25,81%	22261000	0%		0		Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		132.370.000						0	0%	0	13,96%	46261900	0%		0		Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.850.466.000							0%		8,24%	41.633.300	0%	41.633.300	0		Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya		1.986.700.000						0	0%	0	8,56%	40833300	0%		0		Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		112.091.000						0	0%	0	2,84%	800000	0%		0		Dinas Perhubungan
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			18.799.407.686		15.845.608.633		0%		0%	0	0%	0	0%	0%	15.845.608.633		84%	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			11.660.284.957							0%		0%		0%				Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		9.245.284.955						0	0%	0	0%	0	0%		0		Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		415.000.000						0	0%	0	0%		0%		0		Dinas Perhubungan
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			1.530.000.000,00							0,00%		0%		0%				Dinas Perhubungan
		Pengembangan sarana dan prasarana terminal			30.000.000,00						0	0,00%	0,00	0%		0%	0,00			Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)			1.500.000.000,00															Dinas Perhubungan
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi								0	0,00%	0,00	0%		0%	0,00			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.120.933.000							0,00%		0%		0%				Dinas Perhubungan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1.200.000.000,00						0	0%	0	0%		0%	0,00			Dinas Perhubungan
		Pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		920.933.000,00						0	0%	0	0%		0%	0			Dinas Perhubungan
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.043.633.000,00							0%		0%		0%				Dinas Perhubungan
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.043.633.000,00						0	0,00%	0,00	0%		0%	0,00			Dinas Perhubungan
3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			38.332.951.447,00		7.986.770.327		0%		0,00%	0,00	0%	0%	0%	7.986.770.327,00		21%	Dinas Perhubungan	
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			20.993.680.000,00							0,00%		0%		0				Dinas Perhubungan
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		19.489.280.000						0	0%	0	0%		0%	0			Dinas Perhubungan
		Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran dan peraturan pengukuran kapal < 7 GT			504.400.000,00															Dinas Perhubungan
		Pembangunan, Penerbitan Izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			17.755.321.981,00							0%		0%		0%				Dinas Perhubungan
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		7.442.491.981,00						0	0%	0	0%		0%	0,00			Dinas Perhubungan
		Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal			974.930.000,00															Dinas Perhubungan
		Konsultasi publik calon lokasi pembangunan dermaga rakyat			37.900.000,00															Dinas Perhubungan
		Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan								0	0%	0	0%		0%	0,00			Dinas Perhubungan
4		PROGRAM PENGELOLAAN PENEBERANGAN			5.640.240.478,00		1.217.786.200		0%		0%	0	0%	0	0%	1.217.786.200,00		22%	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			5.640.240.478,00							0,00%		0%		0%				Dinas Perhubungan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/ Lapangan Udara	Jumlah landasan yang dibangun beserta fasilitas pendukung		5.640.240.478,00						0	0,00%	0,00	0%		0%	0,00			Dinas Perhubungan
		Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																		
		Faktor penghambat pencapaian kinerja :																		

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	PAGU PROGRAM TAHUN 2025				8.971.251.377						2.368.680.726						-15
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100% 85% 100% 100%	31.192.488.080,00		12.718.957.500	100% 85% 100% 100%	6.603.380.377	0%		13,67%	2.070.984.496,00	0%	2.070.984.496	0%	14.789.941.996,00	47%	BKPSDM	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80%	308.933.900,00		268.314.542	80%	113.904.000,00			12,68%	10.680.000,00	0%	10.680.000	0%	278.994.542,00	90%	BKPSDM	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7Dok	167.013.900,00		142.197.500	4 Dok	100.304.000,00	0	0,00%	0	0%	-	0%	142.197.500,00	85%	BKPSDM		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	141.920.000,00		126.117.042	1 Lap	13.600.000,00	0	78,52%	10.680.000,00	0%	10.680.000	0%	136.797.042,00	96%	BKPSDM		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dok				1 Dok	0	0	0,00%	0	0%	-	0%	-	0%	BKPSDM		
		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Presentase apartur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawainan tepat waktu		1.461.035.000,00		170.443.100									170.443.100,00	12%	BKPSDM		
		Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Terlaksananya pelayanan administrasi Pensiun ASN		542.610.000,00											-	0%	BKPSDM		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pemahaman tentang aplikasi E-Kinerja		918.425.000,00		170.443.100									170.443.100,00	19%	BKPSDM		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	18.156.123.080,00		8.699.160.798	100%	5.092.395.977	0	38,50%	1.960.689.496,00	0%	1.960.689.496	0%	10.659.850.294,00	59%	BKPSDM		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org	14.382.899.080,00		6.514.237.798	34 Org	3.887.459.977			46,04%	1.789.970.496,00	0%	1.789.970.496	0%	8.304.208.294,00	58%	BKPSDM	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dok	3.773.224.000,00		2.184.923.000,00	40 Dok	1.204.936.000,00			14,16%	170.719.000,00		170.719.000		2.355.642.000,00	62%	BKPSDM	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok				2 Dok	-							-		BKPSDM		
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	%	4.496.900.000,00		59.535.000									59.535.000,00	1%	BKPSDM		
		Pengadaan Sarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unt/Itm	4.496.900.000,00		59.535.000,00									59.535.000,00	1%	BKPSDM		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	%	2.981.169.500,00		2.031.317.453		445.368.000	0						2.031.317.453,00	68%	BKPSDM		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	105.986.000,00		78.730.000	1 Paket	8.440.000,00							78.730.000,00	74%	BKPSDM		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	677.855.500,00		1.211.145.000	1 Paket	55.930.000							1.211.145.000,00	179%	BKPSDM		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengondoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengondoran yang Disediakan	4 Paket	500.000.000,00		179.200.000	1 Paket	76.500.000,00							179.200.000,00	36%	BKPSDM		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lap	1.697.328.000,00		562.242.453	16 Lap	304.498.000							562.242.453,00	33%	BKPSDM		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	1.937.426.600,00		1.100.508.107	100%	421.516.400,00			13,76%	58.015.000,00		58.015.000		1.158.523.107,00	60%	BKPSDM	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Lap	13.755.000,00		26.100.000	1 Lap	23.280.000,00			34,36%	8.000.000,00		8.000.000		34.100.000,00	248%	BKPSDM	
		Penyediaan Pengiriman Berkas	Jumlah Pengiriman Berkas	7 Berks	175.000.000,00											-	0%	BKPSDM		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bn	840.000.000,00		457.914.107	3 Lap	202.800.000,00			24,66%	50.015.000,00		50.015.000		507.929.107,00	60%	BKPSDM	
			Tersedianya Jaringan Internet untuk penyediaan jasa komunikasi	12 Bn	58.720.000,00											-	0%	BKPSDM		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Item	745.551.600,00		616.494.000	3 Lap	195.436.400,00							616.494.000,00	83%	BKPSDM		
			Tersedianya Makan dan Minum	43 Org	104.400.000,00											-	0%	BKPSDM		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah	100%	1.850.900.000,00		389.678.500	100%	530.196.000			7,78%	41.600.000,00		41.600.000		431.278.500,00	23%	BKPSDM	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	10 Unit	1.616.400.000,00		339.540.500	34 Unit	453.280.000,00			9,17%	41.600.000,00		41.600.000		381.140.500,00	24%	BKPSDM	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	234.500.000,00		50.138.000	2 Unit	76.916.000							50.138.000,00	21%	BKPSDM		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN	80%	56.592.573.800		13.452.513.735	80%	2.367.871.800			12,57%	297.696.230,00		297.696.230		13.750.209.965,00	24%	BKPSDM	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawainan ASN	Presentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN	80%	9.198.892.000		4.447.311.164	80%	1.001.651.000			46,79%	46.713.679,00		46.713.679		4.494.024.843,00	49%	BKPSDM	
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dok	823.950.000,00		40.010.600	1 Dok	0							40.010.600,00	5%	BKPSDM		
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Tersedianya rencana kebutuhan pengadaan ASN	1 Dok	1.356.520.000,00		67.332.650									67.332.650,00	5%	BKPSDM		
		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dok	4.745.670.000,00		3.870.893.088	1 Dok	792.405.000,00			5,89%	46.713.679,00		46.713.679		3.917.606.767,00	83%	BKPSDM	
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Dok	200.000.000,00		31.715.171	1 Dok	0							31.715.171,00	16%	BKPSDM		

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Dok	-	1 Dok	17,099,942	1 Dak	152,292,000							17,099,942,00			0%	BKPSDM
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dok	200.000.000,00	1 Dok	68.359.000	1 Dok	-							68.359.000,00			34%	BKPSDM
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	642.695.000,00	1 Dok	127.816.122	1 Dok	56.954.000							127.816.122,00			20%	BKPSDM
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dok	590.057.000,00	1 Dok	144.919.000	1 Dak	-							144.919.000,00			25%	BKPSDM
		Evaluasi Datan Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Data Kepegawaian	2653 Data	640.000.000,00		79.165.591									79.165.591,00			12%	BKPSDM
		Mutasi dan Promosi ASN	Presentase Jabatan Struktural dan Fungsional yang terisi sesuai syarat		2.665.330.000,00		2.879.394.596		366.593.000			32,90%	120.932.551,00		120.932.551	3.000.327.147,00			113%	BKPSDM
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	60 Dok	1.054.800.000,00		894.406.900	60 Dok	108.383.000							894.406.900,00			85%	BKPSDM
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	560 Dok	1.140.530.000,00		882.704.409	560 Dok	126.327.000			95,72%	120.932.551,00		120.932.551	1.003.636.960,00			88%	BKPSDM
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	250 Dok	470.000.000,00		1.102.283.287	250 Dok	131.883.000,00							1.102.283.287,00			235%	BKPSDM
		Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi aparatur	100%	42.484.761.000,00		4.965.924.755	100%	644.544.000,00			13,96%	90.000.000,00		90.000.000	5.055.924.755,00			12%	BKPSDM
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	450 Dok	2.204.291.000,00		301.601.420	450 Dok	-							301.601.420,00			14%	BKPSDM
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Org	5.645.000.000,00		2.810.000.000	35 Org	580.000.000			15,51%	90.000.000,00		90.000.000	2.900.000.000,00			51%	BKPSDM
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Didat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Didkat	30 Dok	34.404.094.000,00		1.786.064.235	30 Dok	-							1.786.064.235,00			5%	BKPSDM
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	60 Org	231.376.000,00		68.259.100	60 Org	64.544.000							68.259.100,00			30%	BKPSDM
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan sesuai SOP	20 Org	2.243.590.000,00		1.159.883.220	20 Org	355.083.000,00			11,27%	40.050.000,00		40.050.000	1.199.933.220,00			53%	BKPSDM
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dok	665.000.000,00		386.987.241	100 Dok	162.557.000			24,63%	40.050.000,00		40.050.000	427.037.241,00			71%	BKPSDM
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Org	296.220.000,00		115.287.800	50 Org	65.106.000							115.287.800,00			39%	BKPSDM
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	25 Org	303.060.000,00		229.156.365	25 Org	0							229.156.365,00			76%	BKPSDM
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Lapn	518.060.000,00		241.044.554	25 Lapn	127.420.000							241.044.554,00			47%	BKPSDM
		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	25 Laprn	521.250.000,00		187.407.260	25 Laprn	-							187.407.260,00			36%	BKPSDM
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	80 Org	2.242.670.000		128.979.120	80 Org	-							128.979.120,00			6%	BKPSDM
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional	Terselenggaranya Seleksi Sekolah Ikatan Dinas (SDIN)	80 Org	2.242.670.000		128.979.120	80 Org	-							128.979.120,00			6%	BKPSDM
		Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	80 Org	2.242.670.000		128.979.120	1 Dak	-							128.979.120,00			6%	BKPSDM
				Rata - rata capaian kinerja (5)																
				Predikat kinerja																
		Faktor Pendorong keberhasilan kinerja:																		
		Faktor penghambat pencapaian kinerja :																		
								</												

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4																	-15	
		4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	2 dokumen	5.340.000					0 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	Dinas Kesehatan	
		5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000			8.010.000						-		-		-	Dinas Kesehatan	
		6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	6.000.000	1 dokumen	1 dokumen	8.010.000					0 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	Dinas Kesehatan	
		7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.137.355.000			404.149.674						-		-	42.576.874		14	Dinas Kesehatan
1.3			Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2730 Paket	1.186.955.000			261.807.000						-		-		-	Dinas Kesehatan	
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20 dokumen	301.000.000	730 dokumen	42.576.874	730 dokumen	26.414.000				0 dokumen	-	730 dokumen	42.576.874	730 dokumen	141	Dinas Kesehatan	
		2	Koordinasi dan Pelaksanaan Setim Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 dokumen	599.400.000			17.686.800						-		-		-	Dinas Kesehatan	
1.4			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						82.079.000						-		-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 dokumen	700.000.000	4 dokumen	4 dokumen	21.894.000					0 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	Dinas Kesehatan	
1.5			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	350.000.000			17.415.000					0	-	0	-		-	Dinas Kesehatan	
		1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.290.810.000			7.350.709.608						-	62.832.600	62.832.600	7.413.622.208		34,8	Dinas Kesehatan
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1176 paket	9.313.860.000	6 paket	2.066.504.155	6 paket	65.000.000				0 paket	-	6 paket	2.066.504.155	6 paket	222	Dinas Kesehatan	
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	4.200.000.000	1 paket	264.414.000	1 paket	144.000.000		0,5 paket	62.832.600	1 paket	62.832.600	2 paket	327.246.600	1 paket	7,8	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	1.145.000.000	2 paket	26.583.724	2 paket	33.761.000				0 paket	-	2 paket	26.583.724	2 paket	23	Dinas Kesehatan	
		3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			520.000.000			38.500.000					0 paket	-	0 paket	38.500.000		7,4	Dinas Kesehatan	
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	6.111.950.000	4 laporan	4.954.787.729	4 laporan	-				0 laporan	-	4 laporan	4.954.787.729	4 laporan	81,1	Dinas Kesehatan	
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.951.185.000			3.219.143.000						-		-	2.877.039.000		10,7	Dinas Kesehatan
		5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	155 unit	9.289.330.000	1 unit	2.877.039.000	1 unit	-				0 unit	-	1 unit	2.877.039.000	1 unit	31,0	Dinas Kesehatan	
1.6			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 paket	2.125.375.000			342.104.000						-		-		-	Dinas Kesehatan	
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 unit	450.000.000	15 unit	15 unit	30.625.000					0 unit	-	15 unit	-	15 unit	-	Dinas Kesehatan	
		1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	15.086.480.000									-		-		-	Dinas Kesehatan	
		2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.320.098.070			1.335.160.325						-		-	1.335.160.325		30,9	Dinas Kesehatan
		2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 laporan	979.086.320	2 laporan	198.898.000	2 laporan	62.200.000				0 laporan	-	2 laporan	198.898.000	2 laporan	20,3	Dinas Kesehatan	
		3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 laporan	584.480.000	4 laporan	574.714.608	4 laporan	140.400.000				0 laporan	-	4 laporan	574.714.608	4 laporan	98,3	Dinas Kesehatan	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 laporan	2.756.531.750	3 laporan	561.547.717	3 laporan	102.454.500				0 laporan	-	3 laporan	561.547.717	3 laporan	20,4	Dinas Kesehatan	
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.700.000.000			1.700.482.142						-	65.650.000	1.766.132.142		103,9	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	100.000.000	2 unit		2 unit	90.200.000				0 unit	-	2 unit		2 unit	-	Dinas Kesehatan	
		5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	78 unit	1.100.000.000	68 unit	1.573.210.822	68 unit	421.300.000				0 unit	-	68 unit	1.573.210.822	68 unit	143,0	Dinas Kesehatan	
		6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	150.000.000	1 unit	127.271.320	1 unit	285.621.000				0 unit	-	65.650.000	1 unit	192.921.320	1 unit	128,6	Dinas Kesehatan
		7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	350.000.000	71 paket		71 paket	38.600.000				0 paket	-	71 paket		71 paket	-	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		407.207.596.062			105.684.398.888						-	4.938.396.400	9.602.903.400	103.671.689.568		25,5	Dinas Kesehatan
1.7			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			214.824.333.209			52.720.787.623						-	1.236.230.000				25,1	Dinas Kesehatan
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	6 Unit	77.846.134.951									-		-		-	Dinas Kesehatan	
		1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 unit	9.229.751.784	1 unit		1 unit	3.420.936.333				0 unit	-	1 unit		1 unit	-	Dinas Kesehatan	
		1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	12 unit	18.958.390.000	6 unit		8.664.012.000	6 unit	9.885.068.672			0 unit	-	519.070.828	6 unit	9.183.082.828	6 unit	48,4	Dinas Kesehatan
		2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	65 unit	24.914.804.784	4 unit		4 unit	3.181.778.666				0 unit	-	430.643.000	4 unit	430.643.000	4 unit	1,7	Dinas Kesehatan
		3	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	500.000.000	5 unit		5 unit	2.519.870.000				0 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	Dinas Kesehatan	
		3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	7 unit	18.714.106.529									-		-		-	Dinas Kesehatan	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
-1	-2	-3	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-15
	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	11 unit	5.210.750.000	2 unit	1.646.584.000	2 unit	646.516.657					0 unit	-	2 unit	1.646.584.000	2 unit	31,6	Dinas Kesehatan
	5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	53 unit	10.200.000.000	9 unit	8.490.584.468	9 unit	4.480.218.378					0 unit	71.916.172	9 unit	8.570.500.640	9 unit	84,0	Dinas Kesehatan
18		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	30 unit	5.220.206.598	5 unit	2.689.738.032	5 unit	2.626.854.294					0 unit	214.600.000	5 unit	2.904.338.032	5 unit	55,6	Dinas Kesehatan
	1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		10 paket	4.562.500.000		92.241.000												-	Dinas Kesehatan
	2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penunjang Pelayanan Disediakan Alat Kesehatan/Alat Medik Fasilitas Kesehatan yang	30 paket	18.407.665.713	5 paket	19.007.285.960	5 paket	1.757.073.174					0 paket	-	5 paket	19.007.285.960	5 paket	103,3	Dinas Kesehatan
	3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	350 alat	1.605.492.850	350 alat	1.087.744.465	350 alat	191.635.000					0 alat	-	350 alat	1.087.744.465	350 alat	67,8	Dinas Kesehatan
19		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan		2 kegiatan	-					0 kegiatan	-	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-	Dinas Kesehatan
	1	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	50 paket	18.754.530.000	5 paket	10.635.962.698	5 paket	4.601.735.972					0 paket	-	5 paket	10.635.962.698	5 paket	56,7	Dinas Kesehatan
	2	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	4 kegiatan	600.000.000	1 kegiatan	398.635.000	1 kegiatan	305.490.000					0 kegiatan	-	1 kegiatan	398.635.000	1 kegiatan	64,4	Dinas Kesehatan
	3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			187.473.262.853		51.807.317.815		21.699.807.900		-	4.857.976.400		8.205.833.400		48.511.655.645			25,9	Dinas Kesehatan
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3050 Ibu	2.000.000.000	1507 Ibu	69.860.000	1507 Ibu	556.491.000	1507 Ibu	1507 Ibu	1507 Ibu	4521 Ibu	-	6028 Ibu	69.860.000	1507 Ibu	3,5	Dinas Kesehatan	
2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1442 Ibu	1.112.250.000	1442 Ibu	164.942.500	1442 Ibu	568.195.000	1442 Ibu	1442 Ibu	1442 Ibu	4326 Ibu	-	5768 Ibu	164.942.500	1442 Ibu	14,8	Dinas Kesehatan	
2.1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1376 bayi	3.820.000.000	1376 bayi	514.531.121	1376 bayi	28.530.000	1376 bayi	1376 bayi	1376 bayi	4128 bayi	-	5504 bayi	514.531.121	1376 bayi	13,5	Dinas Kesehatan	
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8322 balita	2.000.000.000	8322 balita	1.006.749.807	8322 balita	66.000.000	8322 balita	8322 balita	8322 balita	24966 balita	-	33288 balita	1.006.749.807	8322 balita	50,3	Dinas Kesehatan	
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10485 anak	930.730.000	10485 anak	55.693.500	10485 anak	645.948.000	10485 anak	10485 anak	10485 anak	31455 anak	-	41940 anak	55.693.500	10485 anak	60	Dinas Kesehatan	
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41939 penduduk	1.210.000.000	41939 penduduk		41939 penduduk	195.401.000	41939 penduduk	41939 penduduk	41939 penduduk	125817 penduduk	-	167756 penduduk		41939 penduduk	-	Dinas Kesehatan	
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 penduduk	234.234.500	6094 penduduk		6094 penduduk	218.160.000	6094 penduduk	6094 penduduk	6094 penduduk	18282 penduduk	-	24376 penduduk		6094 penduduk	-	Dinas Kesehatan	
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12451 penderita	348.000.000	12451 penderita		12451 penderita	455.000	12451 penderita	12451 penderita	12451 penderita	37353 penderita	-	49804 penderita		12451 penderita	-	Dinas Kesehatan	
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4063 penderita	3.850.000.000	4063 penderita	45.180.000	4063 penderita	-	4063 penderita	4063 penderita	4063 penderita	12109 penderita	-	16252 penderita	45.180.000	4063 penderita	12	Dinas Kesehatan	
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	197 orang	248.000.000	197 orang		197 orang	62.260.000	197 orang	197 orang	197 orang	13.990.000	591 orang	13.990.000	788 orang	13.990.000	197 orang	5,6	Dinas Kesehatan
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1442 orang	1.650.000.000	1442 orang	182.992.250	1442 orang	150.015.000				0 orang	-	1442 orang	182.992.250	1442 orang	11,1	Dinas Kesehatan	
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1507 orang	270.000.000	1507 orang	258.414.000	1507 orang	153.820.000				0 orang	153.820.000	1507 orang	412.234.000	1507 orang	152,7	Dinas Kesehatan	
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30 dokumen	2.997.728.080	12 dokumen	3.148.005.600	12 dokumen	5.340.532.500				0 dokumen	-	12 dokumen	3.148.005.600	12 dokumen	105,0	Dinas Kesehatan	
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25 dokumen	1.117.275.000	5 dokumen	988.037.000	5 dokumen	119.537.000				0 dokumen	-	5 dokumen	988.037.000	5 dokumen	88,4	Dinas Kesehatan	
	12	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15 dokumen	1.124.153.100		283.005.000												-	Dinas Kesehatan
	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 dokumen	300.500.000	2 dokumen	35.660.000	2 dokumen	-				0 dokumen	-	2 dokumen	35.660.000	2 dokumen	11,9	Dinas Kesehatan	
	14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 dokumen	1.100.000.000	2 dokumen	154.244.000	2 dokumen	177.350.000				0 dokumen	171.174.000	2 dokumen	325.418.000	2 dokumen	29,6	Dinas Kesehatan	
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 kegiatan	700.000.000	1 kegiatan		1 kegiatan	44.160.000				0 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	Dinas Kesehatan
22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	25 dokumen	13.616.939.000		8.634.263.606												-	Dinas Kesehatan
	1	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	70 dokumen	77.266.227.015	7 dokumen	4.476.028.050	7 dokumen	2.150.481.000				0 dokumen	75.800.000	7 dokumen	4.551.828.050	7 dokumen	5,9	Dinas Kesehatan	
	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 dokumen	13.000.000.000	1 paket	15.435.738.825	1 paket	7.330.024.800		0,5 paket	3.374.141.400	1 paket	6.280.394.400	2 paket	21.716.133.225	1 paket	167,0	Dinas Kesehatan	
	3	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2 paket	70.000.000	2 kegiatan		2 kegiatan	68.000.000				0 kegiatan	21.600.000	2 kegiatan	21.600.000	2 kegiatan	30,9	Dinas Kesehatan	
	4	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	3 unit	240.000.000														-	Dinas Kesehatan

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	35 dokumen	50.947.302.157	7 dokumen	11.653.866.824	12 dokumen	2.100.741.400			6 dokumen	757.993.600	12 dokumen	757.993.600	19 dokumen	12.411.860.424	12 dokumen	244	Dinas Kesehatan
	6	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 dokumen	555.750.000	1 dokumen	1.317.480.968	12 dokumen	1.479.748.200			6 dokumen	711.851.400	12 dokumen	711.851.400	13 dokumen	2.029.332.368	12 dokumen	365,2	Dinas Kesehatan
	7	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 unit	3.770.378.001		2.327.132.964													Dinas Kesehatan
	8	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iltutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)		2 laporan	100.000.000		80.400.000													Dinas Kesehatan
	9	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10 dokumen	1.023.796.000	1 dokumen	572.465.800	1 dokumen	33.465.000					0 dokumen	-	1 dokumen	572.465.800	1 dokumen	55,9	Dinas Kesehatan
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 orang	300.000.000	500 orang		500 orang	16.003.000					0 orang	-	500 orang	-	500 orang	-	Dinas Kesehatan
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	300 orang	500.000.000	150 orang		150 orang	174.000.000					0 orang	-	150 orang	-	150 orang	-	Dinas Kesehatan
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1000 orang	200.000.000	350 orang	225.932.000	350 orang	-					0 orang	-	350 orang	225.932.000	350 orang	113,0	Dinas Kesehatan
	13	Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak		2 dokumen	300.000.000		176.694.000													Dinas Kesehatan
	14	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	100 kawasan	70.000.000	10 kawasan		10 kawasan	20.490.000					0 kawasan	19.210.000	10 kawasan	19.210.000	10 kawasan	27,4	Dinas Kesehatan
	15	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	8 dokumen	500.000.000	2 dokumen		2 dokumen	-					0 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	Dinas Kesehatan
	16	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			110.000.000		21.876.150													Dinas Kesehatan
	17	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	24 dokumen	110.000.000		21.876.150													Dinas Kesehatan
	18	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000				160.840.000				80.420.000		160.840.000		160.840.000		322	Dinas Kesehatan
	19	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	10 unit	500.000.000	10 unit		10 unit	160.840.000			4 unit	80.420.000	8 unit	160.840.000	18 unit	160.840.000	10 unit	322	Dinas Kesehatan
	20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.300.000.000		1.134.417.300		2.383.604.000				-		-		1.134.417.300		26,4	Dinas Kesehatan
	21	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	10 dokumen	250.000.000	7 dokumen		7 dokumen	1.601.033.000					0 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	Dinas Kesehatan
	22	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tangga kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tangga kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	3 kegiatan	3.000.000.000	3 kegiatan	1.134.417.300	3 kegiatan	782.571.000					0 kegiatan	-	3 kegiatan	1.134.417.300	3 kegiatan	37,8	Dinas Kesehatan
	23	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	700 orang	350.000.000	350 orang		350 orang	-					0 orang	-	350 orang	-	350 orang	-	Dinas Kesehatan
	24	Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacangan	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacangan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	700 orang	350.000.000	350 orang		350 orang	-					0 orang	-	350 orang	-	350 orang	-	Dinas Kesehatan
	25	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	700 orang	350.000.000	350 orang		350 orang	-					0 orang	-	350 orang	-	350 orang	-	Dinas Kesehatan
	26	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			25.133.922.913		16.153.977.688	9.997.801.356		154.613.000			789.473.064		1.834.981.064		17.988.958.752		71,6	Dinas Kesehatan
	27	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			4.583.454.731			10.177.500							-		-		-	Dinas Kesehatan
	28	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	90 dokumen	4.583.454.731	15 dokumen		15 dokumen	10.177.500					0 dokumen	-	15 dokumen	-	15 dokumen	-	Dinas Kesehatan
	29	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			9.760.000.000		9.410.657.130	5.371.406.800		154.613.000			60.000.000		776.213.000		10.186.870.130		104,4	Dinas Kesehatan
	30	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasyankes)	115 orang	9.660.000.000	115 orang	7.157.188.530	115 orang	4.519.840.800	50 orang	154.613.000	7 orang	60.000.000	64 orang	380.213.000	179 orang	7.537.401.530	115 orang	78,0	Dinas Kesehatan
	31	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 dokumen	100.000.000	10 dokumen	2.253.468.600	10 dokumen	851.566.000					0 dokumen	396.000.000	10 dokumen	2.649.468.600	10 dokumen	2.649	Dinas Kesehatan
	32	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			9.490.468.182		6.743.320.558	206.765.000							72.360.000		6.815.680.558		71,8	Dinas Kesehatan
	33	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	540 orang	9.490.468.182		6.743.320.558	206.765.000						0	72.360.000	0	6.815.680.558		71,8	Dinas Kesehatan
	34	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.300.000.000			4.409.452.056					729.473.064		986.408.064		986.408.064		75,9	Dinas Kesehatan
23		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	140 orang	1.300.000.000	829 orang		829 orang	4.409.452.056			50 orang	729.473.064	100 orang	986.408.064	929 orang	986.408.064	829 orang	75,9	Dinas Kesehatan
	1	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			120.000.000			61.990.000							17.376.000		17.376.000		14,5	Dinas Kesehatan
24		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			50.000.000			49.990.000							17.376.000		17.376.000		34,8	Dinas Kesehatan

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15 dokumen	50.000.000	4 dokumen		4 dokumen	49.990.000			80.420.000	0 dokumen	17.376.000	4 dokumen	17.376.000	4 dokumen	348	Dinas Kesehatan	
2		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			70.000.000				12.000.000						-		-	Dinas Kesehatan		
3		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	75 dokumen	70.000.000	2 dokumen		2 dokumen	12.000.000				0 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	Dinas Kesehatan	
25		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			400.000.000				45.986.000					45.986.000		45.986.000		115	Dinas Kesehatan	
1		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			400.000.000				45.986.000					45.986.000		45.986.000		115	Dinas Kesehatan	
2		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 dokumen	400.000.000	12 dokumen		12 dokumen	45.986.000				0 dokumen	45.986.000	12 dokumen	45.986.000	12 dokumen	115	Dinas Kesehatan	
					PAGU PROGRAM 2025				58.252.819.801					10.040.490.778						
1		Program Peninggjaan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah	100%	74.378.365.541	24%	17.955.731.783	100%	10.092.526.680	10%	628.344.100	0,00%	0,00	6%	628.344.100	25%	10.584.075.883,00	25%	RSUD	
11		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.197.390.000	72%	1.792.329.221	84%	2.164.601.400	13%	209.679.160		13%	209.679.160	90,9%	1.992.008.381,00		166%	RSUD	
1.124		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang dikerjakan dan dibayarkan	84%	75.000.000,00	506%	379.480.000	82%	332.475.000,00	0%	0		0%	0		379.480.000,00		506%	RSUD	
1.124		Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase orang yg melakukan perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kehar daerah. Jumlah peserta pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan	84%	522.390.000,00	160,44%	838.119.971	82%	1.291.296.000	18%	124.382.160,00		18%	124.382.160,00		962.502.131,00		104%	RSUD	
1.124		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yg dibayarkan	84%	600.000.000,00	94%	564.729.250	82%	540.830.400,00	16%	85.297.000,00		16%	85.297.000		650.026.250,00		100%	RSUD	
12		ADMINISTRASI KEPPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah	100%	270.077.500,00	-	-	273 std	-	0	0		0	0		-		0%	RSUD	
1.224		Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakian dinas dan olahraga	273 std	270.077.500	0	-	273 std	-	0	0		0	0		-		0%	RSUD	
13		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah	100%	366.758.332,00	15,012346079	5.505.901.066	82%	4.435.811.350	19%	418.664.940		19%	418.664.940		5.924.566.006,00		1615%	RSUD	
1.324		Penyedia Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat yang dibayar	84%	97.908.632,00	15,3	15.000.000	82%	7.500.000,00	0	0		0%	0		15.000.000,00		15%	RSUD	
1.324		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	84%	210.401.700,00	2.354,02	4.952.907.550	82%	3.305.017.350,00	9%	95.696.000		9%	95.696.000		5.048.603.550,00		2400%	RSUD	
1.324		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84%	58.448.000,00	920,5	537.993.516	82%	1.123.294.000,00	31%	322.968.940,00		31%	322.968.940,00		860.962.456,00		1473%	RSUD	
14		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.511.033.200,00	141%	9.190.588.737	84%	1.601.430.000,00	0	0		0	0		9.190.588.737,00		141%	RSUD	
14.24		Pelaksana Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pembayaran gaji/honor dan tunjangan ASN dan Non ASN	84%	6.511.033.200,00	141%	9.190.588.737	84%	1.601.430.000,00	0	0		0	0		9.190.588.737,00		141%	RSUD	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah	100%	175.883.750,00	388	682.278.259	82	1.181.607.400,00	0	0		0%	0		682.278.259,00		388%	RSUD	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase biaya pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja	84%	53.183.750,00	422	224.541.459	82	293.510.000,00	0	0		0%	0		224.541.459,00		422%	RSUD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	84%	72.700.000,00	312%	226.971.800	82%	254.947.400,00	0	0		0%	0		226.971.800,00		312%	RSUD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase biaya pemeliharaan gedung kantor	84%	50.000.000,00	462	230.765.000	82	633.150.000,00	0	0		0%	0		230.765.000,00		462%	RSUD	
		PENGANDAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedian sarana prasarana kendaraan dinas yg layak dan memadai	0			794.634.500	0	0	0	0		0	0		794.634.500,00		#DIV/0!	RSUD	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedian sarana prasarana kendaraan dinas yg layak dan memadai	0			794.634.500	0	0	0	0		0	0		794.634.500,00		#DIV/0!	RSUD	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase terlaksananya pemenuhan UKP dan UKM	84%	31.460.206.270,00		25.070.127.339	38.600.244.448,00	16,6%	7.092.641.942		26,5	7.092.641.942		32.162.769.281,00		102%	RSUD		
		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya pemenuhan UKP dan UKM	84%	25.085.872.520,00		19.704.434.252	24.145.604.820,00	4,7 %	1.278.200.000		4,7 %	1.278.200.000		20.982.634.252,00		84%	RSUD		
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya gedung yankes rujukan yang memadai dan sesuai aturan	5 pkt	14.059.991.000,00	0	-	5 pkt	2.129.489.724,00	0	0		0%	0		-		0%	RSUD	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terpenuhinya gedung yankes rujukan yang memadai dan sesuai aturan	7 pkt	5.015.318.600,00	42,12	2.112.414.000	7 pkt	-	0	0		0%	0		2.112.414.000,00		42%	RSUD	
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	tersedianya rumah dinas pegawai yang layak	2 unit	500.000.000,00	0	-	7 unit	-	0	0		0%	0		-		0%	RSUD	
		Pengembangan Rumah sakit	Peningkatan status UPTD RSUD menjadi BLUD (tidak ada di renstra)	0			#DIV/0!	-	349.600.000,00	117	3.200.000		117%	3200000		3.200.000,00		#DIV/0!	RSUD	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan, dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya bahan-bahan logistik medis rumah sakit	2 paket	1.200.000.000,00	1.038	12.457.046.870	2 pkt	14.110.599.000,00	11,0645435	1.275.000.000		11%	1275000000		13.732.046.870,00		11	RSUD	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

[illegible]

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12			14 = 13/5 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
-1	-2	-3	-4															-15			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	4 Jenis	6.945.610	0,00	0,00	0	0	13.585.680	0	18.405.000	1 Paket	99.452.200	1 Paket	99.452.200,00		14,53	Dinas Perikanan		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	8 Jenis	18.345.000	0,00	0,00	0	0	37.023.000	0	24.682.000	1 Paket	518.192.000	1 Paket	518.192.000,00		28,25	Dinas Perikanan		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Jenis	148.000.000	0	0,00	0	0	32.287.000	0	13.125.000	5 Paket	45.412.000	0	45.412.000,00		0,31	Dinas Perikanan		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 jenis	148.000.000	8 Paket	708.394.500	15 Paket	268.594.382	0	22.500.000	0	0	12 Paket	270.372.488	0	978.766.988,00		6,61	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	64.190.000	1 Paket	122.675.000	2 Paket	21.000.000	0	3.000.000	0	5.525.000	3 Paket	26.200.000	0	148.875.000,00		2,32	Dinas Perikanan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	482.850.000	12 Laporan	714.230.000	16 Laporan	883.470.000	0	96.600.000	0	14.120.000	85 Lap	574.030.000	0	1.288.260.000,00		2,67	Dinas Perikanan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	0	-	-	0	-	-	-	0	-	0	80%	50.950.000		50.950.000,00		Dinas Perikanan		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Unit	50.950.000						
		Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah persentase Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	90%	387.196.910	90%	1.049.441.440	90%	952.346.000	90%	182.697.358	90%	174.068.358	90%	761.278.000	90%	1.810.719.440		4,68	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	512 Lembar	5.990.400	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	0	0	0	2.400.000	1 Laporan	4.800.000		10.800.000,00		1,8	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	197.184.000	12 Bulan	202.304.000	12 Bulan	200.400.000	3 Bln	122.261.358	3 Bln	122.261.358	12 Bulan	403.900.000		606.204.000,00		3,07	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 jenis	184.022.510	3 Laporan	841.137.440	3 Laporan	745.946.000	0	60.436.000	0	49.407.000	5 Lap	352.578.000		1.193.715.440,00		6,49	Dinas Perikanan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah pemungut urusan pemerintahan daerah	100%	631.473.700		775.074.120	-	1.131.900.000		119.660.000		39.329.300	-	543.990.000,00	-	1.319.064.120,00		2,09	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	43 Unit	477.100.000	43 Unit	492.154.120	5 Unit	551.410.000	0,00	48.000.000	0,00	25.870.000	43 Unit	214.450.000,00		706.604.120,00		1,48	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.000.000	4 Unit	119.320.000	5 Unit	117.560.000	0,00	9.000.000	0,00	13.459.300	5 Unit	144.560.000,00		263.880.000,00		7,54	Dinas Perikanan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	119.373.700	1 Tahun	163.600.000	6 Unit	462.930.000	0	62.660.000	0	0	5 Unit	184.980.000		348.580.000		2,92	Dinas Perikanan	
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	27.201 Ton	3.286.300.000	21.821 Ton	4.886.031.536	22.189 Ton	2.630.064.629	0	6.640.000	0	35.176.000	22.418.Ton	1.287.012.000		6.173.043.536,00		1,88	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan diwilayah sungai, danau , Waduk, rawa dan Genangan Lainnya	7 Distrik	2.407.000.000	25 Dok	3.752.523.536	16 Jenis 3 Dokumen	2.503.334.629	0	-	0	0	1.142.220.000	-	4.894.743.536,00		2,03	Dinas Perikanan		
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dok	45.000.000	8 Dok	555.700.000	3 Dok	14.550.000	0,00	0	0,00	0	9 Dok	41.220.000,00		596.920.000,00		13,26	Dinas Perikanan	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	12 jenis	2.362.000.000	18 jenis	3.196.823.536	16 Unit	2.488.784.629	0,00	0	0,00	0	385 Unit	1.101.000.000,00		4.297.823.536,00		1,82	Dinas Perikanan	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi dalam Peningkatan Kapasitas SDM	30 org/42 KUB	694.100.000		706.328.000	30 KUB	126.730.000		6.640.000		13.986.000	-	74.796.000,00	-	781.124.000,00		1,13	Dinas Perikanan	
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Org	273.100.000	60 Org	595.628.000	40 Org	123.360.000	0,00	0	0,00	0	10 KUB	29.880.000,00		625.508.000,00		2,29	Dinas Perikanan	
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang terfasilitasi (Dinas Perikanan)	42 KUB	421.000.000	22 KUB	110.700.000	0,00	0		6.640.000		13.986.000	-	44.916.000,00	-	155.616.000,00		0,37	Dinas Perikanan	
		Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal Tangkap	0	-	0,00	-	0,00	0	0,00	0	1 Lokasi	21.190.000	3 Lokasi	69.996.000,00	-	69.996.000,00			Dinas Perikanan	
		Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		0		0,00	-	0,00	0	0,00	0	1 Dok	21.190.000		69.996.000,00	3 Dok	69.996.000,00			Dinas Perikanan	
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Dokumen TPI	1 Dok	185.200.000	1 Dok	427.180.000	1 Dok	427.180.000	0	0,00	0	0	0	0,00	1 Dok	427.180.000,00		2,31	Dinas Perikanan	
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dok	185.200.000	1 Dok	427.180.000	1 Dok	427.180.000	0	0	0	0	0	0	1 Dok	427.180.000,00		2,31	Dinas Perikanan	
3	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Budidaya Perikanan	11.217 Ton	1.440.158.000	10.540 Ton	2.984.306.022	12.427Ton	1.712.602.765	0	39.260.000	0	145.895.000	14.114 Ton	1.335.387.000	25.331 Ton	4.319.693.022			Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	11.217 Ton	1.118.940.000	10.540 Ton	2.742.806.022	12.427Ton	1.639.252.765	0	39.260.000	0	95.470.000	14.114 Ton	1.113.987.000	25.331 Ton	3.856.793.022		3,45	Dinas Perikanan	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit	273.100.000	18	2.742.806.022	14 Unit	237.425.265	-	0	0	0	6 Unit	608.371.580		3.351.177.602		12,27	Dinas Perikanan	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Lokasi	364.340.000	0,00	0	60 Unit	1.359.887.500	0,00	-	0,00	0	4 Unit	299.065.420,00		299.065.420,00		0,82	Dinas Perikanan	
		Pembiutan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembiutan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	42 Kel	213.200.000	0	0	22 Orang	41.940.000	8 Org	14.470.000		19.600.000	20 Kel	63.930.000		63.930.000,00		0,3	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dok	185.200.000	0	0	0,00	0	0	24.790.000		52.160.000	1 Dok	76.950.000	2 Dok	76.950.000,00		0,42	Dinas Perikanan	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15	
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	83.100.000	0	0	0	0	0	0	-	23.710.000	1 Dok	65.670.000	3 Dok	65.670.000,00		0,79	Dinas Perikanan	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	27 Kel	321.218.000	27 Kel	241.500.000	6 Kel	73.350.000	0,00	-	-	50.425.000	20 Kel	221.400.000,00	47 Kel	462.900.000,00		1,44	Dinas Perikanan	
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12 Kel	129.000.000	12 Kel	241.500.000	6,00	73.350.000	0,00	0,00	0,00	22.800.000	20 Kel	87.160.000,00	32 Kel	328.660.000,00		2,55	Dinas Perikanan	
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	12 Kel	63.218.000	12 Kel	-	0,00	0	0,00	-	-	27.625.000	15 Kel	59.750.000,00	27 Kel	59.750.000,00		0,95	Dinas Perikanan	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3 Kel	129.000.000	3 Kel	-	0,00	0	0,00	-	0,00	-	15 Kel	74.490.000,00	18 Kel	74.490.000,00		0,58	Dinas Perikanan	
4		Presentase Tingkat Pelanggaran Ilegal Fishing	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase Tingkat Pelanggaran Ilegal Fishing di waduk, sungai dan rawa	85%	121.000.000	85%	119.400.000	85 %	48.600.000	0,00	-	0,00	6.990.000	90%	34.760.000,00	90%	154.160.000,00		1,27	Dinas Perikanan
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan/Patrol	7 Lokasi	121.000.000	6 Lokasi	119.400.000	3 Lokasi	48.600.000	0	-	1 DOK	6.990.000	-	34.760.000	-	154.160.000,00		1,27	Dinas Perikanan	
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	7	121.000.000	6 Dokumen	119.400.000	6 Dokumen	48.600.000	0	0	1 DOK	6.990.000	6 Dok	34.760.000	12 Dok	154.160.000		1,27	Dinas Perikanan	
5		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Hasil Olahan	1.920 Ton	1.108.300.000	1.422,00	2.421.255.050	1502 Ton	1.410.736.000	0,00	5.616.000	0,00	77.570.000	1532 Ton	1.147.758.000,00	3.569.013.050,00		3,22	Dinas Perikanan	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	38,2 Kg/Kap/Th	458.300.000	48,6Kg/Kap/Th	97.023.450	58,40 Kg/Kap/Th	0	5.616.000	0	5.616.000	0	35.830.000	58,40 Kg/Kap/Th	163.784.000	107 Kg/Kap/Th	260.807.450		0,57	Dinas Perikanan
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah Data dan Informasi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	185.200.000	18	97.023.450	0	0	0	0	-	17.840.000	1 Dok	67.760.000	2 DOK	164.783.450		0,89	Dinas Perikanan	
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	30 Rekom	273.100.000	40 Rekom	0	0	0	28	5.616.000	-	17.990.000	50 Rekom	96.024.000	80 Rekom	96.024.000		0,35	Dinas Perikanan	
		Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasilitasi	20 Pelaku Usaha	421.000.000	0	-	51 Pelaku Usaha	1.070.500.000	0	-	0	0	20	726.895.000	60 PU	726.895.000		1,73	Dinas Perikanan	
		Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	20 Unit	421.000.000	0	-	15 Unit	1.070.500.000	0	-	0	0	17 Unit	726.895.000	32 Unit	726.895.000		1,73	Dinas Perikanan	
		Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah kelompok usaha pengolahan yang terbina	14 Kel	129.000.000	20	248.850.000	18 Kelompok	340.236.000	0	-	0	41.740.000	-	79.998.000	51 Kel	328.848.000	65 Kelompo k	2,55	Dinas Perikanan	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	129.000.000	0	248.850.000	20 Unit Usaha	340.236.000	0	-	0	41.740.000	-	79.998.000	20 Unit Usaha	328.848.000		2,55	Dinas Perikanan	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Mikro Kecil yang Dibina	28 Kel	15.000.000	0	0	40 Kel	340.236.000	0	-	0	0	30 Kel	90.000.000	58 Kel	90.000.000		6	Dinas Perikanan	
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	4 Unit Usaha	15.000.000	0	-	20 Unit Usaha	340.236.000	0	-	0	0	20 Unit Usaha	90.000.000	24 Unit Usaha	90.000.000		6	Dinas Perikanan	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Produksi Olahan Perikanan(Kg)	1256 Kg	85.000.000	1154 Kg	2.075.381.600	1502 Kg	1.070.500.000	0	-	0	0	1584 Kg	87.081.000	2.840 Kg	2.162.462.600		25,44	Dinas Perikanan	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasilitasi	2	85.000.000		2.075.381.600	51 Pelaku Usaha	1.070.500.000	0	-	0	0		87.081.000	51 PU	2.162.462.600		25,44	Dinas Perikanan	
Rata - rata capaian kinerja (5)																					
Predikst kinerja																					
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
JUMLAH PAGU PROGRAM 2025										11.291.253.914	Rp2.361.447.290									Dinas Perindagkop dan UKM	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	331.330.2.17.21.0000 -DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM					10.501.889.594,00		11.116.215.031,00	23	2.464.407.290,00		54	1323.040.064,00	46,31406629	23,47	2.464.407.290,00		13.480.172.321	1,28	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.747.736.014,00		7.706.746.936,00	29	2.214.360.690,00		48	1072.993.464,00	51,54387138	28,58	2.214.360.690		9.820.657.626	1,27	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Nilai/Pre dikat Sistem Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah ah (SAKIP) Disperindagkop dan UKM		7.747.736.014,00		7.706.746.936,00	28,58	2.214.360.690,00		48	1072.993.464,00	51,54387138	28,58	2.214.360.690,00		9.820.657.626	1,27	
		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentas e Pelayana n Publik yang tersele nggarakan secara terintegr asl	100	6.475.779.194,00	96	6.403.408.936,00	34,19	2.214.360.690,00		48	1072.993.464,00	51,54387138	34,19	2.214.360.690,00		8.617.769.626	1,33	Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evahuasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentas e Pemenuh an Pelaksa naan Kegiatan Perencana an Anggara n yang tepat sasaran	100	18.301.000,00	96	27.055.000,00	33	6.046.000,00		0	-	100	33,04	6.046.000	129,13%	33.101.000	1,81	Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA - SKPD	Jumlah Dokume n Perencan aan	100	-	0	-	0	-		0	-	0	0	-	-	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokume n Penyusa nan RKA -SKPD	100	9.165.000,00	100	14.880.000,00	0	-		0,00	-	0,00	0	-	-	14.880.000	1,62	Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokume n Perubaha n RKA -SKPD	100	1.880.000,00	100	2.305.000,00	0	-		0	-	0	0	-	-	2.305.000	1,23	Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokume n Perubaha n DPA -SKPD	100	1.210.000,00	63	1.900.000,00	0	-		0	-	0,00	0	-	-	1.900.000	1,57	Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokume n LKIP	100	6.046.000,00	100	7.970.000,00	100	6.046.000,00		0	-	100	100	6.046.000	200	14.016.000	2,32	Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e Pemenuh an Jasa Pembaya ran Gaji dan Tunjanga n Pegawai Disperindagkop dan UKM selama 1 tahun	100	5.421.101.744,00	99	4.569.167.418,00	37	2.003.295.886,00		49,00	982.249.464,00	51	36,95	2.003.295.886		6.572.463.304	1,21	Dinas Perindagkop dan UKM

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
-1	-2	-3	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-15
	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan Dinas	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentas e Pemenuh an Jasa Pembaya ran Gaji dan Tunjanga n Pegawai Dinas Perindag kop dan UKM selama 1 tahun	100	4.243.728.244,00	95	3.336.715.418,00	44	1.884.026.886,00	48	907.740.464,00	51,81913428	44,4	1.884.026.886,00	5.220.742.304	1,23		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokume n Penataus ahan dan Penguja n/Verifik asi Keuanga n SKPD	100	1.165.098.500,00	98,31	1.220.452.000,00	10	119.269.000,00	62	74.509.000,00	37,52861179	10,24	119.269.000,00	1.339.721.000,00	1,15		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	100	6.530.000,00	100	5.595.000,00	0	-	0	-	0	0	-	5.595.000	0,86		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan /Semeste ran SKPD dan Laporan Hsail Koordina si Penyusu nan Laporan Bulanan/ Triwulan /Semeste ran SKPD	100	5.745.000,00	100	6.405.000,00	0	-	0	-	0	0	-	6.405.000,00	1,11		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentas e pemenuh an Jasa Penyedia an bahan bacaan, rapat koordina si dan konsulta si selama 1 tahun	100	127.770.000,00	95	692.035.605,00	4	4.500.000,00	33	1.500.000,00	66,66666667	3,52	4.500.000,00	696.535.605	5,45		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundag undanga n yang disediakan	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	12	4.500.000,00	33	1.500.000,00	66,66666667	12	4.500.000,00	42.000.000,00	1,12		Dinas Perindagkop dan UKM	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	86.000.000,00	94,61	654.535.605,00	0	-	0	-	0	0	-	654.535.605,00	7,61		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	4.270.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	-	-	-		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum pada masyarakat	100	560.686.450,00	92,93	634.934.913,00	13	71.552.304,00	38	27.242.500,00	61.92645313	12,76	71.552.304,00	706.487.217,00	1,26		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	3.600.000,00	100	9.748.000,00	0	-	0	-	0	0	-	9.748.000	2,71		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	231.600.000,00	88,2	218.142.500,00	26	60.106.554,00	41,00	24.455.500,00	59.31308922	25,95	60.106.554	278.249.054	1,2		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	140.423.950,00	91,6	198.299.423,00	6,17	8.658.750,00	0	-	100	6,17	8.658.750,00	206.958.173,00	1,47		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	185.062.500,00	99,54	208.744.990,00	1,51	2.787.000,00	100	2.787.000,00	0	1,51	2.787.000,00	211.531.990,00	1,14		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan an jasa pemeliharaan barang milik daerah	100	347.920.000,00	97,37	480.216.000,00	37,07	128.966.500,00	48	62.001.500,00	51,92433694	37,07	128.966.500,00	609.182.500,00	1,75		Dinas Perindagkop dan UKM	
		2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	100	320.860.000,00	96,55	343.016.000,00	40,19	128.966.500,00	48	62.001.500,00	51,92433694	40,19	128.966.500,00	471.982.500,00	1,47		Dinas Perindagkop dan UKM	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
-1	-2	-3	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-15
		2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/ Rehabilitasi	100	27.060.000,00	99,49	137.200.000,00	0	-	0	-	0	0	-	137.200.000,00	5,07			Dinas Perindagkop dan UKM
	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi yang Sehat	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentasi Konsistensi Program Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	38.617.600,00	96,53	22.946.000,00	0	-	0	-	0	0	-	22.946.000,00	0,59			Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota	Prosentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	38.617.600,00	96,53	22.946.000,00	0	-	0	-	0	0	-	22.946.000,00	0,59			Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100	38.617.600,00	97	22.946.000,00	0	-	0	-	0	0	-	22.946.000,00	0,59			Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	Prosentasi Konsistensi Program Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi	100	-	99,26	100.450.000,00	0	-	0	-	0	0	-	100.450.000,00				Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan KoperasiSimpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi	100	-	99,26	100.450.000,00	0	-	0	-	0	0	-	100.450.000,00				Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit Koperasi yang dilakukan Penilaian Koperasi	100	-	99,26	100.450.000,00	0	-	0	-	0	0	-	100.450.000,00				Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentasi Konsistensi Program Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100	219.500.000,00	86,95	166.500.000,00	0	-	0	-	0	0	-	166.500.000,00				Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	Prosentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100	219.500.000,00	87	166.500.000,00	0	-	0	-	0	0	-	166.500.000,00				Dinas Perindagkop dan UKM

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100	110.250.000,00		87	166.500.000,00	0	-	0	-	0	0	-	166.500.000			Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		100	109.250.000,00		0	-	0	-	0	-	0	0	-	-			Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentasi Konsistensi Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100	1.013.839.220,00		99,96	1.013.442.000,00	0	-	0	-	0	0	-	1.013.442.000,00			Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.082.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Prosentasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100	1.013.839.220,00		99,96	1.013.442.000,00	0	-	0	-	0	0	-	1.013.442.000,00			Dinas Perindagkop dan UKM
		2.17.082.01.0006	Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100	1.013.839.220,00		100	1.013.442.000,00	0	-	0	-	0	0	-	1.013.442.000			Dinas Perindagkop dan UKM
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.754.153.580,00		75	3.409.468.095,00	9	250.046.600,00	100	250.046.600,00	0	9,08	250.046.600,00		3.659.514.695		Dinas Perindagkop dan UKM
		3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.263.433.000,00		99	2.814.646.500,00	3	69.986.600,00	100	69.986.600,00	0	3,09	69.986.600		2.884.633.100		Dinas Perindagkop dan UKM
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentasi konsistensi Program kegiatan Peningkatan sarana Distribusi	100	1.804.900.000,00		98,03	2.540.696.500,00	1,68	30.293.700,00	100	30.293.700,00	0	1,68	30.293.700,00		2.570.990.200,00		Dinas Perindagkop dan UKM
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentasi Pelaksanaan kegiatan Peningkatan sarana Distribusi	100	1.729.000.000,00		0	-	0	-	0	-	0	0	-	-			Dinas Perindagkop dan UKM
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		0	-		94	815.113.500,00	0	-	0	-	0	0	-	815.113.500			Dinas Perindagkop dan UKM
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan		100	1.729.000.000,00		99,8	1.725.583.000,00	0	-	0	-	0	0	-	1.725.583.000,00			Dinas Perindagkop dan UKM

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentas e Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana	100	75.900.000,00	99,19	273.950.000,00	39,91	30.293.700,00	100	30.293.700,00	0	39,91	30.293.700,00		304.243.700,00			Dinas Perindagkop dan UKM
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100	75.900.000,00	99	273.950.000,00	40	30.293.700,00	100	30.293.700,00	0	39,91	30.293.700,00		304.243.700			Dinas Perindagkop dan UKM
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentas e konsistensi Program Kegiatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	100	83.000.000,00	95	122.250.000,00	27	22.000.000,00	100	22.000.000,00	0	26,51	22.000.000,00		144.250.000			Dinas Perindagkop dan UKM
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentas e Pelaksanaan Kegiatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	100	83.000.000,00	94,77	122.250.000,00	26,51	22.000.000,00	100	22.000.000,00	0	26,51	22.000.000,00		144.250.000,00			Dinas Perindagkop dan UKM
		3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan Harga dan kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	100	83.000.000,00	95	122.250.000,00	27	22.000.000,00	100	22.000.000,00	0	26,51	22.000.000,00		144.250.000			Dinas Perindagkop dan UKM
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentas e konsistensi Program Kegiatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100	375.533.000,00	100	326.738.883,00	5	17.692.900,00	100	17.692.900,00	0	4,71	17.692.900,00		344.431.783			Dinas Perindagkop dan UKM

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentas e Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal, Tera,Tera Ulang dan Pengawa san	100	375.533.000,00	100	326.738.883,00	5	17.692.900,00	100	17.692.900,00	0	4,71	17.692.900,00	344.431.783			Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengk apan di tera ulang	100	375.533.000,00	99,99	326.738.883,00	4,71	17.692.900,00	100	17.692.900,00	0	4,71	17.692.900,00	344.431.783,00			Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentas e konsiste nsi Program Pengum aan dan Pemasara n Produk Dalam Negeri	0				0		0		0	0					Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Prosentas e Pelaksanaan Promosi, Pemasara n dan Peningka tan Produk Dalam Negeri	0				0		0		0	0					Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mempero leh fasilitasi promosi pengan an produk dalam negeri di tingkat kabupate n/kota	0				0		0		0	0					Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mempero leh fasilitasi pemasara n produk dalam negeri melalui kemitraa n dengan retal, martetpl ace, perhotelan dan jasa akomoda si	0				0		0		0	0					Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		100	490.720.580,00	97,75	594.821.595,00	36,69	180.060.000,00	100	180.060.000,00	0	36,69	180.060.000,00	774.881.595,00			Dinas Perindagkop dan UKM	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
		3.31.02	PROGAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase konsistensi Pencapaian Program Kegiatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100	0	99,82	366.738.450,00	0	0	0	0	0	0	0	366.738.450,00			Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.31.02.2.01	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	100	0	100	366.738.450,00	0	0	0	0	0	0	0	366.738.450			Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Fasilitas Sarana dan prasarana Industri yang dibangun	100	0	100	366.738.450,00	0	0	0	0	0	0	0	366.738.450			Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase konsistensi Pencapaian Program Kegiatan Pengendalian Ijin Usaha Industri	100	81.935.000,00	100%	117.991.500,00	0	77.100.000,00	0	77.100.000,00	0	0	77.100.000,00	195.091.500			Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Ijin Usaha Industri	100	81.935.000,00	100%	117.991.500,00	0	77.100.000,00	0	77.100.000,00	0	0	77.100.000,00	195.091.500,00			Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perjanjian berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem online single Submission Risk Base Approval (OSS RBA)		100	81.935.000,00	100%	117.991.500,00	94	77.100.000,00	100	77.100.000,00	0	94,1	77.100.000	195.091.500			Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase konsistensi Pencapaian Program Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri	100	408.785.580,00	89,43	110.091.645,00	25	102.960.000,00	100	102.960.000,00	0	25,19	102.960.000	213.051.645			Dinas Perindagkop dan UKM	
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Industri	100	408.785.580,00	89,43	110.091.645,00	25	102.960.000,00	100	102.960.000,00	0	25,19	102.960.000	213.051.645			Dinas Perindagkop dan UKM	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
-1	-2	-3	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-15
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis Data Industri/Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IRI yang telah di publikasi lewat Data Informasi Sinas	100	123.105.580,00	89,43	110.091.645,00	0	-	0	-	0	0	0	110.091.645,00	-	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
		3.31.04.2.01.0002	Diseminasi/Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas	100	128.480.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
		3.31.04.2.01.0002	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Perusahaan yang di pantau	100	157.200.000,00	-	66	102.960.000,00	100	102.960.000,00	0	65,5	102.960.000,00	-	102.960.000	-	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
JUMLAH PAGU PROGRAM 2025																				
									3.504.581.874						1.996.855.453					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah		30.000.000	8	8.018.463.039	0%	3.192.792.198						301.035.150		8.319.498.189	277.316.686		SATPOL PP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyelesaian laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		20.542.300	70,76	30.209.500	100%	85.017.790							30.209.500	1.470.599,00			SATPOL PP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun		14.040.800	0	-	3 Lap	69.656.790					1		69.656.790	4.961.027,10			SATPOL PP
		Koord. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0	-					0			0			SATPOL PP
		Koord. dan penyusunan lap capaian kinerja dan hitisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lap. Capaian kinerja yang disusun (LKIP)		6.501.500	1	9.483.000	1	2.940.000					1		9.483.000	0			SATPOL PP
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				20.726.500	3 Lap	15.067.000							20.726.500	0			SATPOL PP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase jumlah gaji, tunjangan ASN dan honorarium pejabat pengelola keuangan yang dibayarkan		6.932.800.372	88,35	7.163.927.851	100%	2.675.846.908							7.163.927.851	1.033.338,25			SATPOL PP
		Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		3.276.022.372	17	3.339.155.851	17	2.157.818.980		400.747.718,00		398.572.963		1.222.114.303	456.1270.154	3.982.319,99			SATPOL PP
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan/dok penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		3.656.778.000	7	3.824.772.000	2	-		306.836.000				306.836.000,00	4.131.688.000	1.129.049,28			SATPOL PP
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah			173.505.000	0	-	0	-							0				SATPOL PP
		Penyediaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakelan dinas yang diadakan		173.505.000	0	-	0	-					0			0			SATPOL PP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase jumlah kebutuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun		874.468.900	98,6	524.230.684	100%	210.610.000							524.230.684	0.599.484,65			SATPOL PP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan		304.994.900	1	-	1	1.637.500				31.000.000		31.000.000	31.000.000	0.101.641,00			SATPOL PP
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		103.940.000	3	142.593.500	3	109.610.000		20.337.200		9.320.000,00		37.657.000	180.250.500	4.737.148,00			SATPOL PP
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Jumlah paket barang yang dicetak dan pengadaan yang disediakan		16.200.000	1	5.000.000	1	3.750.000							5.000.000	0.308.641,97			SATPOL PP
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		449.426.000	20	376.637.184	10	95.665.000						36.274.000	412.911.184	0.910.752,12			SATPOL PP
		Pengadaan Barang Milik Daerah			100	14.194.000								0			0			SATPOL PP
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan mesin yang diadakan		4	14.184.000	0	-	-					0		14.184.000	0			SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		180.613.000	95,96	197.943.373	100%	141.330.000					69.624.900		267.568.273	1.481.445,26			SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		3.600.000	1	1.118.000	1	576.000						286.000	1.404.000	0,39			SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet		40.300.000	12	106.725.750	12	80.500.000		4.410.600,00		4.928.300,00		9.338.900	116.064.650	2.880.014,12			SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4	13.432.350	5	13.680.000								13.432.350	0			SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor		136.713.000	3	73.409.149	3	55.135.000				60.000.000,00		60.000.000	133.409.149	0.975.836,65			SATPOL PP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dalam 1 tahun		1.119.826.000	100	87.957.631	100%	79.987.500						231.410.250	319.367.881	0.285.194,20			SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya		954.242.000	11	82.203.631	11	73.190.000		1.050.000.000,00		126.410.250		231.410.250	313.613.881	0.328.652,89			SATPOL PP
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		165.584	4	5.754.000	4	6.797.500							5.754.000	34.749.740			SATPOL PP

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
Terselenggaranya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertibhan Umum	Prosentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertibhan Umum dalam satu daerah Kabupaten/Kota	100	#REF!	100%	311.789.676							#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	SATPOL PP		
	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertibhan Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Prosentase jumlah penduduk/warga negara yang patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	144.290.000	10.90%	57.595.000							0	-	144.290.000	#DIV/0!		SATPOL PP		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertibhan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi yang dihasilkan	0	-		-							0	-		#DIV/0!		SATPOL PP		
	Penyusunan SOP Ketertibhan Umum dan Ketertarikan masyarakat	Jumlah dokumen SOP Penanganan Gangguan ketertarikan dan ketertibhan Umum yang tersusun	400	144.290.000	100	57.595.000							0	-	144.290.000	#DIV/0!		SATPOL PP		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar PolPP dan uji Kompetensi bagi pejabat fungsional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Diklat																SATPOL PP		
	Penindakan atas gangguan Keamanan dan Ketertibhan umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan masa	Jumlah Laporan hasil kegiatan Penindakan atas gangguan Keamanan dan Ketertibhan umum																SATPOL PP		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Prosentase jumlah penduduk yang patuh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati/ Walikota	76	271.717.529	39.88%	60.970.200									271.717.529	#DIV/0!		SATPOL PP		
	Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisas Perda Perkada	60.970.200	0	4	60.970.200									0			SATPOL PP		
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Prosentase jumlah Pegawai yang menjadi PPNS	25.85	11.952.000	100%	123.186.200							0	61.939.000	73.891.000	#DIV/0!		SATPOL PP		
	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Jumlah Pegawai yang menjadi PPNS	123.186.200	2	2	123.186.200		61.939.000,00		61.939.000		61.939.000		61.939.000	8,50280794		SATPOL PP			
Rata - rata capaian kinerja (5)																				
Predikat kinerja																				
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja:																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
1	Meningkatnya Pengendalian Internal	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Terwujudnya Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	22.031.435.474		6.195.805.496	100%	7.194.863.130		152.000.000,00		395.060.000,00		547.060.000,00		6.742.865.496	30,61%	Inspektorat	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal		19.416.621.144		5.731.725.496		4.535.395.645		152.000.000,00		212.560.000,00		364.560.000,00		6.096.285.496	31,40%	Inspektorat	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja	32	1.147.004.320	0 Dak		8 OPD	293.339.200										Inspektorat	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Reviu dan Audit Keuangan Pemerintah Daerah	236	10.449.072.939	109 Lap		49 Lap	2.452.352.309	4 Lap	152.000.000,00	2 Lap	162.560.000,00		314.560.000,00				Inspektorat	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Direviu	94	398.601.800	3 Lap		1 Lap	78.219.000			1 Lap	50.000.000,00		50.000.000,00				Inspektorat	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD)	5	164.837.700	3 Lap		1 Lap	35.937.000										Inspektorat	
		Pengawasan Desa	Jumlah kampung yang terlibt dalam mengelola keuangan kampung	161	2.987.411.850	63 Lap		40 Lap	764.012.786										Inspektorat	
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Antar Pengawasan Internal	20	1.890.107.708	12 Keg		4 Keg	392.751.480										Inspektorat	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80%	1.189.792.414	70,31%		76%	259.391.935										Inspektorat	
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	80%	1.189.792.414	70,31%		76%	259.391.935										Inspektorat	
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		2.614.814.330		464.080.000		570.067.300				182.500.000,00	-	182.500.000,00		646.580.000	24,73%	Inspektorat	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Kasus TP-TGR Yang Diproses	100%	122.102.000	100%		100%	26.620.000										Inspektorat	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaan Khusus/Kasus pengaduan Masyarakat yang selesai Ditindaklanjuti	100%	2.492.712.330	100%	464.080.000	100%	543.447.300	7 Lap	182.500.000,00		182.500.000,00						Inspektorat	
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	100%	3.198.209.139		1.159.008.100		647.343.297		-		-	-	1.159.008.100		36,24%	Inspektorat		
		Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		215.375.718		301.610.000		46.955.018						301.610.000		140,04%	Inspektorat		
		Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Sesuai Standar	100%	107.687.859			100%	23.477.509										Inspektorat	
		Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitas Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitas Pengawasan Sesuai Standar	100%	107.687.859			100%	23.477.509										Inspektorat	
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Jumlah Pendampingan dan Asistensi		2.982.833.421		857.398.100		600.388.279						857.398.100		28,74%	Inspektorat		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang Terlaksana	25	228.941.250	15 OPD		5 OPD	49.912.500										Inspektorat	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/ WBIM	25	228.941.250	15 OPD		5 OPD	49.912.500										Inspektorat	
		Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat daerah yang Melakukan Pemenuhan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi / Sabar Pungli	100%	2.296.009.671	100%	857.398.100	100%	500.563.279										Inspektorat	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
		Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	228.941.250	0 Lap		1 Lap	49.912.500	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Inspektorat
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	100%	37.410.593.694		18.254.533.055		7.987.349.443		698.072.095		1.981.032.625	-	2.886.125.773,00		21.140.658.828		56,51%	Inspektorat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	215.375.718		79.376.000		46.955.018		-		-	-	-	-	79.376.000		36,85%	Inspektorat
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKA SKPD	5	107.687.859	3 Dok		1 Dok	23.477.509											Inspektorat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA, SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD	5	107.687.859	3 Dok		1 Dok	23.477.509											Inspektorat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		21.842.711.003		10.779.943.678		4.762.026.559		626.395.525,33		#####		2.328.249.203,00		13.108.192.881		60,01%	Inspektorat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji ASN yang Terbayarkan	100%	17.020.585.558	100%		100%	3.710.733.547		563.815.664,33		#####		2.136.249.342,00					Inspektorat
		Pelaksanaan Penatasaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Honorarium Tenaga Kontrak dan Tim Pelaksana Kegiatan yang Terbayarkan	100%	4.822.125.445	100%	10.779.943.678	100%	1.051.293.012		62.579.861,00		129.420.000,00		191.999.861,00					Inspektorat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.183.748.599		1.270.332.318		694.103.190		-		230.000.000,00		230.000.000,00		1.500.332.318		47,12%	Inspektorat
		Pengadaan pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase Pegawai Disiplin berpakaian dinas dalam bekerja	100%	192.005.395	100%		100%	41.859.950											Inspektorat
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Aparat Pengawas Yang Terdidik dan Terlatih	100%	2.991.743.204	100%	1.270.332.318	100%	652.243.240				230.000.000,00		230.000.000,00					Inspektorat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.927.963.283		3.332.769.196		1.552.457.131		71.676.570,00		256.200.000,00		327.876.570,00		3.660.645.766		52,84%	Inspektorat
		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	495.100.000	100%		100%	150.000.000											Inspektorat
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.720.947.103	100%		100%	375.191.331											Inspektorat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3.332.769.196				71.676.570,00				71.676.570,00					Inspektorat
		Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan																	Inspektorat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	4.711.916.180	100%		100%	1.027.265.800				256.200.000,00		256.200.000,00					Inspektorat
		Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		966.731.800		865.727.500		-		-		-		-		865.727.500		89,55%	Inspektorat
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Disediakan	7	230.000.000	3 Unit		0												Inspektorat
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Yang Terbangun	1	392.986.800	2 Unit	865.727.500	0												Inspektorat
		Pegadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Tersedia	100%	343.745.000	100%		0			-									Inspektorat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		926.575.911		534.891.556		202.006.935								534.891.556		57,73%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Surat Menyurat	100%	211.058.191	100%		100%	46.813.735											Inspektorat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang Terpenuhi	100%	553.854.672	100%	534.891.556	100%	120.748.320											Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	100%	161.663.048	100%		100%	35.244.880											Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.347.487.381		1.391.492.807		729.800.610								1.391.492.807		41,57%	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.	Persentase Kendaraan Dinas atau Lapangan Yang Terpelihara	100%	2.851.270.958	100%		100%	621.618.261											Inspektorat
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1.391.492.807													Inspektorat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau Bangunan Yang Terpelihara	100%	404.639.923	100%		100%	88.217.349											Inspektorat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Yang Terpelihara	100%	91.576.500	100%		100%	19.965.000											Inspektorat
Rata - rata capaian kinerja (5)																				
Predikat kinerja																				
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
1	Berkembangnya Pengelolaan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pengolah Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat		#####		129.071.000		283.309.000								129.071.000		3%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
	Pengembangan dan Keamanan Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-	129.071.000	-	129.071.000	99.171.000	-	-	-	-	-	-	-	129.071.000	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-	129.071.000	-	129.071.000	2 Laporan	99.171.000	-	-	-	-	-	-	129.071.000	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*****	-	-	-	184.138.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Penyusunan Ketersediaan Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	270.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
			Jumlah Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
			Jumlah Pengembangan Pengankaragaman Pangan	*****	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	*****	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
			Jumlah Laporan Pemberdayaan Pengembangan Konsumsi Berbasis sumber daya Lokal	-	-	-	100%	184.138.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Penyusunan Penanganan Kerawanan Pangan	50.000.000	69.100.000	-	69.100.000	94.504.000	-	-	-	-	-	-	-	69.100.000	-	138%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	50.000.000	69.100.000	-	69.100.000	94.504.000	-	-	-	-	-	-	-	69.100.000	-	138%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Laporan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	50.000.000	69.100.000	-	69.100.000	3 Dokumen	94.504.000	-	-	-	-	-	-	69.100.000	-	138%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	180.000.000	70.531.600	-	70.531.600	72.536.000	-	-	-	-	-	-	-	70.531.600	-	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	70.531.600	-	70.531.600	72.536.000	-	-	-	-	-	-	-	70.531.600	-	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB dan Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
4		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	*****	828.520.000	-	828.520.000	725.737.000	-	-	-	-	-	-	-	828.520.000	-	12%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*****	828.520.000	-	828.520.000	725.737.000	-	-	-	-	-	-	-	828.520.000	-	14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	528.820.000	-	528.820.000	12 Laporan	461.490.000	-	-	-	-	-	-	528.820.000	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan	*****	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
			Jumlah RMU Kelompok yang diperbaiki	-	299.700.000	-	299.700.000	1 Laporan	60.000.000	-	-	-	-	-	-	299.700.000	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengadaan Peralatan Pertanian	490.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
			Jumlah Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	540.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
			Jumlah Pengadaan Obat-obatan Pertanian	878.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
			Jumlah Pengadaan Pupuk Pertanian	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Pertanian	Jumlah Benih Bibit Sayur yang diadakan	-	-	-	-	1 Ton	204.247.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Penyediaan bibit/Benih Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang bersumber dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	725.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		Pengadaan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Hewan Pakan Ternak	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Pakan Ternak	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		Penjaminan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengadaan Pakan Ternak Ayam	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	*****	*****	-	*****	*****	-	-	-	-	-	-	-	*****	-	64%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	*****	*****	-	*****	*****	-	-	-	-	-	-	-	*****	-	63%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pembangunan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan Embung Pertanian	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
			Jumlah Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian	168.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
			Jumlah Pembangunan Prasarana Perkebunan	419.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan jalan Usaha Tani		#####		-		-		-		-		-		-		0%	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pembangunan Rumah Potong Hewan		-		-		-		-		-		-		-			
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pembangunan Pagar Hijauan Pakan Ternak		675.000.000		-		-		-		-		-		-		0%	
		Pengendalian dan Pemadatan Kawasan Pertanian	Jumlah Luas Kawasan Pertanian yang Termantapkan		-		#####	58 Ha	#####		-		-		-		#####			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengolahan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengolahan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000		-		-		-		-		-		-		0%	
		Pengolahan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		400.000.000		-		-		-		-		-		-		0%	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		-	289.920.000			66.588.000		-		-		-	289.920.000				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola		-	-		1 Dokumen	66.588.000		-		-		-	-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian		-	-			975.689.498		-		-		-	-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		-	-		100%	975.689.498		-		-		-	-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		400.000.000	-			-		-		-		-		-		0%	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		400.000.000	-			-		-		-		-		-		0%	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		400.000.000	-			-		-		-		-		-		0%	
6		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		#####	293.393.125			422.301.999		-		-		-	293.393.125			21%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemutupan dan Pembukaan Daerah Wahab Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemutupan dan Pembukaan Daerah Wahab Penyakit Hewan Menular		405.000.000	79.450.000			87.900.000		-		-		-	79.450.000			20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		405.000.000	-			-		-		-		-	-	-		0%	
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	79.450.000		1 Laporan	87.900.000		-		-		-	79.450.000				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		150.000.000	12.600.000			17.100.000		-		-		-	12.600.000			8%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					-	12.600.000			-		-		-		-	12.600.000				
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Sampel Darah Hewan Ternak		-	-			-		-		-		-	-				
			Jumlah Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem		150.000.000	-			-		-		-		-	-			0%	
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan		-	-		2 Laporan	17.100.000		-		-		-	-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Operasional Petugas Teknis Peternakan		-	-			-		-		-		-	-				
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner		846.000.000	142.843.125			231.621.999		-		-		-	142.843.125			17%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium		192.000.000	142.843.125			-		-		-		-	142.843.125			74%	
			Jumlah Pengadaan Obat-obatan Kesehatan Hewan		654.000.000	-			-		-		-		-	-			0%	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah alat dan bahan medik veteriner		-	-		2 Laporan	231.621.999		-		-		-	-				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			58.500.000			85.680.000		-		-		-	58.500.000				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah laporan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			58.500.000		1 Laporan	85.680.000		-		-		-	58.500.000				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian		#####	306.000.997			465.869.000		-		-		-	306.000.997			6%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		#####	306.000.997			465.869.000		-		-		-	306.000.997			6%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pembentukan Kelompok Tani dan Peternak		550.000.000	-			-		-		-		-	-			0%	
			Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPL		649.000.000	-			-		-		-		-	-			0%	
			Jumlah Laporan kegiatan		-	55.500.000		5 Unit	108.610.000		-		-		-	55.500.000				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Penyuluhan Pertanian		300.000.000	-			-		-		-		-	-			0%	

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Identifikasi CPCL Terkait Pascapanen Komoditi Pala		-		-		-		-		-		-		-		-	
			Jumlah Laporan kegiatan		-		196.500.997	5 Unit	59.460.000		-		-		-		196.500.997		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Perlengkapan PPL		200.000.000		-	-	-	-		-		-		-	-	-	0%	
			Jumlah Latihan dan Kunjungan PPL		810.000.000		-	-	-	-		-		-		-	-	-	0%	
			Jumlah Uang Kerja Bimbingan (UKB)		#####		-	-	-	-		-		-		-	-	-	0%	
			Jumlah BBM bagi PPL di 7 Distrik		896.000.000		-	-	-	-		-		-		-	-	-	0%	
			Jumlah Sekolah Lapang yang Terbentuk dan Beroperasi		-		54.000.000	5 Unit	297.799.000		-		-		-		54.000.000		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Petani dan Pelaku Usaha Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		400.000.000		-	-	-		-		-		-	-	-	0%		
			Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pascapanen Pala		-		-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	
			Jumlah Peserta Juru Sembelih Halal		100.000.000		-	-	-	-		-		-		-	-	-	0%	
8	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Dinas Yang Berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		#####		#####		#####		#####		#####		#####		#####		34%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		500.000.000		19.530.000		117.450.300		-		-		-		19.530.000		4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		200.000.000		-	1 Dokumen	77.127.100		-		-		-		-		0%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Data Pertanian		180.000.000		-	-	-		-		-		-		-		0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD yang disusun		-		8.620.000	1 Dokumen	19.700.100		-		-		-		8.620.000		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		120.000.000		-	-	-	-		-		-		-	-	-	0%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Sakip Dinas yang disusun		-		10.910.000	1 Laporan	20.623.100		-		-		-		10.910.000		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		#####		#####		#####		#####		#####		#####		#####		33%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran gaji tepat waktu selama 1 tahun		#####		#####	86 Org/Bln	#####		#####		#####		#####		#####		34%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		#####		-	-	-		-		-		-		-		0%	
	waktu Pembayaran Honor Penatausahaan Keuangan dan honor tenaga kontrak			-		#####	2 Dokumen	#####		-		216.741.000		216.741.000		#####		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		20.000.000		-	-	-		-		-		-		-		0%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		240.000.000		-	-	-		-		-		-		-		0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		240.000.000		-	-	-		-		-		-		-		0%		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-		-	-	-		-		-		-		-		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		#####		#####		#####		-		30.677.725		30.677.725		#####		70%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		70.000.000		11.980.000	1 Paket	13.650.500		-		-		-		11.980.000		17%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		110.000.000		249.644.820	3 Paket	156.583.105		-		30.677.725		30.677.725		280.322.545		255%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		90.000.000		21.703.800	1 Paket	21.703.800		-		-		-		21.703.800		24%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		80.000.000		93.993.369	3 Paket	94.013.000		-		-		-		93.993.369		117%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		30.000.000		58.410.000	3 Paket	73.417.000		-		-		-		58.410.000		195%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		110.000.000		-	-	-		-		-		-		-		0%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		#####		698.017.400	25 Laporan	733.079.000		-		-		-		698.017.400		70%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		804.000.000		416.684.040		487.522.400		-		-		-		416.684.040		52%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		40.000.000		14.230.000	1 Laporan	18.000.000		-		-		-		14.230.000		36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		624.000.000		211.533.040	3 Laporan	254.220.000		-		-		-		211.533.040		34%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		140.000.000		190.921.000	12 Laporan	215.302.400		-		-		-		190.921.000		136%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		32.000.000		-	-	-		-		-		-		-		0%		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		32.000.000		-	-	-		-		-		-		-		0%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		105.000.000		-	-	-		-		-		-		-		0%		
	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel		105.000.000		-	-	-		-		-		-		-		0%		

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		-15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		890.000.000		259.156.100		402.276.500				17.353.000		17.353.000		276.509.100		31%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		400.000.000		199.585.100	40 Unit	304.300.000				-		-		199.585.100		50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		200.000.000		59.571.000	22 Unit	64.253.000				17.353.000		17.353.000		76.924.000		38%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		290.000.000		-	12 Unit	33.723.500				-		-		-		0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rata - rata capaian kinerja (5)																				
Predikat kinerja																				
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1610	18.139.253.430	314	2.755.611.175	624	5.806.191.198	77	812.450.331	76	795.647.511	153	1.608.097.842	467	4.363.709.017	29%	24%	Distrik Kambrau
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	142.000.000	0	0	1	0	1	20.000.220	0	0	1	20.000.220	1	20.000.220	17%	14%	Distrik Kambrau
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	92.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kambrau
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kambrau
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	0	1	20.000.220	0	0	1	20.000.220	1	20.000.220	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kambrau
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1545	12.371.131.430	304	2.042.844.975	608	4.398.485.682	76	711.922.511	76	695.647.511	152	1.407.570.022	456	3.450.414.997	30%	28%	Distrik Kambrau
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1500	9.920.296.430	300	1.857.494.975	600	3.917.103.382	75	687.510.011	75	687.510.011	150	1.375.020.022	450	3.232.514.997	30%	33%	Distrik Kambrau
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	2.261.835.000	4	185.350.000	8	481.382.500	1	24.412.500	1	8.137.500	2	32.550.000	6	217.900.000	30%	10%	Distrik Kambrau
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kambrau
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	84.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kambrau
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	15	1.528.680.000	3	522.703.400	5	1.152.908.400	0	80.527.600	0	100.000.000	0	180.527.600	3	703.231.000	20%	46%	Distrik Kambrau
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	0	0	1	25.839.000	1	25.839.000	0	0	0	0	0	0	1	25.839.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kambrau
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1.272.000.000	1	404.849.400	2	929.604.400	0	80.527.600	0	100.000.000	0	180.527.600	1	585.377.000	20%	46%	Distrik Kambrau
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	136.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kambrau
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	120.000.000	1	5.765.000	2	11.465.000	0	0	0	0	0	0	1	5.765.000	20%	5%	Distrik Kambrau
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	86.250.000	0	186.000.000	0	0	0	0	0	0	0	86.250.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kambrau
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kambrau
		Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kambrau
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	288.542.000	2	63.962.800	4	91.097.116	0	0	0	0	0	0	2	63.962.800	13%	22%	Distrik Kambrau
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JumlahLaporanPenyediaanJasa Surat Menyurat	5	13.000.000	1	3.405.000	2	5.821.000	0	0	0	0	0	0	1	3.405.000	20%	26%	Distrik Kambrau
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	135.062.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kambrau
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	140.480.000	1	60.557.800	2	85.276.116	0	0	0	0	0	0	1	60.557.800	20%	43%	Distrik Kambrau
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	2.795.000.000	1	37.180.000	1	37.180.000	0	0	0	0	0	0	1	37.180.000	13%	1%	Distrik Kambrau
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	135.000.000	1	37.180.000	1	37.180.000	0	0	0	0	0	0	1	37.180.000	20%	28%	Distrik Kambrau

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4																	-15
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kamrau
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2.360.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kamrau
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	15	773.900.000	4	88.920.000	5	126.520.000	0	0	0	0	0	0	4	88.920.000	27%	11%	Distrik Kamrau
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	471.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kamrau
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	4	88.920.000	5	126.520.000	0	0	0	0	0	0	4	88.920.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kamrau
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	142.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kamrau
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25	1.114.960.000	5	137.355.501	5	137.355.501	0	0	0	0	0	0	5	137.355.501	20%	12%	Distrik Kamrau
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Terseleenggaranya Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	25	1.114.960.000	5	137.355.501	5	137.355.501	0	0	0	0	0	0	5	137.355.501	20%	12%	Distrik Kamrau
		Koordinasi/Sinergi dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25	1.114.960.000	6	137.355.501	6	137.355.501	0	0	0	0	0	0	6	137.355.501	24%	12%	Distrik Kamrau
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	45	2.876.000.000	4	0	8	148.590.500	4	56.492.190	0	0	0	0	4	56.492.190	9%	2%	Distrik Kamrau
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	45	2.876.000.000	4	0	8	148.590.500	4	56.492.190	0	0	0	0	4	56.492.190	9%	2%	Distrik Kamrau
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20	870.500.000	4	0	8	148.590.500	4	56.492.190	0	0	0	0	4	56.492.190	20%	6%	Distrik Kamrau
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	2.005.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Distrik Kamrau
4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	350	88.973.000	700	172.127.590	0	0	0	0	0	0	350	88.973.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	350	88.973.000	700	172.127.590	0	0	0	0	0	0	350	88.973.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Republik Indonesia	0	0	350	88.973.000	700	172.127.590	0	0	0	0	0	0	350	88.973.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
5	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes Tepat Waktu	0	0	0	0	1	49.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	1	49.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0	0	1	49.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
6	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik	Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan transhumitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terseleenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Distrik Kamrau
Rata - rata capaian kinerja (5)																				Distrik Kamrau

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-12		13 = 6 + 12		14 = 13/ 5 x 100%		-15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :								Prediksi kinerja											Distrik Kambrau
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :			Kurangnya Program/Kegiatan Urusan Kecamatan yang Dibutuhkan di dalam Renstra, Tidak Terpenuhi Struktur Jabatan Kantor Distrik yang Berdampak pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab, Sarana dan Prasarana Pendukung, Tidak Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Serta Tidak Terdapat Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran																Distrik Kambrau

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 2025

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Dinas Kesehatan	18.57%				
2	RSUD Kab Kaimana	2.97%				
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	0.12%				
4	Satuan Polisi Pamong Praja	4.75%				
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.31%				
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.39%				
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	4.23%				
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	8.26%				
9	Dinas Pertanahan, Perumahan & Kawasan Permukiman	0.11%				
10	Dinas Lingkungan Hidup	14.80%				
11	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	19.08%				
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung	4.52%				
13	Dinas Perhubungan	0.67%				
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	4.81%				
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	3.15%				
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja	3.54%				
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.90%				
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.48%				
19	Dinas Perikanan	5.18%				
20	Dinas Pendidikan , Pemuda & Olah Raga	10.59%				
21	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	4.93%				
22	Sekretariat Daerah	8.62%				

23	Sekretariat DPRD	7.49%				
24	Distrik Kaimana	8.15%				
25	Kelurahan Kaimana Kota	0.72%				
26	Kelurahan Krooy	0.45%				
27	Distrik Teluk Arguni	16.26%				
28	Distrik Teluk Etna	7.74%				
29	Distrik Buruway	16.63%				
30	Distrik Kambrau	11.74%				
31	Distrik Yamor	5.64%				
32	Distrik Arguni Bawah	10.13%				
33	Inspektorat	4.70%				
34	Bappeda, Penelitian dan Pengembangan	7.79%				
35	Badan Pendapatan Daerah	6.49%				
36	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	4.80%				
37	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Aparatur	6.97%				
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.47%				

Adapun realisasi kinerja dan penyerapan anggaran masing masing perangkat daerah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan

Rata - rata capaian kinerja pada dinas kesehatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 18,57% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp. 157.786.931.496 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 67.987.358.275 atau sebesar 43.09%.

2. RSUD

Rata - rata capaian kinerja pada RSUD Kaimana sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 2,97% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran RSUD tahun 2025 sebesar Rp. 58.252.819.801 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 10.040.490.778 atau sebesar 17,24%.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0.12% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 sebesar Rp. 72.590.820.131 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.499.848.863 atau sebesar 3.44%

4. Satuan Polisi Pamong Praja

Rata - rata capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 32,47% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sebesar Rp. 3.504.581.874 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.996.855.453 atau sebesar 32,47%.

5. Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0,11% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Pertanahan, Perumahan dan Ketahanan Pangan tahun 2025 sebesar Rp. 46.708.740.508 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.561.549.150 atau sebesar 3,34 %.

6. Badan Pendapatan Daerah

Rata - rata capaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 6,49% masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 9.324.260.043, sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.374.497.558 atau sebesar 25,47 %.

7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 10,59% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2025 sebesar Rp. 242.620.097.357 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 78.966.767.796 atau sebesar 32,55 %.

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,52% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tahun 2025 sebesar Rp. 12.749.969.384, sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.711.842.428 atau sebesar 21,27 %.

9. Dinas Lingkungan Hidup

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 14,80% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebesar Rp. 9.460.244.581 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 3.634.558.528 atau sebesar 38.47%.

10. Sekretariat Daerah

Rata - rata capaian kinerja pada Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 11,02% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 85.936.010.325 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 28.532.196.784 atau sebesar 33,20 %.

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rata - rata capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 19,08% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sebesar Rp. 4.860.654.231 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.132.553.864 atau sebesar 43,87%.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rata - rata capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 21,39% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran pada triwulan II Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 3.515.843.446 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.625.906.829 atau sebesar 46,25%.

13. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Rata - rata capaian kinerja pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 7,79% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 sebesar Rp. 18.508.741.162 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 5.165.201.721 atau sebesar 27,91%.

14. Sekretariat Dewan

Rata - rata capaian kinerja pada Sekretariat Dewan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,34% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Sekretariat Dewan tahun 2025 sebesar Rp. 53.496.082.851 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 11.148.167.559 atau sebesar 20,84%.

15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 16,48% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp. 5.380.256.826 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 2.184.104.810 atau sebesar 40,59%.

16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,81% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 sebesar Rp. 8.989.124.074 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.971.408.034 atau sebesar 21,93%.

17. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

Rata - rata capaian kinerja pada badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 6,97% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia tahun 2025 sebesar Rp. 8.971.251.377 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 2.368.680.726 atau sebesar 26,40%.

18. Dinas Perindagkop dan UKM

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 3,15 % atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perindagkop dan UKM tahun 2025 sebesar Rp. 11.291.253.914 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 2.003,295.886 atau sebesar 17,74%.

19. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,93% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 sebesar Rp. 18.097.153.447 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 4.018.741.381 atau sebesar 22,21%.

20. Inspektorat

Rata - rata capaian kinerja pada Inspektorat sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,70% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Inspektorat tahun 2025 sebesar Rp. 15.829.555.869 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 3.433.185.773 atau sebesar 21,69%.

21. Dinas Perhubungan

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0,67% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2025 sebesar Rp. 34.924.348.973 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.851.248.731 atau sebesar 8,16%.

22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,90% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 sebesar Rp. 7.583.807.878 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.678.097.272 atau sebesar 22,13%.

23. Dinas Perikanan

Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 5,18% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perikanan tahun 2025 sebesar Rp. 16.485.586.692 dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 3.752.613.407 atau sebesar 26,36%

24. Distrik Kambrau

Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Kambrau sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 6,95% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Distrik Kambrau tahun 2025 sebesar Rp. 6.314.189.789, sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 1.664.590.032 atau sebesar 26,36%.

25. Distrik Kaimana

Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Kaimana sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 8,15% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Distrik Kaimana tahun 2025 sebesar Rp. 15.044.961.362 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 4.295.238.028 atau sebesar 28,55%.

26. Distrik Yamor

Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Yamor sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 5,64% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Distrik Yamor tahun 2025 sebesar Rp. 3.494.901.676 dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 830.031.923 atau sebesar 27,81 %

27. Distrik Teluk etna

Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Teluk Etna sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 7,74% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Distrik Teluk Etna tahun 2025 sebesar Rp. 3.397.190.119 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp.944.857.117 atau sebesar 27,81%.

28. Distrik Teluk Arguni

Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Teluk Arguni sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 16,26% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Distrik Teluk Arguni tahun 2025 sebesar Rp. 5.634.799.383 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.271.881.740 atau sebesar 40,32 %

29. Distrik Arguni Bawah

Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Teluk Arguni Bawah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 10,13% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Distrik Teluk Arguni Bawah tahun 2025 sebesar Rp. 4.420.130.442% Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 1.406.708.777 atau sebesar 31,83%.

30. Distrik Buruway

Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Buruway sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 16,63% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Distrik Buruway tahun 2025 sebesar Rp. 4.248.703.458 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 1.732.469.951 atau sebesar 40,78%

31. Kelurahan Kaimana Kota

Rata - rata capaian kinerja pada Kelurahan Kaimana Kota sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0,72% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Kelurahan Kaimana Kota tahun 2025 sebesar Rp. 1.327.789.550 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 112.500.00

32. Kelurahan Krooy

Rata - rata capaian kinerja pada Kelurahan Krooy sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0,45% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran pada Kelurahan Krooy tahun 2025 sebesar Rp. 1.465.246.480 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 98.480.000 atau sebesar 6,72%.

33. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rata - rata capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar % atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 sebesar Rp. 6.262.630.985 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp..... (data realisasi 2025 tidak di isi)

34. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rata - rata capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,80% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 201.507.876.950 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 44.133.817.751 atau sebesar 21,90%.

35. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Rata - rata capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,99% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja tahun 2025 sebesar Rp. 11.291.253.914 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.521.126.290 atau sebesar 22,33%.

36. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rata - rata capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 8,26% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 sebesar Rp. 7.279.959.468 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.092.428.030 atau sebesar 28,74%.

37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rata - rata capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 6,31% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebesar Rp. 11.385.498.906 dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.859.113.584 atau sebesar 25,11%.

38. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata - rata capaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,23% atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebesar Rp. 12.318.422.756 dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.534.591.339 atau sebesar 20,58%.

2.3 Permasalahan Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

RKPD Tahun 2025 merupakan tahun awal dalam periodisasi RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang berisikan penjabaran visi dan misi bupati terpilih yang telah dilantik pada Februari 2025. Dengan adanya kondisi masa transisi dalam pemerintahan, maka secara otomatis ada perubahan arah kebijakan dan program prioritas dalam RKPD Tahun 2025, termasuk target, tujuan dan sasaran pembangunan.

1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

- 1) Rendahnya capaian mutu dan pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah;
- 2) Terbatasnya akses dan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat;
- 3) Belum optimalnya jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial bagi kelompok rentan;
- 4) Rendahnya produktivitas tenaga kerja akibat minimnya keterampilan dan pelatihan kerja yang relevan;

- 5) Kontribusi UMKM terhadap PDRB masih rendah, karena keterbatasan akses terhadap modal usaha, pasar, teknologi dan pendampingan usaha;
- 6) Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah masih tinggi, ditandai oleh terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di beberapa distrik tertentu dan lemahnya infrastruktur ekonomi di distrik lainnya;
- 7) Belum kuatnya kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi, BUMkam, dan sentra produksi rakyat, dalam menjalankan fungsi intermediasi ekonomi masyarakat;
- 8) Struktur perekonomian daerah masih didominasi sektor primer (pertanian dan perikanan) dengan minim hilirisasi dan keterhubungan dengan sektor sekunder (pengolahan) dan tersier (jasa);
- 9) Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih terbatas, khususnya di wilayah kampung dan distrik terpencil, yang menghambat pengembangan usaha dan tabungan produktif;
- 10) Belumnya optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan produk khas lokal yang dapat mendorong diversifikasi ekonomi daerah;
- 11) Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya akuntabel dan berorientasi hasil;
- 12) Kualitas dan kompetensi aparatur belum merata di seluruh perangkat daerah dan distrik;
- 13) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan masih terbatas dan belum terintegrasi;
- 14) Keterbatasan jangkauan pelayanan publik akibat luas wilayah dan kondisi geografis yang belum diimbangi dengan jumlah dan sebaran wilayah administrasi ;

- 15) Terbatasnya jangkauan dan kualitas infrastruktur dasar antarwilayah yang menghambat pemerataan pembangunan dan mobilitas masyarakat;
- 16) Meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat praktik pembangunan yang belum berwawasan lingkungan;
- 17) Tingginya kerentanan sebagian wilayah terhadap bencana alam dan rendahnya kapasitas mitigasi bencana daerah;
- 18) Implementasi penataan ruang belum optimal dalam mengarahkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terkendali;
- 19) Peran lembaga keagamaan dalam pembinaan sosial belum optimal;
- 20) Pelestarian nilai dan praktik budaya lokal belum terintegrasi dalam pembangunan daerah;
- 21) Kohesi sosial dan representasi masyarakat adat dalam pemerintahan belum mencerminkan semangat kebhinekaan dan otonomi khusus.

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Perubahan RKPD Tahun 2025 bertujuan mengakomodir Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi Pemerintah Kaimana yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD 2025-2029. Ini berarti bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun Pertama pelaksanaan RPJMD. Dengan demikian maka ada hal-hal yang perlu dibenahi terkait arah kebijakan pembangunan, termasuk prioritas dan sasaran pembangunan harus terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, antara lain :

- 1) Pemerataan penempatan guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan di distrik terpencil;
- 2) Menumbuhkan budaya belajar dan membaca;
- 3) Percepatan pelaksanaan pendidikan inklusif;

- 4) Inovasi layanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi;
- 5) Fasilitasi dan penguatan kapasitas bagi calon peserta didik yang akan menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi pada sekolah kedinasan;
- 6) Penguatan fasilitas puskesmas dan distribusi tenaga medis ke seluruh distrik;
- 7) Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta program percepatan penurunan stunting;
- 8) Membudayakan perilaku hidup sehat dan gemar olahraga;
- 9) Pembentukan Blud untuk layanan kesehatan;
- 10) Pembiayaan bagi dokter anak asli papua untuk menempuh pendidikan spesialis;
- 11) Pemutakhiran data DTKS dan penguatan sistem koordinasi program perlindungan sosial;
- 12) Perluasan cakupan bantuan sosial berbasis komunitas bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak);
- 13) Pengembangan BLK komunitas dan kolaborasi pelatihan berbasis dunia usaha lokal;
- 14) Penguatan kerjasama dunia usaha dalam penyerapan lulusan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja lokal;
- 15) Fasilitasi pembiayaan mikro, inkubasi bisnis, dan digitalisasi pemasaran UMKM;
- 16) Penguatan Kapasitas manajerial UMKM dan pengembangan kemitraan usaha lokal;
- 17) Penguatan kerjasama dengan instansi vertikal terkait pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan;
- 18) Penguatan infrastruktur ekonomi dan pembentukan sentra pertumbuhan baru di distrik;
- 19) Pengembangan ekonomi kampung berbasis potensi komoditas lokal secara terintegrasi;

- 20) Penguatan kapasitas manajemen koperasi, dan revitalisasi kelembagaan ekonomi desa;
- 21) Peningkatan dukungan teknis dan akses permodalan kelembagaan ekonomi lokal;
- 22) Pembangunan fasilitas industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- 23) Penguatan jaringan logistik dan rantai pasok komoditas unggulan daerah;
- 24) Pendirian BUMD;
- 25) Peningkatan literasi keuangan berbasis kampung serta perluasan layanan keuangan digital;
- 26) Perluasan akses masyarakat pada layanan keuangan berupa pinjaman modal berupa pinjaman modal dari Bank yang dijamin oleh Pemerintah Daerah;
- 27) Peningkatan kapasitas SDM pariwisata, promosi destinasi dan penguatan ekowisata;
- 28) Pengembangan produk ekowisata berbasis budaya lokal dan konservasi lingkungan;
- 29) Pengembangan kawasan Teluk Triton dengan memperhatikan pelibatan aktif masyarakat sekitar, kearifan budaya lokal, serta kelestarian ekosistem pesisir dan laut;
- 30) Optimalisasi SAKIP, penguatan pengawasan kinerja dan transparansi anggaran;
- 31) Peningkatan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja pada seluruh perangkat daerah;
- 32) Peningkatan pelatihan teknis dan manajerial ASN berbasis kebutuhan jabatan;
- 33) Penguatan sistem merit dan perencanaan kebutuhan SDM ASN berbasis kompetensi;
- 34) sistem layanan digital terintegrasi untuk pelayanan publik;
- 35) Perluasan kanal layanan publik berbasis aplikasi digital terpadu lintas perangkat daerah;

- 36) Penyediaan sarana prasarana pemerintahan pada tingkat kampung dan distrik;
- 37) Penguatan kapasitas distrik sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik;
- 38) Percepatan pembangunan jalan penghubung antar distrik dan akses kampung terpencil;
- 39) Peningkatan infrastruktur transportasi multimoda (darat, laut, udara) untuk wilayah terpencil;
- 40) Percepatan penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif melalui KPBU dan/atau pinjaman daerah serta pelaksanaan kegiatan secara tahun jamak;
- 41) Penguatan pengawasan pemanfaatan ruang dan penerapan kajian daya dukung lingkungan;
- 42) Peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang berbasis peta tematik terpadu;
- 43) Peningkatan kapasitas lembaga kebencanaan, sistem peringatan dini, dan edukasi bencana;
- 44) Penguatan integrasi sistem pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas dan distrik;
- 45) Integrasi rencana tata ruang sektoral dan penegakan kepatuhan RTRW daerah;
- 46) Pemutakhiran dokumen RTRW berbasis data geospasial aktual dan mitigasi risiko bencana;
- 47) Penguatan peran forum komunikasi lintas agama di tingkat distrik dan kampung;
- 48) Peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama dan penguatan pendidikan karakter sosial;
- 49) Integrasi nilai budaya lokal dalam kurikulum pendidikan;
- 50) Inventarisasi nilai adat, budaya dan agama;

- 51) Penguatan kelembagaan adat dalam musyawarah pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah;
- 52) Penguatan representasi OAP dalam lembaga legislatif dan eksekutif daerah;
- 53) Meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam berdemokrasi;
- 54) Penyediaan pendampingan dan bantuan hukum bagi OAP;
- 55) Peningkatan kapasitas kepemimpinan politik dan pemberdayaan kader AOP dalam pemerintahan daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap mengacu pada target dan sasaran pada RPJMD Tahun 2025 – 2029, tetapi juga mengakomodir program-program prioritas pada visi dan misi bupati terpilih yang akan dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah itu haruslah terpadu, terintegrasi, sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya dan dapat diukur serta memiliki parameter/indikator yang jelas sehingga dapat dievaluasi berkesinambungan. Dalam pemahaman itu pula maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian arah kebijakan prioritas pembangunan daerah yang bersumber visi-misi KDH/WKDH pada Perubahan RKPD Tahun 2025 harus dapat memetakan program-kegiatan dan target indikator kinerja dan alokasi pembiayaan yang mencerminkan kebijakan tahun Pertama dari kerangka RPJMD Kabupaten Kaimana 2025-2029.
2. Capaian Semester I Tahun 2025 akan menjadi informasi utama dalam penentuan skala prioritas dan strategi alokasi anggaran dalam tahun berikutnya.

3. Diperlukan kesepahaman ditingkat pelaku dan pemangku peran dalam melaksanakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan penuh komitmen dan konsekuen. Selain itu diperlukan juga penyeragaman pemahaman tentang indikator kinerja dan cara mencapainya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kaimana

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. PDRB terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik infrastruktur, kebijakan, kontribusi sektoral dan seterusnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang menggambarkan kondisi ekonomi daerah dalam rentang waktu tertentu.

Perhitungan PDRB dengan pendekatan manapun harus dilakukan dengan dua cara, yaitu Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perhitungan PDRB kabupaten Kaimana didasarkan pada 17 jenis lapangan usaha. Besaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.095,88 miliar atau naik 6,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.914,73 miliar. Berikut tabel dan diagram perkembangan PDRB Kabupaten Kaimana tahun 2020 s.d 2024.

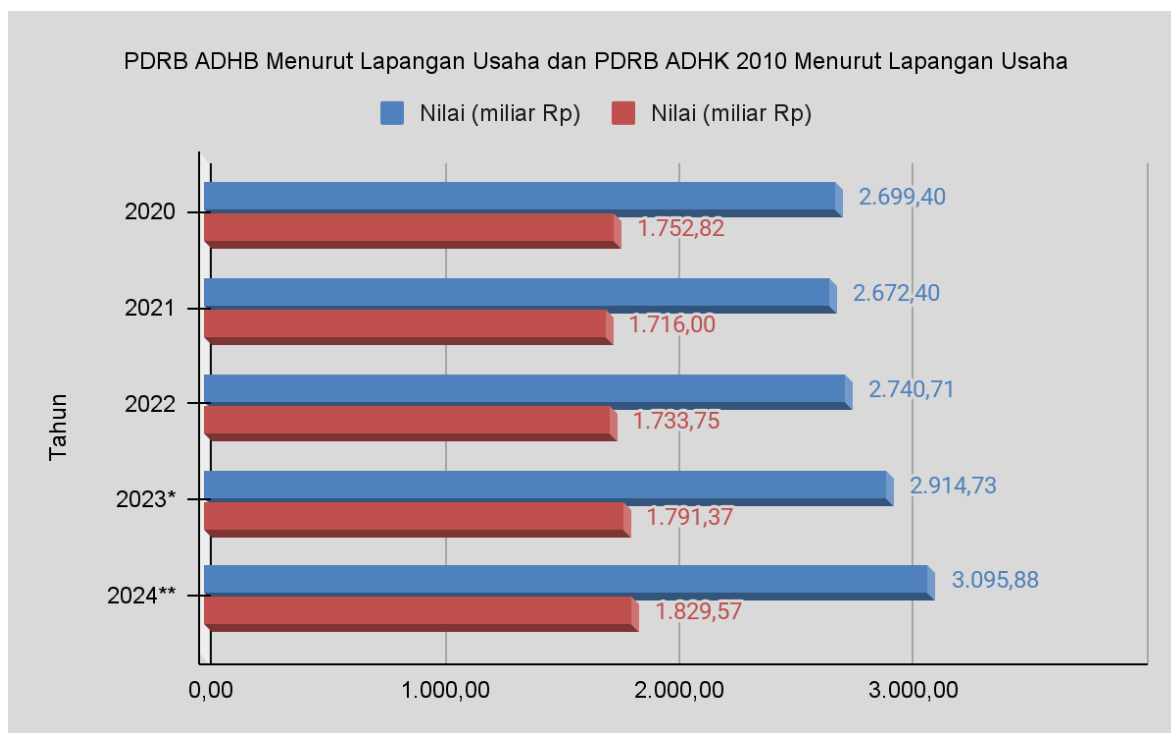
Tabel 3.1.1 PDRB Kabupaten Kaimana 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
	Nilai (miliar Rp)	Nilai (miliar Rp)
2020	2.699,40	1.752,82
2021	2.672,40	1.716,00
2022	2.740,71	1.733,75
2023*	2.914,73	1.791,37
2024**	3.095,88	1.829,57

Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Diagram 3.1.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Kaimana 2020-2024

Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

Pertumbuhan Ekonomi Agregat

Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut pada suatu periode atau satu tahun. Secara *makro* pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaimana dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010. Perubahan penggunaan Tahun Dasar ADHK dari semula ADHK 2000 menjadi ADHK 2010 sebagai bentuk adaptasi pencatatan statistik secara nasional terhadap perkembangan eksternal guna menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Struktur Perekonomian Kabupaten Kaimana

Dengan melihat sumbangan sektoral PDRB Kabupaten Kaimana menunjukkan bahwa kontribusi terbesar masih disumbangkan oleh sektor pertanian dalam arti luas walaupun perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Setiap sektor berkontribusi terhadap pembentukan PDRB sehingga perubahan yang terjadi baik minimum akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Tabel 3.1.2 Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kaimana Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	26,50	27,04	26,66	25,80	24,20
B	Pertambangan dan Penggalan/Mining and Quarrying	1,06	1,08	1,09	1,11	1,15
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	5,52	5,67	5,69	5,73	5,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10

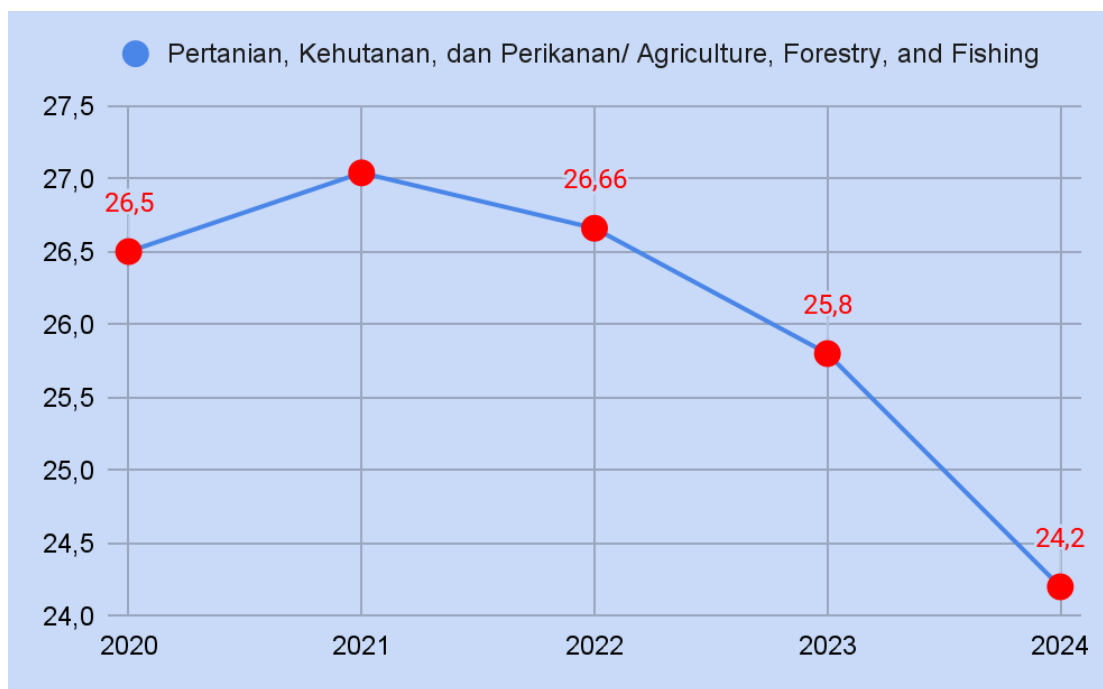
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05
F	Konstruksi/Construction	20,73	20,03	18,98	18,90	19,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	11,05	11,58	11,94	12,65	12,73
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4,68	5,04	5,21	5,24	5,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,80	0,84	0,90	0,94	0,96
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	1,97	2,10	2,09	2,21	2,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1,55	1,52	1,59	1,69	1,63
L	Real Estat/Real Estate Activities	1,87	1,90	1,88	1,95	2,10
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	21,10	19,92	20,67	20,38	21,09
P	Jasa Pendidikan/Education	1,70	1,72	1,71	1,74	1,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,81	0,88	0,90	0,93	0,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,44	0,46	0,47	0,49	0,52
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

**Diagram 3.1.2 Perkembangan Persentase Sektor Pertanian PDRB
Kabupaten Kaimana Tahun 2020-2024**



Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

**Tabel 3.1.3 Laju Pertumbuhan Rill Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2020-2024**

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	-3,37	-0,06	-0,09	1,19	-0,41
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-5,18	0,22	0,84	7,01	4,75
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	-0,47	-0,12	1,73	2,19	0,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	9,71	5,52	3,75	3,99	6,23
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,78	-0,04	-3,18	6,44	3,38
F	Konstruksi/Construction	-0,59	-5,06	-3,11	2,35	4,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,42	1,77	3,50	8,87	2,82
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	-13,04	4,05	3,18	2,02	0,27

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-8,99	2,47	7,47	4,15	4,44
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	8,65	1,71	0,09	8,46	2,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	6,20	-5,76	0,53	7,46	1,88
L	Real Estat/Real Estate Activities	-0,79	0,41	0,72	4,26	3,58
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-5,80	0,65	2,53	8,16	6,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-7,26	-8,05	4,25	2,51	2,88
P	Jasa Pendidikan/Education	-2,24	-0,38	1,60	5,70	5,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	10,18	5,61	2,26	9,80	5,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-1,86	0,66	2,31	5,75	6,32
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-2,83	-2,10	1,03	3,32	2,13

Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

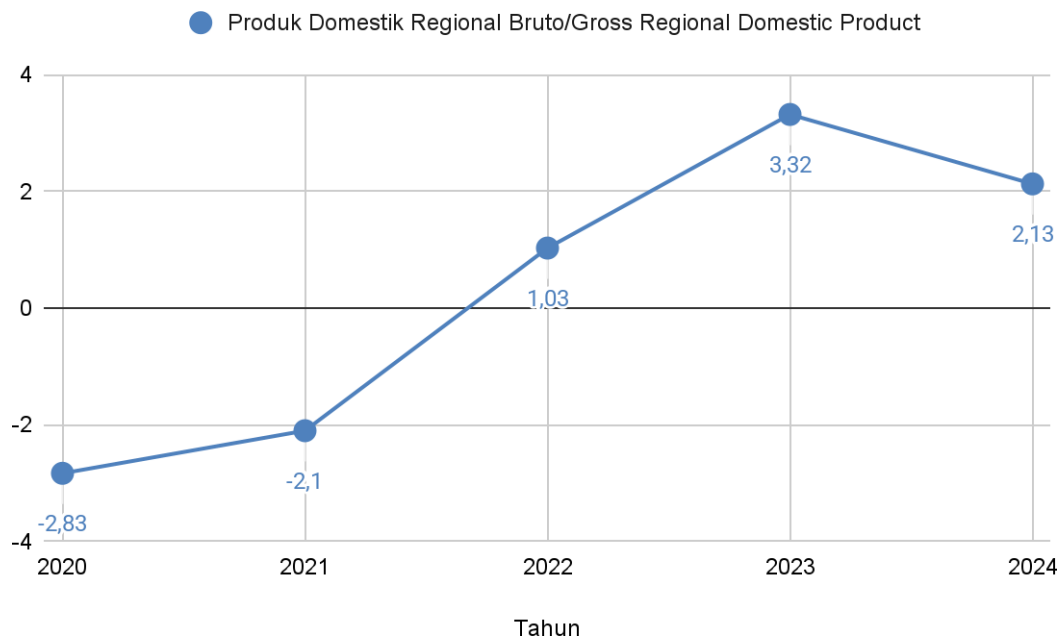
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor

Besaran laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya bila negatif menunjukkan terjadinya perlambatan. Perekonomian Kabupaten Kaimana pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada angka 3,26 persen sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,13 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaimana dalam periode tahun 2024 nilai pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1,13 persen.

Diagram 3.3 Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

Analisis Share Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Analisa share bertujuan untuk mengetahui sejauh mana besaran kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB dan sumbangannya terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.4 Sumbangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kaimana Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		Peranan (Share) PDRB Menurut Lapangan Usaha					Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2020	2021	2022	2023*	2024**	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	26,50	27,04	26,66	25,80	24,20	-3,37	-0,06	-0,09	1,19	-0,41
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1,06	1,08	1,09	1,11	1,15	-5,18	0,22	0,84	7,01	4,75
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	5,52	5,67	5,69	5,73	5,67	-0,47	-0,12	1,73	2,37	0,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	9,71	5,52	3,75	3,99	6,23

E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	1,78	-0,04	-3,18	6,44	3,38
F	Konstruksi/Construction	20,73	20,03	18,98	18,90	19,40	-0,59	-5,06	-3,11	2,35	4,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	11,05	11,58	11,94	12,65	12,73	2,42	1,77	3,50	8,87	2,82
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4,68	5,04	5,21	5,24	5,38	-13,04	4,05	3,18	2,02	0,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,80	0,84	0,90	0,94	0,96	-8,99	2,47	7,47	4,15	4,44
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1,97	2,10	2,09	2,21	2,16	8,65	1,71	0,09	8,46	2,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1,55	1,52	1,59	1,69	1,63	6,20	-5,76	0,53	7,46	1,88
L	Real Estat/Real Estate Activities	1,87	1,90	1,88	1,95	2,10	-0,79	0,41	0,72	4,26	3,58
M, N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	-5,80	0,65	2,53	8,16	6,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	21,10	19,92	20,67	20,38	21,09	-7,26	-8,05	4,25	2,51	2,88
P	Jasa Pendidikan/Education	1,70	1,72	1,71	1,74	1,81	-2,24	-0,38	1,60	5,70	5,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,81	0,88	0,90	0,93	0,97	10,18	5,61	2,26	9,80	5,90
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,44	0,46	0,47	0,49	0,52	-1,86	0,66	2,31	5,75	6,32
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-2,83	-2,10	1,03	3,32	2,13

Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh peranan sektoral terhadap nilai PDRB, tetapi juga oleh laju pertumbuhan sektoral itu sendiri. Sektor Pertanian merupakan

penyumbang terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi peranan (share) sebesar 24,20%. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan riil PDRB menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana terjadi peningkatan maupun penurunan pada sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi jika dibanding dengan tahun 2023, misalnya pada sektor pertanian yang mengalami penurunan sebesar 1,6%, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar 2,26% dan juga sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang juga mengalami penurunan sebesar 3,06% sedangkan kenaikan terjadi pada sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib mengalami kenaikan sebesar 0,37%.

3.1.2 PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Kaimana tahun 2024 sebesar Rp. 48,27 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 44,50 juta, maka pendapatan perkapita Kabupaten Kaimana mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,8 Juta. Yang artinya pendapatan tiap penduduk Kabupaten Kaimana pada tahun 2024 secara rata-rata sebesar Rp. 48,27 Juta.

Tabel 3.5 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	11,49	11,44	11,36	11,48	11,68
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,46	0,46	0,46	0,49	0,56
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	2,39	2,40	2,42	2,55	2,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi/Construction	8,99	8,47	8,09	8,41	9,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4,79	4,90	5,09	5,63	6,15
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2,03	2,13	2,22	2,33	2,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,35	0,36	0,38	0,42	0,46
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,85	0,89	0,89	0,98	1,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,67	0,64	0,68	0,74	0,78
L	Real Estat/Real Estate Activities	0,81	0,80	0,80	0,87	1,02
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	9,15	8,43	8,81	9,07	10,18
P	Jasa Pendidikan/Education	0,74	0,73	0,73	0,78	0,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,35	0,37	0,38	0,41	0,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,19	0,20	0,20	0,22	0,25
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		43,36	42,32	42,60	44,50	48,27

Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Diagram 3.4 Perkembangan PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

3.1.3 Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah alat untuk mengukur ketimpangan/ kesenjangan pengeluaran/distribusi penduduk. Nilai Gini Ratio di antara 0 (nol) dan 1 (satu) . Apabila koefisien Gini bernilai nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna/distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan apabila bernilai satu berarti terdapat ketimpangan sempurna atau distribusi pendapatan makin tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu : ketimpangan

tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30 – 0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30.

Tabel 3.6 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan Nasional Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kaimana	0,407	0,413	0,425	0,392	N/A
Papua Barat	0,382	0,383	0,370	0,370	0,389
Indonesia	0,381	0,384	0,384	0,388	0,381

Sumber : BPS, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kaimana yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,392 pada tahun 2023. Angka ini menurun 0,033 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,425 dan menurun 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,413.

Penurunan Gini Ratio dari tahun 2022 sebesar 0,425 menjadi 0,392 pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah tersebut. Gini Ratio yang lebih rendah menandakan bahwa kesenjangan antara pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat cenderung mengecil.

Penurunan Gini Ratio seperti ini terjadi Karena berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata, adopsi program-program kesejahteraan sosial, atau peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mobilitas sosial ekonomi.

3.1.4 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedangkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kaimana dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 15,50% dan di tahun 2024 sebesar 14,41%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kaimana mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya upaya yang berhasil dari pemerintah baik melalui program pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi yang efektif. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan bahwa kemajuan ini berkelanjutan dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut disajikan data terkait Kemiskinan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kaimana Tahun 2020–2024

Tahun Year	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
2020	438.991	9,52	15,50
2021	450.302	10,31	16,04
2022	511.011	10,11	15,29
2023	609.865	9,90	14,57
2024	682.231	10,06	14,41

Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

Tabel 3.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kaimana Tahun 2015–2024

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
2020	2,36	0,59
2021	2,83	0,73
2022	3,32	1,00
2023	3,13	0,91
2024	3,17	1,01

Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025

3.1.5 Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga barang secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu. Sedangkan laju inflasi adalah selisih/perbedaan nilai inflasi antara waktu tertentu dengan waktu lainnya. Semisal harga bensin pada tahun 2008 dan 2017 adalah Rp 4.000/liter dan Rp. 6.500/liter, maka inflasinya sebesar $(6500-4000)/6500 \times 100\% = 38,5\%$. Itu

artinya, daya beli kita turun 38,5% dibandingkan ketika tahun 2008. Angka inflasi ini di Provinsi Papua Barat, hanya ada di Kota Sorong dan Kab. Manokwari (sebagai Ibukota Prov. Papua Barat). Sehingga, Angka inflasi Kabupaten Kaimana masih mengacu pada angka inflasi Kabupaten Manokwari.

Tabel 3.9 Laju Inflasi Menurut Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Nasional (%), Tahun 2020–2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Manokwari	(0,57)	(1,09)	(0,60)	6,06	2,39	N/A
Papua Barat	0,33	0,23	1,05	3,87	2,93	2,53
Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber : BPS 2025

3.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merujuk pada persentase jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan dalam suatu negara atau wilayah tertentu. TPT dapat dihitung dengan membagi jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja dan dikalikan dengan 100%. TPT diukur untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPT, semakin sulit bagi penduduk untuk menemukan pekerjaan dan semakin buruk kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah tersebut.

TPT dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, perubahan dalam industri atau sektor tertentu, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor global seperti krisis ekonomi global. Oleh karena itu, TPT sering digunakan sebagai indikator untuk memonitor dan mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah dan membantu merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan

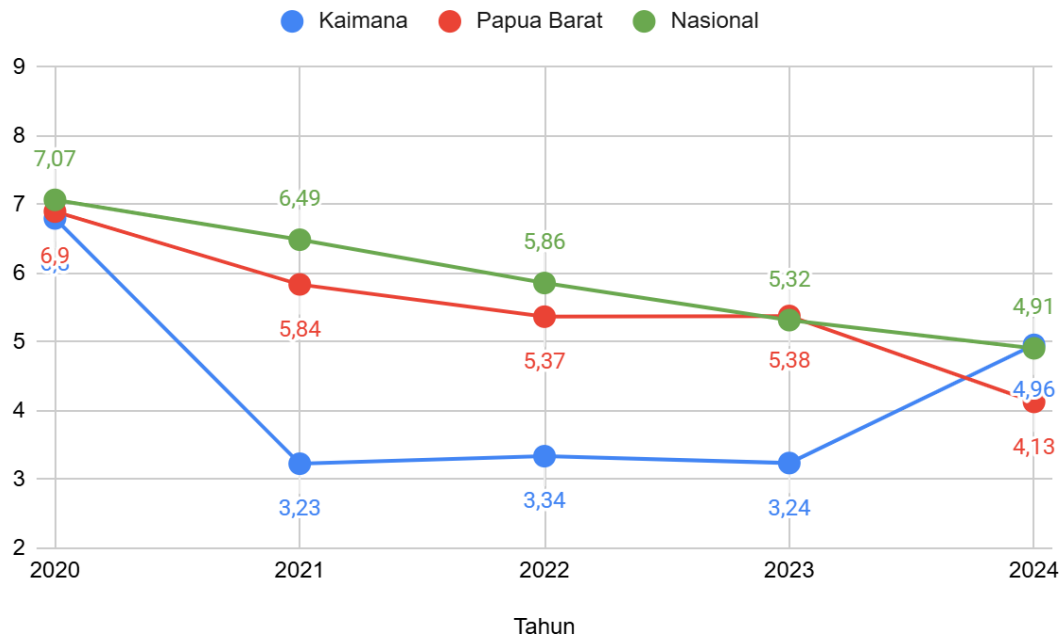
kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2024 TPT kabupaten Kaimana tercapai 4,96 persen angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 3,24 persen. Ini menunjukkan adanya kenaikan TPT sebesar 1,72 persen, dengan kondisi tersebut pemerintah perlu melakukan perbaikan sehingga dapat menyediakan lapangan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat Kabupaten Kaimana.

**Tabel 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021-2024
Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Papua Barat.**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Fak-Fak	7,90	6,75	6,52	6,28
Kaimana	3,23	3,34	3,24	4,96
Teluk Wondama	2,90	2,86	2,77	2,39
Teluk Bintuni	4,74	3,58	3,52	3,16
Manokwari	7,04	5,41	5,97	5,34
Manokwari Selatan	2,90	1,06	1,56	2,54
Pegunungan Arfak	0,70	0,12	0,15	0,31
Papua Barat	5,84	5,37	5,38	4,13

Sumber : BPS, Tahun 2025

**Diagram 3.5 Grafik Perbandingan Tingkat pengangguran Terbuka
(Persen) di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS, Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan Nasional pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kaimana lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat dan Nasional. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada angka pengangguran yang lebih tinggi seperti Perubahan struktur ekonomi, minimnya informasi lapangan kerja, ketidaksesuaian keterampilan dan lain sebagainya sehingga hal ini akan menjadi fokus pemerintah untuk semakin banyak lagi dalam menyediakan lapangan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat Kabupaten Kaimana.

3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup

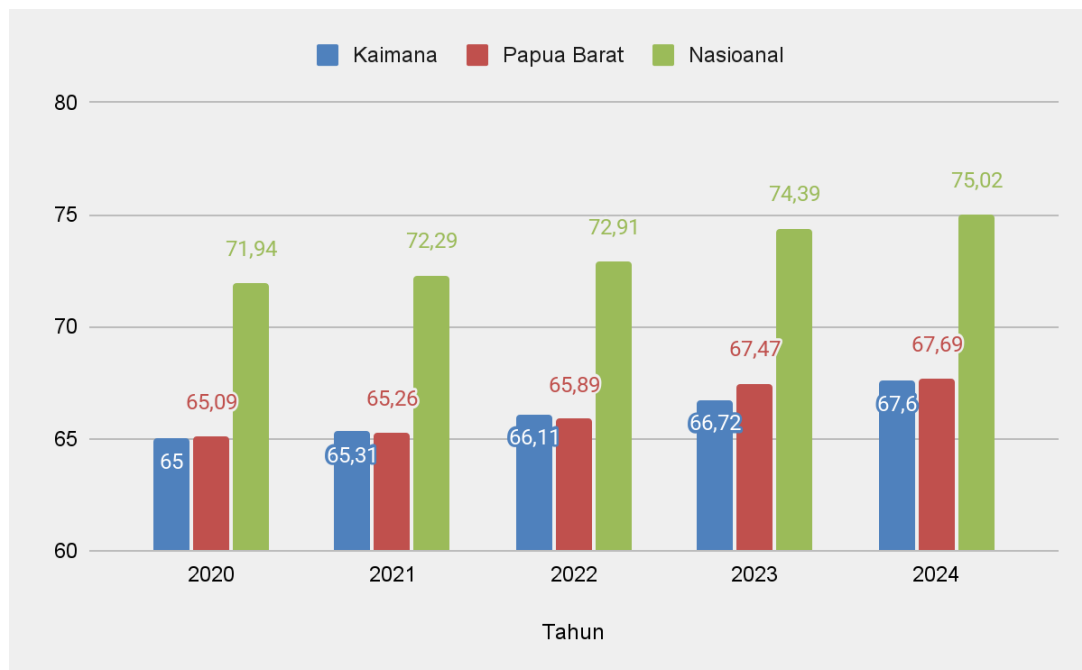
manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Per kapita.

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Sebagai salah satu parameter kunci dalam mengukur pembangunan manusia, perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kaimana Tahun 2024 adalah sebesar 67,60 atau meningkat 0,88 poin dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar 66,72. Komponen IPM Kabupaten Kaimana tahun 2024 terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH) terealisasi 65,86 naik 0,24 poin dari tahun sebelumnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercapai 8,97 naik 0,17 poin dari tahun sebelumnya, Harapan Lama Sekolah (HLS) tercapai 12,51 naik 0,01 poin dari tahun sebelumnya dan Pengeluaran Perkapita sebesar 9,242 juta naik 0,493 poin dari tahun sebelumnya sebesar 8,749 juta. Perkembangan IPM Kabupaten Kaimana,

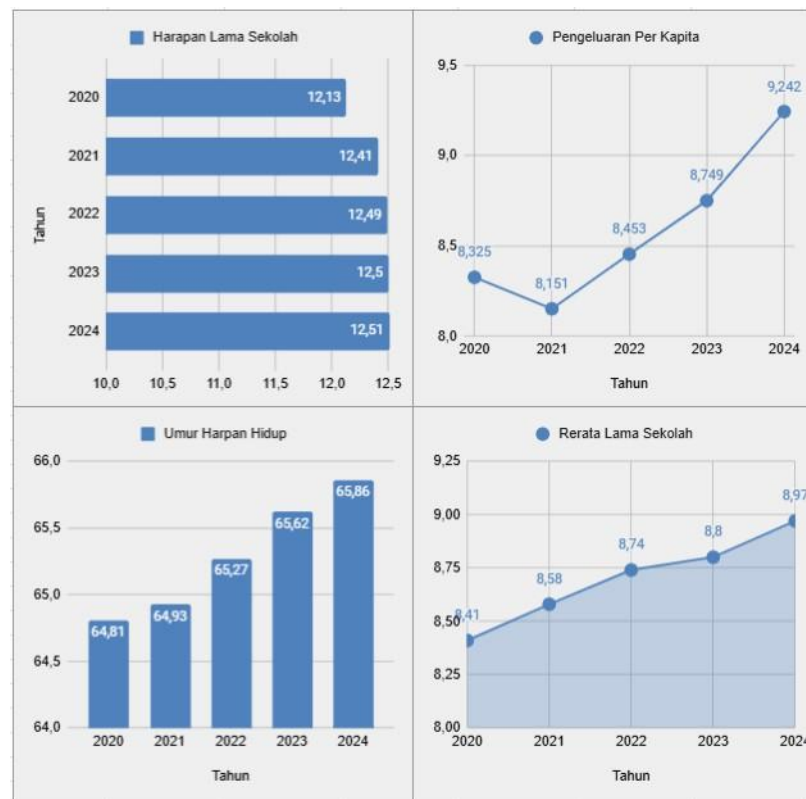
Papua Barat dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 beserta komponen IPM Kabupaten Kaimana disajikan dalam Diagram sebagai berikut :

Diagram 3.6 Perkembangan IPM Kabupaten Kaimana, Papua Barta, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Tahun 2025

Diagram 3.7 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Kaimana 2020-2024



Sumber: BPS, Tahun 2025

Keberhasilan dan tantangan dalam upaya pembangunan daerah dapat dilihat melalui perubahan pada komponen pendukung IPM yaitu Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024, analisis data IPM menunjukkan tren positif yang signifikan. Data dalam diagram menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup mengalami peningkatan perlahan dari 64,81 pada tahun 2020 menjadi 65,86 pada tahun 2024. Harapan Lama Sekolah juga meningkat dari 12,13 pada tahun 2020 menjadi 12,51 di tahun 2024, sementara Rata-rata Lama Sekolah pada awal periode sebesar 8,41 menjadi 8,97 pada akhir periode tahun 2024. Pengeluaran per kapita disesuaikan juga mengalami peningkatan dari 8,325 juta rupiah per orang per tahun menjadi 9,242 juta rupiah. Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Kaimana memperlihatkan tren peningkatan, mencerminkan perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi di daerah.

3.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2020 - 2024), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

3.2.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

A. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
3. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 32 Peraturan Daerah kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
4. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di

luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional

B. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- a. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 1. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 3. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan Bunga;
- d. Potongan; dan

Lain-lain penerimaan yang sah antara lain berupa hibah, dan penerimaan lainnya. Sumber penerimaan ini bersifat insidental sehingga tidak dapat digunakan sebagai dukungan pembiayaan bagi Daerah.

3.2.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

A. Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Sumber Daya Alam (DBH-SDA). (DBH-PBB) Pajak terdiri dari Pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. sedangkan (DBH-SDA) terdiri dari Minyak Bumi dan Gas Bumi, pertambangan dan mineral dan batubara, kehutanan serta perikanan.

B. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.

D. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

E. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam Perubahan APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.

3.2.4 Kebijakan Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah, Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.5 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.207.600.046.856,00 turun sebesar

Rp.(40.372.208.707,00) atau sebesar (3,24)% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2025 pada APBD Induk sebesar Rp.1.247.972.255.563,00.

Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kaimana Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persen
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.771.559.300,00	53.038.906.991,00	16.267.347.691,00	44,24
4.1.01	Pajak Daerah	10.844.825.000,00	10.638.200.000,00	(206.625.000,00)	(1,91)
4.1.02	Retribusi Daerah	16.425.000.000,00	17.765.000.000,00	1.340.000.000,00	8,16
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.750.734.300,00	3.171.072.805,00	420.338.505,00	15,28
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.751.000.000,00	21.464.634.186,00	14.713.634.186,00	217,95
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.206.932.545.599,00	1.150.292.989.201,00	(56.639.556.398,00)	(4,69)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.197.878.120.000,00	1.140.445.247.112,00	(57.432.872.888,00)	(4,79)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.054.425.599,00	9.847.742.089,00	793.316.490,00	8,76
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.268.150.664,00	4.268.150.664,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.268.150.664,00	4.268.150.664,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		1.247.972.255.563,00	1.207.600.046.856,00	(40.372.208.707,00)	(3,24)

Adanya penurunan proyeksi pada target penerimaan daerah Tahun Anggaran 2025 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan pada APBD Induk dengan uraian sebagai berikut:

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

- a) Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 10.638.200.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 206.625.000,00 atau 1,91% dari target yang telah ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp 10.844.825.000,00.

- b) Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 17.765.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.340.000.000,00 atau 8,16% dari target yang telah ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp 16.425.000.000,00.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.171.072.805,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 420.338.505,00 atau 15,28% dari target yang telah ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp 2.750.734.300,00.
- d) Lain-lain PAD yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 21.464.634.186,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.713.634.186,00 atau sebesar 217,95% dari target APBD Induk yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.751.000.000,00.

B. PENDAPATAN TRANSFER

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.140.445.247.112,00 mengalami penurunan sebesar Rp 57.432.872.888,00 atau sebesar 4,79% dari target APBD Induk yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.197.878.120.000,00.
- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 9.847.742.089,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 793.316.490,00 atau sebesar 8,76% dari target APBD Induk yang telah ditetapkan sebesar Rp 9.054.425.599,00.

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan dari target yang telah ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp. 4.268.150.664,00

3.3 Kebijakan Belanja Daerah

3.3.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai

urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

A. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

C. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

D. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

E. Belanja Modal

untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal, Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

F. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
5. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

3.3.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 sebagaimana Tabel Berikut.

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persen (%)
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	889.115.768.407,30	975.359.104.767,57	86.243.336.360,27	9,70
5.1.01	Belanja Pegawai	392.881.127.012,76	409.661.724.205,02	16.780.597.192,26	4,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.388.804.398,54	508.782.537.549,55	68.393.733.151,01	15,53
5.1.05	Belanja Hibah	49.147.836.996,00	53.234.843.013,00	4.087.006.017,00	8,32
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.698.000.000,00	3.680.000.000,00	(3.018.000.000,00)	(45,06)
5.2	BELANJA MODAL	220.750.875.830,97	191.761.667.295,93	(28.989.208.535,04)	(13,13)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	520.584.000,00	4.463.430.800,00	3.942.846.800,00	757,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.654.136.138,00	46.299.664.418,00	11.645.528.280,00	33,61
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.302.387.234,76	76.816.781.956,86	7.514.394.722,10	10,84
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.460.760.932,21	63.230.382.595,07	(52.230.378.337,14)	(45,24)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	430.997.526,00	569.397.526,00	138.400.000,00	32,11
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	382.010.000,00	382.010.000,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.725.438.380,00	6.353.471.699,73	(371.966.680,27)	(5,53)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.725.438.380,00	6.353.471.699,73	(371.966.680,27)	(5,53)
5.4	BELANJA TRANSFER	170.556.121.100,00	170.556.121.100,00	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170.556.121.100,00	170.556.121.100,00	0	0,00
	Jumlah Belanja	1.287.148.203.718,27	1.344.030.364.863,23	56.882.161.144,96	4,428

Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 975.359.104.767,57 mengalami kenaikan sebesar Rp 86.243.336.360,27 atau 9,70% jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Induk sebesar Rp 889.115.768.407,30.

Anggaran Belanja Modal tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 191.761.667.295,93 mengalami penurunan sebesar Rp 28.989.208.535,04 atau 13,13% jika dibandingkan APBD Induk sebesar Rp 220.750.875.830,97.

Sedangkan Alokasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 6.353.471.699,73 mengalami penurunan sebesar Rp 371.966.680,27 atau 5,53% dari APBD Induk sebesar Rp 6.725.438.380,00.

Untuk Anggaran Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp 170.556.121.100,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBD Induk sebesar Rp 170.556.121.100,00.

3.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Kaimana dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana berikut.

Tabel 3.13 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persen (%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.860.948.155,277	137.115.318.007,23	97.254.369.851,96	243,98
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.860.948.155,277	137.115.318.007,23	97.254.369.851,96	243,98
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	685.000.000,000	685.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	685.000.000,000	685.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	685.000.000,00	685.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	39.175.948.155,27	136.430.318.007,23	97.254.369.851,96	248,25

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD tahun anggaran 2025 dapat dikatakan merupakan transisi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 dan RPJMD 2025-2029. Sehingga dalam perubahan RKPD 2025 beberapa target dan arah kebijakan masih untuk menyelesaikan RPJMD sebelumnya namun juga telah memuat target dan program dalam RPJMD yang baru.

Sebagaimana yang termuat dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, arah kebijakan pembangunan daerah pada perubahan RKPD 2025 disesuaikan dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih serta program Asta Cita. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah juga diminta untuk memperhatikan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. Program makan bergizi gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
4. Pengendalian inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Visi Kabupaten Kaimana adalah **MEWUJUDKAN KAIMANA YANG TERTIB, MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN**, yang disertai dengan 5 misi pembangunan yakni :

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia.
2. Pengembangan struktur perekonomian yang tangguh.
3. Pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas wilayah yang mendukung pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
5. Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama, adat dan budaya daerah.

Gambar 4.1 Visi dan Misi Kabupaten Kaimana 2025-2029



Berdasarkan visi dan misi, ditetapkanlah tujuan dan sasaran pembangunan yang disertai dengan indikator dan target untuk menggambarkan ketercapaian visi dan misi. Adapun hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET
				2024	2025
MISI 1. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA KAIMANA					
Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69.20	69.50
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Cakupan penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial kelompok rentan	Persen	100%	100%
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.91	14,12
		Harapan Lama Sekolah OAP	Tahun	-	14,12
		i).Literasi Membaca			
		Literasi Membaca PAUD	Tahun	0	43,21
		Literasi Membaca SD	Tahun	12,77	35,77
		Literasi Membaca SMP	Tahun	10,53	39,47
		Literasi Membaca SMA	Tahun	16,67	52,08
		Literasi Membaca SMK	Tahun	0	36,11
		ii) Numerasi			
		Numerasi PAUD	Tahun	0	43,21
		Numerasi SD	Tahun	12,77	35,77
		Numerasi SMP	Tahun	10,53	39,47

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET
				2024	2025
		Numerasi SMA	Tahun	16,67	52,08
		Numerasi SMK	Tahun	0	36,11
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,88	84,88
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,524	0,524
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	Indeks	51,09	76,72
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	-	57,17
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	48 (Thn. 2022)	48,91
		Paritas Daya Beli	Rupiah	8.749.000	9.122.200
		Paritas Daya Beli Penduduk OAP	Rupiah	-	9.122.200
		Prevalensi Stunting	Indeks	25,7	24,6
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,76	9,25
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,95	67,93
		Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	4,96	2,99
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	65,86	69,79
		Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk OAP (Tahun)	Tahun	65	65
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	59,73	60,69
MISI 2. PENGEMBANGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG TANGGUH					
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan		Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,54	0,77
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,13	3,28
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	98.88	99.03

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET
				2024	2025
melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		Persentase Penduduk Miskin	Persen	14.41	13,23
		Proporsi Kontribusi PDRB Kaimana terhadap Papua Barat	Persen	-	4,87
		Rasio Gini	Indeks	0.392	0.352
	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	5.67	5,68
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	12.73	12.75
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	14.05	14,10
		Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	Persen	1.24	1.25
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Persen	91,17	91,17
		Indeks Daya Saing Pariwisata	Indeks	0.521	0,75
		Persentase Desa Berkembang dan Maju	Persen	0.012	0.012
		Persentase Kampung/Kelurahan yang mendirikan dan merevitalisasi Koperasi Merah Putih	Persen	0	91,86
		Persentase Koperasi Aktif	Persen	3.95	45
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	35	35
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0.96	1,25
		Skor Pola Pangan Harapan	Indeks	84.7	85
MISI 3. PEMANTAPAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH					

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET
				2024	2025
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.17	3,27
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	46.54	57,73
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56.89	57,89
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	76,00
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	71	76,00
		Indeks Sakip	Indeks	B	B
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.15	2,5
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Indeks	WDP	WDP
MISI 4. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS WILAYAH YANG MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN					
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.		Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	120.34	112,25
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85.92	85,92
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	122	121,00
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0.2	0.2
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Cakupan wilayah (Kampung) yang memiliki akses sinyal internet	Persen	84.88	84.88
		Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Persen	17,56	23,26
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	-	55

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET
				2024	2025
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	-	75,64
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman	Persen	16,60	29,30
	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persen	94	94,42
		Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Persen	94,52	94,52
		Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	-	50
MISI 5. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL YANG BERLANDASKAN AGAMA, ADAT DAN BUDAYA DAERAH					
Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	79,05
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	-	55
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik melalui pelaksanaan Otonomi Khusus	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	-	100
		Persentase OAP di lembaga eksekutif	Persen	-	50
		Persentase OAP di lembaga Legislatif	Persen	56	56
		Persentase OAP yang jadi calon legislatif Partai Politik	Persen	-	50
		Tersedianya data terpilah OAP	Persen	60	90

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Kaimana pada perubahan RKPD 2025-2029 difokuskan pada penguatan pondasi SDM dan kelembagaan. Fokus ini ditekankan pada Penguatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Konsolidasi kelembagaan pemerintahan distrik, pemetaan potensi ekonomi lokal, serta pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Layanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial)
 1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah secara merata.
 - Pemerataan penempatan guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan di distrik terpencil.
 - Beasiswa dan Bantuan Siswa, Melakukan seleksi dan penyaluran beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu
 2. Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan dasar di seluruh distrik
 - Penguatan Fasilitas Kesehatan, melakukan peningkatan status dan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) di kampung-kampung terpencil agar dapat memberikan layanan dasar yang memadai.
 - Penurunan Stunting, Melaksanakan program intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan bagi balita, serta edukasi kepada ibu hamil dan menyusui.
 - Distribusi Tenaga Medis, Melakukan penempatan dan insentif bagi tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) di wilayah yang masih kekurangan.

3. Memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif
 - Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penguatan sistem koordinasi program perlindungan sosial.
 - Perluasan cakupan bantuan sosial berbasis komunitas bagi kelompok rentan
- b. Konsolidasi Kelembagaan Pemerintahan
 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 2. Penguatan kompetensi ASN yang merata dan berbasis kebutuhan jabatan.
 3. Mendorong digitalisasi layanan dan tata kelola pemerintahan berbasis TIK.
- b. Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal
 1. Identifikasi Potensi Unggulan
 2. Pendataan Pelaku Usaha

Prioritas pembangunan daerah juga ditetapkan dengan memperhatikan program prioritas kepala daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD, namun tentunya dengan memperhatikan pentahapan pelaksanaan program dan arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya sehingga tidak semua program prioritas dilaksanakan pada perubahan RKPD 2025. Adapun program prioritas daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Program Prioritas Daerah

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
MISI 1. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA KAIMANA				
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan intervensi strategis Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam mendukung keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah. Melalui Program Pengelolaan Pendidikan, BOSDA dirancang dengan pendekatan berformula, yaitu mempertimbangkan variabel jumlah siswa, letak geografis, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan khusus lainnya dari masing-masing satuan pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan disparitas kualitas pendidikan dan meningkatkan capaian mutu pembelajaran, khususnya bagi peserta didik Orang Asli Papua (OAP).	1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya pemberian bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) berformula	Cakupan satuan pendidikan yang memperoleh BOSDA berformula
Kartu Kaimana Sejahtera (sehat/pintar/perlindungan sosial)	Kebijakan ini merupakan pendekatan terintegrasi untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Melalui mekanisme kartu, pemerintah daerah memastikan kelompok rentan, khususnya OAP dan masyarakat tidak mampu, memperoleh akses layanan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	terlaksananya jaminan kesehatan melalui kartu kaimana sejahtera	Cakupan penduduk/kelompok sasaran yang memperoleh jaminan kesehatan

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	dasar secara adil, terjangkau, dan berkelanjutan. Intervensi ini diharapkan mampu menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, memperbaiki derajat kesehatan, serta menjaga keberlanjutan partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.	KESEHATAN MASYARAKAT		
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Bantuan Pendidikan bagi Siswa melalui Kartu Kaimana Pintar	Proporsi siswa OAP dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan.
NakesKu dan GuruKu	Prioritas ini bertujuan untuk memberikan pengakuan yang layak kepada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang menunjukkan kinerja, dedikasi, dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas di Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah menempatkan peran guru dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak peningkatan kualitas sumber daya manusia serta derajat kesehatan masyarakat. Melalui skema penghargaan yang disertai dana pembinaan, kesempatan promosi, serta akses pelatihan lanjutan, prioritas ini mendorong peningkatan profesionalisme serta retensi tenaga ahli di sektor pendidikan dan kesehatan. Penghargaan yang diberikan tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menjadi bentuk dukungan nyata atas kontribusi mereka dalam mencapai target-target	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Pemberian Penghargaan terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik Berprestasi dan berdedikasi yang mendapat penghargaan	Jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang mendapat penghargaan bina mental spiritual
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Pemberian Penghargaan terhadap Tenaga Pendidik Berprestasi dan berdedikasi	Cakupan tenaga pendidik berprestasi dan berdedikasi yang menerima penghargaan dana pembinaan atau mendapatkan kesempatan promosi/pelatihan kompetensi

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	pembangunan daerah. Cakupan pelaksanaan program mencakup tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang dinilai berprestasi dan berdedikasi, termasuk mereka yang aktif dalam pembinaan mental-spiritual masyarakat. Indikator keberhasilan dari kebijakan ini meliputi jumlah penerima penghargaan serta cakupan penerima yang memperoleh manfaat pembinaan atau pengembangan karier, sebagai ukuran dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas dan motivasi aparatur fungsional di bidang pelayanan dasar.			lanjutan.
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Pemberian Penghargaan terhadap Tenaga Kesehatan Berprestasi dan berdedikasi	Cakupan tenaga kesehatan berprestasi dan berdedikasi yang menerima penghargaan dana pembinaan atau mendapatkan kesempatan promosi/pelatihan kompetensi lanjutan.
Dokter Sahabat Kampung	Prioritas ini merupakan terobosan Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam menghadirkan layanan kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat di kampung-kampung, khususnya wilayah yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan tetap. Melalui pendekatan layanan <i>mobile health</i>, tenaga medis ditugaskan untuk secara rutin turun ke kampung-kampung guna memberikan pemeriksaan, pengobatan dasar, edukasi kesehatan, serta skrining dini terhadap faktor risiko penyakit tidak menular, terutama bagi kelompok usia produktif. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperluas	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	terlaksananya kegiatan dokter sahabat kampung	Cakupan kampung yang memperoleh layanan <i>mobile health</i>
				Cakupan Skrining Faktor Risiko Bagi Penduduk Usia Produktif

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	cakupan pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat deteksi dini dan intervensi preventif sebagai bagian dari transformasi layanan primer. Dampak langsung dari kebijakan ini diukur melalui dua indikator utama, yakni jumlah kampung yang mendapatkan layanan kesehatan keliling, serta persentase penduduk usia produktif yang mengikuti kegiatan skrining faktor risiko kesehatan.			
Beasiswa Anak Kampung Berprestasi	Prioritas ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari kampung dan wilayah terpencil yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan memberikan beasiswa penuh, kebijakan ini mendorong terwujudnya keadilan pendidikan dan mobilitas sosial, khususnya bagi generasi muda Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan ekonomi maupun geografis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa yang diberikan mencakup pembiayaan secara menyeluruh termasuk biaya pendidikan, hidup, dan kebutuhan pendukung lainnya guna memastikan keberlanjutan studi para penerima	1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya beasiswa bagi anak kampung berprestasi	Cakupan peserta didik berprestasi yang berasal dari wilayah terpencil lulusan SMA/SMK yang memperoleh beasiswa penuh pada jenjang pendidikan tinggi

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	hingga lulus. Keberhasilan prioritas ini diukur dari cakupan peserta didik yang berasal dari kampung dan telah lulus SMA/SMK yang berhasil memperoleh beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Melalui pendekatan afirmatif ini, Pemerintah Kabupaten Kaimana tidak hanya memperluas kesempatan belajar, tetapi juga menyiapkan generasi muda daerah sebagai sumber daya unggul yang siap berkontribusi dalam pembangunan di masa depan.			
Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup	Prioritas ini ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar, khususnya bagi tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP). Fokus utama diarahkan pada peningkatan keterampilan praktis dan kecakapan hidup yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal.	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlaksananya pendidikan keterampilan kerja	Persentase Tenaga Kerja Prioritas OAP yang ditingkatkan kompetensinya
	Program ini mencakup pelatihan vokasional berbasis potensi lokal dan kebutuhan dunia industri, sekaligus memfasilitasi penempatan kerja secara langsung bagi lulusan pelatihan. Upaya ini dirancang untuk menjawab tantangan pengangguran dan kesenjangan kompetensi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi generasi muda OAP.	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terlaksananya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja Prioritas OAP yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
BLT Masyarakat Miskin	Prioritas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sebagai intervensi cepat untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga yang berada dalam kondisi rawan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Agar penyaluran bantuan tepat sasaran, pemerintah daerah mengandalkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan program. Pemutakhiran data ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kelompok sasaran yang menerima bantuan adalah benar-benar mereka yang memenuhi kriteria kerentanan sosial dan ekonomi.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan penduduk/kelompok sasaran yang memperoleh bantuan sosial
				Ketersediaan DTSEN yang telah dimutakhirkan berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi
MISI 2. PENGEMBANGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH				
Distrik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Prioritas ini diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah melalui penguatan peran distrik sebagai simpul aktivitas ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Dengan menjadikan distrik sebagai pusat pertumbuhan, pemerintah daerah berupaya	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terlaksananya Distrik Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Kopdes yang memiliki unit usaha produktif

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	mendekatkan kegiatan ekonomi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum optimal tersentuh pembangunan ekonomi, khususnya di tingkat kampung dan komunitas masyarakat adat. Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan unit usaha koperasi kampung (Kopdes) yang produktif, promosi penanaman modal di tingkat distrik untuk menarik investasi baru, serta pembinaan ekonomi kepada lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Intervensi tersebut bertujuan membangun kemandirian ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya setempat.	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Distrik Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Nilai investasi baru di Distrik
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terlaksananya Distrik Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Cakupan Distrik yang difasilitasi kegiatan promosi penanaman modal
Bantuan keuangan kampung (1 M/Kampung)	Prioritas ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan kampung melalui alokasi bantuan keuangan langsung dengan plafond maksimal sebesar 1 miliar rupiah per kampung. Kebijakan ini menjadi bentuk afirmasi fiskal yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan berbasis kampung serta mengurangi kesenjangan antarkawasan di Kabupaten Kaimana. Pendekatan ini menempatkan kampung sebagai subjek pembangunan, dengan dukungan pendampingan teknis melalui fasilitator serta	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya bantuan keuangan kampung	Persentase kampung yang memperoleh fasilitas bantuan keuangan kampung
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Terlaksananya bantuan keuangan kampung	Cakupan fasilitator kampung yang mendapat pendampingan dan pelatihan pengelolaan dana BKK
			Terlaksananya	Tersedianya Juklak/Juknis

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/Juknis) sebagai panduan pemanfaatan dana. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa setiap kampung menerima pelatihan pengelolaan dana agar penggunaan bantuan lebih akuntabel dan sesuai dengan perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif.	MASYARAKAT HUKUM ADAT	bantuan keuangan kampung	Pengelolaan dana BKK
			Terlaksananya bantuan keuangan kampung	Cakupan kampung yang mengelola BKK sesuai Juklak/Juknis
BBM 1 Harga	Prioritas ini ditujukan untuk memastikan pemerataan akses energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), bagi seluruh wilayah di Kabupaten Kaimana, termasuk daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Melalui kebijakan BBM 1 Harga, pemerintah daerah berupaya mengurangi disparitas harga BBM antarwilayah, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya biaya hidup dan rendahnya produktivitas ekonomi di kampung-kampung. Dengan memastikan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM 1 harga di titik-titik strategis, program ini mendukung peningkatan mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan kegiatan ekonomi lokal secara lebih efisien. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong iklim investasi yang lebih merata dan inklusif di kawasan pinggiran.	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terlaksananya BBM 1 Harga	Jumlah SPBU BBM 1 harga yang beroperasi

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
Pemberian modal usaha bagi pengusaha muda papua	Prioritas ini diarahkan untuk mendukung tumbuhnya wirausaha muda Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki potensi namun menghadapi keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah daerah memfasilitasi pemberian bantuan permodalan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pengusaha muda lokal agar mampu berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja di wilayahnya sendiri. Inisiatif ini sekaligus menjadi upaya strategis untuk mendorong regenerasi pelaku UMKM yang berkelanjutan, memperkuat struktur ekonomi lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor formal dan anggaran negara. Modal usaha yang diberikan diharapkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga disertai dengan pendampingan usaha agar pemanfaatannya tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terlaksananya Pemberian modal usaha bagi pengusaha muda papua	Persentase pengusaha muda OAP potensial yang memperoleh bantuan modal
Penjaminan kredit bagi umkm dan industri kreatif	Prioritas ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan industri kreatif yang memiliki prospek usaha menjanjikan namun terkendala agunan atau kelayakan administratif dalam memperoleh kredit perbankan. Melalui skema penjaminan kredit (<i>back to back guarantee</i>), pemerintah daerah memberikan jaminan atas pinjaman produktif	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya penjaminan kredit bagi UMKM dan Industri Kreatif	Persentase UMKM layak yang memperoleh fasilitas kredit back to back guarantee
				Tingkat Pengembalian Kredit (NPL)

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	yang diajukan pelaku usaha kepada lembaga keuangan, sehingga memperkecil risiko kegagalan akses pembiayaan. Inisiatif ini diharapkan mendorong tumbuhnya UMKM dan sektor industri kreatif yang inklusif, inovatif, serta mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Selain meningkatkan perputaran ekonomi daerah, program ini juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong transformasi usaha mikro ke arah usaha kecil dan menengah yang lebih profesional.			
Pengembangan komoditi unggulan daerah P2K2S (pala, pisang, kelapa, kopi dan sukun) dan perikanan	Prioritas ini diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan berbasis potensi unggulan daerah. Fokus utamanya adalah komoditi P2K2S (Pala, Pisang, Kelapa, Kopi, dan Sukun) sebagai hasil pertanian khas Kaimana serta penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya. Pendekatan yang digunakan mencakup penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan tanaman, peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan, serta hilirisasi produk melalui penguatan UMKM lokal. Pengembangan komoditi pertanian dilakukan melalui	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah	Cakupan lahan pertanian/perkebunan (5 Ha) yang disediakan jalan usaha tani
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah	Jumlah benih unggul P2K2S yang disediakan

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani untuk membuka akses ke lahan produksi, serta distribusi benih unggul agar produksi meningkat secara kuantitas dan kualitas. Upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan tanaman unggulan. Di sektor perikanan, prioritas diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada petani dan nelayan juga diperkuat, agar mereka mampu menerapkan praktik-praktik pertanian dan perikanan yang efisien, ekonomis, dan berbasis inovasi. Hilirisasi produk hasil pertanian dan perikanan dilakukan melalui pelatihan pengolahan produk turunan yang melibatkan UMKM lokal. Dengan pendekatan ini, komoditi unggulan daerah tidak hanya menjadi produk konsumsi primer, tetapi juga bernilai tambah tinggi dan mampu menembus pasar yang lebih luas.	PERTANIAN		
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya Pengendalian Organisme bagi tanaman P2K2S	Cakupan Pengendalian Organisme pengganggu tanaman P2K2S
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah	Cakupan petani P2K2S yang memperoleh informasi teknis, ekonomi dan inovasi pengolahan
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah	Cakupan kelompok nelayan usaha kecil yang memperoleh bantuan sarpras perikanan tangkap
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah	Cakupan kelompok pembudidaya yang memperoleh bantuan sarpras perikanan
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN	Terlaksananya pengembangan	Cakupan UMKM yang mendapat pelatihan

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
		USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	komoditi unggulan daerah	pengolahan produk turunan P2K2S dan perikanan
Perbaikan tata niaga perdagangan	Prioritas ini bertujuan untuk menciptakan sistem distribusi dan perdagangan yang tertib, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Tata niaga yang belum optimal seringkali menimbulkan disparitas harga, kelangkaan barang, dan ketimpangan pasokan, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola perdagangan menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan ketahanan sosial daerah. Langkah konkret dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi antarinstansi, termasuk instansi vertikal seperti kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengawasan lainnya. Forum ini diharapkan mampu menyusun langkah-langkah strategis dalam pengendalian dan pengawasan distribusi barang, termasuk pengaturan pasokan dan pengendalian harga secara berkala di pasar-pasar utama maupun kampung.	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	terlaksananya perbaikan tata niaga perdagangan	Tersedianya forum koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian dan pengawasan tata kelola perdagangan
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	terlaksananya perbaikan tata niaga perdagangan	Cakupan pelaksanaan monitoring harga bahan pokok harian

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	Di saat yang sama, monitoring harga bahan pokok harian menjadi mekanisme kunci dalam memastikan bahwa harga barang tetap terkendali dan tidak terjadi gejolak yang merugikan masyarakat. Monitoring ini dilakukan secara berkala dengan basis data yang akurat, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan intervensi pasar jika diperlukan.			
Penguatan pengusaha OAP dalam pengadaan barang dan jasa	Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan langsung pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai bagian dari afirmasi kebijakan Otonomi Khusus. Penguatan ini mencakup pemberdayaan pelaku UMKM OAP agar mampu menjadi penyedia barang/jasa yang kompeten, tersertifikasi, dan teregistrasi secara resmi dalam sistem pengadaan elektronik pemerintah. Strategi yang dilakukan meliputi sosialisasi dan bimbingan teknis bagi UMKM OAP untuk memahami proses PBJ, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Pendampingan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis dan digital agar mereka mampu bersaing dalam sistem terbuka berbasis elektronik.	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlaksananya penguatan UMKM OAP dalam PBJ	Cakupan UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya penguatan UMKM OAP dalam PBJ	Cakupan Penyedia OAP yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) OAP
				Persentase Penyedia OAP terhadap seluruh Vendor dalam Katalog Elektronik

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	Langkah berikutnya adalah mendorong peningkatan jumlah penyedia OAP yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) OAP dan Katalog Elektronik Lokal. Keberadaan aplikasi SIKAP OAP sebagai platform terintegrasi juga menjadi prasyarat penting untuk menjamin transparansi dan penguatan kapasitas penyedia lokal berbasis digital.			Lokal
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya penguatan UMKM OAP dalam PBJ	Tersedianya aplikasi SIKAP OAP
Pengembangan ekowisata	Prioritas ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan berbasis potensi alam dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kaimana. Ekowisata tidak hanya menjadi sarana pelestarian lingkungan dan budaya, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Upaya pengembangan diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, peningkatan jumlah destinasi ekowisata yang siap beroperasi melalui penataan kawasan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta promosi potensi wisata unggulan daerah seperti hutan tropis, pesisir, budaya adat, dan situs sejarah lokal. Kedua, pembangunan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan bagi pemandu wisata, pengelola ekowisata, dan pelaku ekonomi	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Terlaksananya pengembangan ekowisata	Jumlah destinasi ekowisata yang beroperasi
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Terlaksananya pengembangan ekowisata	Cakupan SDM lokal (guide, pengelola) yang terlatih

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	kreatif yang menopang destinasi tersebut. Dengan fokus pada pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, ekowisata diharapkan menjadi alternatif ekonomi yang ramah lingkungan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam.			
MISI 3. PEMANTAPAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH				
Distrik sebagai pusat pelayanan dan basis karir ASN	Prioritas ini merupakan bagian dari strategi desentralisasi layanan publik dan reformasi birokrasi di tingkat lokal yang menempatkan distrik sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Kaimana mendorong percepatan pemerataan pelayanan dengan memindahkan sebagian fungsi administrasi dan layanan teknis dari kabupaten ke distrik, sekaligus membangun jenjang karir ASN berbasis wilayah. Penguatan peran distrik dilakukan melalui empat komponen utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan ASN yang proporsional dan sesuai standar formasi untuk memastikan layanan berjalan optimal di setiap distrik. Kedua, penetapan regulasi formal berupa	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terselenggaranya pemusatan pelayanan dan basis karir ASN di Distrik	Persentase Distrik yang terpenuhi kebutuhan pegawainya sesuai ketentuan
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terselenggaranya pemusatan pelayanan dan basis karir ASN di Distrik	Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Distrik Cakupan distrik yang melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	Terselenggaranya pemusatan pelayanan dan basis karir ASN di	Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (sesuai distrik)

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan, sebagai dasar hukum bagi distriki dalam menjalankan fungsi otonom operasional. Ketiga, implementasi aktif pelimpahan kewenangan oleh distrik yang diukur dari cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah dijalankan. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang layak dan memadai, termasuk gedung kantor, peralatan kerja, dan sistem pendukung pelayanan publik lainnya.	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Distrik	
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terselenggaranya pemusatan pelayanan dan basis karir ASN di Distrik	Cakupan Distrik yang memiliki sarana/prasarana sesuai kebutuhan
Percepatan pemekaran wilayah	Prioritas ini bertujuan untuk mempercepat proses pembentukan kampung, kelurahan, distrik, maupun wilayah administratif baru dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengoptimalkan pengelolaan wilayah. Langkah ini juga menjadi bagian penting dari strategi penataan ruang dan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap dinamika kependudukan, kebutuhan layanan dasar, serta potensi sosial-ekonomi lokal. Proses pemekaran wilayah dilakukan secara sistematis mulai dari penyusunan kajian pembentukan kampung, distrik, dan Daerah Otonomi	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya percepatan pemekaran wilayah	Jumlah Kajian Pembentukan Kampung/Kelurahan Definitif
				Jumlah Kajian Pembentukan Distrik
				Tersedianya kajian pembentukan DOB
		2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Terlaksananya percepatan pemekaran wilayah	Jumlah Usulan Pembentukan Kampung Definitif
		4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN	Terlaksananya percepatan	Jumlah Perda Pembentukan Kampung Definitif yang

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	Baru (DOB) sebagai prasyarat perencanaan teknokratik. Kajian ini mencakup analisis kapasitas wilayah, jumlah penduduk, kesiapan sumber daya, hingga aspek budaya dan geografis. Setelah kajian teknis selesai, usulan pembentukan kampung definitif diajukan secara administratif oleh pemerintah daerah untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama DPRD dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Persetujuan Perda menjadi landasan hukum terbentuknya wilayah baru secara definitif. Sebagai dukungan nyata terhadap wilayah-wilayah baru, prioritas ini juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti bangunan pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan oleh wilayah persiapan. Pemerintah juga memastikan penyelesaian ganti kerugian lahan secara adil dan transparan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat atas tanah yang digunakan untuk pembangunan sarpras.	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	pemekaran wilayah	disetujui
				Jumlah Perda Pembentukan Distrik yang disetujui
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya percepatan pemekaran wilayah	Cakupan ketersediaan Sarana/Prasarana Dasar pada kampung persiapan
		2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya percepatan pemekaran	Persentase ganti rugi tanah untuk penyediaan sarpras pada wilayah baru
Penguatan tata kelola ASN dan pengembangan sumberdaya aparatur	Prioritas ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pemerintah daerah menyadari	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terselenggaranya penguatan tata kelola ASN dan Pengembangan	Tersedianya Grand Design Pengembangan Aparatur
				Persentase ASN yang

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kapasitas dan integritas aparatur yang mengelola urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Penguatan tata kelola ASN dilakukan melalui perencanaan strategis yang matang, salah satunya dengan menyusun <i>Grand Design Pengembangan Aparatur</i>. Dokumen ini menjadi peta jalan untuk pembangunan kapasitas ASN dalam jangka menengah dan panjang, termasuk pengembangan kompetensi, manajemen karier, sistem merit, serta peningkatan etika dan budaya kerja. Sejalan dengan itu, pengembangan kompetensi ASN dilakukan secara sistematis dan terstruktur, meliputi kompetensi dasar (integritas, nasionalisme, etika publik, pelayanan publik, dan antikorupsi), kompetensi manajerial (kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi), dan kompetensi fungsional sesuai bidang tugas masing-masing. Peningkatan kompetensi ini menjadi langkah penting untuk mendorong aparatur yang tidak hanya mampu secara teknis, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas moral.		sumberdaya aparatur	Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional
Percepatan penerapan	Percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis	2.16.03 PROGRAM	Terlaksananya	Persentase aplikasi umum

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
SPBE	Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Prioritas ini diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta memperkuat sistem manajemen informasi pemerintahan secara menyeluruh. Penerapan SPBE dilakukan secara bertahap, dimulai dari penguatan infrastruktur dasar seperti akses internet di seluruh perangkat daerah, peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi umum SPBE yang terintegrasi dan sesuai standar nasional, hingga pembangunan kapabilitas SDM pengelola sistem. Ketersediaan jaringan internet yang merata di lingkungan perangkat daerah menjadi fondasi utama agar layanan digital dapat dijalankan secara optimal. Selanjutnya, pemanfaatan aplikasi umum SPBE seperti sistem kepegawaian, keuangan, perencanaan, arsip digital, serta layanan publik berbasis daring harus diperluas penggunaannya oleh seluruh unit kerja. Tak kalah penting, pengembangan kapasitas ASN pengelola SPBE menjadi prioritas agar transformasi	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	percepatan penerapan SPBE	SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah
				Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki akses internet
		5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terlaksananya percepatan penerapan SPBE	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	digital tidak hanya bersifat infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola dan sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis, ASN dibekali keterampilan teknis dan manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi pemerintahan secara andal dan berkelanjutan.			
MISI 4. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS WILAYAH YANG MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN				
Revitalisasi pengelolaan air bersih dalam kota dan penyediaan air bersih dikampung	Prioritas ini ditujukan untuk menjamin akses masyarakat terhadap air bersih yang layak konsumsi sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga serta penopang kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah memfokuskan perhatian pada dua wilayah utama: revitalisasi sistem pengelolaan air bersih di wilayah perkotaan yang sudah ada namun belum optimal, serta penyediaan sistem distribusi air bersih di wilayah kampung yang selama ini mengalami keterbatasan infrastruktur dan layanan. Revitalisasi di kota diarahkan pada perbaikan jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas produksi dan distribusi, serta efisiensi pengelolaan sistem air minum yang sudah tersedia. Sementara itu, penyediaan di kampung mencakup pembangunan	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terlaksananya revitalisasi pengelolaan air bersih dalam kota dan penyediaan air bersih di Kampung	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air layak konsumsi
				Tersedianya Perusahaan Air Minum Daerah

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	sistem baru yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial setempat. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan dan pengoperasian Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) sebagai institusi pengelola air minum yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Keberadaan PDAM sangat penting untuk memastikan kualitas layanan air minum memenuhi standar teknis dan kesehatan, serta menjamin keberlangsungan operasional sistem air bersih dalam jangka panjang.			
Investasi kawasan andalan	Prioritas ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara terfokus melalui pengembangan kawasan andalan sebagai pusat-pusat produktivitas baru yang strategis. Kawasan andalan diarahkan untuk menjadi simpul pertumbuhan yang mampu menarik investasi, menggerakkan sektor ekonomi unggulan, serta memperluas pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Kaimana. Langkah pertama dalam pengembangan kawasan andalan dimulai dari proses identifikasi dan inventarisasi kawasan hutan yang potensial untuk	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya investasi kawasan andalan	Cakupan kawasan hutan yang di Identifikasi dan inventarisasi untuk dapat dikonversi menjadi kawasan produktif lainnya
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terlaksananya investasi kawasan andalan	Persentase penyelesaian ruas jalan di koridor barat kaimana kewenangan kabupaten

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	dikonversi secara legal dan berkelanjutan menjadi kawasan produktif lainnya, seperti kawasan budidaya, pemukiman, atau kawasan ekonomi khusus. Proses ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Selanjutnya, dilakukan promosi intensif terhadap kawasan-kawasan yang telah diidentifikasi melalui berbagai media dan forum investasi, baik di tingkat regional maupun nasional. Promosi ini bertujuan untuk menarik minat investor serta memperkuat posisi kawasan andalan sebagai pusat investasi yang prospektif. Sebagai prasyarat utama investasi, pemerintah juga mempercepat penyelesaian infrastruktur dasar, khususnya pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan di wilayah koridor barat Kaimana yang menjadi lokasi strategis dari kawasan andalan tersebut. Pembangunan infrastruktur ini dimaksudkan untuk membuka aksesibilitas, menurunkan biaya logistik, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya investasi kawasan andalan	Cakupan promosi kawasan andalan yang telah diinventarisir
Penyediaan akses transportasi laut antar	Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kaimana,	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN	Tersedianya akses transportasi laut	cakupan kampung pesisir yang dilayani pelayaran perintis

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
distrik	khususnya antar distrik dan kampung pesisir yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi darat. Dengan topografi wilayah yang didominasi oleh garis pantai dan pulau-pulau kecil, moda transportasi laut menjadi salah satu solusi strategis untuk menjembatani mobilitas penduduk, distribusi barang, serta pelayanan publik. Pemerintah daerah mendorong penyediaan akses transportasi laut yang terjadwal dan terjangkau melalui penyelenggaraan pelayaran perintis yang melayani kampung-kampung pesisir secara reguler. Layanan ini dirancang untuk menjamin ketersediaan jalur transportasi yang aman, murah, dan dapat diandalkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Untuk mendukung keberlangsungan layanan ini, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal juga menjadi bagian penting dalam infrastruktur transportasi laut. Pelabuhan ini akan menjadi titik simpul penghubung antara kampung pesisir dan pusat distribusi di tingkat distrik atau kabupaten, sehingga mempercepat pergerakan orang dan barang serta memperkuat integrasi wilayah.	PELAYARAN	antar distrik	cakupan penyediaan pelabuhan pengumpan lokal
MISI 5. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL YANG BERLANDASKAN AGAMA, ADAT DAN BUDAYA DAERAH				

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
Bantuan untuk tetua adat, Organisasi pemuda dan agama	Prioritas ini merupakan wujud pengakuan dan penghormatan terhadap peran penting lembaga adat, organisasi pemuda, dan lembaga keagamaan dalam membangun ketahanan sosial, memperkuat identitas budaya, serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Ketiga unsur tersebut tidak hanya memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi, tetapi juga berkontribusi besar dalam proses pendidikan karakter, pembinaan generasi muda, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat. Dukungan terhadap lembaga adat diwujudkan melalui pemberian bantuan kepada institusi adat yang aktif menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai tradisi serta menyelesaikan persoalan sosial berbasis kearifan lokal. Melalui bantuan ini, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan budaya dari para tetua adat sebagai penjaga identitas daerah. Sementara itu, organisasi pemuda didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan produktif, kreatif, dan partisipatif melalui dukungan finansial dan pembinaan kapasitas. Bantuan ini bertujuan menciptakan ruang tumbuh bagi generasi muda Papua yang memiliki daya saing, semangat	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada Lembaga Adat	Cakupan Lembaga Adat yang menerima bantuan
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terlaksananya bantuan untuk organisasi pemuda	Cakupan Organisasi Pemuda yang Menerima Bantuan
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada Lembaga Agama	Cakupan Lembaga Agama yang Menerima Bantuan

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	kebangsaan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosialnya. Dukungan serupa juga diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam membangun kerukunan umat beragama, pembinaan akhlak masyarakat, serta pelayanan sosial berbasis spiritualitas. Bantuan yang diberikan mencakup dukungan terhadap kegiatan operasional, pengembangan kapasitas, serta penguatan peran keagamaan dalam pembangunan masyarakat.			
Bantuan pendidikan untuk calon pendeta, imam prioritas OAP	Prioritas ini ditujukan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia asli Papua (OAP) dalam bidang keagamaan, dengan memastikan ketersediaan pemuka agama yang berasal dari komunitas lokal dan memahami secara mendalam nilai-nilai budaya serta kebutuhan spiritual masyarakat setempat. Melalui bantuan pendidikan bagi calon pendeta, imam, atau ustadz dari kalangan OAP, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa proses regenerasi pemuka agama berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Bantuan ini difokuskan pada mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun	1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Pemberian bantuan pendidikan untuk calon pendeta, imam/ustadz prioritas OAP	Cakupan Calon Pendeta dan Ustadz OAP yang Menerima Bantuan Pendidikan

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	memiliki komitmen dan potensi dalam pelayanan keagamaan. Dukungan pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan formal keagamaan, baik di dalam maupun luar daerah, sesuai dengan jenjang dan kebutuhan pendidikan masing-masing calon tokoh agama. Diharapkan, setelah menyelesaikan pendidikan, mereka dapat kembali mengabdikan di kampung halaman untuk memperkuat fungsi pembinaan spiritual masyarakat.			
Pelestarian Adat, dan budaya daerah	Pelestarian adat dan budaya merupakan pilar penting dalam menjaga identitas dan jati diri masyarakat Kabupaten Kaimana. Prioritas ini diarahkan untuk memperkuat posisi budaya lokal sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkepribadian, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada penguatan aktor budaya, kelembagaan, hingga objek budaya agar tetap lestari dan relevan dengan perkembangan zaman. Pembinaan sumber daya manusia kebudayaan dilakukan untuk memastikan adanya generasi penerus yang memahami, menghidupi, dan meneruskan nilai-nilai budaya lokal, baik melalui	2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya daerah	Cakupan Sumberdaya Manusia Kebudayaan yang dibina
				Cakupan lembaga Kebudayaan yang dibina
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA		Cakupan Objek Kebudayaan yang dikembangkan
			Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya daerah	Tersedianya Regulasi dan Kebijakan Daerah yang perlindungan Hak-hak OAP

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	pelatihan, fasilitasi kegiatan, maupun pengakuan resmi terhadap para pelaku budaya. Di sisi kelembagaan, penguatan dilakukan dengan mendukung eksistensi dan operasional lembaga-lembaga kebudayaan lokal agar mampu menjalankan fungsi edukasi, pelestarian, dan promosi budaya. Pengembangan objek kebudayaan mencakup dokumentasi, revitalisasi, hingga pemanfaatan objek budaya sebagai bagian dari penguatan identitas daerah serta potensi pariwisata budaya. Selain itu, prioritas ini juga menyoroti dimensi politik dan hukum dengan mendorong hadirnya regulasi dan kebijakan daerah yang menjamin perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam konteks budaya dan adat. Untuk memperkuat fondasi data dan perencanaan, tersedia pula sistem data terpilah OAP yang mendukung penyusunan program secara lebih tepat sasaran. Sementara dalam sektor pendidikan, pelestarian budaya diperkuat melalui penerapan kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan, sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya ke dalam proses pembelajaran sejak dini.	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
		2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya daerah	Tersedianya data terpilah OAP
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya daerah	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
Peningkatan kesadaran hukum	Peningkatan kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai di Kabupaten Kaimana. Prioritas ini bertujuan menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum serta memperkuat peran tokoh masyarakat dan lembaga sosial dalam menjaga ketertiban umum. Upaya peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui edukasi, dialog, dan pelibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian konflik sosial berbasis komunitas, dengan mendorong mediasi dan pendekatan kearifan lokal sebagai bagian dari penegakan hukum yang inklusif. Persentase konflik sosial yang terselesaikan menjadi salah satu ukuran keberhasilan upaya ini. Selain itu, penguatan kesadaran hukum juga dilakukan melalui pelibatan tokoh masyarakat dalam forum koordinasi yang membahas isu-isu strategis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Forum ini juga mencakup fasilitasi	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya peningkatan kesadaran hukum	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya peningkatan kesadaran hukum	Cakupan tokoh masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih	Deskripsi	Program Sesuai Nomenklatur	Outcome	Indikator Outcome
	pencegahan penyalahgunaan narkoba serta upaya membangun dan menjaga kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan. Peningkatan partisipasi tokoh masyarakat dalam forum-forum tersebut memperkuat jejaring sosial yang berfungsi sebagai penyangga stabilitas lokal. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menciptakan tatanan sosial yang damai, toleran, dan taat hukum.			

4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan antara arah pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan adanya keterkaitan dan konsistensi antara program prioritas daerah dengan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam 17 Program Prioritas Asta Cita. Penyelarasan ini menjadi penting agar pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, tetapi mendukung pencapaian target pembangunan nasional sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan, potensi, dan permasalahan spesifik di Kabupaten Kaimana.

Melalui sandingan program dan kegiatan daerah dengan 17 Program Prioritas Asta Cita, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan intervensi pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta percepatan transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun keterkaitan program kegiatan Kabupaten Kaimana dengan 17 Program Prioritas Asta Cita dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Keterkaitan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dengan Asta Cita

URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.305.600.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	17.202.377.420	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.272.986.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18.948.737.234	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	15.345.413.264	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.612.350.000	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.612.350.000	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.974.600.000	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.974.600.000	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	42.850.000	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	44.916.000	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	461.490.000	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	204.247.000	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	2.165.375.000	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.612.350.000	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.612.350.000	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.974.600.000	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.974.600.000	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	7.305.600.000	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.209.780.000	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.209.780.000	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.209.780.000	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.

4.4 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan mandat nasional yang wajib diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, dalam RKPD Perubahan ini dilakukan penyelarasan SPM dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah guna memastikan pencapaian target layanan dasar secara sistematis dan terukur. Adapun penyelarasan dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Penyelarasan SPM dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	86.020.000
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	108.870.000
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	603.535.000
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	627.171.000
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	317.656.000

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	262.750.000
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	150.015.000
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	218.160.000
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	717.348.000
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	336.761.000
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	86.640.000
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	35.795.000
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	57.595.000

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	58.523.680
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	32.939.996
				Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28.788.000
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	110.900.000
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	266.490.000

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.080.000
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	139.692.418
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	99.900.000
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	113.971.000
				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	7.133.800
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.398.762.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	498.000.000

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.612.350.000
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	170.184.000
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.974.600.000
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	331.702.000
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.600.150.571
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	900.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	323.400.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.955.346.000
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.421.409.060
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.439.396.000
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.189.800.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.195.800.000

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	901.593.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	196.504.000
				Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	7.768.332.650
				Penambahan Ruang Kelas Baru	4.216.212.000
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.059.600.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	3.989.532.150
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	700.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	1.206.500.000
				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	479.999.960
	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	482.584.315
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	123.994.500
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	199.688.038
	Kekhususan PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.236.276.200
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.016.875.000

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	878.465.500
	Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	269.451.000
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	307.046.000
	Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	232.399.520
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	230.769.600
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	79.140.240
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	50.562.840
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	956.434.000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.548.419.050
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.766.864.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.140.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	182.210.047
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	809.724.800
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	162.458.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.775.334.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	801.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	252.848.500
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	-

SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	150.000.000
SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.099.000
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	185.377.000
				Pemberian Layanan Rujukan	152.316.000
				Penyediaan Alat Bantu	66.934.750
Grand Total					85.224.180.185

4.5 Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas nasional yang harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Penghapusan kemiskinan ekstrem difokuskan pada strategi yang komprehensif, meliputi perluasan akses layanan dasar, peningkatan peluang kerja dan pendapatan, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan ini memerlukan sinergi antar program dan sub kegiatan agar intervensi yang dilakukan dapat efektif menjangkau masyarakat miskin ekstrem.

Dalam RKPD Perubahan ini, telah dimuat sub kegiatan yang berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem.

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.042.000.000
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	13.232.645.000
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.189.800.000
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	4.439.396.000
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.022.670.000
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.140.000.000
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	901.593.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	6.195.800.000
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	538.319.931
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.279.670.500
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	7.305.600.000
12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	5.474.466.000
13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-
14	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	2.810.808.000
15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.135.440.000
16	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	323.400.000
17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.304.050.000
18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	4.600.150.571
19	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	900.000.000
20	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	428.100.000
21	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.059.600.000
22	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3.989.532.150

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
23	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	3.172.450.000
24	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	-
25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	700.000.000
26	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.206.500.000
27	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	2.891.930.000
28	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	627.171.000
29	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	603.535.000
30	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	108.870.000
31	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	86.020.000
32	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	717.348.000
33	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	336.761.000
34	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	35.795.000
35	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	86.640.000
36	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	317.656.000
37	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	150.015.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
38	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	262.750.000
39	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	4.756.620.000
40	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	44.160.000
41	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	2.272.986.000
42	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	7.330.024.800
43	Dinas Kesehatan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	-
44	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	11.618.712.434
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	-
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	170.184.000
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	15.612.350.000
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	498.000.000
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	2.398.762.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Mengurangi Pengeluaran Beban	Penunjang	57.595.000
51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Pengeluaran Beban	Langsung	28.788.000
52	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Pengeluaran Beban	Langsung	-
53	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	1.393.103.200
54	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Pengeluaran Beban	Langsung	-
55	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Pengeluaran Beban	Penunjang	1.218.925.000
56	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Pengeluaran Beban	Langsung	66.934.750
57	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Mengurangi Pengeluaran Beban	Langsung	100.099.000
58	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Mengurangi Pengeluaran Beban	Langsung	185.377.000
59	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberian Layanan Rujukan	Mengurangi Pengeluaran Beban	Langsung	152.316.000
60	Dinas Sosial, Pengendalian	Pemberian Layanan Rujukan	Mengurangi Pengeluaran Beban	Langsung	250.002.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
	Penduduk dan Keluarga Berencana				
61	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	588.514.000
62	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.141.552.000
63	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-
64	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	288.000.000
65	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	97.264.000
66	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	94.504.000
67	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	60.000.000
68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.001.214.498
69	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	-
70	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	150.000.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
71	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	46.836.000
72	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	62.640.000
73	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	171.703.200
74	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	288.845.000
75	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Kampung	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	372.774.750
76	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Kampung	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	762.532.250
77	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Kampung	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	640.000.000
78	Dinas Perhubungan	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	129.000.000
79	Dinas Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	5.782.474.000
80	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	368.492.800

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
81	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	4.366.818.200
82	Dinas Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	-
83	Dinas Perikanan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	42.850.000
84	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	44.916.000
85	Dinas Perikanan	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	74.490.000
86	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	59.750.000
87	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	-
88	Dinas Perikanan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	87.160.000
89	Dinas Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	608.371.580
90	Dinas Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	299.065.420
91	Dinas Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	87.081.000

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU
92	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	114.700.000
93	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	1.013.839.221
94	Distrik Yamor	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	45.870.000

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rincian yang menjelaskan nama/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif. Rencana kerja dan pendanaan juga mengakomodir program kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan surat edaran Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Kaimana untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Program, kegiatan beserta indikator dan target pada perubahan RKPD 2025 disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029. Adapun program dan kegiatan perangkat daerah pada perubahan RKPD 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini :

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: KAB. KAIMANA

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BER-TAMBAH / BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			297.763.854.937,76	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			290.863.451.852,76			
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			162.840.430.218,00	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			160.550.714.781,00			
	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			222.694.000,00	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			131.300.000,00			
1	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	172.644.000,00	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	81.250.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3Laporan	50.050.000,00	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3Laporan	50.050.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	0,00	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			157.422.144.428,00	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			156.649.898.991,00			
1	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1102Orang/bulan	154.801.566.828,00	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1102Orang/bulan	154.029.321.391,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22Dokumen	2.543.485.000,00	1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22Dokumen	2.543.485.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4Laporan	33.591.000,00	1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4Laporan	33.591.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4Laporan	10.000.000,00	1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4Laporan	10.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	33.501.600,00	1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	33.501.600,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			128.470.000,00	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			97.157.000,00			
1	1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0Dokumen	113.994.000,00	1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0Dokumen	82.681.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

2	1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72Orang	14.476.000,00	1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72Orang	14.476.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.181.901.500,00	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			787.138.500,00			
1	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	148.304.500,00	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	148.304.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25Paket	81.917.000,00	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25Paket	81.917.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2Paket	219.124.000,00	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2Paket	219.124.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10Paket	68.800.000,00	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10Paket	68.800.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95Laporan	1.663.756.000,00	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95Laporan	268.993.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			1.076.191.800,00	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			1.076.191.800,00			
1	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	66.960.000,00	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	66.960.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	608.400.000,00	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	608.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2Laporan	400.831.800,00	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2Laporan	400.831.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.809.028.490,00	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.809.028.490,00			
1	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1Unit	45.100.000,00	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1Unit	45.100.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25Unit	701.740.000,00	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25Unit	701.740.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4Unit	611.392.000,00	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4Unit	611.392.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	380.926.490,00	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	380.926.490,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72Unit	69.870.000,00	1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72Unit	69.870.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			133.970.189.719,76	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			129.445.808.071,76			
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			45.064.771.625,00	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			44.435.325.607,00			
1	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	4Ruang	1.041.048.000,00	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4Ruang	1.041.048.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

2	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3Ruang	0,00	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3Ruang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4Unit	66.000.000,00	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4Unit	66.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	12Unit	4.238.784.000,00	1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	12Unit	4.265.584.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	245Paket	272.048.000,00	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	245Paket	272.048.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
6	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	11Paket	579.355.000,00	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	11Paket	579.355.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
7	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan	6Unit	247.632.000,00	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6Unit	247.632.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
8	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500Peserta Didik	600.459.000,00	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500Peserta Didik	447.523.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
9	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	57Orang	1.943.958.000,00	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	57Orang	1.943.958.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
10	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	400Orang	1.609.471.250,00	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400Orang	1.548.419.050,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
11	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	18Satuan Pendidikan	482.584.315,00	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	18Satuan Pendidikan	482.584.315,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
12	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	91Satuan Pendidikan	13.232.645.000,00	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	91Satuan Pendidikan	13.232.645.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
13	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	182Orang	368.852.000,00	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	182Orang	227.454.182,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
14	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2Ruang	0,00	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2Ruang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
15	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1Konten Digital	0,00	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1Konten Digital	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
16	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	188Orang	0,00	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	188Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
17	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3Dokumen	1.229.306.060,00	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3Dokumen	1.041.426.060,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
18	1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4Ruang	100.000.000,00	1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4Ruang	100.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

19	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1Paket	1.020.000.000,00	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1Paket	1.020.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
20	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	17Ruang	4.239.396.000,00	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	17Ruang	4.239.396.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
21	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6Unit	1.022.670.000,00	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6Unit	1.022.670.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
22	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6Orang	846.410.000,00	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6Orang	733.430.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
23	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	94Satuan Pendidikan	1.140.000.000,00	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	94Satuan Pendidikan	1.140.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
24	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6Ruang	901.593.000,00	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6Ruang	901.593.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
25	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10534Peserta Didik	9.882.560.000,00	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10534Peserta Didik	9.882.560.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
26	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1Paket	0,00	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			31.432.575.982,00	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			30.889.774.982,00			
1	1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1Ruang	388.080.000,00	1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1Ruang	388.080.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7Ruang	961.680.000,00	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7Ruang	961.680.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3Ruang	936.936.000,00	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3Ruang	936.936.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2Ruang	936.936.000,00	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2Ruang	936.936.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4Unit	1.243.440.000,00	1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4Unit	1.243.440.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
6	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1Unit	538.319.931,00	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1Unit	538.319.931,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
7	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8Ruang	1.279.670.500,00	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8Ruang	1.279.670.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
8	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1Ruang	249.480.000,00	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1Ruang	249.480.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
9	1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5Unit	987.525.000,00	1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5Unit	987.525.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
10	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	115Paket	1.011.450.000,00	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	115Paket	1.011.450.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

11	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10Paket	550.000.000,00	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10Paket	550.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
12	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4033Peserta Didik	8.457.600.000,00	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4033Peserta Didik	8.457.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
13	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	400Peserta Didik	361.529.200,00	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400Peserta Didik	273.439.200,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
14	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah	12Orang	451.368.000,00	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12Orang	451.368.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
15	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	600Orang	740.295.000,00	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	600Orang	740.295.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
16	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	18Satuan Pendidikan	5.474.466.000,00	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	18Satuan Pendidikan	5.474.466.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
17	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	38Orang	151.360.000,00	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	38Orang	114.220.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
18	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	38Orang	153.050.000,00	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	38Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
19	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1Konten Digital	199.688.038,00	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1Konten Digital	199.688.038,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
20	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2Dokumen	375.506.000,00	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2Dokumen	110.985.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
21	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1Dokumen	236.860.113,00	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1Dokumen	236.860.113,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
22	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	12Komunitas	323.676.000,00	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	12Komunitas	323.676.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
23	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19Satuan Pendidikan	0,00	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	19Satuan Pendidikan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
24	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6Ruang	2.810.808.000,00	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6Ruang	2.810.808.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
25	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1558Paket	1.022.400.000,00	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1558Paket	1.022.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
26	1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1Unit	200.000.000,00	1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1Unit	200.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

27	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10Ruang	975.772.200,00	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10Ruang	975.772.200,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
28	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5Paket	414.680.000,00	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5Paket	414.680.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.02.2.03 Pengelolan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			15.788.949.215,76	1.01.02.2.03 Pengelolan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			14.495.485.715,76			
1	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7Unit	2.698.812.765,76	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7Unit	2.698.812.765,76	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4Paket	349.881.500,00	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4Paket	349.881.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	5Paket	300.000.000,00	1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	5Paket	250.500.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	25Paket	496.853.450,00	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	25Paket	400.915.950,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta	3200Peserta Didik	3.491.400.000,00	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3200Peserta Didik	3.491.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
6	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	26Orang	1.230.996.000,00	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	26Orang	1.230.996.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
7	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0Orang	605.862.500,00	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0Orang	549.597.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
8	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8Satuan Pendidikan	1.962.882.200,00	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8Satuan Pendidikan	1.236.276.200,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
9	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	3200Satuan Pendidikan	1.265.570.000,00	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	3200Satuan Pendidikan	1.265.570.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
10	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7Dokumen	377.155.000,00	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7Dokumen	12.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
11	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12Ruang	1.092.660.800,00	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12Ruang	1.092.660.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
12	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2500Paket	900.000.000,00	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2500Paket	900.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
13	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6Paket	1.016.875.000,00	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6Paket	1.016.875.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.02.2.04 Pengelolan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			428.100.000,00	1.01.02.2.04 Pengelolan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			428.100.000,00			
1	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	1Satuan Pendidikan	0,00	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1Satuan Pendidikan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

2	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1Satuan Pendidikan	428.100.000,00	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1Satuan Pendidikan	428.100.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1unit	0,00	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			25.460.642.097,00	1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			23.767.151.767,00			
1	1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1Unit	6.373.332.650,00	1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1Unit	6.373.332.650,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10Ruang	4.216.212.000,00	1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10Ruang	4.216.212.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	1Ruang	0,00	1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	1Ruang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	572Paket	714.744.000,00	1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1075Paket	714.744.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	800Paket	706.400.000,00	1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	800Paket	706.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
6	1.01.02.4.05.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40Paket	0,00	1.01.02.4.05.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	40Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
7	1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan	1Unit	129.560.000,00	1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2Unit	129.560.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
8	1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3064Peserta didik	4.423.216.150,00	1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3064Peserta didik	4.343.532.150,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
9	1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	6Satuan Pendidikan	203.910.000,00	1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	6Satuan Pendidikan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
10	1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan	6Satuan Pendidikan	0,00	1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	6Satuan Pendidikan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
11	1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300Peserta Didik	1.120.669.120,00	1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300Peserta Didik	841.547.120,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
12	1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	64Orang	1.797.600.000,00	1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	64Orang	1.797.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
13	1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	250Orang	750.381.130,00	1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250Orang	559.724.800,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
14	1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6Satuan Pendidikan	123.994.500,00	1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6Satuan Pendidikan	123.994.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
15	1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	4Satuan Pendidikan	3.172.450.000,00	1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	4Satuan Pendidikan	3.172.450.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

16	1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	21Orang	203.234.500,00	1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	21Orang	162.586.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
17	1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	18Konten Digital	162.458.000,00	1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	18Konten Digital	162.458.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
18	1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2Dokumen	647.670.000,00	1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2Dokumen	40.800.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
19	1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2Dokumen	144.040.000,00	1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
20	1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang	100Orang	330.770.047,00	1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	100Orang	182.210.047,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
21	1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3Lembaga	240.000.000,00	1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3Lembaga	240.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.02.4.06.0000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			7.655.164.300,00	1.01.02.4.06.0000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			7.289.983.500,00			
1	1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1Ruang	312.312.000,00	1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1Ruang	312.312.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1Unit	0,00	1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2Paket	0,00	1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4	1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5Paket	500.000.000,00	1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5Paket	500.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5	1.01.02.4.06.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	11Paket	801.000.000,00	1.01.02.4.06.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	11Paket	801.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
6	1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan	1Unit	39.396.000,00	1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1Unit	39.396.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
7	1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1Unit	480.000.000,00	1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1Unit	480.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
8	1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1215Peserta didik	1.436.000.000,00	1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1215Peserta didik	1.436.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
9	1.01.02.4.06.0039 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	3Satuan Pendidikan	0,00	1.01.02.4.06.0039 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	3Satuan Pendidikan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
10	1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200Peserta Didik	527.629.000,00	1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200Peserta Didik	307.046.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

11	1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	250Orang	252.848.500,00	1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250Orang	252.848.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
12	1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	3Satuan Pendidikan	414.048.800,00	1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3Satuan Pendidikan	269.451.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
13	1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	6Satuan Pendidikan	2.891.930.000,00	1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	6Satuan Pendidikan	2.891.930.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota			8.139.986.500,00	1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota			8.139.986.500,00			
1	1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang	11Satuan Pendidikan	8.139.986.500,00	1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	11Satuan Pendidikan	8.139.986.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			360.362.800,00	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			274.056.800,00			
	1.01.03.4.03 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas			360.362.800,00	1.01.03.4.03 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas			274.056.800,00			
1	1.01.03.4.03.0001 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	1Dokumen	360.362.800,00	1.01.03.4.03.0001 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	1Dokumen	274.056.800,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.03.4.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	1Dokumen	0,00	1.01.03.4.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			592.872.200,00	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			592.872.200,00			
	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			463.169.120,00	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			463.169.120,00			
1	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0Dokumen	230.769.600,00	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0Dokumen	230.769.600,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3Laporan	232.399.520,00	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3Laporan	232.399.520,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.04.4.02 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan			129.703.080,00	1.01.04.4.02 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan			129.703.080,00			

1	1.01.04.4.02.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	0Dokumen	50.562.840,00	1.01.04.4.02.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	0Dokumen	50.562.840,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	1.01.04.4.02.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	1Laporan	79.140.240,00	1.01.04.4.02.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	1Laporan	79.140.240,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				228.429.880.625,02	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			221.275.499.220,02			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				97.179.916.146,00	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			96.727.087.384,00			
	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			743.700.000,00	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			259.190.000,00			
1	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	278.730.000,00	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	145.440.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10Laporan	464.970.000,00	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	113.750.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			87.157.637.356,00	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			88.404.750.594,00			
1	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	730Orang/bulan	85.958.707.356,00	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	730Orang/bulan	87.205.820.594,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	1.182.910.000,00	1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	1.182.910.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
3	1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2Dokumen	0,00	1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
4	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	0,00	1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
5	1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2Dokumen	10.680.000,00	1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2Dokumen	10.680.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
6	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4Laporan	0,00	1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan

7	1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	5.340.000,00	1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	5.340.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.010.000,00	1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.010.000,00			
1	1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	8.010.000,00	1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	8.010.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2Laporan	0,00	1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat			0,00	1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00			
1	1.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1Dokumen	0,00	1.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			409.191.000,00	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			275.723.000,00			
1	1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut KelengkapanJumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75Paket Paket	210.000.000,00	1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut KelengkapanJumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75Paket Paket	210.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	730Dokumen	79.242.000,00	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	730Dokumen	26.414.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
3	1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1Dokumen	0,00	1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
4	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4Dokumen	102.534.000,00	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4Dokumen	21.894.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
5	1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10Orang	0,00	1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
6	1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50Orang	17.415.000,00	1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50Orang	17.415.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.075.928.500,00	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.993.964.500,00			
1	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8Paket	570.000.000,00	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6Paket	570.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Kesehatan
2	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang DisediakanJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2Paket Paket	679.320.000,00	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang DisediakanJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2Paket Paket	679.320.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
3	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanJumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket Paket	378.932.500,00	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanJumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket Paket	378.932.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
4	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang DisediakanJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24Dokumen Dokumen	0,00	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang DisediakanJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24Dokumen Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan

5	1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4Laporan	0,00	1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4Laporan	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Kesehatan
6	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6Laporan	1.447.676.000,00	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9Laporan	365.712.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
7	1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12Dokumen	0,00	1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12Dokumen	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.207.641.190,00	1.02.01.2.07.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.207.641.190,00			
1	1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5Unit	0,00	1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5Unit	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3Unit	400.000.000,00	1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3Unit	400.000.000,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
3	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5Unit	0,00	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10Unit	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
4	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3Unit	807.641.190,00	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3Unit	807.641.190,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
5	1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	0,00	1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
6	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4Unit	0,00	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4Unit	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			2.492.147.100,00	1.02.01.2.08.0000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			2.492.147.100,00			
1	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	68.200.000,00	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	68.200.000,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	1.197.300.000,00	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	1.197.300.000,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
3	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	1.226.647.100,00	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	1.226.647.100,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan

	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.085.661.000,00	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.085.661.000,00			
1	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1Unit	90.200.000,00	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1Unit	90.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan PerizinannyaJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15Unit Unit	714.850.000,00	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan PerizinannyaJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15Unit Unit	714.850.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
3	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0Unit	243.510.000,00	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0Unit	243.510.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Kesehatan
4	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2Unit Unit	998.501.000,00	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit Unit	998.501.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
5	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1Unit	38.600.000,00	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	38.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			109.832.285.736,78	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			104.298.070.093,78			
	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			60.951.717.592,78	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			60.648.415.592,78			
1	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1Unit	3.420.936.333,00	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1Unit	3.420.936.333,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang DibangunJumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6Unit Unit	14.738.518.272,00	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang DibangunJumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6Unit Unit	14.738.518.272,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
3	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang DibangunJumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4Unit Unit	3.906.224.666,00	1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang DibangunJumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3Unit Unit	3.906.224.666,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
4	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5Unit	2.519.870.000,00	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5Unit	2.519.870.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
5	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0Unit	1.848.334.900,00	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0Unit	1.848.334.900,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan

6	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh	10Unit	646.516.657,00	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2Unit	646.516.657,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
7	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	10Unit	4.480.218.378,00	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	11Unit	4.480.218.378,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
8	1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan	7Unit	2.626.854.294,00	1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5Unit	2.626.854.294,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
9	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang DisediakanJumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	92Unit Unit	9.425.422.880,00	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang DisediakanJumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	92Unit Unit	9.425.422.880,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
10	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance CenterJumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	350Unit Unit	587.342.000,00	1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance CenterJumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Region	350Unit Unit	412.370.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
11	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	350Unit	45.120.000,00	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	361Unit	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
12	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	0Unit	272.620.000,00	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	0Unit	189.410.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
13	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakanJumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5Paket Pake t	16.128.249.212,78	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakanJumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9Paket Pake t	16.128.249.212,78	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan

14	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1Paket	305.490.000,00	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1Paket	305.490.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			43.917.364.951,00	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40.868.642.951,00			
1	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1507Orang	744.971.000,00	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1507Orang	556.491.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1442Orang	603.535.000,00	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1442Orang	568.195.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
3	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1376Orang	99.210.000,00	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1376Orang	28.530.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
4	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8322Orang	124.520.000,00	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8322Orang	66.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
5	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10485Orang	717.348.000,00	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10485Orang	645.948.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
6	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41939Orang	429.481.000,00	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41939Orang	195.401.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
7	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6094Orang	229.560.000,00	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6094Orang	218.160.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
8	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12451Orang	60.495.000,00	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12451Orang	455.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
9	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4063Orang	62.320.000,00	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4063Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
10	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	197Orang	119.260.000,00	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	197Orang	62.260.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
11	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1442Orang	237.615.000,00	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1442Orang	150.015.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
12	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1507Orang	293.870.000,00	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1507Orang	153.820.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
13	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12Dokumen	6.058.392.500,00	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12Dokumen	5.340.532.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
14	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5Dokumen	134.286.000,00	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5Dokumen	119.537.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan

15	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12Dokumen	0,00	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Kesehatan
16	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12Dokumen	46.400.000,00	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
17	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2Dokumen	177.350.000,00	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2Dokumen	177.350.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
18	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100Orang	44.160.000,00	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100Orang	44.160.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
19	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7Dokumen	2.221.811.000,00	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7Dokumen	2.150.481.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
20	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan MasyarakatJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	1Dokumen Dokumen	18.336.601.471,00	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan MasyarakatJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1Dokumen Dokumen	18.336.601.471,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
21	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2Paket	68.000.000,00	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	2Paket	68.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
22	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0Dokumen	3.800.080.000,00	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0Dokumen	3.800.080.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
23	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah	12Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	6.368.892.064,00	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah Dokumen Operasional Pelayanan PuskesmasJumlah	12Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	6.368.892.064,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
24	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12Dokumen	1.479.748.200,00	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12Dokumen	1.479.748.200,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
25	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/KotaJumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di	10Unit Unit	116.939.716,00	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/KotaJumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10Unit Unit	94.027.716,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
26	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	10Laporan	0,00	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
27	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1Dokumen	71.175.000,00	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1Dokumen	33.465.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan

28	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200Orang	155.583.000,00	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	200Orang	16.003.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
29	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	150Orang	245.280.000,00	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	150Orang	174.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
30	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500Orang	472.361.000,00	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	500Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
31	1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	50Tatanan	20.490.000,00	1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	50Tatanan	20.490.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
32	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12Dokumen	0,00	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
33	1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan	2Dokumen	377.630.000,00	1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
34	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4Dokumen	0,00	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara			387.184.193,00	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara			118.137.550,00			
1	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil	16Dokumen Dokumen	387.184.193,00	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	16Dokumen Dokumen	118.137.550,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			245.670.000,00	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			160.840.000,00			
1	1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	10Unit	245.670.000,00	1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	10Unit	160.840.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	5Unit	0,00	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah			4.330.349.000,00	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah			2.502.034.000,00			
1	1.02.02.4.02.0044 Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	7Dokumen	1.601.033.000,00	1.02.02.4.02.0044 Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	7Dokumen	1.601.033.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.02.4.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujuk Balik Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujuk	11Unit/Fasy ankes Unit/F asyankes	263.225.000,00	1.02.02.4.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujuk Balik Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan	11Unit/Fasy ankes Unit/F asyankes	118.430.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan

3	1.02.02.4.02.0048 Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	3Dokumen	1.967.641.000,00	1.02.02.4.02.0048 Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	3Dokumen	782.571.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
4	1.02.02.4.02.0054 Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350Orang	166.150.000,00	1.02.02.4.02.0054 Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
5	1.02.02.4.02.0055 Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350Orang	166.150.000,00	1.02.02.4.02.0055 Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
6	1.02.02.4.02.0056 Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350Orang	166.150.000,00	1.02.02.4.02.0056 Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	350Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				21.283.452.742,24	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			20.142.365.742,24			
	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			14.777.500,00	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			10.177.500,00			
1	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15Dokumen	14.777.500,00	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15Dokumen	10.177.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			16.023.024.186,24	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			15.257.664.186,24			
1	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya	2Dokumen	0,00	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
2	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	115Orang Orang	14.406.098.186,24	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	115Orang Orang	14.406.098.186,24	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
3	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10Dokumen	1.616.926.000,00	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10Dokumen	851.566.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			836.199.000,00	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			664.102.000,00			

1	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan KompetensinyaJumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	70Orang Orang	836.199.000,00	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan KompetensinyaJumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	70Orang Orang	664.102.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.03.4.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.409.452.056,00	1.02.03.4.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.210.422.056,00			
1	1.02.03.4.03.0002 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	829Orang	4.409.452.056,00	1.02.03.4.03.0002 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	829Orang	4.210.422.056,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			88.240.000,00	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			61.990.000,00			
	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional			53.440.000,00	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional			49.990.000,00			
1	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4Dokumen	53.440.000,00	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4Dokumen	49.990.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			34.800.000,00	1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			12.000.000,00			
1	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2Dokumen	34.800.000,00	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2Dokumen	12.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			45.986.000,00	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			45.986.000,00			
	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10Dokumen	0,00	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45.986.000,00	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45.986.000,00			
1	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	20Dokumen	45.986.000,00	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	20Dokumen	45.986.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan

2	1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	20Keluarga	0,00	1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	20Keluarga	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10Dokumen	0,00	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kesehatan
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			114.380.412.319,21	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			61.700.119.613,98			
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.245.281.088,00	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.739.896.416,00			
	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132.142.300,00	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.966.300,00			
1	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	96.993.900,00	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	12.817.900,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1Laporan	35.148.400,00	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	35.148.400,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.294.697.288,00	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.092.923.616,00			
1	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55Orang/bulan	5.082.243.288,00	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55Orang/bulan	4.880.469.616,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	3.212.454.000,00	1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	3.212.454.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000,00	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000,00			
1	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	50.000.000,00	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	50.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15Orang	0,00	1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			932.786.500,00	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			713.351.500,00			
1	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	12.287.500,00	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	12.287.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	14.360.000,00	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	14.360.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	120.990.000,00	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	120.990.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55Laporan	785.149.000,00	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55Laporan	565.714.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00			
1	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3Unit	0,00	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30Unit	0,00	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10Unit	0,00	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			1.339.105.000,00	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			1.339.105.000,00			
1	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	12.000.000,00	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	12.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	768.800.000,00	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	768.800.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12Laporan	558.305.000,00	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	558.305.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			496.550.000,00	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			496.550.000,00			
1	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10Unit	496.550.000,00	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10Unit	496.550.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			306.000.000,00	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			306.000.000,00			
	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			306.000.000,00	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			306.000.000,00			
1	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	3KM	0,00	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	3KM	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	1KM	0,00	1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	1KM	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1KM	306.000.000,00	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1KM	306.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			29.202.158.639,00	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			16.573.304.000,00			
	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah			29.202.158.639,00	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah			16.573.304.000,00			
1	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	15Unit	0,00	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	15Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2	1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1Lembaga	170.184.000,00	1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1Lembaga	170.184.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	68Orang	0,00	1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	68Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	40Liter/Detik	25.363.874.639,00	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	40Liter/Detik	14.368.520.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10Unit	1.585.000.000,00	1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10Unit	60.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	300SR	2.083.100.000,00	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300SR	1.974.600.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN			0,00	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	PERSAMPAHAN REGIONAL		0,00			
	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			0,00	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1Dokumen	0,00	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			5.120.649.000,00	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			2.398.762.000,00			
	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.120.649.000,00	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.398.762.000,00			
1	1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan	1Penyelenggara	0,00	1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	1Penyelenggara	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10Rumah Tangga	5.120.649.000,00	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10Rumah Tangga	2.398.762.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			860.468.800,00	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			579.034.000,00			
	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			860.468.800,00	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			579.034.000,00			
1	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000M	0,00	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000M	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	2500Meter	860.468.800,00	1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	2500Meter	579.034.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			3.024.416.045,00	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			4.397.761.045,00			

	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan		3.024.416.045,00	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan		4.397.761.045,00					
1	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan	2Dokumen	231.620.000,00	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2Dokumen	231.620.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang
2	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10Dokumen	2.714.796.045,00	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10Dokumen	4.088.141.045,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang
3	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	5Dokumen	78.000.000,00	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataa	5Dokumen	78.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		2.844.289.429,00	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		2.794.680.329,00					
	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		2.844.289.429,00	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		2.794.680.329,00					
1	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5Dokumen	2.844.289.429,00	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5Dokumen	2.794.680.329,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		61.665.868.318,21	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		23.799.400.823,98					
	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		61.665.868.318,21	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		23.799.400.823,98					
1	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang	9Dokumen	1.172.438.174,00	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	9Dokumen	394.327.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang
2	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi	16KM	1.472.587.094,00	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	16KM	35.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang
3	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10.979KM	4.153.815.792,00	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10.979KM	7.631.016.739,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang
4	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10KM	32.710.419.852,21	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10KM	7.028.260.004,98	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang
5	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1KM	19.431.476.056,00	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1KM	3.473.907.330,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang
6	1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1Jembatan	0,00	1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1Jembatan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang

7	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3Jembatan	0,00	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3Jembatan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1KM	0,00	1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	1KM	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	1Jembatan	0,00	1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	1Jembatan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	253.178KM	214.040.000,00	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	253.178KM	214.040.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1KM	0,00	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1KM	2.511.757.900,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	87.345KM	2.511.091.350,00	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	87.345KM	2.511.091.350,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				111.281.000,00	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			111.281.000,00			
	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)			111.281.000,00	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)			111.281.000,00			
1	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW	0Dokumen	111.281.000,00	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0Dokumen	111.281.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				13.495.190.169,00	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			41.782.984.496,00			
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.114.436.780,00	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.304.254.897,00			
	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			76.112.000,00	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.080.000,00			
1	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	65.012.000,00	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	21.980.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1Laporan	11.100.000,00	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	11.100.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.585.836.380,00	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.251.829.497,00			
1	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34Orang/bulan	3.899.685.380,00	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34Orang/bulan	3.565.678.497,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3Dokumen	677.271.000,00	1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3Dokumen	677.271.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2Laporan	8.880.000,00	1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2Laporan	8.880.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			998.291.000,00	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			565.148.000,00			

1	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	14.920.000,00	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	14.920.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	100.440.000,00	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	100.440.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	27.500.000,00	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	27.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3Laporan	855.431.000,00	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3Laporan	422.288.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			332.107.400,00	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			332.107.400,00			
1	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	6.000.000,00	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	6.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	70.200.000,00	1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	70.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1Laporan	56.248.000,00	1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Laporan	56.248.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	199.659.400,00	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	199.659.400,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			122.090.000,00	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			122.090.000,00			
1	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6Unit	56.880.000,00	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6Unit	56.880.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	46.900.000,00	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	46.900.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18Unit	18.310.000,00	1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18Unit	18.310.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			150.000.000,00	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			150.000.000,00			
	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			150.000.000,00	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			150.000.000,00			
1	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2Unit Rumah	150.000.000,00	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2Unit Rumah	150.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			7.230.753.389,00	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			36.328.729.599,00			
	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10			7.230.753.389,00	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)			36.328.729.599,00			
1	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50Unit Rumah	7.167.267.389,00	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50Unit Rumah	36.265.243.599,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

2	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1Laporan	16.650.000,00	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1Laporan	16.650.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1Dokumen	46.836.000,00	1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1Dokumen	46.836.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			18.341.910.776,00	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			17.828.805.992,75			
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.048.115.596,00	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.560.554.099,00			
	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			253.831.090,00	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			170.008.890,00			
1	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	69.656.790,00	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	68.004.790,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	14.040.800,00	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	14.040.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Satuan Polisi Pamong Praja
3	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	121.724.000,00	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	39.553.800,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	2.940.000,00	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	2.940.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	6.501.500,00	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	6.501.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
6	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3Laporan	23.901.000,00	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3Laporan	23.901.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3Laporan	15.067.000,00	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3Laporan	15.067.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.373.224.256,00	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.073.410.959,00			
1	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25Orang/bulan	3.276.022.372,00	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25Orang/bulan	3.055.631.362,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Satuan Polisi Pamong Praja
2	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22Orang/bulan	2.157.818.908,00	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22Orang/bulan	2.067.950.617,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13Orang/bulan	1.569.076.976,00	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16Orang/bulan	1.580.662.980,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

4	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0Dokumen	3.656.778.000,00	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0Dokumen	3.656.778.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
5	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	518.028.000,00	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	518.028.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	1.183.476.000,00	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	1.183.476.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	6.094.500,00	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	4.954.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	5.929.500,00	1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	5.929.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			233.914.000,00	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			201.855.000,00			
1	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4Paket	46.550.000,00	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4Paket	173.505.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Satuan Polisi Pamong Praja
2	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	0,00	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3Paket	28.350.000,00	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3Paket	28.350.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6Orang	159.014.000,00	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.774.608.750,00	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.557.991.750,00			
1	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	1.637.500,00	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	1.637.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	304.994.900,00	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	304.994.900,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Satuan Polisi Pamong Praja
3	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4Paket	110.685.500,00	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4Paket	155.685.500,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4Paket	0,00	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3Paket	421.584.600,00	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3Paket	421.584.600,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3Paket	109.610.000,00	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3Paket	109.610.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	103.848.000,00	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	103.848.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Satuan Polisi Pamong Praja
8	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	3.750.000,00	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	3.750.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2Paket	26.611.250,00	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2Paket	26.611.250,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	16.200.000,00	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	16.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
11	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Laporan	0,00	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20Laporan	95.665.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49Laporan	226.261.000,00	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49Laporan	135.738.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
13	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5Laporan	449.426.000,00	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5Laporan	182.667.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			915.874.000,00	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			926.714.000,00			
1	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	3.600.000,00	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	3.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
2	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	30.996.000,00	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	30.996.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	576.000,00	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	576.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1Laporan	40.300.000,00	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	40.300.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
5	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2Laporan	80.500.000,00	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	92.500.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3Laporan	150.000.000,00	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	150.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5Laporan	13.680.000,00	1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5Laporan	13.680.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4Laporan	404.374.000,00	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4Laporan	392.364.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	55.135.000,00	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	65.985.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	136.713.000,00	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	136.713.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.496.663.500,00	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.630.573.500,00			
1	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12Unit	262.230.000,00	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12Unit	396.140.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18Unit	954.242.000,00	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18Unit	954.242.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
3	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11Unit	73.190.000,00	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11Unit	73.190.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11Unit	34.620.000,00	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11Unit	34.620.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	6.797.500,00	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	6.797.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	165.584.000,00	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	165.584.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				396.539.800,00	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		378.529.800,00				
	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			212.383.400,00	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		194.373.400,00				
1	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0Dokumen	20.493.000,00	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0Dokumen	20.493.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
2	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	1Dokumen	0,00	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
3	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1Dokumen	7.133.800,00	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1Dokumen	7.133.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
4	1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	0Orang	113.971.000,00	1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	0Orang	113.971.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
5	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	1laporan	0,00	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
6	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	1Laporan	70.785.600,00	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1Laporan	52.775.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja

	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			60.970.200,00	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			60.970.200,00			
1	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3Laporan	60.970.200,00	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3Laporan	60.970.200,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			123.186.200,00	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			123.186.200,00			
1	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2Laporan	123.186.200,00	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2Laporan	123.186.200,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				379.749.680,00	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				322.439.676,00		
	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			59.995.000,00	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			57.595.000,00			
1	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300Orang	59.995.000,00	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300Orang	57.595.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			58.523.680,00	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			91.463.676,00			
1	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	109Unit	0,00	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	109Unit	32.939.996,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400Orang	58.523.680,00	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400Orang	58.523.680,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1Dokumen	0,00	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			18.150.000,00	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			28.800.000,00			
1	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1Laporan	0,00	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	1Dokumen	0,00	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian	25Orang	18.150.000,00	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25Orang	28.800.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25Orang	0,00	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1Laporan	0,00	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			243.081.000,00	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			144.581.000,00			
1	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	34Orang	82.306.000,00	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	34Orang	82.306.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1Laporan	160.775.000,00	1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1Laporan	62.275.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			517.505.700,00	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			567.282.417,75			
	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah			92.935.700,00	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah			210.772.417,75			
1	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35Laporan	92.935.700,00	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35Laporan	71.080.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0Dokumen	0,00	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1Dokumen	139.692.417,75	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan			424.570.000,00	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan			356.510.000,00			
1	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap	340Orang	308.540.000,00	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	340Orang	245.610.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	4Desa/Kelurahan	116.030.000,00	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	4Desa/Kelurahan	110.900.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			9.416.789.056,00	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			8.775.445.460,00			
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.733.039.276,00	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.210.325.680,00			
	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.020.000,00	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.020.000,00			
1	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	24.950.000,00	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	24.950.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	7Laporan	27.070.000,00	1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7Laporan	27.070.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.503.378.956,00	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.111.825.360,00			
1	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12Orang/bulan	3.826.410.956,00	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12Orang/bulan	3.434.857.360,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	654.018.000,00	1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	654.018.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4Laporan	22.950.000,00	1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4Laporan	22.950.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			88.300.000,00	1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			69.400.000,00			
1	1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56Paket	30.400.000,00	1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56Paket	30.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2Orang	57.900.000,00	1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2Orang	39.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			699.937.500,00	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			587.677.500,00			
1	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5Paket	231.457.500,00	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5Paket	231.457.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	92.650.000,00	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	92.650.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10Laporan	337.230.000,00	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10Laporan	263.570.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4	1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2Dokumen	38.600.000,00	1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			228.690.000,00	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			228.690.000,00			
1	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Laporan	11.100.000,00	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Laporan	11.100.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	0Laporan	80.400.000,00	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0Laporan	80.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12Laporan	137.190.000,00	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	137.190.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160.712.820,00	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160.712.820,00			
1	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1Unit	103.452.000,00	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1Unit	103.452.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	57.260.820,00	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	57.260.820,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			2.224.228.200,00	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			2.162.028.200,00			
	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			1.005.303.200,00	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			943.103.200,00			
1	1.06.02.2.01.0001 Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300Keluarga	1.005.303.200,00	1.06.02.2.01.0001 Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300Keluarga	943.103.200,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7Keluarga	0,00	1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7Keluarga	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.218.925.000,00	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.218.925.000,00			
1	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0Keluarga	0,00	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0Keluarga	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7Lembaga	1.218.925.000,00	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7Lembaga	1.218.925.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			797.958.750,00	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			754.728.750,00			
	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			547.956.750,00	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			504.726.750,00			
1	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	0Orang	66.934.750,00	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0Orang	66.934.750,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0Orang	115.299.000,00	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0Orang	100.099.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5Orang	213.407.000,00	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5Orang	185.377.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20Orang	152.316.000,00	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20Orang	152.316.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti			250.002.000,00	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti			250.002.000,00			
1	1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3Orang	250.002.000,00	1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3Orang	250.002.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			567.874.000,00	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			554.674.000,00			
	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah			567.874.000,00	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah			554.674.000,00			
1	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	1000Keluar a	298.504.000,00	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000Keluar a	298.504.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300Keluarga	269.370.000,00	1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300Keluarga	256.170.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			0,00	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			0,00			
	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			0,00	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			0,00			
1	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0Orang	0,00	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			93.688.830,00	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			93.688.830,00			
	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			93.688.830,00	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			93.688.830,00			
1	1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1Dokumen	93.688.830,00	1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1Dokumen	93.688.830,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.197.457.800,00	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.171.071.800,00			
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			381.199.800,00	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			368.492.800,00			
	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			381.199.800,00	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			368.492.800,00			

1	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40Orang	381.199.800,00	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40Orang	368.492.800,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			3.816.258.000,00	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			3.802.579.000,00			
	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			3.816.258.000,00	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			3.802.579.000,00			
1	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5Perkara	36.258.000,00	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5Perkara	22.579.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	14000Orang	3.780.000.000,00	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	14000Orang	3.780.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			7.279.959.468,00	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.991.430.751,00			
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.526.961.858,00	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.453.915.751,00			
	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			88.799.000,00	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00			
1	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	88.799.000,00	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.850.539.598,00	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.889.192.491,00			
1	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35Orang/bulan	4.043.737.598,00	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35Orang/bulan	4.082.390.491,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	806.802.000,00	2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	806.802.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			226.216.260,00	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			203.316.260,00			
1	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4Paket	30.889.260,00	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4Paket	30.889.260,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	7.875.000,00	2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	7.875.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5Paket	32.250.000,00	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5Paket	32.250.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	155.202.000,00	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	132.302.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			202.225.000,00	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			202.225.000,00			
1	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	26.250.000,00	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	26.250.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3Laporan	85.200.000,00	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	85.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	90.775.000,00	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	90.775.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			159.182.000,00	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			159.182.000,00			
1	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5Unit	159.182.000,00	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5Unit	159.182.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			882.998.000,00	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			863.996.000,00			
	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			882.998.000,00	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			863.996.000,00			
1	2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2Dokumen	99.998.000,00	2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2Dokumen	80.996.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	0Orang	783.000.000,00	2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	0Orang	783.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			700.000.000,00	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			561.348.000,00			
	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			76.900.000,00			
1	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	100.000.000,00	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	76.900.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan			600.000.000,00	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan			484.448.000,00			
1	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	40Orang	600.000.000,00	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30Orang	484.448.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			100.000.000,00	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			65.500.000,00			
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			100.000.000,00	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			65.500.000,00			

1	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	100Organisasi	100.000.000,00	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	100Organisasi	65.500.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			69.999.610,00	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			46.671.000,00			
	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			69.999.610,00	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			46.671.000,00			
1	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1Dokumen	69.999.610,00	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1Dokumen	46.671.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			450.349.000,00	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			363.475.000,00			
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			283.309.000,00	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			196.435.000,00			
	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan			99.171.000,00	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			99.171.000,00			
1	2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2laporan	99.171.000,00	2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	4laporan	99.171.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			184.138.000,00	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			97.264.000,00			
1	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	2Laporan	184.138.000,00	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2Laporan	97.264.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			94.504.000,00	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			94.504.000,00			
	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			94.504.000,00	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			94.504.000,00			
1	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	3Dokumen	94.504.000,00	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	3Dokumen	94.504.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			72.536.000,00	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			72.536.000,00			
	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			72.536.000,00	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			72.536.000,00			
1	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah	2Dokumen	72.536.000,00	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2Dokumen	72.536.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			793.748.400,00	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			793.748.400,00			

	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			793.748.400,00	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			793.748.400,00			
	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			793.748.400,00	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			793.748.400,00			
1	2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1Dokumen	520.584.000,00	2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1Dokumen	520.584.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	10Dokumen	273.164.400,00	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10Dokumen	273.164.400,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			9.973.381.496,00	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			9.668.558.581,00			
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.233.861.156,00	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.715.958.351,00			
	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.222.700,00	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.190.700,00			
1	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	59.441.000,00	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	16.409.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
2	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	4.781.700,00	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	4.781.700,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
3	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4Laporan	0,00	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.291.606.666,00	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.275.196.861,00			
1	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32Orang/bulan	3.540.558.166,00	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32Orang/bulan	3.524.148.361,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
2	2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	2.746.944.000,00	2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	2.746.944.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
3	2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	4.104.500,00	2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	4.104.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
4	2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1Laporan	0,00	2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			911.917.000,00	2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			513.153.000,00			

1	2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13Orang	911.917.000,00	2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13Orang	513.153.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			970.382.790,00	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			910.685.790,00			
1	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	13.629.990,00	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	13.629.990,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
2	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4Paket	0,00	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
3	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30Paket	67.813.800,00	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30Paket	67.813.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
4	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2Paket	746.100.000,00	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2Paket	746.100.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
5	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket	16.600.000,00	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket	16.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
6	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15Laporan	126.239.000,00	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15Laporan	66.542.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			151.064.000,00	2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			151.064.000,00			
1	2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60Unit	151.064.000,00	2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60Unit	151.064.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			291.698.000,00	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			291.698.000,00			
1	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	5.004.000,00	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	5.004.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
2	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3Laporan	164.400.000,00	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	164.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
3	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	122.294.000,00	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	122.294.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			552.970.000,00	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			552.970.000,00			
1	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13Unit	485.480.000,00	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13Unit	485.480.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
2	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	56.280.000,00	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	56.280.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
3	2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7Unit	11.210.000,00	2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7Unit	11.210.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			75.000.000,00	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			75.000.000,00			

	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			0,00	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1Dokumen	0,00	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
2	2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1Laporan	0,00	2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			75.000.000,00	2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			75.000.000,00			
1	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan	0.01Ha	75.000.000,00	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0.01Ha	75.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN			0,00	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN			0,00			
	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3			0,00	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3			0,00			
1	2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	1Dokumen	0,00	2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN			0,00	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			0,00			
	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah			0,00	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	9Badan Usaha	0,00	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	9Badan Usaha	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0,00	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0,00			
	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			

1	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang	340Orang	0,00	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	340Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0,00	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			0,00			
	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10Entitas	0,00	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10Entitas	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			0,00	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			208.314.000,00			
	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			0,00	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			208.314.000,00			
1	2.11.10.2.01.0003 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	0Perkara	0,00	2.11.10.2.01.0003 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	1Perkara	208.314.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			664.520.340,00	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			669.286.230,00			
	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			664.520.340,00	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			669.286.230,00			
1	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5Kelompok	500.000.000,00	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5Kelompok	500.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
2	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana	2Dokumen	0,00	2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Penge	2Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
3	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	7Unit	139.520.340,00	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	7Unit	144.286.230,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
4	2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	7Unit	0,00	2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	7Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
5	2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2670Ton	0,00	2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2670Ton	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup

6	2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan	2Unit	25.000.000,00	2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2Unit	25.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			0,00	2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			0,00			
1	2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2Laporan	0,00	2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Lingkungan Hidup
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN			5.003.731.488,00	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN			5.385.880.927,00			
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.450.395.888,00	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.587.705.777,00			
	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.920.000,00	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.880.000,00			
1	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	14.970.000,00	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	19.930.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2Laporan	14.950.000,00	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2Laporan	14.950.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.536.513.688,00	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.860.426.577,00			
1	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32Orang/bulan	3.197.229.688,00	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32Orang/bulan	3.521.502.577,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0Dokumen	0,00	2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	331.614.000,00	2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	331.254.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4	2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	7.670.000,00	2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	7.670.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			106.400.000,00	2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			106.400.000,00			
1	2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2Paket	106.400.000,00	2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2Paket	106.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			532.816.800,00	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			341.253.800,00			
1	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	25.000.000,00	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	25.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	92.492.800,00	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	92.492.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3	2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6Paket	31.675.000,00	2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6Paket	31.675.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	92.400.000,00	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	92.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7Paket	9.900.000,00	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7Paket	9.900.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10Laporan	281.349.000,00	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10Laporan	89.786.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			191.765.400,00	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			191.765.400,00			
1	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	4.935.000,00	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	4.935.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	80.400.000,00	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	80.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5Laporan	106.430.400,00	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5Laporan	106.430.400,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.980.000,00	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.980.000,00			
1	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2Unit	52.980.000,00	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2Unit	52.980.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			175.020.000,00	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			285.316.950,00			
	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			175.020.000,00	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			285.316.950,00			
1	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran	4Dokumen	103.650.000,00	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4Dokumen	77.850.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4Laporan	71.370.000,00	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4Laporan	207.466.950,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN			227.255.600,00	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN			234.343.200,00			
	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan			227.255.600,00	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan			234.343.200,00			
1	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5Layanan	113.454.000,00	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5Layanan	62.640.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang	5Paket	113.801.600,00	2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5Paket	171.703.200,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			151.060.000,00	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			278.515.000,00			

	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan			151.060.000,00	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan			278.515.000,00			
1	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan yang tersusun	4Dokumen	151.060.000,00	2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan yang tersusun	4Dokumen	278.515.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			14.412.709.384,00	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			13.843.206.610,00			
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.810.596.384,00	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.062.020.360,00			
	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			87.563.000,00	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.475.000,00			
1	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	73.063.000,00	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	30.975.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
2	2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1Laporan	14.500.000,00	2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	14.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.889.185.284,00	2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.349.890.260,00			
1	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35Orang/bulan	5.276.757.284,00	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35Orang/bulan	4.737.462.260,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
2	2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	1.612.428.000,00	2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	1.612.428.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			182.482.600,00	2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			182.482.600,00			
1	2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	32.000.000,00	2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	32.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
2	2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	99Orang	150.482.600,00	2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	99Orang	150.482.600,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			923.716.000,00	2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			756.523.000,00			
1	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	145.000.000,00	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	145.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
2	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	35.500.000,00	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	35.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
3	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	743.216.000,00	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	576.023.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			870.000.000,00	2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			870.000.000,00			
1	2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3Unit	0,00	2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung

2	2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2Unit	870.000.000,00	2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	870.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			566.369.500,00	2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			566.369.500,00			
1	2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	10.250.000,00	2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	10.250.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1Laporan	148.400.000,00	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	148.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
3	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1Laporan	407.719.500,00	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1Laporan	407.719.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			291.280.000,00	2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			291.280.000,00			
1	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pajak Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6Unit	152.170.000,00	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6Unit	152.170.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	2.13.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6Unit	139.110.000,00	2.13.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6Unit	139.110.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			1.135.757.000,00	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			710.664.000,00			
	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			1.135.757.000,00	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			710.664.000,00			
1	2.13.04.2.01.0002 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	6Dokumen	109.020.000,00	2.13.04.2.01.0002 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	9Dokumen	109.020.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	3Dokumen	70.370.000,00	2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	3Dokumen	70.370.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
3	2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala	1Laporan	386.484.000,00	2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1Laporan	386.484.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
4	2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7Dokumen	569.883.000,00	2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7Dokumen	144.790.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.946.000.000,00	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			3.708.532.250,00			
	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah			2.946.000.000,00	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah			3.708.532.250,00			
1	2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5Unit	2.946.000.000,00	2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6Unit	2.946.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

2	2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	0Dokumen	0,00	2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1Dokumen	762.532.250,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT			0,00	2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT			0,00			
	2.13.07.4.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			0,00	2.13.07.4.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			0,00			
1	2.13.07.4.01.0003 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	0Dokumen	0,00	2.13.07.4.01.0003 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.07.4.03 Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			0,00	2.13.07.4.03 Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.13.07.4.03.0001 Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk	0Kampung dan perkampungan	0,00	2.13.07.4.03.0001 Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan	84Kampung dan perkampungan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.08 PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN			520.356.000,00	2.13.08 PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN			361.990.000,00			
	2.13.08.4.01 Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan			520.356.000,00	2.13.08.4.01 Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan			361.990.000,00			
1	2.13.08.4.01.0001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	84Lembaga Kemasyarakatan	520.356.000,00	2.13.08.4.01.0001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	84Lembaga Kemasyarakatan	361.990.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			2.901.633.700,00	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			2.801.776.700,00			
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			220.922.000,00	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			151.690.000,00			
	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			220.922.000,00	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			151.690.000,00			
1	2.14.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2000Data	161.100.000,00	2.14.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2000Data	134.900.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	2.14.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1Dokumen	59.822.000,00	2.14.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1Dokumen	16.790.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00			
1	2.14.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3Dokumen	0,00	2.14.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00			
1	2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2Unit	0,00	2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			398.573.000,00	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			367.948.000,00			

	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			54.317.000,00	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			54.317.000,00			
1	2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1Dokumen	0,00	2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2Satuan Pendidikan	0,00	2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2Satuan Pendidikan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat	1Kegiatan	54.317.000,00	2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1Kegiatan	54.317.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			344.256.000,00	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			313.631.000,00			
1	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data	0Laporan	344.256.000,00	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0Laporan	313.631.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1.483.627.700,00	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1.483.627.700,00			
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			597.156.000,00	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			597.156.000,00			
1	2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	200Unit	159.964.000,00	2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	200Unit	159.964.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	178Laporan	437.192.000,00	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	178Laporan	437.192.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PL KB)			731.000.000,00	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PL KB)			731.000.000,00			

1	2.14.03.2.02.0006 Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P)	170Laporan	731.000.000,00	2.14.03.2.02.0006 Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P)	170Laporan	731.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah			100.974.000,00	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah			100.974.000,00			
1	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	170Laporan	32.558.000,00	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	170Laporan	32.558.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	135Orang	68.416.000,00	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	135Orang	68.416.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7Unit	0,00	2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	11Orang	0,00	2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	11Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			54.497.700,00	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			54.497.700,00			
1	2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1Laporan	43.560.000,00	2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1Laporan	43.560.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	2.14.03.2.04.0005 Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung	Jumlah DASHAT di Kampung KB	2Unit	10.937.700,00	2.14.03.2.04.0005 Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung	Jumlah DASHAT di Kampung KB	2Unit	10.937.700,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			798.511.000,00	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			798.511.000,00			
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan			130.000.000,00	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan			130.000.000,00			
1	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10Unit	130.000.000,00	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang	10Unit	130.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan			668.511.000,00	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			668.511.000,00			
1	2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembe	2000Organi sasi	380.511.000,00	2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembe	2000Organis asi	380.511.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2200laporan	288.000.000,00	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2200laporan	288.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			34.579.159.973,00	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			36.767.263.375,70			
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.842.691.031,00	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.713.847.633,70			
	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			73.477.600,00	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.725.600,00			
1	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	59.347.600,00	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	27.695.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
2	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	14.130.000,00	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	14.130.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
3	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	0Laporan	0,00	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	13.900.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.658.873.046,00	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.759.603.648,70			
1	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26Orang/bul an	2.735.731.046,00	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26Orang/bul an	2.836.461.648,70	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
2	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3Dokumen	894.882.000,00	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3Dokumen	894.882.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
3	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	14.130.000,00	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	14.130.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan

4	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1Laporan	14.130.000,00	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1Laporan	14.130.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			264.894.000,00	2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			167.646.000,00			
1	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2Paket	93.400.000,00	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2Paket	93.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
2	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5Orang	171.494.000,00	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5Orang	74.246.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.249.706.385,00	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			803.843.385,00			
1	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	317.393.385,00	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	317.393.385,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Perhubungan
2	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	50.000.000,00	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	50.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
3	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2Laporan	882.313.000,00	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2Laporan	436.450.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			90.450.000,00	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			421.739.000,00			
1	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2Laporan	4.200.000,00	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2Laporan	4.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
2	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1Laporan	86.250.000,00	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	86.250.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
3	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0Laporan	0,00	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	331.289.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			505.290.000,00	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			505.290.000,00			
1	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22Unit	477.150.000,00	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22Unit	477.150.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
2	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3Unit	28.140.000,00	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3Unit	28.140.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			1.769.251.230,00	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			3.091.333.230,00			
	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			1.344.261.230,00	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.723.061.230,00			
1	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	30Unit	1.195.261.230,00	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30Unit	2.574.061.230,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
2	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2Unit	149.000.000,00	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2Unit	149.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan

	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			121.990.000,00	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		65.272.000,00				
1	2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang	5Orang	121.990.000,00	2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	5Orang	65.272.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			129.000.000,00	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			129.000.000,00			
1	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	1Laporan	129.000.000,00	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1Laporan	129.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			174.000.000,00	2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			174.000.000,00			
1	2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	174.000.000,00	2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	174.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			26.967.217.712,00	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			26.919.499.712,00			
	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			361.500.000,00	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			361.500.000,00			
1	2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7Laporan	361.500.000,00	2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7Laporan	361.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			0,00	2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			0,00			
1	2.15.03.2.10.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	1Dokumen	0,00	2.15.03.2.10.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan			26.483.727.712,00	2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			26.483.727.712,00			
1	2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1Unit	26.483.727.712,00	2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	2Unit	26.483.727.712,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan

2	2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	7Laporan	0,00	2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	7Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			121.990.000,00	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			74.272.000,00			
1	2.15.03.2.13.0008 Fasilitas Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan	5Orang	121.990.000,00	2.15.03.2.13.0008 Fasilitas Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	5Orang	74.272.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			0,00	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			1.042.582.800,00			
	2.15.04.4.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			0,00	2.15.04.4.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			1.042.582.800,00			
1	2.15.04.4.02.0008 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	1Unit	0,00	2.15.04.4.02.0008 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	1Unit	1.042.582.800,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Dinas Perhubungan
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN			7.903.992.024,00	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN			7.506.283.271,00			
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.093.524.024,00	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.844.960.271,00			
	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			104.095.000,00	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.518.000,00			
1	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	80.435.000,00	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	28.858.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1Laporan	10.620.000,00	2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	10.620.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	13.040.000,00	2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	13.040.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.638.810.924,00	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.659.209.171,00			
1	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32Orang/bulan	3.152.173.924,00	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32Orang/bulan	3.172.572.171,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	466.137.000,00	2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	466.137.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	10.500.000,00	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	10.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

4	2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1Laporan	10.000.000,00	2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1Laporan	10.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5	2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	0,00	2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00			
1	2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2Paket	0,00	2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			629.282.000,00	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			411.897.000,00			
1	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	0Paket	0,00	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10000Paket	117.600.000,00	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10000Paket	117.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4Paket	30.000.000,00	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4Paket	30.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20Laporan	481.682.000,00	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20Laporan	264.297.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.437.000,00	2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.437.000,00			
1	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11Unit	131.437.000,00	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11Unit	131.437.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			364.687.800,00	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			364.687.800,00			
1	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	566Laporan	4.800.000,00	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	566Laporan	4.800.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12Laporan	199.900.000,00	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	199.900.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12Laporan	159.987.800,00	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	159.987.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			225.211.300,00	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			225.211.300,00			
1	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11Unit	140.310.000,00	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11Unit	140.310.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28Unit	84.901.300,00	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28Unit	84.901.300,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0Unit	0,00	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI			367.834.000,00	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI			323.994.000,00			

	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			367.834.000,00	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			323.994.000,00			
1	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	126Orang	367.834.000,00	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	126Orang	323.994.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.442.634.000,00	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.337.329.000,00			
	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah			2.442.634.000,00	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah			2.337.329.000,00			
1	2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	11Aplikasi	684.569.000,00	2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	11Aplikasi	602.014.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	36Perangkat Daerah	1.758.065.000,00	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	36Perangkat Daerah	1.735.315.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.948.097.214,50	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.742.165.166,50			
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.454.661.194,00	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.255.208.346,00			
	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			83.183.000,00	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.301.000,00			
1	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	64.882.000,00	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	9.165.000,00	2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	9.165.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	1.880.000,00	2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	1.880.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4	2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1Dokumen	1.210.000,00	2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1Dokumen	1.210.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	0Laporan	6.046.000,00	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0Laporan	6.046.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.421.101.744,00	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.200.530.896,00			
1	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34Orang/bulan	4.243.728.244,00	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34Orang/bulan	4.023.157.396,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

2	2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0Dokumen	1.165.098.500,00	2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0Dokumen	1.165.098.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0Laporan	6.530.000,00	2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0Laporan	6.530.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0Laporan	5.745.000,00	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0Laporan	5.745.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00			
1	2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	0,00	2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5Orang	0,00	2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			41.770.000,00	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			127.770.000,00			
1	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0Dokumen	37.500.000,00	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0Dokumen	37.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	0,00	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	86.000.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2Dokumen	4.270.000,00	2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2Dokumen	4.270.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			560.686.450,00	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			560.686.450,00			
1	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2Laporan	3.600.000,00	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2Laporan	3.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6Laporan	231.600.000,00	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6Laporan	231.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0Laporan	140.423.950,00	2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0Laporan	140.423.950,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0Laporan	185.062.500,00	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0Laporan	185.062.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			347.920.000,00	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			347.920.000,00			
1	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0Unit	320.860.000,00	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0Unit	320.860.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

2	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0Unit	27.060.000,00	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0Unit	27.060.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			52.096.800,00	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			38.617.600,00			
	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah			52.096.800,00	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah			38.617.600,00			
1	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	9Unit Usaha	52.096.800,00	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	9Unit Usaha	38.617.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			0,00	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			0,00			
	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian	9Unit Usaha	0,00	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	9Unit Usaha	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	9Unit Usaha	0,00	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	9Unit Usaha	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			0,00	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			0,00			
	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	6Orang	0,00	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	6Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			0,00	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			215.000.000,00			
	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			215.000.000,00			
1	2.17.06.2.01.0004 Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0Unit Usaha	0,00	2.17.06.2.01.0004 Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	86Unit Usaha	215.000.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	9Unit Usaha	0,00	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	9Unit Usaha	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			427.500.000,00	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			219.500.000,00			
	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para			427.500.000,00	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku			219.500.000,00			

1	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	420Unit Usaha	212.250.000,00	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	420Unit Usaha	110.250.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap	420Unit Usaha	215.250.000,00	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	420Unit Usaha	109.250.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0Orang	0,00	2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.013.839.220,50	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1.013.839.220,50			
	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1.013.839.220,50	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1.013.839.220,50			
1	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan	264Unit Usaha	1.013.839.220,50	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	264Unit Usaha	1.013.839.220,50	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7.134.915.709,00	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7.359.422.298,00			
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.857.051.109,00	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.612.140.698,00			
	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			79.517.000,00	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.620.000,00			
1	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0Dokumen	79.517.000,00	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0Dokumen	28.620.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.192.853.069,00	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.565.112.658,00			
1	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37Orang/bulan	3.360.713.069,00	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37Orang/bulan	3.729.817.658,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8Dokumen	832.140.000,00	2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8Dokumen	832.140.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0Laporan	0,00	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5Laporan	3.155.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			11.786.000,00	2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.086.000,00			
1	2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	11.786.000,00	2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	6.086.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			47.000.000,00	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			47.000.000,00			
1	2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50Paket	47.000.000,00	2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50Paket	47.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0Orang	0,00	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			417.624.480,00	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			510.660.480,00			
1	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	0Paket	0,00	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2Paket	80.400.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4Paket	10.799.980,00	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4Paket	10.799.980,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	8.605.000,00	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	8.605.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0Paket	0,00	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	159.600.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
5	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	51.404.500,00	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	51.404.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
6	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10Laporan	346.815.000,00	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10Laporan	199.851.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.270.560,00	2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.270.560,00			
1	2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0Unit	0,00	2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0Unit	0,00	2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10Unit	108.270.560,00	2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10Unit	108.270.560,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			0,00	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			188.001.000,00			
1	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Laporan	0,00	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2Laporan	6.300.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0Laporan	0,00	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2Laporan	181.701.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			158.390.000,00			
1	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0Unit	0,00	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2Unit	40.000.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0Unit	0,00	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6Unit	65.610.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0Unit	0,00	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15Unit	11.350.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0Unit	0,00	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	41.430.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			159.080.000,00	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			109.500.000,00			
	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			159.080.000,00	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			109.500.000,00			
1	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	47.300.000,00	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	47.300.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1Daerah	0,00	2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1Daerah	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1Dokumen	111.780.000,00	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1Dokumen	62.200.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			221.846.000,00	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			125.762.000,00			
	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			221.846.000,00	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			125.762.000,00			
1	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1Dokumen	221.846.000,00	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1Dokumen	125.762.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.533.381.600,00	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.311.967.600,00			
	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah			1.533.381.600,00	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah			1.311.967.600,00			
1	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	1500Pelaku Usaha	1.155.303.200,00	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500Pelaku Usaha	1.035.510.200,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	10Pelaku Usaha	368.866.400,00	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10Pelaku Usaha	267.245.400,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1500Kegiatan Usaha	9.212.000,00	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1500Kegiatan Usaha	9.212.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			363.557.000,00	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			200.052.000,00			
	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah			363.557.000,00	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah			200.052.000,00			

1	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	100Kegiatan Usaha	363.557.000,00	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100Kegiatan Usaha	200.052.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			0,00	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			0,00			
	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10Dokumen	0,00	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN			7.831.921.240,00	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN			7.311.966.240,00			
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.161.337.000,00	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			798.781.000,00			
	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			622.057.000,00	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			259.501.000,00			
1	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1Kegiatan	75.587.000,00	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1Kegiatan	75.587.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	200Orang	321.586.000,00	2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	200Orang	23.100.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
3	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan	154Orang	224.884.000,00	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	154Orang	160.814.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			539.280.000,00	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			539.280.000,00			
1	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3Organisasi	539.280.000,00	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3Organisasi	539.280.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			6.314.340.490,00	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			6.156.941.490,00			
	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			974.071.000,00	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			974.071.000,00			

1	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1Dokumen	974.071.000,00	2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1Dokumen	974.071.000,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah			1.570.861.490,00	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah			1.570.861.490,00			
1	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1Kegiatan	1.570.861.490,00	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1Kegiatan	1.570.861.490,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			375.068.000,00	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			217.669.000,00			
1	2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di	700Dokumen	375.068.000,00	2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	700Dokumen	217.669.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			3.350.000.000,00	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			3.350.000.000,00			
1	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	3Dokumen	3.350.000.000,00	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	3Dokumen	3.350.000.000,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			44.340.000,00	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			44.340.000,00			
1	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1Lembaga	44.340.000,00	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1Lembaga	44.340.000,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			356.243.750,00	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			356.243.750,00			
	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi			356.243.750,00	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi			356.243.750,00			
1	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1Laporan	356.243.750,00	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1Laporan	356.243.750,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			185.928.000,00	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			141.394.000,00			
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			185.928.000,00	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			141.394.000,00			
	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			185.928.000,00	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			141.394.000,00			
1	2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100Persentase	185.928.000,00	2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100Persentase	141.394.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			380.510.000,00	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			297.486.000,00			
	2.21.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			380.510.000,00	2.21.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			297.486.000,00			
	2.21.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			380.510.000,00	2.21.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			297.486.000,00			
1	2.21.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120Orang	380.510.000,00	2.21.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120Orang	297.486.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			6.703.337.881,00	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			7.439.311.701,00			

	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.286.716.828,00	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.424.905.305,00			
	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			511.596.000,00	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			252.518.000,00			
1	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	331.842.000,00	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	37.342.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	12.014.000,00	2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	12.014.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	15.782.000,00	2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	15.782.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3Laporan	114.074.000,00	2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3Laporan	149.496.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10Laporan	37.884.000,00	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10Laporan	37.884.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.885.030.508,00	2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.584.019.985,00			
1	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32Orang/bulan	3.077.486.508,00	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32Orang/bulan	2.785.595.985,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	798.744.000,00	2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	789.624.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	4.200.000,00	2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	4.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	4.600.000,00	2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	4.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00			
1	2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	0,00	2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.040.640.320,00	2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			738.917.320,00			
1	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	3.483.320,00	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	3.483.320,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6Paket	0,00	2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3Paket	20.500.000,00	2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3Paket	20.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	299.640.000,00	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	299.640.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2Paket	78.500.000,00	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2Paket	78.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	638.517.000,00	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	336.794.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00			
1	2.22.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30Unit	0,00	2.22.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			301.751.000,00	2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			301.751.000,00			
1	2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	9.000.000,00	2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	9.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6Laporan	170.400.000,00	2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6Laporan	170.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	122.351.000,00	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	122.351.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			547.699.000,00	2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			547.699.000,00			
1	2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1Unit	45.100.000,00	2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1Unit	45.100.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16Unit	182.600.000,00	2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16Unit	182.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	194.166.000,00	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	194.166.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	45.493.000,00	2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	45.493.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3Unit	80.340.000,00	2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3Unit	80.340.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				416.621.053,00	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.014.406.396,00		
	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			73.587.653,00	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00			

1	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1Objek	73.587.653,00	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1Objek	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			343.033.400,00	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			277.889.400,00			
1	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2Objek	343.033.400,00	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2Objek	277.889.400,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.736.516.996,00			
1	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	13Objek	0,00	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	13Objek	1.736.516.996,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2Unit	0,00	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			0,00	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			0,00			
	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2Dokumen	0,00	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR			0,00	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR			0,00			
	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0,00	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2Objek	0,00	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2Objek	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0,00	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2Objek	0,00	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2Objek	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.200.344.813,58	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.199.921.126,30			
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.101.075.513,58	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.011.158.097,30			
	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			67.977.100,00	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.945.100,00			
1	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	59.802.600,00	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	16.770.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3Laporan	8.174.500,00	2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3Laporan	8.174.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.225.107.288,58	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.165.414.872,30			

1	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0Orang/bulan	3.912.939.288,58	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0Orang/bulan	3.853.246.872,30	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	312.168.000,00	2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	312.168.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00			
1	2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	0,00	2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			344.280.500,00	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			357.087.500,00			
1	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2Paket	82.280.500,00	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2Paket	152.104.500,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	0,00	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	13.640.000,00	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	13.640.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8Laporan	248.360.000,00	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8Laporan	191.343.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00			
1	2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25Unit	0,00	2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8Unit	0,00	2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			236.610.625,00	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			236.610.625,00			
1	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	0,00	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	161.400.000,00	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	161.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	75.210.625,00	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	75.210.625,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			227.100.000,00	2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			227.100.000,00			
1	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2Unit	0,00	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4Unit	227.100.000,00	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4Unit	227.100.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3	2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1Unit	0,00	2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			99.269.300,00	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			188.763.029,00			
	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah			80.153.100,00	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah			175.156.829,00			
1	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15Perpustakaan	0,00	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15Perpustakaan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	15Perpustakaan	80.153.100,00	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	15Perpustakaan	175.156.829,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15Orang	0,00	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000Eksemplar	0,00	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000Eksemplar	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1Perpustakaan	0,00	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1Perpustakaan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			19.116.200,00	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			13.606.200,00			
1	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	0Perpustakaan	0,00	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	0Perpustakaan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	30Orang	0,00	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	30Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	20Lokus	19.116.200,00	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	20Lokus	13.606.200,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			95.670.000,00	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			81.336.000,00			
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			95.670.000,00	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			81.336.000,00			
	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			21.090.000,00	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200Berkas	0,00	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200Berkas	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3Laporan	21.090.000,00	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	2Laporan	0,00	2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	2Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			48.936.000,00			
1	2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10Arsip	0,00	2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10Arsip	48.936.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			74.580.000,00	2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			32.400.000,00			
1	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	500Pengguna	74.580.000,00	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	500Pengguna	32.400.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			0,00	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			0,00			
	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			0,00	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			0,00			
1	2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	200Berkas	0,00	2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	200Berkas	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN			16.033.700.926,02	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN			14.521.972.054,02			
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.363.661.926,00	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.717.055.054,00			
	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			430.717.710,00	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			290.794.710,00			
1	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	324.771.600,00	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	250.515.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
2	3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	105.946.110,00	3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	40.279.110,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.334.108.528,00	3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.399.167.656,00			
1	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50Orang/bulan	4.916.799.528,00	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50Orang/bulan	4.981.858.656,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
2	3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	2.417.309.000,00	3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	2.417.309.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			463.124.000,00	3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			137.216.000,00			
1	3.25.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0Unit	0,00	3.25.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan

2	3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	117.500.000,00	3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	117.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Perikanan
3	3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	50Dokumen	19.716.000,00	3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50Dokumen	19.716.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
4	3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13Orang	325.908.000,00	3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.779.493.688,00	3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.533.658.688,00			
1	3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	99.452.200,00	3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	99.452.200,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
2	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5Paket	270.372.488,00	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5Paket	270.372.488,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
3	3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12Paket	45.412.000,00	3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12Paket	45.412.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
4	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	488.292.000,00	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	518.192.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
5	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket	26.200.000,00	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket	26.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
6	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85Laporan	849.765.000,00	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85Laporan	574.030.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.950.000,00	3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.950.000,00			
1	3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5Unit	50.950.000,00	3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5Unit	50.950.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			761.278.000,00	3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			761.278.000,00			
1	3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	4.800.000,00	3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	4.800.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
2	3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	2Laporan	403.900.000,00	3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	403.900.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
3	3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0Laporan	0,00	3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
4	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5Laporan	352.578.000,00	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5Laporan	352.578.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			543.990.000,00	3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			543.990.000,00			
1	3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	43Unit	214.450.000,00	3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	43Unit	214.450.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan

2	3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5Unit	144.560.000,00	3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5Unit	144.560.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
3	3.25.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5Unit	184.980.000,00	3.25.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5Unit	184.980.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1.836.092.000,00	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1.287.012.000,00			
	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)			1.680.920.000,00	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)			1.142.220.000,00			
1	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	9Dokumen	79.920.000,00	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	9Dokumen	41.220.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
2	3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1Unit	500.000.000,00	3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1Unit	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
3	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	385Unit	1.101.000.000,00	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	385Unit	1.101.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			85.176.000,00	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			74.796.000,00			
1	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30Orang	35.190.000,00	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30Orang	29.880.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Dinas Perikanan
2	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10Kelompok	49.986.000,00	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10Kelompok	44.916.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah			69.996.000,00	3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah			69.996.000,00			
1	3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3Dokumen	69.996.000,00	3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3Dokumen	69.996.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.353.407.000,02	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1.335.387.000,02			
	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			232.640.000,00	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			221.400.000,00			
1	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15Kelompok	74.490.000,00	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15Kelompok	74.490.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
2	3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	15Kelompok	59.750.000,00	3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	15Kelompok	59.750.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan

3	3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	15Kelompok	0,00	3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	15Kelompok	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
4	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20Kelompok	98.400.000,00	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20Kelompok	87.160.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.120.767.000,02	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.113.987.000,02			
1	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	72.450.000,00	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen	65.670.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
2	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6Unit	608.371.580,00	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6Unit	608.371.580,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
3	3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1Dokumen	76.950.000,00	3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1Dokumen	76.950.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
4	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4Unit	299.065.420,02	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4Unit	299.065.420,02	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
5	3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20Unit	63.930.000,00	3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20Unit	63.930.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			144.380.000,00	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			34.760.000,00			
	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam			144.380.000,00	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam			34.760.000,00			
1	3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	70Pelaku Usaha	50.100.000,00	3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	70Pelaku Usaha	34.760.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
2	3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	18Pelaku Usaha	0,00	3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	18Pelaku Usaha	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
3	3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan yang dibentuk	4Orang	94.280.000,00	3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan yang dibentuk	4Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL			1.336.160.000,00	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL			1.147.758.000,00			
	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			179.304.000,00	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			163.784.000,00			

1	3.25.06.2.01.0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil	50Rekomen dasi	104.304.000,00	3.25.06.2.01.0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	50Rekomen dasi	96.024.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
2	3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1Dokumen	75.000.000,00	3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1Dokumen	67.760.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			90.000.000,00	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			90.000.000,00			
1	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	0Unit Usaha	90.000.000,00	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0Unit Usaha	90.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu)			259.963.000,00	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu)			87.081.000,00			
1	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	46Pelaku Usaha	259.963.000,00	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	46Pelaku Usaha	87.081.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.06.4.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			79.998.000,00	3.25.06.4.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			79.998.000,00			
1	3.25.06.4.04.0001 Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan	0Unit Usaha	79.998.000,00	3.25.06.4.04.0001 Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	0Unit Usaha	79.998.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.25.06.4.07 Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			726.895.000,00	3.25.06.4.07 Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			726.895.000,00			
1	3.25.06.4.07.0001 Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	17unit	726.895.000,00	3.25.06.4.07.0001 Fasilitas penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	17unit	726.895.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perikanan
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			5.218.564.000,00	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			4.863.021.653,00			
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI			5.130.384.000,00	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI			4.773.971.653,00			
	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			430.384.000,00	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			423.971.653,00			
1	3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2Dokumen	430.384.000,00	3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2Dokumen	423.971.653,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	22Unit	0,00	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	22Unit	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2Laporan	0,00	3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2Laporan	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			4.700.000.000,00	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			4.350.000.000,00			
1	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2Lokasi	4.700.000.000,00	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2Lokasi	4.350.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1Laporan	0,00	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1Laporan	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			88.180.000,00	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			89.050.000,00			
	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			88.180.000,00	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			89.050.000,00			
1	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2Dokumen	0,00	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2Dokumen	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8Kegiatan	88.180.000,00	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2Kegiatan	89.050.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4Promosi	0,00	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4Promosi	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			0,00	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			0,00			
	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			0,00	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			0,00			
1	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100Orang	0,00	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100Orang	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	65Orang	0,00	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	65Orang	0,00	tidak ada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			17.646.804.447,54	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			16.313.097.048,00			

	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.110.643.950,54	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.035.633.551,00			
	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			117.450.300,00	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			68.208.300,00			
1	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	77.127.100,00	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	34.095.100,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	19.700.100,00	3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1Dokumen	16.595.100,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	20.623.100,00	3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	17.518.100,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.832.948.345,54	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.184.104.946,00			
1	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86Orang/bul an	8.790.668.345,54	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86Orang/bul an	8.141.824.946,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	2.042.280.000,00	3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	2.042.280.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	0,00	3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00	3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00			
1	3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	1Laporan	0,00	3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			178.000.000,00	3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			178.000.000,00			
1	3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3Paket	178.000.000,00	3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3Paket	178.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50Orang	0,00	3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.092.446.405,00	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			715.521.405,00			
1	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	13.650.500,00	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	13.650.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	156.583.105,00	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	156.583.105,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	21.703.800,00	3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	21.703.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3Paket	94.013.000,00	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3Paket	94.013.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

5	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket	73.417.000,00	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket	73.417.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1Dokumen	0,00	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25Laporan	733.079.000,00	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25Laporan	356.154.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			487.522.400,00	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			487.522.400,00			
1	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	18.000.000,00	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	18.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	254.220.000,00	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	254.220.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12Laporan	215.302.400,00	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	215.302.400,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			402.276.500,00	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			402.276.500,00			
1	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40Unit	304.300.000,00	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40Unit	304.300.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22Unit	64.253.000,00	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22Unit	64.253.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12Unit	33.723.500,00	3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12Unit	33.723.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA			725.737.000,00	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA			725.737.000,00			
	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			725.737.000,00	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			725.737.000,00			
1	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12Laporan	461.490.000,00	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12Laporan	461.490.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1Laporan	60.000.000,00	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1Laporan	60.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih	1Ton	204.247.000,00	3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1Ton	204.247.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah			0,00	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah			0,00			
1	3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1Laporan	0,00	3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			2.922.252.498,00	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			2.940.408.498,00			

	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			1.946.563.000,00	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			1.964.719.000,00			
1	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	58Ha	1.879.975.000,00	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	58Ha	1.898.131.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang	1Dokumen	66.588.000,00	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1Dokumen	66.588.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			975.689.498,00	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			975.689.498,00			
1	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3Unit	975.689.498,00	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3Unit	975.689.498,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT			422.301.999,00	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT			422.301.999,00			
	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			87.900.000,00	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			87.900.000,00			
1	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1Laporan	87.900.000,00	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1Laporan	87.900.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			17.100.000,00	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			17.100.000,00			
1	3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	2Laporan	17.100.000,00	3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	2Laporan	17.100.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah			231.621.999,00	3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah			231.621.999,00			
1	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2Laporan	231.621.999,00	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2Laporan	231.621.999,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			85.680.000,00	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			85.680.000,00			
1	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1Laporan	85.680.000,00	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1Laporan	85.680.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			465.869.000,00	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			189.016.000,00			
	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			465.869.000,00	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			189.016.000,00			
1	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5Unit	108.610.000,00	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5Unit	129.556.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5Unit	59.460.000,00	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5Unit	59.460.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5Unit	297.799.000,00	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5Unit	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.632.766.000,00	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.263.433.000,00			
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			1.881.000.000,00	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			1.804.900.000,00			
	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.729.000.000,00	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.729.000.000,00			
1	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	200Unit	0,00	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	200Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1Unit	1.729.000.000,00	3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1Unit	1.729.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah			152.000.000,00	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah			75.900.000,00			
1	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6Dokumen	152.000.000,00	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6Dokumen	75.900.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			132.000.000,00	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			83.000.000,00			
	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			132.000.000,00	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			83.000.000,00			
1	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2Laporan	132.000.000,00	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2Laporan	83.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	1Laporan	0,00	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			0,00	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			0,00			
	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00			
1	3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0Pelaku Usaha	0,00	3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0Pelaku Usaha	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			619.766.000,00	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			375.533.000,00			
	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			619.766.000,00	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			375.533.000,00			
1	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera	259Unit	619.766.000,00	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	259Unit	375.533.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			0,00	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			0,00			
	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			0,00	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			0,00			
1	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40UMKM	0,00	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40UMKM	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40UMKM	0,00	3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40UMKM	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			760.406.580,00	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			490.720.580,00			
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			0,00	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			0,00			
	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			0,00	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			0,00			
1	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5Dokumen	0,00	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.31.02.4.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			0,00	3.31.02.4.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			0,00			
1	3.31.02.4.01.0008 Fasilitas bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang	40Unit	0,00	3.31.02.4.01.0008 Fasilitas bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan	40Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			185.981.000,00	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			81.935.000,00			
	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			185.981.000,00	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			81.935.000,00			
1	3.31.03.2.01.0004 Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan	1Dokumen	185.981.000,00	3.31.03.2.01.0004 Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi,	1Dokumen	81.935.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			574.425.580,00	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			408.785.580,00			
	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			574.425.580,00	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			408.785.580,00			

1	3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1Dokumen	123.105.580,00	3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1Dokumen	123.105.580,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1Dokumen	163.720.000,00	3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1Dokumen	128.480.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1Dokumen	287.600.000,00	3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1Dokumen	157.200.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
4.01 SEKRETARIAT DAERAH				87.965.038.325,00	4.01 SEKRETARIAT DAERAH				78.844.599.537,00		
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				58.481.075.245,00	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				53.593.365.457,00		
	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			672.093.800,00	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			672.093.800,00			
1	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	177.214.900,00	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	177.214.900,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2Dokumen	76.440.200,00	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2Dokumen	76.440.200,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4Laporan	205.806.700,00	4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4Laporan	205.806.700,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
4	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	212.632.000,00	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	212.632.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.255.950.932,00	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.816.665.144,00			
1	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0Orang/bulan	12.929.477.932,00	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0Orang/bulan	12.490.192.144,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	11.267.568.000,00	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	11.267.568.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	58.905.000,00	4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	58.905.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.658.697.800,00	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.352.969.800,00			
1	4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	595Orang	1.997.421.000,00	4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	595Orang	1.019.173.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah

2	4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50Orang	661.276.800,00	4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50Orang	333.796.800,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			14.540.465.458,00	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			12.263.677.458,00			
1	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	170.032.000,00	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	170.032.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	1.631.930.483,00	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	1.631.930.483,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	512.818.875,00	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	512.818.875,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
4	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	2.501.559.600,00	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	2.501.559.600,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
5	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	454.600.000,00	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	454.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
6	4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2Laporan	819.256.000,00	4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2Laporan	819.256.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
7	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	8.450.268.500,00	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	6.173.480.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			728.215.000,00	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			728.215.000,00			
1	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1Unit	728.215.000,00	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1Unit	728.215.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			4.111.022.000,00	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			4.221.994.000,00			
1	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Laporan	0,00	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	110.972.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat Daerah
2	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3Laporan	1.606.720.000,00	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	1.606.720.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2Laporan	2.504.302.000,00	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2Laporan	2.504.302.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.995.791.000,00	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.995.791.000,00			
1	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59Unit	866.260.000,00	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59Unit	866.260.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34Unit	351.720.000,00	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34Unit	351.720.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat Daerah
3	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	727.511.000,00	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	727.511.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah

4	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50Unit	50.300.000,00	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50Unit	50.300.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala			627.766.255,00	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala			686.266.255,00			
1	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0Orang/Bulan	203.916.255,00	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0Orang/Bulan	262.416.255,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2Paket	23.850.000,00	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2Paket	23.850.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2Orang	100.000.000,00	4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2Orang	100.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
4	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0Orang/Bulan	300.000.000,00	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0Orang/Bulan	300.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			2.751.064.000,00	4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			2.751.064.000,00			
1	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6Paket	980.133.000,00	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6Paket	980.133.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6Paket	980.133.000,00	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6Paket	980.133.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1Paket	790.798.000,00	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1Paket	790.798.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			798.683.900,00	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			688.399.900,00			
1	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3Dokumen	189.284.900,00	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3Dokumen	122.650.900,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1Laporan	249.995.000,00	4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1Laporan	206.345.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1Dokumen	28.810.000,00	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1Dokumen	28.810.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
4	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1Dokumen	330.594.000,00	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1Dokumen	330.594.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			5.341.325.100,00	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.416.229.100,00			
1	4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12Laporan	2.524.929.100,00	4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12Laporan	2.009.509.100,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat Daerah
2	4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12Laporan	2.354.396.000,00	4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12Laporan	1.944.720.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat Daerah
3	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12Laporan	462.000.000,00	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12Laporan	462.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			26.221.437.480,00	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			22.508.086.480,00			

	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			1.734.482.000,00	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			1.064.389.000,00			
1	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4Dokumen	976.119.000,00	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4Dokumen	414.670.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat Daerah
2	4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3Dokumen	758.363.000,00	4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3Dokumen	649.719.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			22.588.992.000,00	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			19.743.893.000,00			
1	4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1Dokumen	21.280.000.000,00	4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1Dokumen	19.140.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	1Dokumen	803.000.000,00	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas	1Dokumen	397.901.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1Dokumen	505.992.000,00	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1Dokumen	205.992.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum			1.693.649.480,00	4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum			1.588.454.480,00			
1	4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	180Dokumen	985.792.480,00	4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	180Dokumen	985.792.480,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat Daerah
2	4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5Kasus	500.345.000,00	4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5Kasus	395.150.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	180Dokumen	207.512.000,00	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	180Dokumen	207.512.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama			204.314.000,00	4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama			111.350.000,00			
1	4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1Dokumen	204.314.000,00	4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1Dokumen	111.350.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			3.262.525.600,00	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.743.147.600,00			
	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			763.450.000,00	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			391.462.000,00			
1	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1Laporan	348.944.000,00	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1Laporan	240.300.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1Dokumen	119.250.000,00	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1Dokumen	42.850.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4Dokumen	295.256.000,00	4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4Dokumen	108.312.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			382.623.600,00	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			382.623.600,00			

1	4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	0Dokumen	0,00	4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	0Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1Laporan	132.626.800,00	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1Laporan	132.626.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	7Laporan	249.996.800,00	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1Laporan	249.996.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.890.318.000,00	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.873.962.000,00			
1	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4Dokumen	400.269.000,00	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4Dokumen	300.730.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat Daerah
2	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1Dokumen	240.890.000,00	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1Dokumen	240.890.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat Daerah
3	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	25Orang	1.249.159.000,00	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	25Orang	1.332.342.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			226.134.000,00	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			95.100.000,00			
1	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1Dokumen	163.500.000,00	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Penanaman Modal,	1Dokumen	95.100.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
2	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1Dokumen	62.634.000,00	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
4.02 SEKRETARIAT DPRD				47.151.493.489,00	4.02 SEKRETARIAT DPRD				57.411.758.994,00		
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				37.552.472.489,00	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				40.856.555.994,00		
	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			142.623.600,00	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			68.115.600,00			
1	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	92.283.600,00	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	17.775.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
2	4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2Laporan	50.340.000,00	4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2Laporan	50.340.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.051.850.590,00	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.248.167.795,00			
1	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84Orang/bulan	21.129.236.590,00	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84Orang/bulan	19.219.893.795,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD

2	4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3Dokumen	2.610.510.000,00	4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3Dokumen	2.716.170.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
3	4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1Dokumen	312.104.000,00	4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1Dokumen	312.104.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00			
1	4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	0,00	4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
2	4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25Orang	0,00	4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.610.169.299,00	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.901.523.599,00			
1	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3Paket	145.951.108,00	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3Paket	145.951.108,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
2	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54Paket	775.995.600,00	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54Paket	2.448.617.900,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
3	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	494.893.591,00	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	494.893.591,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
4	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket	244.150.000,00	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3Paket	244.150.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
5	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112Laporan	2.949.179.000,00	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112Laporan	4.567.911.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.063.153.000,00	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.060.223.000,00			
1	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	34.500.000,00	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	34.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat DPRD
2	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3Laporan	1.212.300.000,00	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	1.259.100.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
3	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	3.816.353.000,00	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	4.766.623.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.617.676.000,00	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.617.676.000,00			
1	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16Unit	392.665.000,00	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16Unit	392.665.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
2	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15Unit	578.260.000,00	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15Unit	578.260.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
3	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4Unit	646.751.000,00	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	646.751.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			1.173.260.000,00	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			1.173.260.000,00			

1	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	7Orang/Bulan	510.000.000,00	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	7Orang/Bulan	510.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat DPRD
2	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5Paket	413.260.000,00	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5Paket	413.260.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
3	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25Orang	250.000.000,00	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25Orang	250.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi			893.740.000,00	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi			1.787.590.000,00			
1	4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	2Laporan	893.740.000,00	4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	2Laporan	1.787.590.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
2	4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1Laporan	0,00	4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			9.599.021.000,00	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			16.555.203.000,00			
	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1.687.003.000,00	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			2.775.753.000,00			
1	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12Dokumen	1.610.358.000,00	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12Dokumen	2.699.108.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
2	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0Dokumen	76.645.000,00	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0Dokumen	76.645.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			580.873.000,00	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			580.873.000,00			
1	4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	1Dokumen	580.873.000,00	4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1Dokumen	580.873.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			3.338.863.000,00	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			5.209.625.000,00			
1	4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	3Dokumen	1.167.467.000,00	4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	3Dokumen	1.167.467.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
2	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5Dokumen	2.171.396.000,00	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5Dokumen	3.988.398.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat DPRD
3	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1Dokumen	0,00	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
4	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1Dokumen	0,00	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1Dokumen	53.760.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			3.992.282.000,00	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			7.988.952.000,00			
1	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	7Laporan	2.305.500.000,00	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	7Laporan	6.397.570.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat DPRD
2	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25Dokumen	0,00	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Sekretariat DPRD
3	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3Dokumen	1.686.782.000,00	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3Dokumen	1.591.382.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat DPRD
	5.01 PERENCANAAN			17.041.603.377,00	5.01 PERENCANAAN			14.237.709.061,00			
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.122.221.777,00	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.154.159.461,00			

	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			187.205.500,00	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			187.205.500,00			
1	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	74.049.000,00	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	74.049.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	28.679.000,00	5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	28.679.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	26.769.500,00	5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	26.769.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	29.539.000,00	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	29.539.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	28.169.000,00	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Laporan	28.169.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.292.896.653,00	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.941.707.337,00			
1	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41Orang/bulan	4.404.296.653,00	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41Orang/bulan	4.053.107.337,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	858.600.000,00	5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	858.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1Laporan	15.000.000,00	5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1Laporan	15.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	15.000.000,00	5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	15.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			57.000.000,00	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			57.000.000,00			
1	5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	57.000.000,00	5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	57.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0Orang	0,00	5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.433.354.424,00	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			922.756.424,00			
1	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	2.801.324,00	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	2.801.324,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

2	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	100.975.000,00	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	100.975.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	1.334.000,00	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	1.334.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	266.545.600,00	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	266.545.600,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2Paket	263.726.500,00	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2Paket	138.411.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	797.972.000,00	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	412.689.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			579.880.000,00	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			473.605.000,00			
1	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	15.012.000,00	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	15.012.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4Laporan	206.380.000,00	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4Laporan	206.380.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	358.488.000,00	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	252.213.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			571.885.200,00	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			571.885.200,00			
1	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16Unit	367.380.000,00	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16Unit	367.380.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	150.045.200,00	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	150.045.200,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59Unit	54.460.000,00	5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59Unit	54.460.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			4.516.431.000,00	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.610.751.000,00			
	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			3.153.608.100,00	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			2.434.093.100,00			
1	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1Dokumen	70.000.000,00	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1Dokumen	70.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1Berita Acara	121.686.000,00	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1Berita Acara	121.686.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1Berita Acara	32.453.200,00	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1Berita Acara	32.453.200,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2Berita Acara	355.003.000,00	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2Berita Acara	186.629.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

5	5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	86Usulan	207.950.000,00	5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	86Usulan	158.540.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4Dokumen	2.366.515.900,00	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4Dokumen	1.864.784.900,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			33.039.500,00	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			33.039.500,00			
1	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1Dokumen	33.039.500,00	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1Dokumen	33.039.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.208.291.400,00	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.022.126.400,00			
1	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	1Laporan	575.388.800,00	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1Laporan	389.223.800,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4Laporan	632.902.600,00	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4Laporan	632.902.600,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			121.492.000,00	5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			121.492.000,00			
1	5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	1Dokumen	121.492.000,00	5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1Dokumen	121.492.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			4.402.950.600,00	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			3.472.798.600,00			
	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			2.425.081.600,00	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.690.691.600,00			
1	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1Laporan	87.393.000,00	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1Laporan	55.534.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1Laporan	900.000.000,00	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1Laporan	900.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	2Laporan	1.437.688.600,00	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2Laporan	735.157.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			23.560.000,00	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			23.560.000,00			

1	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3Dokumen	0,00	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	2Laporan	23.560.000,00	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2Laporan	23.560.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1.954.309.000,00	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1.758.547.000,00			
1	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3Laporan	369.754.000,00	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3Laporan	302.654.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2Dokumen	1.200.000.000,00	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2Dokumen	1.200.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4Laporan	283.818.000,00	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4Laporan	245.218.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1Laporan	100.737.000,00	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1Laporan	10.675.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.02 KEUANGAN				208.613.842.546,00	5.02 KEUANGAN				250.320.784.717,99		
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.709.990.885,00	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.937.314.104,00		
	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.085.600,00	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			154.811.600,00			
1	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	110.369.600,00	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	15.095.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pendapatan Daerah
2	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	71.270.000,00	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	71.270.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	17.470.000,00	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	17.470.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
4	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1Laporan	38.666.000,00	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	38.666.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	12.310.000,00	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	12.310.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah

	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.167.793.600,00	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.483.527.492,00			
1	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43Orang/bulan	5.575.420.096,00	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43Orang/bulan	4.541.571.004,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
2	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47Orang/bulan	5.274.117.004,00	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47Orang/bulan	4.623.699.988,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7Dokumen	1.457.820.000,00	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7Dokumen	1.457.820.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	838.066.500,00	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	838.066.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
5	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2Laporan	11.650.000,00	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2Laporan	11.650.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
6	5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	10.720.000,00	5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	10.720.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			335.331.000,00	5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			295.179.000,00			
1	5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	335.331.000,00	5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	295.179.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat			40.090.000,00	5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			40.090.000,00			
1	5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1Dokumen	0,00	5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
2	5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	2Dokumen	40.090.000,00	5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	2Dokumen	40.090.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			824.806.000,00	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			296.644.000,00			
1	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	45.000.000,00	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	45.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
2	5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1Dokumen	0,00	5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
3	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4Orang	114.660.000,00	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4Orang	39.808.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
4	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150Orang	0,00	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	14Orang	665.146.000,00	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14Orang	211.836.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.993.063.055,00	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.484.725.382,00			
1	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3Paket	21.146.480,00	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3Paket	21.146.480,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah

2	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	160.370.550,00	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	267.929.877,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pendapatan Daerah
3	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	401.221.025,00	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	401.221.025,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	245.000.000,00	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	245.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	898.570.000,00	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan	449.103.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5Laporan	206.425.000,00	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5Laporan	39.995.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
7	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1Dokumen	60.330.000,00	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1Dokumen	60.330.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00			
1	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1Unit	0,00	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
2	5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2Unit	0,00	5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			2.728.582.900,00	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			2.786.617.900,00			
1	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3Laporan	23.500.000,00	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3Laporan	23.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2Laporan	6.240.000,00	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2Laporan	9.300.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
3	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3Laporan	245.920.000,00	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	255.920.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
4	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3Laporan	1.070.875.000,00	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	1.070.875.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8Laporan	1.107.986.900,00	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8Laporan	1.107.986.900,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	274.061.000,00	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	319.036.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.370.238.730,00	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.395.718.730,00			
1	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23Unit	1.322.380.000,00	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23Unit	1.322.380.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20Unit	295.880.750,00	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20Unit	306.360.750,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah

3	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15Unit	17.030.000,00	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15Unit	32.030.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pendapatan Daerah
4	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32Unit	347.640.000,00	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32Unit	347.640.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	7Unit	60.970.000,00	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7Unit	60.970.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
6	5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34Unit	326.337.980,00	5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34Unit	326.337.980,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				184.222.122.661,00	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				229.455.424.113,99		
	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran			4.407.321.951,00	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran			3.657.235.951,00			
1	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2Dokumen	71.200.000,00	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2Dokumen	71.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2Dokumen	71.200.000,00	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2Dokumen	71.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	38Dokumen	294.733.278,00	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	38Dokumen	294.733.278,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38Dokumen	307.718.673,00	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38Dokumen	307.718.673,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6Dokumen	2.671.930.000,00	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6Dokumen	2.042.939.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6Dokumen	990.540.000,00	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6Dokumen	869.445.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.698.455.450,00	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.062.086.350,00			
1	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3Dokumen	594.804.600,00	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3Dokumen	401.870.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	6Laporan	500.744.850,00	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	6Laporan	336.922.850,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4Dokumen	177.354.800,00	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4Dokumen	78.610.400,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	150Orang	425.551.200,00	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150Orang	244.682.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.281.556.440,00	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.923.472.440,00			
1	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	1Laporan	256.221.000,00	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1Laporan	172.465.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1Laporan	540.298.000,00	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1Laporan	481.910.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1Dokumen	624.840.000,00	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1Dokumen	581.652.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1Dokumen	162.613.440,00	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1Dokumen	162.613.440,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	150Orang	697.584.000,00	5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150Orang	524.832.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			175.556.121.100,00	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			222.655.734.652,99			
1	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3Laporan	175.556.121.100,00	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3Laporan	222.655.734.652,99	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan			278.667.720,00	5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan			156.894.720,00			
1	5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	3Dokumen	43.158.000,00	5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	3Dokumen	43.158.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0Orang	235.509.720,00	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0Orang	113.736.720,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.914.125.000,00	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.237.334.000,00			

	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.914.125.000,00	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.237.334.000,00			
1	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1Dokumen	719.350.000,00	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1Dokumen	408.396.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	20Laporan	421.770.000,00	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	20Laporan	179.566.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	34Laporan	138.870.000,00	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	34Laporan	95.682.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1Laporan	0,00	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20Laporan	286.938.000,00	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20Laporan	267.814.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34Orang	347.197.000,00	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34Orang	285.876.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			767.604.000,00	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			690.712.500,00			
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			767.604.000,00	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			690.712.500,00			
1	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1Laporan	91.970.000,00	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1Laporan	91.970.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
2	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1Laporan	58.720.000,00	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1Laporan	33.250.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
3	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	3Laporan	25.590.000,00	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3Laporan	25.590.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
4	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50Obyek Pajak	26.600.000,00	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50Obyek Pajak	26.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
5	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1Dokumen	234.644.000,00	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1Dokumen	152.424.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
6	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2Layanan	28.500.000,00	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2Layanan	28.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
7	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2Dokumen	50.580.000,00	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2Dokumen	50.580.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
8	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1Dokumen	171.770.000,00	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1Dokumen	181.962.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pendapatan Daerah
9	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2Dokumen	19.950.000,00	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2Dokumen	19.950.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Badan Pendapatan Daerah
10	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1Dokumen	59.280.000,00	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1Dokumen	79.886.500,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah

11	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	1Laporan	0,00	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Pendapatan Daerah
	5.03 KEPEGAWAIAN			11.206.297.277,00	5.03 KEPEGAWAIAN			9.276.513.763,00			
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.828.086.377,00	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.420.887.763,00			
	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			195.755.000,00	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.904.000,00			
1	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4Dokumen	182.155.000,00	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4Dokumen	100.304.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	13.600.000,00	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	13.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
3	5.03.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1Dokumen	0,00	5.03.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.022.395.977,00	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.909.903.363,00			
1	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34Orang/bulan	3.817.459.977,00	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34Orang/bulan	3.704.967.363,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40Dokumen	1.204.936.000,00	5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40Dokumen	1.204.936.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
3	5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	0,00	5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			658.223.000,00	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			445.368.000,00			
1	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	8.440.000,00	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	8.440.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	55.930.000,00	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	55.930.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
3	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	76.500.000,00	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	76.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
4	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16Laporan	517.353.000,00	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16Laporan	304.498.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			421.516.400,00	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			421.516.400,00			
1	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	23.280.000,00	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	23.280.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3Laporan	202.800.000,00	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3Laporan	202.800.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

3	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	195.436.400,00	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	195.436.400,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			530.196.000,00	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			530.196.000,00			
1	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34Unit	453.280.000,00	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34Unit	453.280.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	76.916.000,00	5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	76.916.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4.378.210.900,00	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.855.626.000,00		
	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi			1.200.317.000,00	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi			1.489.406.000,00			
1	5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1Dokumen	0,00	5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1Dokumen	935.160.000,00	5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1Dokumen	1.280.160.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
3	5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1Laporan	0,00	5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
4	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1Lembaga	152.292.000,00	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1Lembaga	152.292.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5	5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1Dokumen	0,00	5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
6	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1Dokumen	112.865.000,00	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1Dokumen	56.954.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
7	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1Dokumen	0,00	5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			549.635.000,00	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			366.593.000,00			
1	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	60Dokumen	245.410.000,00	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	60Dokumen	108.383.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	560Dokumen	126.327.000,00	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	560Dokumen	126.327.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
3	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	250Dokumen	177.898.000,00	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	250Dokumen	131.883.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			1.904.478.900,00	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			644.544.000,00			
1	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	450Dokumen	0,00	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	450Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35Orang	580.000.000,00	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35Orang	580.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

3	5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	30Dokumen	1.259.934.900,00	5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	30Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
4	5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi	60Orang	64.544.000,00	5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	60Orang	64.544.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			723.780.000,00	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			355.083.000,00			
1	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100Dokumen	366.808.000,00	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100Dokumen	162.557.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
2	5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50Orang	125.552.000,00	5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50Orang	65.106.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
3	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25Orang	0,00	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
4	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25Laporan	231.420.000,00	5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25Laporan	127.420.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5	5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	25Laporan	0,00	5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	25Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				99.752.000,00	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				0,00		
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				99.752.000,00	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				0,00		
	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			99.752.000,00	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			0,00			
1	5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1Dokumen	99.752.000,00	5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.983.811.600,00	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.415.845.600,00		
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.983.811.600,00	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.415.845.600,00		
	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			129.130.000,00	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			0,00			
1	5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1Laporan	129.130.000,00	5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			250.000.000,00	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			0,00			
1	5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2Dokumen	250.000.000,00	5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			1.604.681.600,00	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			1.415.845.600,00			
1	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	3Dokumen	500.000.000,00	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3Dokumen	500.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3Laporan	1.104.681.600,00	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3Laporan	915.845.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

	6.01 INSPEKTORAT DAERAH			14.476.515.151,64	6.01 INSPEKTORAT DAERAH			14.096.123.338,00			
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.466.588.151,64	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.372.696.338,00			
	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			146.304.000,00	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.800.000,00			
1	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	92.504.000,00	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
2	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	36.130.000,00	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	36.130.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
3	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	17.670.000,00	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	17.670.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.872.160.831,64	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.557.037.018,00			
1	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28Orang/bulan	3.569.302.831,64	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28Orang/bulan	4.254.179.018,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
2	6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3Dokumen	1.302.858.000,00	6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3Dokumen	1.302.858.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.365.700.000,00	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.365.700.000,00			
1	6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	56.000.000,00	6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1Paket	56.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Inspektorat
2	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19Orang	1.309.700.000,00	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19Orang	1.309.700.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.413.767.320,00	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.727.503.320,00			
1	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2Paket	135.000.000,00	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2Paket	135.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
2	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	32.952.000,00	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	32.952.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
3	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	150.106.320,00	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	150.106.320,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
4	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	21.580.000,00	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	21.580.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
5	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36Laporan	2.074.129.000,00	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36Laporan	1.387.865.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00			
1	6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0Unit	0,00	6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	74Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat

	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			474.216.000,00	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			474.216.000,00			
1	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	39.216.000,00	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	39.216.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
2	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	2Laporan	140.400.000,00	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2Laporan	140.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
3	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2Laporan	294.600.000,00	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2Laporan	294.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			194.440.000,00	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			194.440.000,00			
1	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17Unit	175.640.000,00	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17Unit	175.640.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
2	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13Unit	15.350.000,00	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13Unit	15.350.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Inspektorat
3	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
4	6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7Unit	3.450.000,00	6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7Unit	3.450.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN			4.139.126.000,00	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN			3.852.626.000,00			
	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			3.823.528.000,00	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			3.537.028.000,00			
1	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4Laporan	166.800.000,00	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4Laporan	166.800.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Inspektorat
2	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	121Laporan	2.156.328.000,00	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	121Laporan	2.156.328.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
3	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	38Laporan	53.000.000,00	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	38Laporan	53.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
4	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1Laporan	95.000.000,00	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1Laporan	95.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
5	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	7Laporan	286.500.000,00	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	7Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Inspektorat
6	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4Kesepakatan	741.196.000,00	6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4Kesepakatan	741.196.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
7	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2Dokumen	324.704.000,00	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2Dokumen	324.704.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			315.598.000,00	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			315.598.000,00			

1	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1Laporan	26.598.000,00	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1Laporan	26.598.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
2	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7Laporan	289.000.000,00	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7Laporan	289.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			870.801.000,00	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			870.801.000,00			
	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			370.976.000,00	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			370.976.000,00			
1	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1Rekomendasi	17.608.000,00	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1Rekomendasi	17.608.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
2	6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2Rekomendasi	353.368.000,00	6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2Rekomendasi	353.368.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			499.825.000,00	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			499.825.000,00			
1	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5perangkat daerah	37.500.000,00	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5perangkat daerah	37.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
2	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5perangkat daerah	37.500.000,00	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5perangkat daerah	37.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
3	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1Kegiatan	387.325.000,00	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1Kegiatan	387.325.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
4	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5perangkat daerah	37.500.000,00	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5perangkat daerah	37.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Inspektorat
	7.01 KECAMATAN			38.874.128.619,00	7.01 KECAMATAN			37.751.821.754,00			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.420.090.929,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			29.607.394.064,00			
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			506.643.940,00	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			218.628.690,00			
1	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	57.025.200,00	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
2	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	69.586.550,00	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	45.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
3	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	59.249.800,00	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	16.217.800,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
4	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	73.488.600,00	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	6.495.600,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
5	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	85.766.870,00	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	60.766.870,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor

6	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	5.895.000,00	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	5.895.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Arguni Bawah
7	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	0,00	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Teluk Arguni Atas
8	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	28.539.500,00	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	16.739.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
9	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0Dokumen	0,00	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
10	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	28.539.500,00	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	28.539.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
11	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	2.956.000,00	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	2.956.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
12	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen	0,00	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
13	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	0,00	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
14	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	20.000.220,00	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	20.000.220,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
15	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	2.300.000,00	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	2.300.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
16	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1Laporan	3.056.000,00	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	3.056.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas

17	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1Laporan	0,00	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
18	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	0Laporan	0,00	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
19	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	10.662.200,00	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Laporan	10.662.200,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
20	7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1Dokumen	59.578.500,00	7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.470.276.454,00	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.121.423.839,00			
1	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24Orang/bulan	2.305.834.884,00	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24Orang/bulan	2.096.562.916,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kamrau
2	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25Orang/bulan	2.122.144.349,00	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25Orang/bulan	2.163.047.560,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
3	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45Orang/bulan	3.724.871.633,00	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45Orang/bulan	3.771.455.034,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Distrik Teluk Arguni Atas
4	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59Orang/bulan	5.874.811.832,00	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59Orang/bulan	5.491.577.838,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Distrik Kaimana
5	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24Orang/bulan	2.100.000.008,00	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24Orang/bulan	1.937.589.329,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
6	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23Orang/bulan	2.452.175.442,00	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23Orang/bulan	2.297.865.186,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Distrik Arguni Bawah
7	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24Orang/bulan	2.160.111.806,00	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24Orang/bulan	1.632.999.476,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
8	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10Dokumen	426.390.000,00	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10Dokumen	426.390.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
9	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	340.818.500,00	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	340.818.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
10	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	271.024.500,00	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	271.024.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
11	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	426.364.500,00	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	426.364.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kamrau

12	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	338.682.000,00	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	338.682.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
13	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	325.908.000,00	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2Dokumen	325.908.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
14	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen] Dokumen	1.470.156.000,00	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen]D okumen	1.470.156.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
15	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	83.850.000,00	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	83.850.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
16	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	2.308.000,00	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	2.308.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
17	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	0,00	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
18	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	4.835.000,00	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	4.835.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
19	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	0,00	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
20	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	2Laporan	0,00	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	2Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
21	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1Laporan	0,00	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas

22	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1Laporan	20.000.000,00	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1Laporan	20.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
23	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	3.000.000,00	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2Dokumen	3.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
24	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1Dokumen	4.140.000,00	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	4.140.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
25	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1Dokumen	12.850.000,00	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	12.850.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
26	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1Dokumen	0,00	7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			128.050.000,00	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			128.050.000,00			
1	7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3Unit	0,00	7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
2	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	21.850.000,00	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	21.850.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
3	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	0,00	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
4	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	0,00	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
5	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	25.000.000,00	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	25.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
6	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29Paket	81.200.000,00	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29Paket	81.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
7	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	0,00	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kamrau
8	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5Orang	0,00	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.125.525.315,00	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.939.696.315,00			
1	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2Paket	15.078.805,00	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2Paket	15.078.805,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kamrau
2	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	0Paket	1.400.000,00	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0Paket	1.400.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
3	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1Paket	0,00	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
4	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4Paket	56.500.000,00	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4Paket	56.500.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah

5	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket Pake t	135.518.080,00	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket Pake t	135.518.080,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
6	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	0,00	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
7	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	20.000.000,00	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket	20.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
8	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2Paket	51.000.000,00	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2Paket	51.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
9	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	79.118.030,00	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3Paket	79.118.030,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Kamrau
10	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7Paket	29.355.000,00	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7Paket	29.355.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Buruway
11	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	5.000.000,00	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	5.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
12	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	318.750.000,00	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	318.750.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
13	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	191.200.000,00	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	191.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Teluk Arguni Atas
14	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5Paket	643.560.000,00	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5Paket	643.560.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
15	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang DisediakanJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket Pake t	492.580.000,00	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang DisediakanJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket Pake t	492.580.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
16	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	353.744.400,00	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	463.644.400,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
17	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	370.654.000,00	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	370.654.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Kamrau
18	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	472.200.000,00	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	472.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
19	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15Paket	26.010.000,00	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15Paket	26.010.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kamrau
20	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanJumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket Pake t	102.000.000,00	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanJumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket Pake t	102.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
21	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	9.750.000,00	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	9.750.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
22	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	20.000.000,00	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	20.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
23	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	10.000.000,00	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	10.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas

24	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1Laporan	319.946.000,00	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1Laporan	197.566.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
25	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1Laporan	90.747.000,00	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1Laporan	50.898.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
26	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	0,00	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
27	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2Laporan	50.414.000,00	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2Laporan	50.414.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
28	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6Laporan	0,00	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
29	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6Laporan	261.000.000,00	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6Laporan	127.500.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
1	7.01.01.2.07.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			732.519.750,00	7.01.01.2.07.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			732.519.750,00			
	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3Unit	0,00	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kamrau
	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3Unit	72.000.000,00	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3Unit	72.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5Unit	134.000.000,00	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5Unit	134.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1Unit	110.000.000,00	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1Unit	110.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2Unit	133.203.000,00	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2Unit	133.203.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1Unit	0,00	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10Unit	0,00	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3Unit	0,00	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kamrau
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4Unit	56.125.000,00	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4Unit	56.125.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
10	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1Unit	0,00	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna

11	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2Unit	134.750.000,00	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2Unit	134.750.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Teluk Arguni Atas
12	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	0,00	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
13	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	0,00	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
14	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5Unit	0,00	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
15	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8Unit	27.988.750,00	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8Unit	27.988.750,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
16	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15Unit	64.453.000,00	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15Unit	64.453.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			672.925.670,00	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			682.925.670,00			
1	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	1.800.000,00	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	1.800.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Teluk Etna
2	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	2.796.000,00	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	2.796.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
3	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	6.000.000,00	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	6.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
4	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200Laporan	0,00	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
5	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Laporan	15.600.000,00	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Laporan	15.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
6	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	5.988.000,00	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	5.988.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Buruway
7	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	6.000.000,00	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	6.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
8	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0Laporan	0,00	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	10.000.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
9	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	149.610.000,00	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	149.610.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
10	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0Laporan	24.480.000,00	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0Laporan	24.480.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana

11	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Laporan	0,00	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
12	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	3Laporan	73.015.000,00	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	73.015.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Buruway
13	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	50.106.320,00	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	50.106.320,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
14	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	63.285.000,00	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3Laporan	63.285.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
15	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1Laporan	29.760.000,00	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1Laporan	29.760.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
16	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1Laporan	29.703.600,00	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1Laporan	29.703.600,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kamrau
17	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0Laporan	214.781.750,00	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0Laporan	214.781.750,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD :	Distrik Kaimana
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			784.149.800,00	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			784.149.800,00			
1	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8Unit	0,00	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
2	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5Unit	83.782.800,00	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5Unit	83.782.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kamrau
3	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4Unit	54.140.000,00	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4Unit	54.140.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
4	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1Unit	0,00	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
5	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan PerizinannyaJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4UnitUnit	27.460.000,00	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan PerizinannyaJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4UnitUnit	27.460.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
6	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4Unit	85.780.000,00	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4Unit	85.780.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
7	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6Unit	82.890.000,00	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6Unit	82.890.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah

8	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3Unit	42.890.000,00	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3Unit	42.890.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
9	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4Unit	80.960.000,00	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4Unit	80.960.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Distrik Teluk Etna
10	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4Unit	80.960.000,00	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4Unit	80.960.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
11	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
12	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	189.007.000,00	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4Unit	189.007.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
13	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2Unit	0,00	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Distrik Teluk Arguni Atas
14	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1Unit	56.280.000,00	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	56.280.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Distrik Arguni Bawah
15	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3Unit	0,00	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
16	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
17	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	0,00	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
18	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3Unit	0,00	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN				4.185.374.000,00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN			5.264.774.000,00			
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1.012.474.000,00	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			816.874.000,00			
1	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1Laporan	0,00	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
2	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5Laporan	118.000.000,00	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5Laporan	47.200.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
3	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1Dokumen	150.000.000,00	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1Dokumen	150.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas

4	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2Dokumen	186.895.500,00	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2Dokumen	123.595.500,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
5	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4Dokumen	167.248.000,00	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4Dokumen	124.558.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
6	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8Dokumen	0,00	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
7	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0Dokumen	108.808.700,00	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0Dokumen	108.808.700,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
8	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1Dokumen	171.800.000,00	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1Dokumen	171.800.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
9	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1Dokumen	109.721.800,00	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1Dokumen	90.911.800,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			3.172.900.000,00	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			4.447.900.000,00			
1	7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2Dokumen	622.900.000,00	7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2Dokumen	622.900.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
2	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1Laporan	2.550.000.000,00	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1Laporan	3.825.000.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
	7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan			0,00	7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan			0,00			
1	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1Dokumen	0,00	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0,00	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0,00			
1	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8Laporan	0,00	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN			1.902.543.140,00	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN			1.902.543.140,00			
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			876.405.940,00	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			876.405.940,00			
1	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	5Lembaga Kemasyarakatan	99.038.750,00	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5Lembaga Kemasyarakatan	99.038.750,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna

2	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6Lembaga Kemasyarakatan	56.492.190,00	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6Lembaga Kemasyarakatan	56.492.190,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
3	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8Lembaga Kemasyarakatan	0,00	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8Lembaga Kemasyarakatan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
4	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20Lembaga Kemasyarakatan	109.212.000,00	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20Lembaga Kemasyarakatan	109.212.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
5	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1Lembaga Kemasyarakatan	103.000.000,00	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1Lembaga Kemasyarakatan	103.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
6	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2Lembaga Kemasyarakatan	352.708.000,00	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2Lembaga Kemasyarakatan	352.708.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
7	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15Lembaga Kemasyarakatan	155.955.000,00	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15Lembaga Kemasyarakatan	155.955.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
8	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3Laporan	0,00	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
9	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0Laporan	0,00	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
10	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1Laporan	0,00	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
11	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1Laporan	0,00	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.026.137.200,00	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.026.137.200,00			
1	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0Lembaga Kemasyarakatan	108.108.800,00	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0Lembaga Kemasyarakatan	108.108.800,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
2	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0Unit	531.474.400,00	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0Unit	531.474.400,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
3	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0Pokmas / Ormas	354.514.000,00	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0Pokmas / Ormas	354.514.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana
4	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0Laporan	32.040.000,00	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0Laporan	32.040.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kaimana

	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			289.016.000,00	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			255.826.000,00			
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			289.016.000,00	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			255.826.000,00			
1	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1Laporan	79.020.000,00	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1Laporan	45.830.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
2	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1Laporan	170.000.000,00	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1Laporan	170.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
3	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7Laporan	39.996.000,00	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7Laporan	39.996.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			115.161.400,00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			115.161.400,00			
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			115.161.400,00	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			115.161.400,00			
1	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25Orang	115.161.400,00	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25Orang	115.161.400,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN			961.943.150,00	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN			606.123.150,00			
	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			961.943.150,00	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			606.123.150,00			
1	7.01.06.2.01.0016 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8Dokumen	45.870.000,00	7.01.06.2.01.0016 Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8Dokumen	45.870.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Yamor
2	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3Laporan	191.684.000,00	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3Laporan	125.884.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Arguni Bawah
3	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3Laporan	301.232.250,00	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3Laporan	215.482.250,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
4	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4Laporan	77.176.900,00	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4Laporan	63.316.900,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau

5	7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1Laporan	0,00	7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Arguni Atas
6	7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1Laporan	204.020.000,00	7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1Laporan	83.570.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Buruway
7	7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7Laporan	141.960.000,00	7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7Laporan	72.000.000,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Kambrau
8.01 KESATUAN BANGSA DAN				11.385.498.906,00	8.01 KESATUAN BANGSA DAN				12.265.773.455,00		
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.527.485.706,00	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.479.195.255,00		
	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			83.685.000,00	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.510.000,00			
1	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	77.175.000,00	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2Dokumen	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen	2.790.000,00	8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen	2.790.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2Laporan	0,00	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20Laporan	3.720.000,00	8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20Laporan	3.720.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.057.740.876,00	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.961.145.425,00			
1	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12Orang/bulan	2.469.770.876,00	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12Orang/bulan	2.373.175.425,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	587.970.000,00	8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	587.970.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	0,00	8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4Laporan	0,00	8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			181.537.500,00	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			307.017.500,00			

1	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12Paket	937.500,00	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12Paket	937.500,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12Paket	42.000.000,00	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12Paket	167.480.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	33.300.000,00	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12Paket	33.300.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12Dokumen	0,00	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	105.300.000,00	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	105.300.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			186.429.000,00	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			186.429.000,00			
1	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	7.200.000,00	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12Laporan	7.200.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12Laporan	82.800.000,00	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	82.800.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12Laporan	29.980.000,00	8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12Laporan	29.980.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	66.449.000,00	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	66.449.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.093.330,00	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.093.330,00			
1	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6Unit	0,00	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1Unit	0,00	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1Unit	5.333.330,00	8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	5.333.330,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5Unit	12.760.000,00	8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5Unit	12.760.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			2.862.024.200,00	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			4.153.649.200,00			
	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2.862.024.200,00	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			4.153.649.200,00			

1	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0Orang	0,00	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50Orang	1.237.591.200,00	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50Orang	1.541.516.200,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1Laporan	214.600.000,00	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1Laporan	214.600.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	94Orang	1.409.833.000,00	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	94Orang	2.397.533.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.232.700.000,00	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.209.780.000,00			
	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan			1.232.700.000,00	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.209.780.000,00			
1	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	0Orang	1.209.780.000,00	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	0Orang	1.209.780.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	1Laporan	22.920.000,00	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	1Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			476.140.000,00	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			0,00		
	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi			476.140.000,00	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi			0,00		
1	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12Orang	225.650.000,00	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12Orang	250.490.000,00	8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12Orang	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0Laporan	0,00	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			350.000.000,00	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			350.000.000,00		
	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan			350.000.000,00	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan			350.000.000,00		
1	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0Orang	0,00	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0Orang	350.000.000,00	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0Orang	350.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0Laporan	0,00	8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0Laporan	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			2.937.149.000,00	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			3.073.149.000,00			
	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			2.937.149.000,00	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			3.073.149.000,00			
1	8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	0Dokumen	0,00	8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusu	0Dokumen	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	0Orang	2.309.814.000,00	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	0Orang	2.445.814.000,00	bertambah	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	0Laporan	63.335.000,00	8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	0Laporan	63.335.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0Dokumen	564.000.000,00	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0Dokumen	564.000.000,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.443.350.000,00	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			0,00			
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.443.350.000,00	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0,00			
	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.900.000,00	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00			

1	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1Laporan	13.900.000,00	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.155.000,00	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0,00			
1	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5Laporan	3.155.000,00	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00			
1	X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10Orang	0,00	X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0Orang	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			517.643.000,00	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,00			
1	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2Paket	80.400.000,00	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0Paket	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	159.600.000,00	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0Paket	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20Laporan	277.643.000,00	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00			
1	X.XX.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6Unit	0,00	X.XX.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1Unit	0,00	X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0Unit	0,00	tidakada	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			750.262.000,00	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			0,00			
1	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2Laporan	6.300.000,00	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Laporan	110.972.000,00	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Sekretariat Daerah
3	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1Laporan	120.000.000,00	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Distrik Teluk Etna
4	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2Laporan	181.701.000,00	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
5	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3Laporan	331.289.000,00	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0Laporan	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Perhubungan
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			158.390.000,00	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00			

1	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2Unit	40.000.000,00	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0Unit	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6Unit	65.610.000,00	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0Unit	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15Unit	11.350.000,00	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0Unit	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	41.430.000,00	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0Unit	0,00	berkurang	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
TOTAL				1.287.338.458.718	TOTAL			1.280.165.179.138			

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2025 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD, hingga pada tahap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (P-PPA) Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kaimana Tahun 2025-2029 dengan Visi Kepala Daerah **"Mewujudkan Kaimana yang Tertib, Maju, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan"** serta Lima Misi Utama yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja yang terukur.

Pada akhirnya, komitmen, kerjasama dan harmonisasi kerja seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2025 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Kaimana secara menyeluruh.

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
HASAN ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

IMANUEL TUMANAT, SH.
PENATA TK.I
NIP. 19811225 201104 1 001

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial				Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial				
1	Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70	Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.				Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.				
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	61.27	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	61.27	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	2.92	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	2.92	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Harapan Lama Sekolah OAP	Tahun	14.36	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Harapan Lama Sekolah OAP	Tahun	14.36	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi PAUD	%	45.68	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi PAUD	%	45.68	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Paritas Daya Beli	Rp	9164997	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Paritas Daya Beli	Rp	9164997	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Paritas Daya Beli Penduduk OAP	Rp	9164997	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Paritas Daya Beli Penduduk OAP	Rp	9164997	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Rata-rata lama Sekolah Penduduk OAP	Tahun	9.43	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Rata-rata lama Sekolah Penduduk OAP	Tahun	9.43	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.36	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.36	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi SD	%	38.56	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi SD	%	38.56	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
10	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca SMP	%	42.1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca SMP	%	42.1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
11	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	57.88	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	57.88	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
12	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.40	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.40	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
13	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	77.10	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	77.10	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
14	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.478	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.478	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84.94	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84.94	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
16	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68.46	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68.46	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
17	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi SMP	%	42.1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi SMP	%	42.1	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
18	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Cakupan penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial kelompok rentan	%	100	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Cakupan penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial kelompok rentan	%	100	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
19	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	49.22	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	49.22	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
20	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca PAUD	%	45.68	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca PAUD	%	45.68	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	69.96	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	69.96	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
22	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk OAP (Tahun)	Tahun	65.60	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk OAP (Tahun)	Tahun	65.60	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
23	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca SMA	%	54.17	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca SMA	%	54.17	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
24	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi SMA	%	54.17	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi SMA	%	54.17	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
25	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	23.5	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	23.5	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
26	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi SMK	%	38.89	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Numerasi SMK	%	38.89	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca SMK	%	38.89	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca SMK	%	38.89	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
28	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca SD	%	38.56	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia.	Literasi Membaca SD	%	38.56	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat				Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat				
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Proporsi Kontribusi PDRB Kaimana terhadap Papua Barat	%	5.29	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Proporsi Kontribusi PDRB Kaimana terhadap Papua Barat	%	5.29	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Rasio Gini	Indeks	0.348	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Rasio Gini	Indeks	0.348	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
3	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Indeks Desa Membangun (IDM)		0.78	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Indeks Desa Membangun (IDM)		0.78	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Persentase Penduduk Miskin	%	13.06	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Persentase Penduduk Miskin	%	13.06	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	99.35	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	99.35	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4.55	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4.55	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.40	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.40	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura				Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura				
1	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	14.15	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	14.15	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase Kampung/Kelurahan yang mendirikan, mengembangkan dan merevitalisasi Koperasi Merah Putih	%	100	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase Kampung/Kelurahan yang mendirikan, mengembangkan dan merevitalisasi Koperasi Merah Putih	%	100	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	5.7	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	5.7	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase Desa Berkembang dan Maju	%	0.024	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase Desa Berkembang dan Maju	%	0.024	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan peternakan terhadap PDRB	%	1.27	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan peternakan terhadap PDRB	%	1.27	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	(%)	93.37	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	(%)	93.37	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	85.725	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	85.725	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	12.83	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	12.83	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Indeks Daya Saing Pariwisata	Indeks	0.85	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Indeks Daya Saing Pariwisata	Indeks	0.85	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
10	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	40	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	40	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
11	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	55	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	55	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.33	Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.33	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.				Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.				
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.	Rerata Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	59.86	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.	Rerata Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	59.86	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.30	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.30	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi				Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi				
1	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	*	77.14	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	*	77.14	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	*	77.14	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	*	77.14	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
3	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Indeks	0	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Indeks	0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	*	2.8	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	*	2.8	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Cakupan Pemekaran Kabupaten/Kota	%	0	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Cakupan Pemekaran Kabupaten/Kota	%	0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Cakupan Pemekaran Provinsi	%	0	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Cakupan Pemekaran Provinsi	%	0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Cakupan Pemekaran Distrik	%	0	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Cakupan Pemekaran Distrik	%	0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Nilai sakip kabupaten	Nilai	70	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Nilai sakip kabupaten	Nilai	70	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Indeks Inovasi Daerah	Angka	60.94	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Indeks Inovasi Daerah	Angka	60.94	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
10	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Cakupan Pemekaran Kampung/Kelurahan	%	23	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Cakupan Pemekaran Kampung/Kelurahan	%	23	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
11	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	0	Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.				Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.				
1	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	86.07	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	86.07	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	110.27	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	110.27	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
3	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	29.95	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	29.95	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	*	120	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	*	120	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0.45	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0.45	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah				Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah				
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman	%	42.64	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman	%	42.64	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	28.96	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	28.96	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Cakupan wilayah pesisir yang dilayani kapal perintis	%	60	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Cakupan wilayah pesisir yang dilayani kapal perintis	%	60	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Cakupan wilayah (Kampung) yang memiliki akses sinyal internet	%	93.25	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Cakupan wilayah (Kampung) yang memiliki akses sinyal internet	%	93.25	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	76.94	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	76.94	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	60	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	60	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
1	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	%	89.54	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	%	89.54	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	50	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	50	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
3	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	94.42	Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	94.42	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat				Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat				

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat	Cakupan Regulasi Kebijakan Daerah yang Mengakomodir Hak-Hak OAP	%	0	Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat	Cakupan Regulasi Kebijakan Daerah yang Mengakomodir Hak-Hak OAP	%	0	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	*	79.84	Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	*	79.84	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
3	Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	56	Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	56	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik				Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik				

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	â Cakupan OAP yang melek politik	%	20	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	â Cakupan OAP yang melek politik	%	20	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Persentase OAP di lembaga eksekutif	*	50	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Persentase OAP di lembaga eksekutif	*	50	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
3	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Cakupan Pendidikan politik untuk OAP	%	20	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Cakupan Pendidikan politik untuk OAP	%	20	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Persentase OAP di lembaga Legislatif	*	56	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Persentase OAP di lembaga Legislatif	*	56	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Persentase OAP yang jadi calon legislatif Partai Politik	*	50	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Persentase OAP yang jadi calon legislatif Partai Politik	*	50	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Cakupan inklusi keuangan calon legislatif OAP	%	20	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Cakupan inklusi keuangan calon legislatif OAP	%	20	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	â Cakupan perlindungan masyarakat dan tanah OAP	%	20	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	â Cakupan perlindungan masyarakat dan tanah OAP	%	20	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Tersedianya data terpilah OAP	%	100	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Tersedianya data terpilah OAP	%	100	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
9	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

NO	RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: KAB. KAIMANA

NO	RPJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN / PROGRAM (RPJMD/RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN / PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase biaya personil siswa PAUD (%)	0	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMK	56,17 Nilai		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase biaya personil siswa pendidikan menengah (%)	0		Iklim Inklusivitas SMA	58,77 Nilai		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase biaya personil siswa pendidikan dasar (%)	0		Iklim kebinekaan SMK	76,84 Nilai		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan satuan pendidikan yang memperoleh BOSDA berformula (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan Calon Pendeta dan Imam/Ustadz OAP yang Menerima Bantuan Pendidikan (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase perlengkapan siswa PAUD (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase perlengkapan siswa pendidikan dasar (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase perlengkapan siswa pendidikan menengah (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Proporsi siswa OAP dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan. (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan tenaga pendidik berprestasi dan berdedikasi yang menerima penghargaan dana pembinaan atau mendapatkan kesempatan promosi/pelatihan kompetensi lanjutan. (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Cakupan peserta didik berprestasi yang berasal dari wilayah terpencil lulusan SMA/SMK yang memperoleh beasiswa penuh pada jenjang pendidikan tinggi (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	90					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	65,2					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,76					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	57,76					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim Inklusivitas SMA (Nilai)	58,77					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim Inklusivitas SMK (Nilai)	56,17					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim kebinekaan SMK (Nilai)	76,84					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim kebinekaan SMA (Nilai)	76,45					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim keamanan SMK (Nilai)	67,03					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim keamanan SMA (Nilai)	70,71					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Skor kemampuan numerasi SMK (%)	56,35					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		APM SD (%)	98,38					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Skor Kemampuan Numerasi SMA (%)	57,46					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Skor Kemampuan Literasi SMK (%)	58,71					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		APM SMP (%)	60,81					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		APM SMK (%)	55,06					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Skor kemampuan literasi SMA (%)	65,03					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

		Angka Putus Sekolah SMA (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Angka Putus Sekolah SMK (%)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Angka Putus Sekolah SD (%)	0,16					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Angka putus sekolah SMP (%)	1,42					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase ruang kelas pendidikan menengah dalam kondisi baik (%)	98,36					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase satuan pendidikan SD yang terakreditasi (%)	93					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		APM SMA (%)	40,38					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim Keamanan SD (Nilai)	67,18					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim Keamanan SMP (Nilai)	63,21					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	30,6					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	40,71					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	68,82					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	50,61					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%)	55,5					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	51,71					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Iklim kebinekaan SD (%)	61,14					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%)	0	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	-	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,51	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru	100%		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	80		Proporsi PTK Penggerak	4%		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
					Proporsi PTK Bersertifikat	60%		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
					% Kecukupan ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	90%		1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	85					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0					1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik (%)	70	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya perencanaan penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%		1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah & 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	8		Terlaksananya perencanaan penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%		10 Puskesmas & 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kampung yang memperoleh layanan mobile health (%)	60	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase terlaksananya pemenuhan UKP dan UKM	84 persen		10 Puskesmas & RSUD
		Cakupan Skrining Faktor Risiko Bagi Penduduk Usia Produktif (%)	100		Peningkatan Sarana dan prasarana	7 Unit		10 Puskesmas & RSUD
		Cakupan penduduk/kelompok sasaran yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	20		Meningkatkan efektifitas, efisiensi, kinerja, profesionalisme dan akses serta pelayanan rumah sakit	100%		1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan & RSUD
		Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar (%)	60					10 Puskesmas
		Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar (%)	70					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Presentase puskesmas yang memiliki jejaring kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar (%)	16,13					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%)	50					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Prevalensi overweight pada anak usia sekolah (%)	23,4					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Presentase puskesmas dan pustu yang menyelenggarakan program aktivitas fisik (%)	20					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	0					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

		Puskesmas yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat (%)	100					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Puskesmas dengan hasil surveilans kualitas air minum tingkat rumah tangga memenuhi syarat (Unit Kerja)	0					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	11					10 Puskesmas
		Prevalensi overweight pada anak usia sekolah (%)	23,4					
		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	5					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	45,6					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	11,63					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	13,8					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Insiden Stunting balita (kasus baru) (Kasus)	8					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	7,7					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Presentase ibu hamil KEK (%)	13					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	82					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	75					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Distrik dengan Eliminasi Kusta (%)	0					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Distrik dengan Eliminasi Filariasis (%)	0					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Distrik dengan Eliminasi Frambusia (%)	0					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) (%)	0					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Insiden HIV (%)	0					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%)	77					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	72,6					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	85					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan Imunisasi MR 1 Pada Bayi (%)	85					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan Imunisasi HPV (%)	20					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan Imunisasi Lengkap pada Baduta (%)	85					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan Imunisasi di usia Sekolah Dasar (%)	80					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	58					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Presentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif (%)	75					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan Skrining kesehatan Jiwa (%)	40					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas (%)	100					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100					1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100					10 Puskesmas
		Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	85					10 Puskesmas
		Cakupan Imunisasi di usia Sekolah Dasar (%)	80					10 Puskesmas
		Cakupan Imunisasi HPV (%)	20,3					10 Puskesmas
		Cakupan Imunisasi Lengkap pada Baduta (%)	85					10 Puskesmas
		Cakupan Imunisasi MR 1 Pada Bayi (%)	88					10 Puskesmas
		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%)	60					10 Puskesmas
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100					10 Puskesmas
		Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) (%)	50					10 Puskesmas
		Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah (%)	80					10 Puskesmas
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	73					10 Puskesmas
		Cakupan Skrining kesehatan Jiwa (%)	30					10 Puskesmas
		Penemuan Kasus TBC (%)	73					10 Puskesmas
		Pengobatan kusta tepat waktu (%)	60					10 Puskesmas
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	88					10 Puskesmas
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100					10 Puskesmas
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100					10 Puskesmas
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100					10 Puskesmas

		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100				10 Puskesmas
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100				10 Puskesmas
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100				10 Puskesmas
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100				10 Puskesmas
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100				10 Puskesmas
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100				10 Puskesmas
		Presentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif (%)	76				10 Puskesmas
		Presentase ibu hamil KEK (%)	13				10 Puskesmas
		Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas (%)	100				10 Puskesmas
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100				10 Puskesmas
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100				10 Puskesmas
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional (%)	0				1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Persentase pemakaian tempat tidur dalam periode waktu tertentu (BOR) (%)	35				1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah
		Lama Hari Pasien dirawat (LOS) (Hari)	4				1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah
		Presentasi Fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar (%)	70				1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah
		Presentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	5,81				10 Puskesmas
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan tenaga kesehatan berprestasi dan berdedikasi yang menerima penghargaan dana pembinaan atau mendapatkan kesempatan promosi/pelatihan kompetensi lanjutan. (%)	0	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas SDMk	100 persentase	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Presentase STR tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan (%)	80		Terlaksananya Pembayaran Jasa Bagi Tenaga Kesehatan	1	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan & RSUD
		Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Presentase)	70				1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Presentasi Rumah Sakit yang terpenuhi SDM sesuai standar (%)	84				1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (Presentase)	70	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tersedianya sedan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100 persentase	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Presentasi Fasilitas kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar (%)	80				1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Presentasi puskesmas dengan pemenuhan obat dan vaksin program vaksin tepat waktu dan tepat jumlah (%)	70				1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Presentase)	11	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 persentase	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Presentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0				1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	1.02.07 - PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Presentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0				1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) (%)	0				1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintan daerah	80%	1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase terpenuhinya pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi (%)	0	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase terpenuhinya Pengelolaan sumber daya air	80%	1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air layak konsumsi (%)	0	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase SPAM yang sesuai dengan standar kebutuhan air bersih	80%	1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tersedianya Perusahaan Air Minum Daerah (Perusahaan)	YA				1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional (%)	35	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Meningkatnya Sistem Sarana Prasarana Persampahan	80%	1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Presentase)	15	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase Meningkatnya Sistem Pengolahan Air Limbah yang memadai	80%	1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Presentase)	40	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase terbangunya Sistem Drainase	50%	1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Presentase)	10				1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan ketersediaan Sarana/Prasarana Dasar pada kampung persiapan (%)	0	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Meningkatnya Bangunan Gedung	90%	1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Cakupan Distrik yang memiliki sarana/prasarana sesuai kebutuhan (%)	0					1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	27,27					1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	27,27	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan lainnya	95%		1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase penyelesaian ruas jalan di koridor barat kaimana kewenangan kabupaten (%)	0	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	95%		1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Konektivitas Darat (Persentase)	20					1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0					1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan kawasan hutan yang diidentifikasi dan inventarisasi untuk dapat dikonversi menjadi kawasan produktif lainnya (%)	0	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase peningkatan tata ruang	90%		1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	20	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase ketersediaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 persen		2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	10					2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	0,6	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase ketersediaan rumah layak huni jumlah peningkatan	100 persen		2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Kualitas rumah tidak layak huni	50 persen		2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	0					2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase realisasi belanja operasional tepat waktu (%)	100		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Persentase realisasi belanja operasional tepat waktu (%)	100		Presentase Pelaksanaan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan (%)	100	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Pelaksanaan Program Administrasi Umum Perangkat Daerah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen		1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100					1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100					1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	16,67					1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian SPM Bidang Kebencanaan (%)	86,67	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Program Penanggulangan Bencana	1 Tahun		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	60,75	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1		1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	60,75					1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintah daerah	7 kegiatan		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	2	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase pemberdayaan kampung kategori KAT	100%		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	3					1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0					1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi sosial	100%		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	50		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Org		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100					1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase pemberian fasilitas keluarga	100%		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	undefined		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persenatse terpeliharanya Taman makan Pahlawan	1 Kegiatan		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan internal terhadap layanan penunjang (%)	0					2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0					2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja Prioritas OAP yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%)	40	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-		2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%)	0					2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%)	46					2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan ((%))	76,53	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-		2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Sakip (Indeks)	8	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase realisasi belanja operasional tepat waktu (%)	84,88					2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	84,44	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase IPG	69%		2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	84,44					2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	84,88	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terwujudnya upaya perlindungan hak perempuan melalui : Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar (SOP)	100%		2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	84,88					2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	1					2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	30	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya Jumlah Kelurahan/Kampung/RT yang menerapkan Indikator Pemenuhan Hak Anak	85%		2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	20	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-		2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	85	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatkan Pengolahan Diversifikasi Ke tahanan Pangan Masyarakat	100 Persen		2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Penanganan Kerawanan Pangan	100 Persen		2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	80	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan	100 Persen	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti rugi tanah untuk penyediaan sarpras pada wilayah baru (%)	0	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase ketersediaan lahan bagi bangunan milik pemerintah	100%	2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	32,25		Luas tanah yang di bebaskan pemerintah	50 persen m2	2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	98	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	95				2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu (%)	87	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	62%	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	64				2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	20	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase ketaatan Kegiatan usaha yang memiliki izin PPLH	39%	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	70	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	48 %	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	30				2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	30	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan	72 %	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terwujudnya pelaksanaan hari lingkungan hidup	100 %	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	66,67	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani	59 %	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
		Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Pemuh Pengumpulan Sampah ((%))	50				2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0				2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	10	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	50				2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen pencatatan Sipil	100 %	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	63				2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	43				2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	45				2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya data terpilah OAP (%)	90				2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100				2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	3	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	BB	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Usulan Pembentukan Kampung Definitif (Laporan / Dokumen)	0				2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
		Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	0				2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	0				2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase kampung yang administrasi pemerintahan kampung sesuai aturan	100 %	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung

		Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100					2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan fasilitator kampung yang mendapat pendampingan dan pelatihan pengelolaan dana BKK (%)	0	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Cakupan kampung yang mengelola BKK sesuai Juklak/Juknis (%)	0					2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Tersedianya Juklak/Juknis Pengelolaan dana BKK (*)	ada					2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Cakupan Pembinaan Ekonomi Lembaga/Masyarakat Kampung (%)	0					2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100					2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0					2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	Persentase Kampung yang Mengembangkan Produk Unggulan (%)	0	2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	-	-		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.08 PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif (Lembaga)	84	2.13.08 PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN	-	-		2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
					Persentase Penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintah daerah	7 kegiatan		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total) (jiwa)	2,7	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	21,7-					1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	70,40	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	95 %		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	37,60					1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	75	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	presentasi pelaksanaan pengadaan sarana kelompok Bina keluarga Balita Stunting	100 %		1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	BB	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah, Nilai Sakip, Presentase terhadap laporan keuangan OPD, Profesionalisme aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP), Kualitas Renja, RKA dan DPA	100 %		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	100	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggara raan lalu lintas dan angkutan jalan raya	95 %		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
		Konektivitas Darat (Persentase)	68					2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut (Unit)	2	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penyelenggara an Program Pengelolaan Pelayaran	95 %		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
		cakupan kampung pesisir yang dilayani pelayaran perintis (%)	0					2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
		cakupan penyediaan pelabuhan pengumpan lokal (%)	0					2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
		Konektivitas Laut (Unit)	37					2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Pengendalian KKOP (Persentase)	100	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Penyelenggaraan Program pengelolaan penerbangan	10 %		2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	0	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Lembaga Publik yang aktif dalam Pengelolaan Komunikasi Publik	100 Persen		2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki akses internet (%)	90	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang sudah memiliki Website	100%		2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	35		Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah	70%		2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Tersedianya aplikasi SIKAP OAP (*)	Tidak		Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet	90%		2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				

	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	BB	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0					3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas (%)	0	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100 %		3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	3,98					3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	35					3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	45	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Pelaksanaan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi	100 %		3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	35	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100 %		3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	3,78	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	100 %		3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan UMKM yang mendapat pelatihan pengolahan produk turunan P2K2S dan perikanan (%)	0	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100 %		3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Cakupan UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (%)	0					3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	3,78					3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100 %		3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Persentase pengusaha muda OAP potensial yang memperoleh bantuan modal (%)	0					3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	0					3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.17.09 - PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	35	2.17.09 - PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	-	-		3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	86,7	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	45					2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administratif (Nilai)	93,5					2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,27	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-		2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai investasi baru di Distrik (Juta Rupiah)	0	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-		2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Cakupan Distrik yang difasilitasi kegiatan promosi penanaman modal (%)	0					2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0					2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Cakupan promosi kawasan andalan yang telah diinventarisir (%)	0					2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	45				2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	60	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Indeks kepuasan internal terhadap layanan penunjang (%)	84				2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase kepatuhan berusaha (Persentase)	65	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (unit)	75	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Organisasi Pemuda yang Menerima Bantuan (%)	0	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Organisasi Pemuda	100 Persen	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0				1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	100 Persen	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	1,7	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan dokumen data sektoral daerah, persentase jumlah pengembangan SDM penyusun data sektoral	1 Dokumen	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
	2.21.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	2.21.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimtek TOT tata kelola informasi dan jaringan komunikasi sandi dan dokumen penetapan peraturan bupati tentang penerapan TTE	60 Org	2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja SAKIP yang diperoleh	A Nilai	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lembaga Adat yang menerima bantuan (%)	100	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Cakupan lembaga Kebudayaan yang dibina (%)	0				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Cakupan Objek Kebudayaan yang dikembangkan (%)	0				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Cakupan Sumberdaya Manusia Kebudayaan yang dibina (%)	0				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	12				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	15	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	13,27 %	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	1				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	5				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	100	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	95	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase Penambahan Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	15000 Eksemplar	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Presentase Perpustakaan Elektronik Yang Berbasis Digital di dukung dengan Pembinaan, Promosi, Sosialisasi Terhadap Masyarakat.	90%	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tingkat Menggerakkan Masyarakat gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan	95%	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Di Perpustakaan Daerah	95%	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	95				2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	95	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	90 %	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	95	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	90 %	2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan usaha kecil yang memperoleh bantuan sarpras perikanan tangkap (%)	0	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	22.418.000 Ton	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
		Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	105				3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok pembudidaya yang memperoleh bantuan sarpras perikanan (%)	0	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	14,118 ton	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
		Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) (Indeks)	102				3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya (%)	90	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase tingkat pelanggaran ilegal fishing di waduk, sungai dan rawa	85 %	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	60	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	2532 Ton	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan SDM lokal (guide, pengelola) yang terlatih (%)	0	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana	2,56 %	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah destinasi ekowisata yang beroperasi (Angka)	0				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisata (Orang)	754				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Lama kunjungan wisatawan (Hari)	2-3				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	30	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	5				2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	30	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	2.22.3.26.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Tahunan (Ton)	259,54	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 Persen	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	1210,41				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah benih unggul P2K2S yang disediakan (Angka)	0				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Semusim (Ton)	1538,59				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah Populasi Ternak (Sapi, Kambing dan Babi) (Ekor)	1642				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah Populasi Ternak Unggas (Ekor)	26923				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan lahan pertanian/perkebunan (5 Ha) yang disediakan jalan usaha tani (%)	0	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 Persen	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. ((%))	0				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian Organisme pengganggu tanaman P2K2S (%)	0				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan petani P2K2S yang memperoleh informasi teknis, ekonomi dan inovasi pengolahan (%)	0	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian	100 Persen	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100				2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			

	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah SPBU BBM 1 harga yang beroperasi (Angka)	0	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Konsistensi Program kegiatan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100 %	3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	4,59	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Konsistensi Program kegiatan Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	100 %	3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Cakupan pelaksanaan monitoring harga bahan pokok harian (%)	89,06				3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	0				3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	86				3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan (%)	0	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Konsistensi Program Pengembangan Ekspor	100 %	3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Nilai Ekspor Barang (Nilai)	5				3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	91,96	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Konsistensi Program Standarsisasi dan Perlindungan Konsumen	90 %	3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	35	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Konsistensi Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100 %	3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase UMKM layak yang memperoleh fasilitas kredit back to back guarantee (%)	0	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase konsistensi Pencapaian Program Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Industri	95 %	3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	95,95				3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Tingkat Pengembalian Kredit (NPL) (%)	0				3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	30				3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	50	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase konsistensi program kegiatan pengendalian ijin usaha industri	95 %	3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	40	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase konsistensi Program kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri	95 %	3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH			4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 %	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		Indeks Sakip (Indeks)	B				4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kajian Pembentukan Distrik (Laporan / Dokumen)	0	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan	100 %	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		Jumlah Kajian Pembentukan Kampung Definitif (Laporan / Dokumen)	8				4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		Tersedianya kajian pembentukan DOB (Laporan / Dokumen)	0				4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		Cakupan Lembaga Agama yang Menerima Bantuan (%)	0				4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		Tersedianya forum koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian dan pengawasan tata kelola perdagangan (*)	ada				4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		Cakupan distrik yang melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan (%)	0				4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Distrik (Peraturan)	TIDAK				4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	70				4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyedia OAP yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) OAP (%)	0	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase tercapainya Program Perekonomian dan Pembangunan	100 %	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
		Persentase Penyedia OAP terhadap seluruh Vendor dalam Katalog Elektronik Lokal (%)	0				4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
	4.02 SEKRETARIAT DPRD			4.02 SEKRETARIAT DPRD			
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Perda Pembentukan Distrik yang disetujui (Laporan / Dokumen)	0	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi	100 %	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
		Jumlah Perda Pembentukan Kampung Definitif yang disetujui (Laporan / Dokumen)	0		pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	80				4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	80				4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD

		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	85,71				4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
	5.01 PERENCANAAN			5.01 PERENCANAAN			
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi belanja operasional tepat waktu (%)	100	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Indeks kepuasan internal terhadap layanan penunjang (%)	100		Nilai Sakip OPD	83%	5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	BB				5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	100	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Renja OPD yang dievaluasi	100%	5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100		Persentase ketersediaan Data Sektoral	40%	5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
					Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah	99%	5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perangkat daerah mitra perencanaan pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia; Perekonomian dan SDA; Infrastruktur dan Kewilayahan)	99 %	5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100				5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100				5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.02 KEUANGAN			5.02 KEUANGAN			
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,85		Persentase Pelayanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kampung yang memperoleh fasilitas bantuan keuangan kampung (%)	0	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100				5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	90				5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Rencana Kerja dan Anggaran Tepat Waktu (Tepat Waktu)	Tepat Waktu				5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	85	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	93 %	5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	40	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah	5 Persen	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	90				5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah
	5.03 KEPEGAWAIAN			5.03 KEPEGAWAIAN			
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	80	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8 Persentase	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%)	0	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN	80 Persen	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
		Persentase Distrik yang terpenuhi kebutuhan pegawainya sesuai ketentuan (%)	0				5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	80				5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	0				5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
		Tersedianya Grand Design Pengembangan Aparatur (Dokumen)	Tidak				5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	80	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	80 Orang	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100 %	5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	44,43				5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH			6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan internal terhadap layanan penunjang (%)	75	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70				6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	70	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terwujudnya Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
		Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (%)	35		Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
		Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti (%)	100				6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
		Pegawai yang menyampaikan LHKPN/LHKASN (%)	100				6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan (Rekomendasi)	5	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase terlaksananya program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	100%	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
	7.01 KECAMATAN			7.01 KECAMATAN			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkat layanan Administrasi Kantor Distrik Yamor	100 %	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Yamor
					Persentase penyelenggaraan Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	
					Nilai kepuasan Masyarakat	88%	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	CC		Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100				7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Krooy
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	73		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100				7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Kaimana Kota
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	70,8		Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	90		Persentase penyelenggaraan program penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Distrik Kaimana)	100 %	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70		persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	81,25		-	-	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas
					jumlah bulan pengelolah administrasi keuangan	100 %	Kelurahan Kaimana Kota
					Persentase penyelenggaraan program penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kelurahan Krooy)	100 Persen	Kelurahan Krooy
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%)	0	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Distrik Kaimana	100 %	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana
		-	-				Kelurahan Kaimana Kota
		Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%)	0		Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah distrik teluk etna	100 %	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway
		Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%)	0		persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah distrik teluk etna	100 %	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna
		Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%)	0		Meningkat layanan Administrasi Kantor Distrik Yamor	100 %	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Yamor
					Persentasi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Distrik Yamor	100 %	
					Nilai kepuasan Masyarakat	88%	
		Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%)	0		Persentase Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau
		Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%)	0,0				
		Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%)	0		Presentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Distrik Arguni Bawah	100 %	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah
		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	70				
		Rerata Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	57,73		Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Distrik Teluk Arguni	100 %	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas
		Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%)	0				
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di Distrik Kaimana	100 %	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100		presentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di distrik kaimana	100 %	Kelurahan Kaimana Kota
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100		Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Krooy	100 Persen	Kelurahan Krooy
		Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%)	100		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang terbina di distrik Teluk Etna	100 %	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	95		persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di distrik teluk etna	100 %	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna

		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	100		Meningkat layanan Administrasi Kantor Distrik Yamor	100 %		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Yamor
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	70,3		Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Distrik YAMOR	100 %		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)			Nilai kepuasan Masyarakat	88%		
		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	70		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	81,25		Persentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Teluk Arguni Bawah	100 %		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di Distrik Teluk Arguni	100 %		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas
		Persentase penanganan gangguan trantribumlinmas (%)	70,8		Persentase tingkat kinerja trantribun di Distrik Teluk Etna	100 %		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway
		Persentase penanganan gangguan trantribumlinmas (%)	81,25		Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan KetertibanUmum	100 %		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau
		Persentase penanganan gangguan trantribumlinmas (%)	0		Persentase tingkat kinerja Trantribun di Distrik Teluk Arguni	100 %		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas
		Persentase penanganan gangguan trantribumlinmas (%)	0					7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Krooy
		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	0					7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Kaimana Kota
		Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)	100					7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna
		Persentase penanganan gangguan trantribumlinmas (%)	68					7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan	100 %		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100					7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100					7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Krooy
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100					7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Kaimana Kota
		Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	100					7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Yamor
		Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	70					7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana
		Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	65					7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau
		Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%)	81,25					7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (%)	72	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintah kampung yang terbina dan terawasi di Distrik Teluk Etna	100 %		7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway
		persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (%)	0		Persentase Pemerintah Kampung yang terbina dan terawasi di Distrik Yamor	100 %		7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Yamor
		Persentase APBDes tepat waktu (%)	65,8		Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau
		Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus Pelatihan (Orang)	15		Presentase Pemerintah Kampung Yang Terbina dan Terawasi di Distrik Teluk Arguni bawah	100 %		7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah
		Persentase APBDes tepat waktu (%)	81,25		Persentase Pemerintah Kampung yang terbina dan terawasi di Distrik Teluk Arguni Atas	100 %		7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas
		Persentase APBDes tepat waktu (%)	100					7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna
		Persentase APBDes tepat waktu (%)	100					7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Regulasi Kebijakan Daerah yang Mengakomodir Hak-Hak OAP (%)	0	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan inklusi keuangan calon legislatif OAP (%)	0					8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		z Cakupan OAP yang melek politik (%)	0					8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan Pendidikan politik untuk OAP (%)	0					8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase OAP dilembaga Legislatif (Orang)	5					8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase OAP yang jadi calon legislatif partai politik (Orang)	10					8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100					8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan tokoh masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (%)	0	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan tokoh masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (%)	100					
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-		8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	TOTAL			TOTAL				

DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL
DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI, DAN KABUPATEN / KOTA

UNTUK KABUPATEN / KOTA : KAB. KAIMANA
NAMA KABUPATEN / KOTA : KAB. KAIMANA

NO.	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI SESUAI KEPMENDAGRI 12/2024	TARGET RKPD KABUPATEN / KOTA 2025	TARGET RKPD PERUBAHAN KABUPATEN / KOTA 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Indeks Modal Manusia	0,46	68,501	69,5	Kabupaten Kota Menggunakan IPM
2	Rasio Gini	0,370 - 0,380	0.36	0,352	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,75 - 4,06	6,01	2,99	
4	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5,19 - 5,48	2,57	3,28	
5	Tingkat Kemiskinan (%)	19,26 - 20,12	13,13	13,23	
6	Intensitas Emisi GRK (%)	1,08	-	-	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		2.014.406.396	
		pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek emajuan Kebudayaan (#) Pensi Kaimana (#) Festival Noken	0	
		2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (#) Festival Seni dan Budaya PB, (#) Festival Budaya 8 Suku		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	277.889.400	
		2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Lembaga Adat yang dibuat		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1.736.516.996	
		2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	0	
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Organisasi Pemuda		
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan bantuan kewirausahaan Cakupan pelatihan kewirausahaan % Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan % Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi pemuda		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	75.586.000	
		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	23.100.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	160.814.000	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	739.280.000	
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan		
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan		
		4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	969.561.000	
		4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	839.319.000	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat		
		4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	21.511.446.017	

		4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	703.319.400	
		4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	265.392.000	
		4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum		
		4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.102.788.480	
		4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2.280.235.000	
		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	207.512.000	
		4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah			
		4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	165.823.000	
		1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMK	138.936.148.410,76	
			Iklim Inklusivitas SMA		
			Iklim kebinekaan SMK		
		1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		45.863.444.957,00	
		1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.041.048.000	
		1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	
		1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.042.000.000	
		1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	4.265.584.000	
		1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	840.064.350,00	
		1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.433.475.000	
		1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	247.632.000	
		1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		368.573.000	
		1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	3.766.864.000	
		1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.548.419.050	
		1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	482.584.315	
		1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	13.232.645.000	
		1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	227.454.182	

		1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	0	
		1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	
		1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	
		1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.420.409.060	
		1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	100.000.000	
		1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.189.800.000	
		1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4.4396.396.000	
		1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.022.670.000	
		1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	956.434.000	
		1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.140.000.000	
		1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	901.593.000	
		1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6.195.800.000	
		1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	
		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	% Biaya personil siswa SMP % Guru/Tutor sesuai kualifikasi SMP % Kepala satuan pendidikan SMP sesuai standar % Pemenuhan Guru / Tutor SMP % Pemenuhan T.Kependidikan SMP % Perlengkapan siswa SMP Rasio Ketersediaan SMP terhadap PUS % Ruang kelas SMP dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi		
		1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	388.080.000	
		1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	961.680.000	
		1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	936.936.000	
		1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	936.936.000	
		1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.243.440.000	
		1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	538.319.931	
		1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.279.670.500	
		1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	umlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	249.480.000	
		1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	987.526.000	
		1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2.234.161.214	

		1.01.02.2.02.002 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	670.000.000	
		1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	7.305.600.000	
		1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.160.522.644	
		1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.138.334.000	
		1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	740.295.000	
		1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	5.474.466.000	
		1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	114.220.000	
		1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	
		1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	199.688.038	
		1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	110.985.000	
		1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	430.705.113	
		1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	323.676.000	
		1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0	
		1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2.810.808.000	
		1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.135.440.000	
		1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	200.000.000	
		1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	975.772.200	
		1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	414.680.000	
		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	% Biaya personil siswa TK % Guru/Tutor sesuai kualifikasi TK % Kepala satuan pendidikan sesuai standar TK % Pemenuhan Guru / Tutor TK % Perlengkapan siswa TK Rasio Ketersediaan PAUD terhadap PUS % Ruang kelas PAUD Non Formal dalam kondisi baik % Ruang Kelas TK dalam Kondisi Baik % Satuan pendidikan PAUD non Formal terakreditasi % Satuan Pendidikan Terakreditasi TK		
		1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2.698.812.765.76	
		1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	349.881.500	

		1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	250.500.000	
		1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	400.915.950	
		1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	323.400.000	
		1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.955.346.000	
		1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	878.465.500	
		1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.236.276.200	
		1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.304.050.000	
		1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	331.702.000	
		1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4.600.150.571	
		1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	900.000.000	
		1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.016.875.000	
		1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	% Biaya personil siswa Kesetaraan % Guru/Tutor sesuai kualifikasi Kesetaraan % Kepala satuan pendidikan sesuai standar Kesetaraan % Pemenuhan Guru / Tutor Kesetaraan % Pemenuhan T.Kependidikan Kesetaraan % Perlengkapan Peserta Kesetaraan % Ruang kelas Kesetaraan dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi Non Formal		
		1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	
		1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	428.100.000	
		1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	0	
		1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	% Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan PPDB % Perlengkapan Siswa SMA Rasio Ketersediaan SMA terhadap PUS % Ruang kelas SMA dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Pelaksana Assesmen Nasional % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMA		
		1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	7.768.332.650	
		1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4.216.212.000	
		1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	
		1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.813.876.000	

		1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.059.600.000	
		1.01.02.4.05.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	
		1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	183.785.600	
		1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	3.989.532.150	
		1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	
		1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	
		1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	841.547.120	
		1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	2.775.334.000	
		1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	809.724.800	
		1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	123.994.500	
		1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	3.172.450.000	
		1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	162.586.500	
		1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	162.458.000	
		1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	196.504.000	
		1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	
		1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	182.210.047	
		1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas (Lembaga)	240.000.000	
		1.01.02.4.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	% Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) % Perlengkapan Siswa SMK Rasio Ketersediaan SMK terhadap PUS % Ruang kelas SMK dalam kondisi Baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMK		
		1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	312.312.000	
		1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	
		1.01.02.4.06.0015 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	479.999.960	
		1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	
		1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	700.000.000	
		1.01.02.4.06.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	801.000.000	
		1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	39.396.000	

		1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	
		1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.206.500.000	
		1.01.02.4.06.0039 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	
		1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	307.046.000	
		1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	252.848.500	
		1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	269.451.000	
		1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2.891.930.000	
		1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	% Tersediannya bantuan Fasilitas bagi pendidikan diluar kewenangan		
		1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan Pendidikan)	8.478.176.500	
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		1.209.780.000	
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1.209.780.000	
		8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.209.780.000	
		8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		274.056.800	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas		274.056.800	
		1.01.03.4.03.0001 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	274.056.800	
		1.01.03.4.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	0	
		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Pelaksanaan Program Administrasi Umum Perangkat Daerah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	478.429.800	
		1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	294.273.400	

		1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	20.493.000	
		1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	
		1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	7.133.800	
		1.05.02.2.01.00010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	113.971.000	
		1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	99.900.000	
		1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	52.775.600	
		1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
		1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.970.200	
		1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
		.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS1	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	123.186.200	
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		350.000.000	
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		350.000.000	
		8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	
		8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350.000.000	
		8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	0	
		2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang produktif	0	

		2.17.06.2.01.0004 Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0	
		2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0	
		2.18.03 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.311.967.600	
		2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		1.311.967.600	
		2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.035.510.200	
		2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	267.245.400	
		2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	9.212.000	
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
		2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.816.000.000	
		2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	762.532.250	
		2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
		2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun	160.200.000	
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA, Dokumen PPAS, Dokumen Perubahan KUA, dan Dokumen Perubahan PPAS Jumlah DPA Perubahan 2025 Jumlah DPA Tahun 2025 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		

		5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	71.200.000	
		5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	71.200.000	
		5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	294.733.278	
		5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	307.718.673	
		5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.450.889.000	
		5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
		5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Survei dan Evaluasi Dana Perimbangan yang Diselesaikan Jumlah Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan (Berkas) Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan		
		5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	416.270.600	
		5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	455.062.850	
		5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	78.610.400	
		5.02.02.2.02.00011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	352.675.240	
		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Perda		
		5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	172.465.000	
		5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1.091.608.800	
		5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	518.652.000	

		5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	162.613.440	
		5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	870.336.000	
		5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Tak Terduga		
		5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	177.281.559.480	
		5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah		
		5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	43.158.000	
		5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	314.864.720	
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.206.132.000,00	
		3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Presentase Pengelolaan Penangkapan ikan di wilaya sungai, Danau,Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	2.048.370.000,00	
		3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	57.870.000	
		3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	
		3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1.990.500.000	
		3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi Perikanan	42.850.000	
		3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	44.916.000	
		3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal tangkap	69.996.000,00	
		3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	69.996.000,00	
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)		
		3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		
		3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	74.490.000	
		3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	59.750.000	

		3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0	
		3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	87.160.000	
		3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.670.000	
		3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	608.371.580	
		3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	76.950.000	
		3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.065.420.02	
		3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	93.930.000	
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		
		2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
		2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	114.700.000	
		2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	109.250.000	
		2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	123.553.247	
		2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0	
		2.17.07.4.03 Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP			
		2.17.07.4.03.0001 Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	265.180.000	
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan		
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan		
		4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	969.561.000	
		4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	839.319.000	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat		

		4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritua	21.511.446.017	
		4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	703.319.400	
		4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	265.392.000	
		4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas dan koordinasi hukum		
		4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.102.788.480	
		4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2.280.235.000	
		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	207.512.000	
		4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah			
		4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	165.823.000	
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase tercapainya program perekonomian dan pembangunan		
		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian		
		4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasi; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
		4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
		4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		
		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Admisntasi Pembangunan	Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan		
		4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas penyusunan program pembangunan Daerah		
		4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
		4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
		4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa		
		4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
		4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
		4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa		
		4.01.03.2.04 Pemantaun Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam		
		4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		

		4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet	2.712.824.770,00	
		2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangkan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC	2.712.824.770,00	
		2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	641.198.500,00	
		2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.071.626.270,00	
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana	4.773.971.653	
		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kawasan startegis Pariwisata	423.971.653	
		3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	423.971.653	
		3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	
		3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	
		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (#) Pengembangan Kampung Wisata Lobo, (#) Pengembangan Kampung Wisata Mai-Mai, (#) Pengembangan Kampung Siawatan (#) Pengembangan Kampung Wisata Namatota (#) Pengembangan Kampung Wisata Marsi	4.350.000.000	
		3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4.350.000.000	
		3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	
		3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Kegiatan pelatihan Pramusaji berbasis Kearifan Lokal, Sosialisasi Peningkatan kapasitas Sadar Wisata) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata (Pelatihan dan Sertifikasi tenaga Kerja Pariwisata, Dive Resqui	0	

		3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	
		3.26.05.2.01.0010 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	0	
		2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang produktif	0	
		2.17.06.2.01.0004 Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0	
		2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0	
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		125.762.000	
		2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		125.762.000	
		2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	125.762.000	
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		4.738.732.250	
		2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		4.578.532.250	
		2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.816.000.000	
		2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	762.532.250	
		2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		160.200.000	
		2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun	160.200.000	
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		185.488.442.060,73	

		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA, Dokumen PPAS, Dokumen Perubahan KUA, dan Dokumen Perubahan PPAS Jumlah DPA Perubahan 2025 Jumlah DPA Tahun 2025 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4.039.524.951	
		5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	71.200.000	
		5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	71.200.000	
		5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	294.733.278	
		5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	307.718.673	
		5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.450.889.000	
		5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	846.784.000	
		5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Survei dan Evaluasi Dana Perimbangan yang Diselesaikan Jumlah Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan (Berkas) Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	1.302.626.350	
		5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	416.270.600	
		5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	455.062.850	
		5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	78.610.400	
		5.02.02.2.02.00011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	352.675.240	
		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Perda	2.878.675.240	
		5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	172.465.000	

		5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1.091.608.800	
		5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	518.652.000	
		5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	162.613.440	
		5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	870.336.000	
		5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Tak Terduga	176.909.592.799,73	
		5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	176.909.592.799,73	
		5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah		
		5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	43.158.000	
		5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	314.864.720	
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Konsistensi Program kegiatan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.874.060.000	
		3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Los Pasar Jumlah peralatan dan perlengkapan	1.798.160.000	
		3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0	
		3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.798.160.000	
		3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Wilayah	75.900.000	
		3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	75.900.000	
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.013.839.220,50	
		2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.013.839.220,50	
		2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.013.839.220,50	

		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase konsistensi Pencapaian Program Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Industri	0	
		3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Unit IKM	0	
		3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	
		3.31.02.4.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	0	
		3.31.02.4.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan	0	
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.233.177.498	
		3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah	2.231.963.000	
		3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	2.165.375.000	
		3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	66.588.000	
		3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Presentase Pembangunan Prasarana Pertanian	1.001.214.498	
		3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1.001.214.498	
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.206.132.000,00	
		3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Presentase Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	2.048.370.000,00	
		3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	57.870.000	
		3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	
		3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1.990.500.000	
		3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		87.766.000	
		3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi Perikanan	42.850.000	
		3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	44.916.000	
		3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal tangkap	69.996.000,00	
		3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	69.996.000,00	
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	1.335.387.000,02	

		3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	221.400.000	
		3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	74.490.000	
		3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	59.750.000	
		3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0	
		3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	87.160.000	
		3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.113.987.000,02	
		3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.670.000	
		3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	608.371.580	
		3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	76.950.000	
		3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.065.420.02	
		3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	93.930.000	
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan	26.945.304.891	
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan	1.808.880.000	
		4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	969.561.000	
		4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	839.319.000	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	22.480.157.417	
		4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritua	21.511.446.017	
		4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	703.319.400	
		4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	265.392.000	

		4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas dan koordinasi hukum	2.490.435.480	
		4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.102.788.480	
		4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	1.280.235.000	
		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	207.512.000	
		4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah		165.823.000	
		4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	165.823.000	
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	612.683.247	
		2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	347.503.247	
		2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	114.700.000	
		2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	109.250.000	
		2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	123.553.247	
		2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0	
		2.17.07.4.03 Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP		265.180.000	
		2.17.07.4.03.0001 Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	265.180.000	
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase tercapainya program perekonomian dan pembangunan	3.936.525.600	
		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	763.450.000	
		4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	391.462.000	
		4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	240.300.000	
		4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	42.850.000	
		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Admisntasi Pembangunan	Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	443.412.600	
		4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas penyusunan program pembangunan Daerah	0	
		4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	132.626.800	

		4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	310.786.800	
		4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2.940.147.750	
		4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	711.769.750	
		4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	240.890.000	
		4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa		
		4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	1.987.488.000	
		4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	95.100.000	
		4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	66.162.000	
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet	2.712.824.770,00	
		2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangkan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC	2.712.824.770,00	
		2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	641.198.500,00	
		2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.071.626.270,00	
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana	4.773.971.653	
		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kawasan startegis Pariwisata	423.971.653	
		3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	423.971.653	
		3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	
		3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	
		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (#) Pengembangan Kampung Wisata Lobo, (#) Pengembangan Kampung Wisata Mai-Mai, (#) Pengembangan Kampung Siawatan (#) Pengembangan Kampung Wisata Namatota (#) Pengembangan Kampung Wisata Marsi	4.350.000.000	

		3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4.350.000.000	
		3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	
		3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Kegiatan pelatihan Pramusaji berbasis Kearifan Lokal, Sosialisasi Peningkatan kapasitas Sadar Wisata) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata (Pelatihan dan Sertifikasi tenaga Kerja Pariwisata, Dive Resqui	0	
		3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	
		3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	umlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase SPAM yang sesuai dengan standar kebutuhan air bersih	0	
		1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase SPAM yang sesuai dengan Standar Kebutuhan Air Bersih	18.255.134.000	
		1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0	
		1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	170.184.000	
		1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0	
		1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	15.612.350.000	
		1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	498.000.000	
		1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		111.281.000	
		1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Tata Ruang dalam Satu Tahun	111.281.000	
		1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	11.281.000	
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	47.808.318.029,07	
		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	47.808.318.029,07	
		1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2.357.896.403,00	
		1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	panjang jalan kewenangan kabupaten/kota dan Desa yang diawasi penyelenggaraannya	35.000.000,00	
		1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	13.220.441.114,00	
		1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	24.152.559.132,07	
		1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3.473.907.330,00	

		1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0	
		1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang dibangun	224500000	
		1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yangDilebarkan Menambah Lajur	0	
		1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan	jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala	31.124.800,00	
		1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey Kondisinya	214.040.000,00	
		1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.511.757.900,00	
		.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1587091350	
		2.18.03 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.311.967.600	
		2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		1.311.967.600	
		2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.035.510.200	
		2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	267.245.400	
		2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	9.212.000	
		2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penyelenggaraan Program Pengelolaan Pelayaran	9.492.086.000,00	
		2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.635.340.000,00	
		2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.635.340.000,00	
		2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Perda yang sudah ditetapkan	0	
		2.15.03.2.10.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	
		2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah tambatan perahu yang di bangun	5.782.474.000,00	
		2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan pengumpan Lokal yang Dibangun	5.782.474.000,00	
		2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	0,00	
		2.15.03.2.13.0008 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	74.272.000,00	
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		125.762.000	
		2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		125.762.000	

		2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	125.762.000	
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMA (Nilai)	138.936.148.410,76	
			Iklim Inklusivitas SMK (Nilai)		
			Iklim kebinekaan SMK (Nilai)		
		1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		45.863.444.957,00	
		1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.041.048.000	
		1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	
		1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.042.000.000	
		1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	4.265.584.000	
		1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	840.064.350,00	
		1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.433.475.000	
		1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	247.632.000	
		1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		368.573.000	
		1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	3.766.864.000	
		1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.548.419.050	
		1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	482.584.315	
		1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	13.232.645.000	
		1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	227.454.182	
		1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	0	
		1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	
		1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	
		1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.420.409.060	
		1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	100.000.000	
		1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.189.800.000	
		1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4.4396.396.000	
		1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.022.670.000	
		1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	956.434.000	
		1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.140.000.000	
		1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	901.593.000	
		1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6.195.800.000	
		1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	

		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	% Biaya personil siswaSMP % Guru/Tutor sesuai kualifikasi SMP % Kepala satuan pendidikan SMP sesuai standar % Pemenuhan Guru / TutorSMP % PemenuhanT. Kependidikan SMP % Perlengkapan siswa SMPRasio Ketersediaan SMP terhadap PUS % Ruang kelas SMP dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi		
		1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	388.080.000	
		1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	961.680.000	
		1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	936.936.000	
		1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	936.936.000	
		1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.243.440.000	
		1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	538.319.931	
		1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.279.670.500	
		1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		249.480.000	
		1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	987.526.000	
		1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2.234.161.214	
		1.01.02.2.02.002 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	670.000.000	
		1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	7.305.600.000	
		1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.160.522.644	
		1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.138.334.000	
		1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	740.295.000	
		1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	5.474.466.000	
		1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	114.220.000	
		1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	
		1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	199.688.038	
		1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	110.985.000	
		1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	430.705.113	
		1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	323.676.000	
		1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0	
		1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2.810.808.000	
		1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.135.440.000	

		1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	200.000.000	
		1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	975.772.200	
		1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	414.680.000	
		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	% Biaya personil siswa TK % Guru/Tutor sesuai kualifikasi TK % Kepala satuan pendidikan sesuai standar TK % Pemenuhan Guru / Tutor TK % Perlengkapan siswa TK Rasio Ketersediaan PAUD terhadap PUS % Ruang kelas PAUD NonFormal dalam kondisi baik % Ruang Kelas TK dalam Kondisi Baik % Satuan pendidikan PAUD non Formal terakreditasi % Satuan Pendidikan Terakreditasi TK		
		1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2.698.812.765.76	
		1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	349.881.500	
		1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	250.500.000	
		1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	400.915.950	
		1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	323.400.000	
		1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.955.346.000	
		1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	878.465.500	
		1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.236.276.200	
		1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.304.050.000	
		1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	331.702.000	
		1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4.600.150.571	
		1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	900.000.000	
		1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.016.875.000	
		1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	% Biaya personil siswa Kesetaraan % Guru/Tutor sesuai kualifikasi Kesetaraan % Kepala satuan pendidikan sesuai standar Kesetaraan % Pemenuhan Guru / Tutor Kesetaraan % Pemenuhan T.Kependidikan Kesetaraan % Perlengkapan Peserta Kesetaraan % Ruang kelas Kesetaraan dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi Non Formal		
		1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	
		1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	428.100.000	
		1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	0	

		1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	% Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan PPDB % Perlengkapan Siswa SMA Rasio Ketersediaan SMA terhadap PUS % Ruang kelas SMA dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Pelaksana Asesmen Nasional % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMA		
		1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	7.768.332.650	
		1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4.216.212.000	
		1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	
		1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.813.876.000	
		1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.059.600.000	
		1.01.02.4.05.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	
		1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	183.785.600	
		1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	3.989.532.150	
		1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	
		1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	
		1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	841.547.120	
		1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	2.775.334.000	
		1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	809.724.800	
		1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	123.994.500	
		1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	3.172.450.000	
		1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	162.586.500	
		1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	162.458.000	
		1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	196.504.000	
		1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	
		1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan	182.210.047	
		1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas (Lembaga)	240.000.000	
		1.01.02.4.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	% Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan Penerimaa Peserta Didik Baru (PPDB) % Perlengkapan Siswa SMK Rasio Ketersediaan SMK terhadap PUS % Ruang kelas SMK dalam kondisi Baik % Satuan PendidikanTerakreditasi SMK		

		1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	312.312.000	
		1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	
		1.01.02.4.06.0015 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	479.999.960	
		1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	
		1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	700.000.000	
		1.01.02.4.06.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	801.000.000	
		1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	39.396.000	
		1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	
		1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.206.500.000	
		1.01.02.4.06.0039 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	
		1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	307.046.000	
		1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	252.848.500	
		1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	269.451.000	
		1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2.891.930.000	
		1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	% Tersediannya bantuan Fasilitas bagi pendidikan diluar kewenangan		
		1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan Pendidikan)	8.478.176.500	
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Sarana dan prasarana Meningkatkan efektifitas, efisiensi, kinerja, profesionalisme dan akses serta pelayanan rumah sakit	44.503.682.283,50	
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana dan prasarana Meningkatkan efektifitas, efisiensi, kinerja, profesionalisme dan akses serta pelayanan rumah sakit	28.391.576.868,50	
		1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	4.853.449.600	
		1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1.096.046.000	
		1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	2.101.731.100	
		1.02.02.2.01.00014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	7.715.637.721	
		1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	240.735.000	
		1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	189.410.000	
		1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	12.194.567.447,50	

		1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	305.490.000	
		1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.428.858.979	
		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	627.171.000	
		1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Oran)	603.535.000	
		1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	108.870.000	
		1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	86.020.000	
		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	717.348.000	
		1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	336.761.000	
		1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	218.160.000	
		1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	35.795.000	
		1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	86.640.000	
		1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	317.656.000	
		1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	150.015.000	
		1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	262.750.000	
		1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	4.756.620.000	
		1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	134.286.000	
		1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0	
		1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		0	
		1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		177.350.000	
		1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	44.160.000	
		1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2.272.986.000	
		1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	7.330.024.800	
		1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	68.000.000	
		1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.532.991.400	
		1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.595.623.200	
		1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0	
		1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	
		1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	76.902.915	

		1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	48.683.000	
		1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	245.280.000	
		1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	28.020.000	
		1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	20.490.000	
		1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0	
		1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	278.570.000	
		1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0	
		1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya informasi kesehatan untuk publik	392.105.265,00	
		1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	392.105.265,00	
		1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	160.840.000	
		1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	160.840.000	
		1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0	
		1.02.02.4.02 *Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		183.640.000,00	
		1.02.02.4.02.0044 Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	1.601.033.000	
		1.02.02.4.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	0	
		1.02.02.4.02.0048 Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	1.924.960.387	
		1.02.02.4.02.0054 Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	
		1.02.02.4.02.0055 Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	
		1.02.02.4.02.0056 Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan	26.945.304.897	
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan	1.808.880.000	
		4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	969.561.000	
		4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	839.319.000	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	22.480.157.417	
		4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	21.511.446.017	

		4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	703.319.400	
		4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	265.392.000	
		4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas dan koordinasi hukum	2.490.435.480	
		4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.102.788.480	
		4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2.280.235.000	
		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	207.512.000	
		4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah			
		4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	165.823.000	
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Pembayaran Jasa Bagi Tenaga Kesehatan	10.979.393.764	
		1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	14.888.500	
		1.02.03.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	14.777.500	
		1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	5.750.614.500	
		1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	
		1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5.039.928.500	
		1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	710.686.000	
		1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	212.737.000,00	
		1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	212.737.000,00	
		1.02.03.4.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.874.265.200,00	
		1.02.03.4.03.0002 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	3.874.265.200,00	
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		368.492.800	
		2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		368.492.800	

		2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	368.492.800	
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase pemberian fasilitas keluarga	1.730.066.000	
		1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga miskin yang terdata	1.730.066.000	
		1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	588.514.000	
		1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.141.552.000	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	0	
		2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang produktif	0	
		2.17.06.2.01.0004 Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0	
		2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0	
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		125.762.000	
		2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		125.762.000	
		2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	125.762.000	
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
		2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.816.000.000	
		2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	762.532.250	
		2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		160.200.000	
		2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun	160.200.000	
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		185.488.442.060.73	

		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA,Dokumen PPAS, Dokumen Perubahan KUA, dan Dokumen Perubahan PPAS Jumlah DPA Perubahan 2025 Jumlah DPA Tahun 2025 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4.039.524.951	
		5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	71.200.000	
		5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	71.200.000	
		5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	294.733.278	
		5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	307.718.673	
		5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.450.889.000	
		5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
		5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Survei dan Evaluasi Dana Perimbangan yang Diselesaikan Jumlah Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan (Berkas) Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	1.302.626.350	
		5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	416.270.600	
		5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	455.062.850	
		5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	78.610.400	
		5.02.02.2.02.00011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	352.675.240	
		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Perda	2.878.675.240	
		5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	172.465.000	
		5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1.091.608.800	

		5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	518.652.000	
		5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	162.613.440	
		5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	870.336.000	
		5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Tak Terduga	176.909.592.799,73	
		5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	176.909.592.799,73	
		5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	358.022.720	
		5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang	43.158.000	
		5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	314.864.720	
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.233.177.498	
		3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah	2.231.963.000	
		3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	2.165.375.000	
		3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	66.588.000	
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.206.132.000,00	
		3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Presentase Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	2.048.370.000,00	
		3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	57.870.000	
		3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	
		3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1.990.500.000	
		3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi Perikanan	42.850.000	
		3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	44.916.000	
		3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal tangkap	69.996.000,00	

		3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	69.996.000,00	
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	1.335.387.000,02	
		3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	221.400.000	
		3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	74.490.000	
		3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	59.750.000	
		3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0	
		3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	87.160.000	
		3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.670.000	
		3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	608.371.580	
		3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	76.950.000	
		3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.065.420.02	

		3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	93.930.000	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tidak ada di 2025		
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	tidak ada di 2025		
		2.17.07.2.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	612.683.247	
		2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	347.503.247	
		2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	114.700.000	
		2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	109.250.000	
		2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	123.553.247	
		2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0	
		2.17.07.4.03 Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP		265.180.000	
		2.17.07.4.03.0001 Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	265.180.000	
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan	26.945.304.897	
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan	1.808.880.000	
		4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	969.561.000	
		4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	839.319.000	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	22.480.157.417	
		4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	21.511.446.017	

		4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	703.319.400	
		4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	265.392.000	
		4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitas dan koordinasi hukum	2.490.435.480	
		4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.102.788.480	
		4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2.280.235.000	
		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	207.512.000	
		4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah			
		4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	165.823.000	
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Konsistensi Program kegiatan Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	1.089.900.000	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah	1.089.900.000	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	83.000.000	

		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.006.900.000	
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase tercapainya program perekonomian dan pembangunan	3.936.285.350	
		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	391.462.000	
		4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	240.300.000	
		4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	42.852.000	
		4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	108.312.000	
		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Admisntasi Pembangunan	Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	443.413.600	
		4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penyusunan program pembangunan Daerah	0	
		4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	132.626.800	
		4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	310.786.800	
		4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2.940.147.750	
		4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	711.769.750	
		4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	240.890.000	
		4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa	1.987.488.000	
		4.01.03.2.04 Pemantaun Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	161.262.000	
		4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	95.100.000	
		4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	66.162.000	
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet	2.712.824.770,00	
		2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangkan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC	2.712.824.770,00	
		2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	641.198.500,00	

		2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.071.626.270,00	
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana	4.773.971.653	
		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kawasan startegis Pariwisata	423.971.653	
		3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	423.971.653	
		3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	
		3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	
		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (#) Pengembangan Kampung Wisata Lobo, (#) Pengembangan Kampung Wisata Mai-Mai, (#) Pengembangan Kampung Siawatan (#) Pengembangan Kampung Wisata Namatota (#) Pengembangan Kampung Wisata Marsi	4.350.000.000	
		3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4.350.000.000	
		3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	
		3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Kegiatan pelatihan Pramusaji berbasis Kearifan Lokal, Sosialisasi Peningkatan kapasitas Sadar Wisata) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata (Pelatihan dan Sertifikasi tenaga Kerja Pariwisata, Dive Resqui	0	
		3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	
		3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	umlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	0	
		2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang produktif	0	
		2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0	
		2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0	
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		0	
		2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
		2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	125.762.000	

		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		4.738.732.250	
		2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		4.578.532.250	
		2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.816.000.000	
		2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	762.532.250	
		2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		160.200.000	
		2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun	160.200.000	
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		185.488.442.060,73	
		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA,Dokumen PPAS, Dokumen Perubahan KUA, dan Dokumen Perubahan PPAS Jumlah DPA Perubahan 2025 Jumlah DPA Tahun 2025 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4.039.524.951	
		5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	71.200.000	
		5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	71.200.000	
		5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	294.733.278	
		5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	307.718.673	
		5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.450.889.000	
		5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	846.784.000	

		5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Survei dan Evaluasi Dana Perimbangan yang Diselesaikan Jumlah Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan (Berkas) Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	1.302.626.350	
		5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	416.270.600	
		5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	455.062.850	
		5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	78.610.400	
		5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	352.675.240	
		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Perda	2.878.675.240	
		5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	172.465.000	

		5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1.091.608.800	
		5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	518.652.000	
		5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	162.613.440	
		5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	870.336.000	
		5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Tak Terduga	117.281.559.480	
		5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	177.281.559.480	
		5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	358.022.720	
		5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang	43.158.000	
		5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	314.864.720	
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		4.738.732.250	
		2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		4.578.532.250	
		2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.816.000.000	

		2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	762.532.250	
		2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		160.200.000	
		2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun	160.200.000	
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Konsistensi Program kegiatan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.874.060.000	
		3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Los Pasar Jumlah peralatan dan perlengkapan	1.7798.160.000	
		3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0	
		3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.1798.160.000	
		3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Wilayah	75.900.000	
		3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	75.900.000	
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.013.839.220,50	
		2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.013.839.220,50	
		2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1.013.839.220,50	
		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase konsistensi Pencapaian Program Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Industri	0	
		3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Unit IKM	0	
		3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	
		3.31.02.4.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	0	
		3.31.02.4.01.0008 Fasilitas bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan	0	
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.233.177.498,00	

		3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah	2.231.963.000,00	
		3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	2.165.375.000,00	
		3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	66.588.000,00	
		3.27.03.2.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Presentase Pembangunan Prasarana Pertanian	1.001.214.498,00	
		3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1.001.214.498,00	
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.206.132.000,00	
		3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Presentase Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	2.048.370.000,00	
		3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	57.870.000	
		3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	
		3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1.990.500.000	
		3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		87.766.000	
		3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi Perikanan	42.850.000	
		3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	44.916.000	
		3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal tangkap	69.996.000,00	
		3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	69.996.000,00	
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	1.335.387.000,02	
		3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	221.0400.000	
		3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	74.490.000	
		3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	59.750.000	
		3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0	
		3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	87.160.000	

		3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.113.987.000,02	
		3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.670.000	
		3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	608.371.580	
		3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	76.950.000	
		3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.065.420,02	
		3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	93.930.000	
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	612.683.247	
		2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	347.503.247	
		2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	114.700.000	
		2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	109.250.000	
		2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	123.553.247	
		2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0	
		2.17.07.4.03 Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP		265.180.000	
		2.17.07.4.03.0001 Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	265.180.000	
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan	26.945.304.897	
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan	1.808.880.000	
		4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	969.561.000	
		4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	839.319.000	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	22.480.157.417	
		4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua	21.511.446.017	
		4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	703.319.400	

		4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	265.392.000	
		4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	2.490.435.480	
		4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.102.788.480	
		4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2.280.235.000	
		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	207.512.000	
		4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah			
		4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	165.823.000	
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Konsistensi Program kegiatan Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	1.089.900.000,00	
		3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah	1.089.900.000,00	
		3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	83.000.000,00	
		3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.006.900.000,00	
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase tercapainya program perekonomian dan pembangunan	3.936.285.350	
		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	391.462.000	
		4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasi; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	240.300.000	
		4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	42.850.000	
		4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	108.312.000	
		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Admisntasi Pembangunan	Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	443.413.600	
		4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas penyusunan program pembangunan Daerah	0	
		4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	132.626.800	
		4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	310.786.800	
		4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2.940.147.750	
		4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	711.768.750	
		4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	240.890.000	
		4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa	1.987.488.000	
		4.01.03.2.04 Pemantaun Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	161.262.000	
		4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	95.100.000	

		4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	66.162.000	
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet	2.712.824.770,00	
		2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangkan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemma selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC	2.712.824.770,00	
		2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	641.198.500,00	
		2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.071.626.270,00	
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana	4.773.971.653	
		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kawasan startegis Pariwisata	423.971.653	
		3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	423.971.653	
		3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	
		3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	
		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (#) Pengembangan Kampung Wisata Lobo, (#) Pengembangan Kampung Wisata Mai-Mai, (#) Pengembangan Kampung Wisata Siawatan (#) Pengembangan Kampung Wisata Namatota (#) Pengembangan Kampung Wisata Marsi	4.350.000.000	
		3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4.350.000.000	
		3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	
		3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Kegiatan pelatihan Pramusaji berbasis Kearifan Lokal, Sosialisasi Peningkatan kapasitas Sadar Wisata) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata (Pelatihan dan Sertifikasi tenaga Kerja Pariwisata, Dive Resqui	0	

		3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	
		3.26.05.2.01.0010 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	umlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	
7	Memperkuat reformasi politik hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN	4.171.523.000,00	
		5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN	1.691.912.000,0	
		5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	0	
		5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1.482.666.000,00	
		5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	0,00	
		5.03.02.2.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	152.292.000,00	
		5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	umlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	0	
		5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	56.954.000,00	
		5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0	
		5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Presentase Jabatan Struktural dan Fungsional yang terisi sesuai syarat	598.724.000,00	
		5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	108.383.000,00	
		5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	208.195.000,00	
		5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Promosi ASN	282.146.000,00	
		5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi aparatur	1.525.804.000,00	
		5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	891.260.000	
		5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	570.000.000	
		5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	0	
		5.03.02.2.03.0006 Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	64.544.000	
		5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan sesuai SOP	355.083.000,00	
		5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	162.557.000,00	
		5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	65.106.000,00	
		5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0	
		5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	127.420.000	
		5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0	

		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan	26.945.304.897	
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan	1.8.8.880.000	
		4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	969.561.000	
		4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	839.319.000	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	22.480.157.417	
		4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	21.511.446.017	
		4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	703.319.400	
		4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	265.392.000	
		4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	2.490.435.480	
		4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.102.788.480	
		4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1.180.135.000	
		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	207.512.000	
		4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		165.832.000	
		4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	165.823.000	
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Distrik Kaimana	4.690.615.500,00	
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan di Tingkat Distrik	123.595.500,00	
		7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.595.500,00	
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan di Tingkat Distrik Tersedianya dana 100 juta disetiap Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy	4.567.020.000,00	
		7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	742.020.000,00	
		7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.825.000.000,00	
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Meningkatnya Bangunan Gedung	5.174.785.045	

		1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase Meningkatnya Bangunan Gedung	5.174.785.045	
		1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	231.620...	
		1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.865.165.045	
		1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	78.000.000	
		4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	17.384.885.000	
		4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2.780.024.000	
		4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.703.379.000	
		4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	76.645.000	
		4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	580.873.000	
		4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	580.873.000	
		4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	5.258.621.000	
		4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1.167.467.000	
		4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4.091.154.000	
		4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0	
		4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	0	

		4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Presentase Laporan Kunker ke 7 Distrik, Laporan Pokir dan Laporan Reses Presentase tersedianya Kunjungan Kerja Ke 7 Distrik, Presentase Terkumpulnya Pokir DPRD, dan Presentasi Reses	8.765.367.000	
		4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6.259.994.000	
		4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0	
		4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2.505.373.000	
		2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		3.515.800.000	
		2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3.515.800.000	
		2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3.420.848.000	
		2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94.952.000	
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet	2.712.824.770,00	
		2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangkan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC	2.712.824.770,00	

		2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	641.198.500,00	
		2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.071.626.270,00	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		2.014.406.396	
		2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek emajuan Kebudayaan (#) Pensi Kaimana (#) Festival Noken	0	
		2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek PemajuanKebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan	0	
		2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Festival Seni dan Budaya PB, Festival Budaya 8 Suku	277.889.400	
		2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	277.889.400	
		2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Lembaga Adat yang dibuat	1.736.516.996	
		2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1.736.516.996	
		2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	0	
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Organisasi Pemuda	998.781.000	
		2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan bantuan kewirausahaan Cakupan pelatihan kewirausahaan % Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan % Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi pemuda	998.781.000	
		2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	75.586.000	
		2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	23.100.000	
		2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	160.814.000	
		2.19.02.2.02Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		739.280.000	
		2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	739.280.000	
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan	26.945.3.4.897	
		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan	1.808.880.000	

		4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	969.561.000	
		4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	839.319.000	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	22.480.157.417	
		4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua	21.511.446.017	
		4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	703.319.400	
		4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb	265.392.000	
		4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	2.490.435.480	
		4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1.102.788.480	
		4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2.280.235.000	
		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	207.512.000	
		4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		165.823.000	
		4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	165.823.000	
		1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMK	138.936.148.410,76	
			Iklim Inklusivitas SMA		
			Iklim kebinekaan SMK		
		1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		45.863.444.957,00	

		1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.041.048.000	
		1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	
		1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.042.000.000	
		1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	4.265.584.000	
		1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	840.064.350,00	
		1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.433.475.000	
		1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	247.632.000	
		1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		368.573.000	
		1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	3.766.864.000	
		1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.548.419.050	
		1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	482.584.315	
		1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	13.232.645.000	
		1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	227.454.182	
		1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	0	
		1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	
		1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	
		1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.420.409.060	
		1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	100.000.000	
		1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.189.800.000	
		1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4.4396.396.000	
		1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.022.670.000	
		1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	956.434.000	
		1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.140.000.000	
		1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	901.593.000	
		1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6.195.800.000	
		1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	

		1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	% Biaya personil siswa SMP % Guru/Tutor sesuai kualifikasi SMP % Kepala satuan pendidikan SMP sesuai standar % Pemenuhan Guru / Tutor SMP % Pemenuhan T.Kependidikan SMP % Perlengkapan siswa SMP Rasio Ketersediaan SMP terhadap PUS % Ruang kelas SMP dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi	32.961.420.640	
		1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	388.080.000	
		1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	961.680.000	
		1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	936.936.000	
		1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	936.936.000	
		1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.243.440.000	
		1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	538.319.931	
		1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.279.670.500	
		1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		249.480.000	
		1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	987.526.000	
		1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	2.234.161.214	
		1.01.02.2.02.002 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	670.000.000	
		1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	7.305.600.000	
		1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.160.522.644	
		1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.138.334.000	
		1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	740.295.000	
		1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	5.474.466.000	
		1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	114.220.000	
		1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	
		1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	199.688.038	
		1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	110.985.000	

		1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	430.705.113	
		1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	323.676.000	
		1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0	
		1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2.810.808.000	
		1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.135.440.000	
		1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	200.000.000	
		1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	975.772.200	
		1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	414.680.000	
		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	% Biaya personil siswa TK % Guru/Tutor sesuai kualifikasi TK % Kepala satuan pendidikan sesuai standar TK % Pemenuhan Guru / Tutor TK % Perlengkapan siswa TK Rasio Ketersediaan PAUD terhadap PUS % Ruang kelas PAUD Non Formal dalam kondisi baik % Ruang Kelas TK dalam Kondisi Baik % Satuan pendidikan PAUD non Formal terakreditasi % Satuan Pendidikan Terakreditasi TK	16.246.375.486,76	
		1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2.698.812.765,76	
		1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	349.881.500	
		1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	250.500.000	
		1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	400.915.950	
		1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	323.400.000	
		1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.955.346.000	
		1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	878.465.500	
		1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.236.276.200	
		1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.304.050.000	
		1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	331.702.000	
		1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4.600.150.571	
		1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	900.000.000	
		1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.016.875.000	

		1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	% Biaya personil siswa Kesetaraan % Guru/Tutor sesuai kualifikasi Kesetaraan % Kepala satuan pendidikan sesuai standar Kesetaraan % Pemenuhan Guru / Tutor Kesetaraan % Pemenuhan T.Kependidikan Kesetaraan % Perlengkapan Peserta Kesetaraan % Ruang kelas Kesetaraan dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi Non Formal	428.100.000	
		1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	
		1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	428.100.000	
		1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	0	
		1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	% Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan PPDB % Perlengkapan Siswa SMA Rasio Ketersediaan SMA terhadap PUS % Ruang kelas SMA dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Pelaksana Assesmen Nasional % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMA	27.698.147.367	
		1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	7.768.332.650	
		1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4.216.212.000	
		1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	
		1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.813.876.000	
		1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.059.600.000	
		1.01.02.4.05.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	
		1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	183.785.600	
		1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	3.989.532.150	
		1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	
		1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	
		1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	841.547.120	
		1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	2.775.334.000	

		1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	809.724.800	
		1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	123.994.500	
		1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	3.172.450.000	
		1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang)	162.586.500	
		1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	162.458.000	
		1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	196.504.000	
		1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	
		1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	182.210.047	
		1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Lembaga)	240.000.000	
		1.01.02.4.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	% Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) % Perlengkapan Siswa SMK Rasio Ketersediaan SMK terhadap PUS % Ruang kelas SMK dalam kondisi Baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMK	7.260.483.460	
		1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	312.312.000	
		1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	
		1.01.02.4.06.0015 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	479.999.960	
		1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	
		1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	700.000.000	
		1.01.02.4.06.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	801.000.000	
		1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	39.396.000	
		1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	
		1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	1.206.500.000	
		1.01.02.4.06.0039 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	
		1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	307.046.000	
		1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	252.848.500	

		1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	269.451.000	
		1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2.891.930.000	
		1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	% Tersediannya bantuan Fasilitas bagi pendidikan diluar kewenangan	8.478.176.500	
		1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan Pendidikan)	8.478.176.500	
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		1.209.780.000	
		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1.209.780.000	
		8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.209.780.000	
		8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		274.056.800	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas		274.056.800	
		1.01.03.4.03.0001 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	274.056.800	
		1.01.03.4.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	0	
		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Jumlah Pelaksanaan Program Administrasi Umum Perangkat Daerah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	478.429.800	
		1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	294.273.400	
		1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	20.493.000	
		1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	
		1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	7.133.800	
		1.05.02.2.01.00010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	113.971.000	

		1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	99.900.000	
		1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	52.775.600	
		1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		60.970.200	
		1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.970.200	
		1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		123.186.200	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS1. 05.02.2.03.0006	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	123.186.200	
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		350.000.000	
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		350.000.000	
		8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	
		8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350.000.000	
		8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	